



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2023 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kota Mojokerto yang cerdas, inovatif, berdaya saing, mandiri dan berkelanjutan, perlu menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan *Smart City* Kota Mojokerto Tahun 2023 - 2032;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6840);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 - 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Smart City* adalah pengelolaan Daerah yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Daerah menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan Daerah yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

6. Masterplan *Smart City* adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *Smart City* Daerah Tahun 2023-2032.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Masterplan *Smart City*.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah;
- b. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City* Daerah;
- c. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah pada dokumen perencanaan *Smart City* Daerah; dan
- d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan proses bisnis Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, instansi terkait serta akselerasi dalam percepatan transformasi digital.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Masterplan *Smart City* Daerah; dan
- b. monitoring dan evaluasi Masterplan *Smart City* Daerah.

## BAB II

### MASTERPLAN *SMART CITY* DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Masterplan *Smart City* Daerah mengacu pada prioritas kebijakan Daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

- (2) Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
  - a. masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.
- (4) Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam:
  - a. mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Mojokerto *Smart City*; dan
  - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Mojokerto *Smart City*.
- (5) Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu dan evaluasi berdasarkan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. hasil evaluasi Pemerintah Daerah;
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penjabaran Masterplan *Smart City* Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Arah Pembangunan *Smart City* Daerah;
  - c. Bab III : Strategi Pembangunan *Smart City*;
  - d. Bab IV : Rencana Aksi *Smart City*;
  - e. Bab V : Peta Jalan Pembangunan *Smart City*; dan
  - f. Bab VI : Penutup.

- (2) Rincian penjabaran Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI MASTERPLAN *SMART CITY* DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi Masterplan *Smart City* Daerah dilaksanakan terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan program Masterplan *Smart City* Daerah;
  - b. pelaksanaan Rencana Program Masterplan *Smart City* Daerah; dan
  - c. capaian hasil pelaksanaan Masterplan *Smart City* Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

##### Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tim Pelaksana *Smart City* Daerah.
- (2) Rekomendasi hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan *Smart City* Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah dan Dewan *Smart City* Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 29 Mei 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,  
  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 28

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
MASTERPLAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2023 - 2032**

**MASTERPLAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2023 - 2032**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

## 1.1 LATAR BELAKANG

Warga yang semakin pintar, dan masalah yang semakin kompleks dan beragam yang dihadapi oleh suatu negara atau kota, menjadikan entitas-entitas ini memberikan jawaban dan solusi atas tuntutan-tuntutan ini. Saat ini, warga tidak saja menuntut negara atau pemerintah kota agar mampu menjaga “perut mereka kenyang” dengan memberikan kemudahan bekerja dan berusaha, tetapi juga tuntutan akan sebuah kota yang layak untuk ditinggali. Di kota ini, mereka akan menuntut tersedianya ruang terbuka hijau, kota yang rendah polusi, jalur khusus pesepeda, dan kualitas pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan lebih transparan.

Untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapi ini diperlukan pendekatan dan strategi yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien. Seperti misalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Barcelona, Spanyol. Kota yang menjadi tuan rumah “Smart City Expo and World Congress” pada 2011 ini telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya tiang lampu LED yang mampu digunakan untuk memantau kemacetan lalu lintas, aktivitas pejalan kaki, kualitas udara, dan polusi suara. Selain itu, di kota ini, juga telah terpasang tempat sampah cerdas, dimana tempat sampah ini menyedot sampah dan meletakkan mereka di penyimpanan bawah tanah sehingga bisa mengurangi bau sampah, dan volume sampah di dalam truk pengangkut.<sup>1</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Kota Barcelona tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan konsep kota cerdas, atau *Smart City*. Yaitu, sebuah konsep yang digunakan untuk mengatasi persoalan dengan lebih terintegrasi, kolaboratif, dan sinergis. Upaya ini menjadi mungkin dilakukan dengan adanya dukungan teknologi informasi, yang menjadi ciri khas dari Revolusi Industri 4.0 atau lebih dikenal dengan revolusi digital. Keberadaan teknologi informasi ini, bisa menjadi sarana untuk mempermudah atau menjadi salah satu infrastruktur pendukung pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Di Indonesia, pembangunan *Smart City* di kabupaten/kota di Indonesia dimulai pada 2017 dengan “Gerakan Menuju 100 *Smart City*” yang dikomando oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Target 100 *Smart City* ini dicapai pada 2017 dan 2018. Di 2017, 25 kabupaten/kota menjadi sasaran kegiatan ini, dan dilanjutkan dengan 75 kabupaten/kota lainnya pada 2018. Konsep *Smart City* yang dikembangkan di kabupaten/kota ini diharapkan akan mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh

---

<sup>1</sup> Disarikan dari: <https://businesschief.com/top10/top-10-smart-cities-worldwide>

pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang terkenal dengan kompleksitas dan heterogenitas. Harapannya, dengan *Smart City*, daerah akan mampu menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Mengingat, Indonesia tidak saja beragam kondisi geografisnya, tetapi juga situasi sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahannya. Karenanya, dengan potensi dan permasalahan yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, kota cerdas yang dikembangkan di Kota Mojokerto akan berbeda dengan yang dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Meskipun, tidak menutup kemungkinan, penerapan *Smart City* di Kota Mojokerto juga dengan melihat dan mengadopsi praktik-praktik yang sudah berhasil dilakukan di daerah lainnya di Indonesia, atau bahkan telah diterapkan oleh negara lainnya.

Sukses dengan 100 kabupaten/kota cerdas di 2017-2018, Kementerian Kominfo melanjutkan mengembangkan kabupaten/kota cerdas sejalan dengan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan 10 kawasan yang menjadi destinasi pariwisata prioritas dan ibukota negara (IKN) baru. Total, 45 kabupaten/kota di 10 kawasan destinasi pariwisata dan tiga kabupaten/kota di IKN menjadi sasaran program ini di 2020. Pengembangan 10 kawasan prioritas ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di Indonesia. Melanjutkan upaya di 2021, di 2022 ini, Kementerian Kominfo kembali menginisiasi *Smart City* di 50 kabupaten/kota di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Di Jawa Timur, bersama dengan tujuh kabupaten/kota lainnya, Kota Mojokerto menjadi salah satu lokasi sasaran *Smart City* di Provinsi Jawa Timur. Perencanaan pengembangan *Smart City* di kota ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti, posisi Kota Mojokerto sebagai bagian dari aglomerasi ekonomi Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan), kota satelit dari Surabaya, kekayaan potensi ekonomi kerakyatan, dan potensi budaya daerah sebagai bekas pusat Kerajaan Mojopahit.

Master Plan ini akan berisi enam bagian utama. Di Bab I tentang Pendahuluan yang membahas latarbelakang, tujuan, landasan hukum, dan kerangka berpikir penulisan *master plan Smart City* Kota Mojokerto. Bab II tentang Arah Pembangunan *Smart City* Daerah akan membahas visi, misi, dan sasaran *Smart City* daerah; dan indikator utama *Smart City* daerah. Bab III akan membahas strategi pembangun di masing-masing dimensi *Smart City*. Lebih lanjut di Bab IV, akan dibahas rencana aksi *Smart City* daerah yang meliputi

pengembangan kebijakan dan kelembagaan; pengembangan infrastruktur pendukung; pengembangan aplikasi dan perangkat lunak; dan penguatan literasi. Lebih lanjut Bab V akan membahas peta jalan atau program daerah di masing-masing dimensi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di bab inilah, tertulis rencana program kerja daerah selama 10 tahun mendatang di masing-masing dimensi *Smart City*. Dan, Bab VI akan menjadi penutup untuk Master Plan ini.

## 1.2 TUJUAN

*Master Plan Smart City* Kota Mojokerto ini berisi tentang peta jalan *Smart City* dan rencana aksi di enam dimensi *Smart City* selama 10 tahun ke depan (2023 – 2032). Adapun tujuan disusunnya Master Plan ini adalah:

- a. Menyediakan peta jalan atau program-program perencanaan dan rencana aksi Kota Mojokerto 2023 – 2032.
- b. Menyelaraskan program dan kegiatan *Smart City* Kota Mojokerto dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di RPJMD ataupun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- c. Menyediakan buku panduan bagi Kota Mojokerto dalam mengembangkan *Smart City* sehingga akan berjalan dengan sistematis, efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## 1.3 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan *Smart City* dan pembuatan *Master Plan* di Kota Mojokerto berdasarkan pada regulasi-regulasi yang ada baik di tingkat nasional ataupun Kota Mojokerto. Regulasi-regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/219/417.101.3/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Mojokerto.

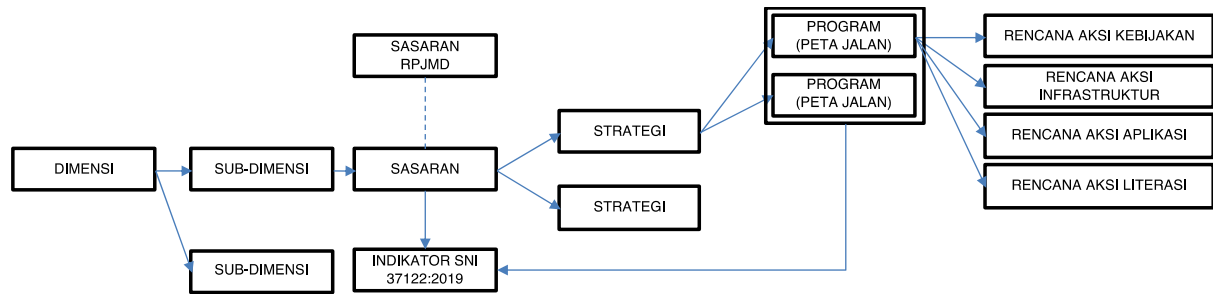
## 1.4 KERANGKA BERPIKIR

### 1.4.1 Kerangka Berpikir *Smart City*

Enam dimensi *Smart City* digunakan sebagai dasar pengembangan *Smart City* di Kota Mojokerto. Keenam dimensi tersebut adalah: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Di **Gambar 1.1** berikut merupakan Kerangka Penyusunan *Smart City* di Kota Mojokerto. Secara singkat, pengembangan *Smart City* di enam dimensi dan 18 sub-dimensi tersebut didasarkan pada permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang dihadapi oleh Kota Mojokerto. Dari permasalahan itu, kemudian ditentukan sasaran tiap-tiap dimensi dan sub-dimensi. Sasaran-sasaran di *Smart City* ini tentunya dilakukan dengan merujuk pada sasaran-sasaran di RPJMD Kota Mojokerto dan Indikator SNI ISO 37122:2019. Ini dilakukan agar sasaran *Smart City* yang disusun tidak bertolak belakang atau biar harmonis dengan sasaran-sasaran di RPJMD. Sedangkan harmonisasi dengan ISO SNI 37122:2019 diperlukan untuk standar referensi pengembangan *Smart City*, terutama di masa yang akan datang. Dari sasaran yang sudah disusun, strategi di masing-masing sasaran. Dari strategi inilah kemudian dibuat peta jalan atau rencana program yang akan dikembangkan di Kota Mojokerto. Bersama dengan pembuatan peta jalan (program/inovasi), juga disusun rencana aksi di masing-masing program/inovasi. Rencana aksi ini meliputi rencana aksi kebijakan, infrastruktur (*hardware*),

aplikasi (*software*), dan literasi. Baik peta jalan ataupun rencana aksi juga akan ditulis tahapan tahun pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini akan mempermudah implementasi masing-masing inovasi yang direncanakan dalam *Smart City* Kota Mojokerto.



Gambar 1. 1. Kerangka Penyusunan Smart City

Adapun keenam dimensi *Smart City*, seperti yang disebutkan di bawah ini, meskipun secara fokus berbeda, keberadaannya sama pentingnya, karena saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya. Secara singkat, berikut pengertian untuk masing-masing dimensi *Smart City*:

a. **Smart Governance**, merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar. Dengan *Smart Governance* ini, tata kelola pemerintahan akan mampu mengubah pola-pola birokrasi konvensional agar dapat menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan senantiasa melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

b. **Smart Branding**, yaitu serangkaian cara yang dilakukan daerah memasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Dengan *Smart Branding*, untuk memenuhi kebutuhan kotanya, dia tidak lagi hanya bisa mengandalkan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki, akan tetapi juga harus bisa melibatkan partisipasi masyarakat, baik dari warga setempat ataupun dari luar daerah. Dukungan dan kolaborasi juga diperlukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku bisnis dan investor. Sehingga, bersama pemerintah daerah, akan dapat mendorong percepatan pembangunan.

c. **Smart Economy**, dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut adaptasi yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Tiga elemen di *Smart Economy* yang disasar, yaitu terciptanya ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terselenggaranya ekosistem transaksi keuangan.

d. **Smart Living**, merupakan satu dimensi yang bertujuan untuk menjadikan sebuah kota

merupakan sebuah tempat yang lebih layak untuk tinggal dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, tata ruang yang harmonis, dan adanya dukungan kelayakan mobilitas baik untuk orang ataupun barang.

e. **Smart Society**, merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Dengan mediasi teknologi, dimensi fisik dan virtual kehidupan warga kota akan semakin terjalin secara intensif. Tiga hal yang menjadi fokus di dimensi ini, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

6. **Smart Environment**, sebuah kota yang pintar tidak saja mampu melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang besar-besaran dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang layak bagi warganya, tetapi juga sebuah kota yang mampu memberikan perlindungan bagi daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa elemen penting di dalam dimensi ini adalah perlindungan air, udara, dan tanah, pengelolaan sampah padat dan limbah cair, serta upaya daerah untuk mengelola energi baru.

#### 1.4.2 Keterkaitan **Smart City** dengan RPJMD Kota Mojokerto

Perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto saat ini menggunakan RPJMD 2018 – 2023, yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota. Jika kita cermati, ketujuh Misi pembangunan Kota Mojokerto sudah sesuai dengan dimensi-dimensi *Smart City*.

**Misi Pertama, Mewujudkan SDM Berkualitas melalui Akses dan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan**, sudah sesuai dengan dimensi *Smart Living* dan *Smart Society*, dimana pelayanan kesehatan menjadi bagian dari *Smart Living*, dan pelayanan pendidikan merupakan bagian dari sub-dimensi ekosistem pendidikan di *Smart Society*. **Misi Kedua, Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, dan HAM** berkaitan dengan *Smart Society*, terutama terkait dengan sub-dimensi interaksi masyarakat dan keamanan masyarakat.

**Misi Ketiga, Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Efektif, Demokratis, Profesional, dan Adil dalam Melayani Masyarakat**, telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*. **Misi Keempat, Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah**, telah selaras dengan dimensi *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. Meskipun di dalam Misi ini tidak “tertulis” dengan jelas hal-hal yang berkaitan dengan *Smart Living* dan *Smart Environment*, jika dilihat ke Indikator Sasaran, akan terlihat bahwa dua dimensi ini telah masuk di dalamnya.

**Misi Kelima, Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dalam Kerangka Integrasi Nasional pada Tatanan Masyarakat yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila,** sejalan dengan *Smart Society*. **Misi Keenam, Mewujudkan Partisipasi Masyarakat melalui Pemberian Akses dan Kesempatan dalam Pembangunan,** telah selaras dengan *Smart Economy* dan *Smart Society*. Dan, Misi Ketujuh, Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat, telah selaras dengan dimensi *Smart Economy*.

Berikut di bawah gambaran singkat keterkaitan antara RPJMD, Misi *Smart City*, dan Dimensi *Smart City*:

**Tabel 1.1 Keterkaitan antara RPJMD dan Dimensi *Smart City* di Kota Mojokerto**

No	Isu Strategis	RPJMD	Misi Smart City	Dimensi Smart City
1.	Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.	Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	Mewujudkan kota yang layak untuk ditinggali dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas dan mobilitas yang mudah dan nyaman	<i>Smart Economy, Smart Living, dan Smart Society</i>
2.	Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota yang tertib, aman, dan stabil	Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang profesional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	<i>Smart Governance dan Smart Society</i>
3.	Mewujudkan good governance dan pelayanan yang prima	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang profesional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	<i>Smart Governance</i>
4.	Peningkatan infrastruktur yang mendorong daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.	Mewujudkan kota berdaya saing tinggi yang ditunjang oleh ekonomi kreatif dan industri pariwisata berbasis sejarah dan budaya	<i>Smart Branding, Smart Economy, dan Smart Environment</i>
5.	Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak	Mewujudkan masyarakat perkotaan yang toleran, rukun, aman, inklusif, dan melek literasi.	<i>Smart Society</i>

		mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila		
6.	Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi.	Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	Membangun kota yang mandiri yang didukung oleh sektor unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.	<i>Smart Economy dan Smart Society</i>
7.	Anggaran yang berbasis pada pelayanan masyarakat	Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	Membangun kota yang mandiri yang didukung oleh sektor unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.	<i>Smart Economy</i>

Sumber: RPJMD Kota Mojokerto dan Dimensi Smart City, diolah

Dari tabel di atas, Kota Mojokerto memang tidak menjadikan pembangunan lingkungan (*Smart Environment*) di dalam Misi pembangunan di RPJMD. Akan tetapi, komitmen kota terhadap pembangunan di bidang lingkungan, disebutkan di indikator sasaran di Misi Keempat RPJMD, dimana di dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri juga diimbangi dengan upaya bagaimana menjaga keseimbangan di bidang lingkungan hidup. Jika dicermati, hal itu dipaparkan dengan jelas di dalam indikator sasaran pembangunan di Misi Keempat. Di Misi Keempat ini, pemerintah Kota Mojokerto memiliki dua tujuan: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup, dimana salah satu sasasannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup (dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah/IKLHD).

### 1.4.3 Keterkaitan *Smart City* dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto

Karena *Smart City* yang ingin diwujudkan oleh Kota Mojokerto sudah menjadi prioritas di dalam RPJMD, sudah sewajarnya jika pembangunan *Smart City* sudah selaras dengan Rencana Strategis OPD di Kota Mojokerto. Sebab, program kerja yang disusun oleh OPD di lingkup pemerintah daerah Kota Mojokerto merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi kepala daerah di RPJMD. Program-program sedang diusulkan oleh OPD untuk dijadikan bagian dari *Master Plan Smart City* tidak sedikit yang merupakan pengembangan dari program-program yang sudah berjalan saat ini dan menjadi bagian dari Renstra OPD 2018 – 2023. Contoh, program **Cuhat Ning Ita** yang dikomando oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskomfo) yang merupakan contoh program di *Smart Governance* di sub-dimensi Layanan Publik juga merupakan upaya untuk mewujudkan Misi Ketiga di RPJMD “**Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat.**” Contoh lain adalah program Gerbang Layanan Informasi Terpadu

dan Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan **GAYATRI** yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan Misi Pertama di RPJMD “**Mewujudkan kota yang layak untuk ditinggali dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas dan mobilitas yang mudah dan nyaman.**” GAYATRI ini merupakan salah satu contoh program di dimensi *Smart Living* di sub-dimensi Layanan Kesehatan.

#### **1.4.4 Keterkaitan *Smart City* dengan SNI ISO 37122:2019 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

SNI ISO 37122:2019 merupakan standar pertama dalam SNI ISO 37120 “Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat – Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup. Standar ini menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi serangkaian indikator untuk *Smart City*. Dalam *Smart City*, SNI ISO 37122:2019 ini digunakan bersama dengan ISO 37120 agar dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi indikator untuk menerapkan sistem manajemen pemerintah daerah, mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan. Sehingga pemerintah daerah dapat:

- Menanggapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi, dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat;
- Menerapkan metode kepemimpinan kolaboratif;
- Memanfaatkan informasi data dan teknologi modern untuk menyediakan layanan dan meningkatkan kualitas hidup dan menjadikan kota nyaman bagi siapa saja yang berada di kota (penduduk, bisnis, pengunjung);
- Menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dengan dukungan kebijakan, praktik, dan teknologi yang cerdas;
- Mengidentifikasi kebutuhan dan manfaat infrastruktur pintar;
- Memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan;
- Membangun ekonomi yang dinamis dan inovatif yang siap menghadapi tantangan masa depan;

Di dalam penyusunan rencana induk *Smart City*, indikator-indikator yang terdapat di dalam SNI ISO 37122:2019 dapat digunakan sebagai indikator pada sasaran pembangunan *Smart City* bersama dengan indikator-indikator pembangunan daerah lainnya yang terdapat di dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau indikator-indikator di dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Total terdapat 80 indikator *Smart City* di SNI ISO 37122:2019, baik kelompok indikator atau turunannya.

Indikator-indikator di SNI ISO 37122:2019 yang digunakan untuk dimensi di *Smart City* juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ditetapkan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015, SDGs merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) yang berakhir pada 2015. Tujuh belas tujuan SDGs yang disepakati di markas PBB di New York ini, harapannya bisa dicapai pada 2030, dan juga menjadi bagian dari Resolusi PBB yang dikenal dengan Agenda 2030. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto, dalam pembuatan perencanaan pembangunan daerah juga sudah merujuk pada indikator-indikator di SDGs.

Kecuali Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender dan 17 tentang Kerjasama Global untuk Mencapai 16 Tujuan yang sudah disebutkan, setiap Tujuan yang ditetapkan di SDGs secara spesifik berkaitan dengan beberapa indikator di dalam SNI ISO 37122:2019. Misalnya saja, di Tujuan 7 “Memastikan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang” sesuai dengan Indikator SNI ISO terkait dengan energi (indikator 7), lingkungan dan perubahan iklim di indikator 8, indikator 12 tentang perumahan, limbah padat di indikator 16, dan indikator 22 terkait dengan air limbah. Jika dilihat dari dimensi di *Smart City*, sudah sesuai dengan *Smart Living* dan *Smart Environment*.

Selain Tujuan 7, Tujuan 11 “Membuat kota-kota dan pemukiman-pemukiman yang inklusif, aman, tahan, dan berkelanjutan” juga cukup menarik untuk dilihat. Tujuan ini tidak hanya selaras dengan 13 indikator di SNI ISO 37122:2019, tetapi juga dengan lima dimensi di *Smart City* (*Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*). Tigabelas indikator yang selaras dengan Tujuan 11 ini adalah terkait dengan energi, lingkungan dan perubahan iklim, pemerintahan, kesehatan, perumahan, populasi dan kondisi sosial, rekreasi, keamanan, limbah padat, olahraga dan budaya, transportasi, pertanian perkotaan, dan perencanaan perkotaan.

Selain beberapa kesesuaian yang sudah disebutkan di atas, beberapa contoh lainnya bisa dilihat di Tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2 Kesesuaian antara Indikator SNI ISO 37122/2019 dan Indikator SDGs**

Dimensi	Sub-Dimensi	SNI ISO 37122/2019	SDGs
Smart Branding	Pariwisata	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring  17b.1. Jumlah pemesanan daring untuk	8.9.2 Jumlah lapangan pekerjaan di bidang industri pariwisata sebagai proporsi dari total pekerjaan, rata-rata pertumbuhan pekerjaan, menurut jenis kelamin

		<p>fasilitas budaya per 100.000 penduduk</p> <p>17b.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan</p>	
<b>Smart Economy</b>	<b>Ekosistem Industri</b>	<p>20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan</p> <p>20.2. Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)</p> <p>20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring</p>	<p>9.3.1: Proporsi industri kecil dalam total nilai tambah industri</p> <p>9.3.2: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau jalur kredit</p>
<b>Smart Living</b>	<b>Kesehatan</b>	<p>11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p> <p>11.3. Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan public langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air</p>	<p>3.8.1 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau jalur kredit cakupan layanan kesehatan dasar (didefinisikan sebagai cakupan rata-rata layanan penting berdasarkan intervensi pelacak yang mencakup kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular dan layanan kapasitas dan akses, di antara populasi umum dan paling tidak beruntung).</p> <p>3.8.2 Jumlah orang yang ditanggung oleh asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk</p>
<b>Smart Society</b>		<p>6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu Bahasa</p> <p>6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa</p>	<p>4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin</p> <p>4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan kemampuan</p>

		6.3. Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	teknologi informasi dan komunikasi (TIK) keterampilan, menurut jenis keterampilan
<b>Smart Environment</b>	<b>Proteksi Lingkungan</b>	22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali  22.2. Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering)  22.3. Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota  22.4. Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi  22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	6.3.1 Proporsi air limbah yang diolah dengan aman  6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik

Sumber: Indikator SNI ISO 37122/2019 dan Indikator SDGs, diolah

#### 1.4.5 Keterkaitan *Smart City* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia

Pelaksanaan *Smart City* tidak bisa dipisahkan dengan dua kebijakan di Indonesia terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Disahkan dengan Peraturan Presiden 95/2018, SPBE atau lebih jamak dikenal dengan *e-government* bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Ini dilakukan dengan cara penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan SPBE, diharapkan kualitas pelayanan publik akan meningkat dan bisa menjangkau daerah yang lebih luas, serta bisa menekan penyalahgunaan wewenang, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dengan adanya pengawasan dan pengaduan yang berbasis elektronik.

Dalam konteks pelaksanaan *Smart City*, SPBE ini sangat mendukung pelaksanaan terutama untuk dimensi *Smart Governance*. Terutama, untuk mencapai SPBE yang terintegrasi/terpadu di semua lini pemerintahan, baik di tingkat nasional ataupun sub-nasional (provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Sampai saat ini, untuk pelaksanaan SPBE masih sangat bervariasi dan belum terintegrasi baik di tingkat nasional ataupun daerah dengan adanya perbedaan situasi dan kondisi. Variasi yang terjadi antara lain tidak semua daerah di Indonesia didukung oleh infrastruktur internet yang bagus karena kondisi geografis.

Di Kota Mojokerto, pelaksanaan SPBE di tingkat daerah direspon dengan pembuatan Arsitektur SPBE. Di Kota Mojokerto, layanan SPBE dibagi menjadi dua: layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang ditujukan untuk internal birokrasi; dan layanan publik berbasis elektronik yang diperuntukkan buat masyarakat dan kalangan bisnis. Kota Mojokerto, telah menggunakan 16 aplikasi administrasi pemerintahan, yang terdiri dari 10 aplikasi pusat dan 6 aplikasi daerah. Diantara aplikasi daerah yang digunakan untuk urusan administrasi diantaranya adalah Simpeg, Ekinerja, epresensi, Sim Cuti. Sedangkan untuk aplikasi dari pemerintah pusat yang digunakan saat ini adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, dan keuangan daerah.

Selain aplikasi yang digunakan untuk manajemen birokrasi, juga tersedia layanan untuk publik (eksternal) yang sudah interoperabel yang disediakan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Total layanan kepada publik di Kota Mojokerto sebanyak 164 yang tersebar di 42 instansi pemerintah di Kota Mojokerto. Saat ini, sebanyak 44 layanan (28%), sudah online dan didukung aplikasi, 87 layanan (57%) masih manual, dan 26 layanan (25%) memiliki opsi untuk online atau manual. Diantara layanan online yang sudah disediakan antara lain perizinan online, ebhptp, uji kir *online*, dan pelayanan kelurahan online.

#### **1.4.6 Keterkaitan *Smart City* dengan Kawasan Gerbang Kertosusila**

Pengembangan *Smart City* di Kota Mojokerto tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia Gerbang Kertosusila – Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) ini dibuat menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah 47/1996 tentang RTRW Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Saat ini, landasan yang digunakan sebagai dasar pembangunan di kawasan Gerbang Kertosusila ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80/2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Di dalam Perpres ini, kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Gerbang Kertosusila telah berkembang dari tujuh daerah berubah menjadi 10 dengan tambahan tiga kabupaten – Jombang, Bojonegoro, dan Tuban.

Kawasan yang didominasi oleh budaya perkotaan ini, secara umum sudah memiliki kualitas SDM yang sudah cukup baik karena didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik formal ataupun informal. Dengan potensi ekonomi di bidang industri manufaktur, makanan minuman, dan industri lainnya, 50 persen perekonomian Provinsi Jawa Timur disumbang oleh kawasan ini. Kawasan ini sangat diuntungkan dengan kemudahan konektivitas dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, seperti Bandara Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Kamal (Madura), dan Pelabuhan Gresik (Gresik). Selain itu, kawasan ini pada umumnya sudah dilewati oleh jalan tol nasional, dan dukungan jalur kereta api, sehingga daerah-daerah yang berada di kawasan ini sudah semuanya bisa diakses dengan kereta api. Selain industri yang sudah relatif berkembang, kawasan ini banyak memiliki potensi yang masih dikembangkan lagi, seperti agropolitan di Kabupaten Tuban, dan juga sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang potensial di beberapa daerah. Bagi Kota Mojokerto, menjadi bagian dari Kawasan Gerbang Kertosusila bisa menciptakan kesempatan (*opportunity*) ataupun tantangan bagi Kota Mojokerto. Seperti diketahui, Kota Mojokerto memiliki potensi di bidang industri kecil seperti alas kaki dan makanan-minuman, potensi wisata budaya dan sejarah, dan juga dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif mumpuni.



**BAB II**  
**ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH**

## 2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO

### 2.1.1 Visi dan Misi *Smart City* Kota Mojokerto

Keberadaan Visi dan Misi Kota Mojokerto *Smart City* tidak bisa dipisahkan dengan Visi dan Misi Kota Mojokerto yang disebutkan di dalam RPJMD 2018-2023, yang saat ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk *Smart City* Kota Mojokerto 2023 - 2032. Visi dan Misi *Smart City* Kota Mojokerto ditentukan sudah selaras dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto yang tercantum di RPJMD 2018 – 2023, dan telah sesuai dengan enam dimensi *Smart City*.

Visi Kota Mojokerto *Smart City* adalah: **MEWUJUDKAN KOTA MOJOKERTO YANG CERDAS, INOVATIF, BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN**

Visi ini diturunkan menjadi enam Misi:

- **Misi 1:** Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang profesional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.
- **Misi 2:** Mewujudkan kota berdaya saing tinggi yang ditunjang oleh ekonomi kreatif dan industri pariwisata berbasis sejarah dan budaya.
- **Misi 3:** Membangun kota yang mandiri yang didukung oleh sektor unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.
- **Misi 4:** Mewujudkan kota yang layak untuk ditinggali dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas dan mobilitas yang mudah dan nyaman.
- **Misi 5:** Mewujudkan masyarakat perkotaan yang toleran, rukun, aman, inklusif, dan melek literasi.
- **Misi 6:** Mewujudkan tatakelola lingkungan yang berkelanjutan dengan pelibatan aktif masyarakat.

### 2.1.2 Sasaran *Smart City* Kota Mojokerto

Berikut di bawah adalah sasaran yang ingin dicapai oleh *Smart City* Kota Mojokerto di tiap dimensi dan sub-dimensi:

#### 2.1.2.1 *Smart Governance*

Berikut di bawah adalah sasaran *Smart City* di dimensi *Smart Governance* yang ingin diwujudkan di Kota Mojokerto. Sasaran-sasaran ini disusun dari persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Governance*.

Tabel 2. 1. Sasaran Dimensi *Smart Governance*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Layanan Publik</b>	Akses informasi dan keluhan layanan publik yang belum merata	Meningkatkan penyebaran informasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota
	Belum semua pelayanan publik terintegrasi	Meningkatnya ketersediaan pelayanan pyboik yang terintegrasi dan interoperabilitas
	Belum adanya layanan publik yang terintegrasi dengan daerah lain	Meningkatkan kemudahan akses dan integrasi layanan dengan daerah lain
<b>Manajemen Birokrasi</b>	Layanan bagi birokrasi (kepegawaian, pensiun) yang belum seluruhnya terintegrasi dan interoperabilitas	Meningkatnya layanan administrasi birokrasi yang terintegrasi dan interoperabilitas
	Portal satu data dan informasi (Satikomo) belum optimal difungsikan menjadi pusat data dan referensi pembuatan kebijakan di Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan mudah dipakai sesuai prinsip satu data Indonesia
	Audit internal dan pengawasan berbasis risiko belum optimal karena keterbatasan SDM (Auditor)	Meningkatnya pengawasan dan kualitas pelayanan birokrasi
<b>Rancangan Kebijakan</b>	Kebijakan satu peta yang belum optimal disosialisasikan	Meningkatnya integrasi data dalam satu peta
	Kualitas perencanaan pembangunan yang masih belum optimal	Meningkatnya kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan
	Masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dengan optimal (pelibatan hanya di Musrenbang)	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
	JDIH Kota Mojokerto yang tidak terkoneksi dengan JDIH pemerintah pusat	Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat – daerah

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi layanan publik, sasaran ini ingin dicapai karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kota belum semuanya saling terintegrasi dan interoperabilitas. Bahkan dari 167 layanan kepada publik, 87 diantaranya masih manual, dan 26 layanan masih manual, atau ada pilihan online. Belum lagi, 44 layanan yang berupa aplikasi yang mayoritas masih berjalan sendiri-sendiri.

Di sub-dimensi manajemen birokrasi, sasaran ini ingin dicapai. Sama dengan masalah di sub-dimensi pelayanan publik, belum semua sistem/aplikasi administrasi yang digunakan oleh birokrasi di Kota Mojokerto sudah terintegrasi. Misalnya, terkait dengan perencanaan dan penganggaran telah menggunakan SIPD, akan tetapi untuk pengelolaan keuangan masih menggunakan SIMDA, dimana kedua sistem ini belum terintegrasi sehingga menyulitkan untuk pengawasan. Begitu juga dengan layanan kepegawaian lainnya, seperti cuti dan pension.

Di pembuatan kebijakan publik, kedua sasaran ingin dicapai karena masih kurang selarasnya kebijakan di Kota Mojokerto dengan yang ada di pemerintah pusat. Salah satu masalah yang dikeluhkan adalah JDIH Kota Mojokerto yang tidak bisa koneksi dengan JDIH pemerintah pusat setelah adanya perbaikan. Tidak ketinggalan, adanya keinginan untuk perbaikan *input* atau *feedback* terhadap perencanaan pembangunan yang selama ini hanya dilakukan lewat Musrenbang, yang diagendakan setiap satu tahun sekali secara bertingkat. Meskipun Musrenbang tetap menjadi sarana utama untuk menjalin aspirasi masyarakat dalam pembangunan, diperlukan alternatif penjangkaran aspirasi dalam pembangunan lainnya. Sehingga, proses pengumpulan aspirasi terhadap pembangunan dan perencanaan pembangunan lebih bersifat fleksibel dan tidak hanya bergantung pada satu *event* yang diselenggarakan dalam satu waktu tertentu (rapat Musrenbang).

### 2.1.2.2 Smart Branding

Untuk sasaran di dimensi *Smart Branding Smart City* di Kota Mojokerto bisa dilihat seperti tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2. 2. Sasaran Dimensi *Smart Branding*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
Pariwisata	Kurangnya destinasi wisata alam	Menambah destinasi wisata baru non-alam
	Belum adanya event/kalender wisata Kota Mojokerto	Menambah jumlah atraksi dan <i>event</i> pariwisata
	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana fisik pendukung	Meningkatnya infrastruktur fisik, sosial, dan budaya

	pariwisata di Kota Mojokerto, contoh hotel	pendukung ekosistem pariwisata
<b>Ekosistem Bisnis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyediaan fasilitas iklim berusaha yang lebih mudah</li> <li>2. Program Jempol Mempesona belum dimanfaatkan secara maksimal</li> </ol>	Meningkatnya investasi daerah, usaha perdagangan, dan pemasaran produk kreatif daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
<b>Tampilan (Wajah Kota)</b>	Masih belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana bernuansa Mojopahit ( <i>Spirit of Mojopahit</i> )	Meningkatnya jumlah landmarks yang bernuansa <i>Spirit of Mojopahit</i>
	PKL yang menggunakan badan jalan untuk berjualan	Menurunnya jumlah PKL yang berjualan di badan jalan dan berhasil dilokasir

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Sasaran di sub-dimensi pariwisata didasari oleh Kota Mojokerto tidak memiliki potensi wisata alam, dan untuk potensi wisata buatan dan budaya juga masih terbatas. Selain itu, keberadaan fasilitas pendukung wisata (*amenities*) di kota ini, seperti hotel, juga masih sangat kurang. Saat ini, Kota Mojokerto – sebagai bekas pusat Kerajaan Mojopahit – ingin menghidupkan kembali *Spirit of Mojopahit* ke dalam pengembangan ekosistem pariwisata untuk pengembangan industri pariwisata berbabiskan sejarah dan budaya.

Di sub-dimensi daya saing ekonomi, sasaran ini dibuat untuk memfaatkan posisi dan potensi Kota Mojokerto sebagai bagian dari aglomerasi ekonomi Kawasan Gerbang Kertosusilo. Berada di posisi ini, Kota Mojokerto bisa memanfaatkan untuk menarik investor untuk menanamkan permodalan di kota ini. Berada di posisi ini, juga mempermudah Kota Mojokerto untuk memasarkan potensi-potensi lokal daerah yang dia miliki karena memudahnya jaringan dan distribusi logistik. Misalnya, dekat dengan bandara, pelabuhan, jalan tol nasional, dan memiliki stasiun kereta api. Kota Mojokerto telah memiliki program untuk mempermudah perizinan lewat Program Jempol Mempesona, yang merupakan layanan jemput bola perizinan di kelurahan. Sayangnya, program ini belum terlalu banyak dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi, terutama UKM.

Sasaran di perwajahan kota dibuat selaras dengan keinginan dari walikota untuk mengembalikan kembali *Spirit of Mojopahit* yang itu ditunjukkan melalui *landmarks* di kota ini. Upaya yang sudah mulai untuk dilakukan adalah dengan membuat pembuatan gerbang atau gedung-gedung dengan nuansa arsitektur Mojopahit. Selain itu, pemerintah kota juga perlu

menyelesaikan persoalan PKL yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di Kota Mojokerto. Seperti disampaikan dalam FGD, pemerintah kota sebenarnya sudah melakukan upaya lokalisasi PKL di beberapa lokasi, seperti misalnya di Benteng Pancasila. Akan tetapi, para PKL juga memilih berjualan meluar di trotoar dan badan jalan di Kawasan Benteng Pancasila. Persoalan ini tidak saja merusak keindahan kota, tetapi juga membahayakan bagi para pejalan kaki. Karena trotoar dan badan jalan yang bisa digunakan untuk tempat berjalan, digunakan untuk berjualan.

### 2.1.2.3 *Smart Economy*

Tabel 2.3 berikut di bawah merupakan sasaran di dimensi *Smart Economy* Kota Mojokerto di masing-masing sub-dimensinya:

**Tabel 2. 3. Sasaran Dimensi *Smart Economy***

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Ekosistem Industri</b>	Belum adanya konektivitas industri di Kota Mojokerto dan wilayah sekitarnya	Meningkatkan konektivitas dan kerjasama dengan industri di sekitar Kota Mojokerto
	Menurunnya jumlah lahan pertanian di Kota Mojokerto	Meningkatkan upaya intensifikasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan
	Perlunya mempermudah akses UMK/UMKM terhadap akses permodalan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan
<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat miskin belum berjalan dengan baik</li> <li>2. Perlunya penciptaan wirausaha baru</li> </ol>	Meningkatkan kemandirian masyarakat
<b>Ekosistem Transaksi Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan transaksi keuangan koperasi yang belum berbasis IT/digitalisasi</li> <li>2. Transaksi pembayaran retribusi pasar masih manual</li> </ol>	Meningkatnya transaksi keuangan digital daerah, terdorongnya ekonomi digital ( <i>e-commerce dan marketplace</i> )

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Sasaran yang dibuat di sub-dimensi ekosistem industri dibuat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto. Yaitu, posisi yang dikelilingi oleh kawasan industri di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo, sementara itu, di kota sendiri juga memiliki

potensi untuk ekonomi kerakyatan, seperti potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak bergerak di bidang makanan dan kerajinan kulit (alas kaki). Selain itu, sasaran lainnya yang ditetapkan adalah bagaimana mengatasi lahan pertanian jumlah lahan pertanian yang semakin sempit, akan tetapi di satu sisi, harus memikirkan upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Mengingat, usaha pengembangan pertanian dengan penggunaan lahan luas (ekstensifikasi) sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan. Disinilah Kota Mojokerto perlu untuk menetapkan sasaran untuk mengatasi kelemahan yang mereka miliki.

Di sub-dimensi kesejahteraan sosial, sasaran dibuat dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat Kota Mojokerto tidak memiliki tingkat kemandirian yang solid atau yang kuat karena pemerintah kota sudah banyak menyediakan berbagai fasilitas gratis kepada masyarakat, seperti misalnya layanan pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Tidak dipungkiri bahwa dengan ukuran daerah yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak sebanyak daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, menjadikan pemerintah daerah mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar bagi penduduknya.

Dan, di sasaran di sub-dimensi ekosistem transaksi digital ditetapkan dengan penggunaan transaksi digital belum sepenuhnya dilakukan di Kota Mojokerto. Penggunaan QRIS sempat *trending* digunakan pada saat pandemik Covid-19 meningkat pada 2021 yang lalu. Akan tetapi, dengan pandemic mulai mereda, mayoritas masyarakat sudah kembali lagi ke pola transaksi konvensional dengan uang tunai (*cash*). Karenanya, penggunaan transaksi *cashless* ini perlu untuk didorong kembali. Selain itu, pemerintah kota juga menasar pemberian kemudahan kepada UMKM untuk mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.

#### 2.1.2.4 Smart Living

Terbagi dalam tiga sub-dimensi tabel 2.4 berikut di bawah menjelaskan sasaran yang ingin dicapai di dimensi *Smart Living* di *Master Plan Smart City* Kota Mojokerto 2023 – 2032. Sasaran-sasaran ini disusun berdasarkan persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Living* yang diidentifikasi pada saat FGD Bimbingan Teknis.

Tabel 2. 4. Sasaran Dimensi *Smart Living*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
Harmonisasi Tata Ruang	1. Kurangnya ruang terbuka hijau yang nyaman	Terciptanya wajah kota dengan tata ruang yang berkualitas

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kebutuhan permukiman baru karena dengan posisi Kota Mojokerto sebagai kota satelit Surabaya</li> <li>3. Bekas bangunan WC komunal SANIMAS yang mangkrak</li> <li>4. Munculnya perkampungan kumuh</li> <li>5. Banjir sebagai konsekuensi dengan perkembangan permukiman</li> </ol>	
	Belum meratanya akses air minum dan sanitasi yang layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak
<b>Kesehatan</b>	Akses kepada pelayanan sehat masih kurang bagus, seperti antrian pendaftaran panjang di fasilitas kesehatan (RS)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarpras dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan preventif dan promotif layanan kesehatan, termasuk Penyakit Tidak Menular (PTM)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya kesehatan preventif dan promotif
<b>Transportasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume kendaraan padat</li> <li>2. Mobilitas masyarakat terbatas karena tidak tersedianya sarana transportasi umum yang layak</li> <li>3. Ketersediaan lahan parkir sempit dan mahal biaya parkir</li> </ol>	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam bermobilitas

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi harmonisasi tata ruang, sasaran ini ditetapkan karena adanya tuntutan masyarakat untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Seperti diketahui, ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto masih sangat terbatas, yaitu hanya satu ruang terbuka hijau per satu kelurahan. Berkembangnya kebutuhan akan RTH ini juga sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dihadapi di sub-dimensi harmonisasi tata ruang adalah dengan fasilitas yang dibangun di program SANIMAS yang mangkrak.

Di sub-dimensi pelayanan kesehatan, sasaran-sasaran ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk kualitas pelayanan kesehatan yang lebih bagus. Dengan akses atau jarak

ke pelayanan kesehatan yang sudah tidak sulit lagi, peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah hal yang disasar oleh kota ini, termasuk untuk mengembalikan Puskesmas pada fungsi awalnya, sebagai pusat “kesehatan” masyarakat, bukan pusat “kesakitan” masyarakat. Sehingga, kegiatan-kegiatan perlu dilakukan adalah upaya-upaya promotif dan preventif, seperti fokus pada pencegahan PTM, yang di masa depan bisa menjadi beban ganda biaya kesehatan di Indonesia.

Di sub-dimensi transportasi, sasaran dibuat berdasarkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Mojokerto diantaranya adalah kesulitan mobilitas karena tidak tersedianya transportasi umum yang murah dan layak. Sedangkan, bagi masyarakat pengguna kendaraan sendiri, dihadapkan pada terbatasnya lahan parkir dan biaya parkir yang mahal. Persoalan-persoalan inilah yang mendasari lahirnya sasaran ini.

### 2.1.2.5 *Smart Society*

Tabel di bawah menjelaskan sasaran yang ingin dicapai di dimensi *Smart Society* di Kota Mojokerto *Smart City*. Sasaran-sasaran ini disusun berdasarkan masalah-masalah pembangunan yang masih dihadapi di Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 5. Sasaran Dimensi *Smart Society***

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Interaksi Masyarakat</b>	Pemberdayaan disabilitas dan kaum marginal yang masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keterlibatan kelompok disabilitas dan kaum marginal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan</li> <li>2. Menguatnya jejaring disabilitas di Kota Mojokerto sampai dengan tingkat nasional</li> </ol>
<b>Ekosistem Belajar (Pendidikan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya kanal literasi</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat Perpustakaan</li> <li>3. Kurangnya masyarakat tentang literasi</li> </ol>	Meningkatnya minat baca masyarakat

	4. Rendahnya kunjungan masyarakat ke Perpustakaan	
	Masih ada masyarakat yang tidak bisa melakukan akses ke pendidikan formal	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non-formal
<b>Keamanan Masyarakat</b>	1. Masih terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 2. Risiko bencana alam dan non-alam	Meningkatnya sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat, baik dari resiko bencana alam, atau keamanan digital

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi interaksi masyarakat, persoalan disabilitas yang masih belum menjadi arus utama pembangunan di masyarakat. Misalnya, keterlibatan mereka dalam pembangunan masih belum optimal. Juga, pemerintah kota juga belum optimal menyediakan infrastruktur (akomodasi yang layak) dan layanan yang bisa diakses oleh mereka.

Di sub-dimensi ekosistem belajar, sasaran ini dibuat dengan dasar masih rendahnya literasi dan minat baca masyarakat. Meskipun, perpustakaan daerah dan juga perpustakaan keliling juga telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sedangkan di sub-dimensi keamanan masyarakat, sasaran ini dibuat dengan belum adanya sistem atau manajemen bencana yang sangat berguna digunakan untuk melakukan mitigasi jika terjadi bencana. Sehingga, adanya korban dan kerugian bisa diminimalisir. Selain itu, adanya layanan kedaruratan yang selama ini masih disediakan oleh instansi yang berbeda-beda, dan tentunya dengan kanal (nomor telpon yang berbeda). Misalnya, layanan 119 untuk PSC *ambulance* atau 113 untuk pemadam kebakaran. Beragam nomor telepon darurat ini akan menyulitkan masyarakat untuk menghapalnya. Sebagai daerah yang berada di 4 DAS dan 9 sub-DAS Brantas dan berbatasan dengan daerah pegunungan yang menjadi wilayah Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto rawan terhadap bencana banjir. Apalagi ditunjang dengan letak hidrologis kota yang bentuknya seperti *lepek*, sehingga hujan dengan curah tinggi dalam waktu yang lama juga menjadikan daerah ini berpotensi terhadap banjir. Oleh karena itu, diperlukan satu layanan kedaruratan yang sudah terintegrasi.

#### **2.1.2.6 Smart Environment**

Dimensi terakhir di *Smart City* adalah *Smart Environment*. Di tabel berikut di bawah, dapat dilihat sasaran di masing-masing sub-dimensi.

Tabel 2. 6. Sasaran Dimensi *Smart Environment*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Proteksi Lingkungan</b>	Banjir karena timbunan sampah atau perkembangan permukiman yang tidak terkendal	Meningkatnya tata kelola lingkungan dengan terkendalnya polusi udara, dan perlindungan air dan tanah
	Kualitas udara yang tidak terpantau	
	Kurangnya ruang terbuka hijau	
<b>Pengelolaan Limbah dan Sampah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan volume sampah</li> <li>2. Pengelolaan sampah yang belum bagus karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah</li> <li>3. Kapasitas TPA terbatas dan prediksi sudah penuh dalam waktu 4 tahun ke depan</li> <li>4. Belum adanya teknologi pengelolaan sampah</li> </ol>	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah
	Limbah B3 dan limbah cair rumah tangga yang belum terolah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air dan pengelolaan limbah cair domestik
	Daerah yang belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT)	Meningkatnya jumlah limbah cair rumah tangga dan limbah tinja yang terolah
<b>Tata Kelola Energi</b>	Belum dimanfaatkannya potensi sampah, limbah padat, dan cair untuk dijadikan sumber energi alternatif dengan optimal	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sampah dan limbah untuk diubah menjadi energi baru

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi proteksi lingkungan, sasaran ini dibuat dengan adanya penurunan kualitas udara, air, dan tanah di Kota Mojokerto, yang diantaranya disebabkan oleh perkembangan

permukiman yang tidak terkendali dan kualitas udara yang tidak terkontrol. Di sub-dimensi pengelolaan sampah dan limbah cair diantaranya disebabkan oleh adanya kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk mengelola sampa dari rumah, misalnya dengan pemilahan. Sedangkan di sisi lainnya, kapasitas TPA Randegan sangat terbatas untuk menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga kota. Padahal di Kota Mojokerto telah memiliki potensi Bank Sampah yang berada di tingkat RT/RW/Kelurahan, tidak kurang dari 150. Masalah sampah ini menjadi bom waktu di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Sedangkan di pengelolaan limbah cair/tinja belum bisa dilakukan secara optimal karena salah satu penyebab adalah kota ini juga belum memiliki sarana untuk pengelolaannya (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu/IPLT). Selama ini, pengelolaan limbah cair, seperti tinja, masih menggantungkan daerah lainnya, seperti Kota Gresik. Dan, di sub-dimensi tata kelola energi, ada keinginan untuk menciptakan energi baru yang berasal dari pengelolahn kembali limbah dari sampah ataupun limbah cair/tinja.

## 2.2 INDIKATOR UTAMA *SMART CITY* KOTA MOJOKERTO

Penyusunan Indikator Utama *Smart City* Kota Mojokerto di keenam dimensi akan dibuat berdasarkan beberapa acuan (rujukan) indikator. Yaitu, RPJMD, regulasi dari pemerintah pusat, SNI ISO 37122/2019, dan SDGs. Penggunaan indikator rujukan ini akan saling melengkapi. Misal, jika rujukan indikator tidak ditemukan di SNI ISO 37122/2019, bisa digunakan indikator di SDGs, terutama untuk sasaran-sasaran program yang digunakan untuk peta jalan di jangka panjang.

### 2.2.1 *Smart Governance*

Untuk mengukur capaian sasaran *Smart Governance* diperlukan indikator utama capaian sasaran. Di tabel 2.7, bisa dilihat indikator utama yang ingin dicapai di tiap sub-dimensi *Smart Governance*.

Tabel 2. 7. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Layanan Publik</b>	1. Meningkatnya ketersediaan pelayanan publik yang terintegrasi dan interoperabilitas	1. Persentase layanan administrasi masyarakat online terintegrasi	1. Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekur SPBE Kota Mojokerto
	2. Meningkatnya penyebaran informasi dan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Peraturan Menteri Pemberdayaan

	kepuasaan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan diadopsi di RPJMD 2018 – 2023
<b>Manajemen Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya layanan administrasi birokrasi yang terintegrasi dan interoperabilitas</li> <li>2. Meningkatnya kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan mudah dipakai sesuai prinsip satu data Indonesia</li> <li>3. Meningkatnya pengawasan dan kualitas pelayanan birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</li> <li>2. Sistem Merit</li> <li>3. Indeks Kematangan SPBE</li> <li>4. Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>5. Indeks Manajemen Risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>2. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>3. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>4. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>5. RPJMD 2018 – 2023</li> </ol>
<b>Kebijakan Publik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya integrasi data dalam satu peta</li> <li>2. Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat – daerah</li> <li>3. Meningkatnya kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kebijakan/regulasi pemerintah daerah yang sudah selaras dengan pemerintah pusat</li> <li>2. Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekur SPBE Kota Mojokerto</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang</li> </ol>

4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekur SPBE Kota Mojokerto

*Dari berbagai sumber, diolah*

Di sub-dimensi layanan publik, persentase layanan yang sudah terintegrasi perlu untuk dimasukkan ke dalam indikator sasaran, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, layanan publik di Kota Mojokerto masih banyak yang belum terintegrasi. Bahkan, mayoritas pelayanan juga masih manual. Oleh karena itu, integrasi sistem layanan memang harus sudah mulai diintegrasikan demi peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat. Di sub-dimensi manajemen birokrasi, indikator-indikator sasaran tersebut dimasukkan dengan merujuk pada RPJMD Kota Mojokerto 2018 – 2013, dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80/2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2024 (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25/2020). Apalagi, terkait dengan manajemen birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Mojokerto tidak bergerak dari status BB selama lima tahun terakhir. Yang menjadi persoalan adalah ketidaksesuain Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan RPJMD.

### 2.2.2 *Smart Branding*

Beberapa indikator utama terkait dengan *Smart Branding*, dapat dilihat di tabel 2.8 di bawah:

**Tabel 2. 8. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Branding***

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
Pariwisata	1. Bertambahnya destinasi wisata baru non-alam	1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	1. SDG (Target 8.9, indikator 8.9.2)
	2. Meningkatnya infrastruktur fisik, sosial, dan budaya pendukung ekosistem pariwisata	2. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	2. SNI ISO 37122 (indikator 14.1) 3. SNI ISO 37122 (indikator 17b.1)
	3. Menambah jumlah atraksi dan <i>event</i> pariwisata	3. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 4. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	4. SNI ISO 37122 (indikator 17b.2) 5. RPJMD 2018 – 2023

		5. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	
Daya Saing Bisnis	Meningkatnya investasi daerah, usaha perdagangan, dan pemasaran produk kreatif daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1. Nilai realisasi Investasi (PMA dan PMDN) 2. Pertumbuhan PRDB sektor industri 3. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	1. RPJMD 2018 – 2023 2. RPJMD 2018 – 2023 3. RPJMD 2018 – 2023
Wajah Kota	1. Meningkatnya jumlah landmarks yang bernuansa <i>Spirit of Mojopahit</i> yang mendukung terciptanya wajah kota yang berkualitas, indah, rapi, dan sesuai dengan standar arsitektur internasional 2. Menurunnya jumlah PKL yang berjualan di badan jalan dan berhasil dilokasir	Total anggaran yang dialokasikan untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi seluruh warisan budaya dan alam.	SDG (Target 11.4, indikator 11.4.1)

Dari berbagai sumber, diolah

Di dimensi *Smart Branding*, indikator-indikator sasaran disusun berdasarkan ISO SNI 37122, Tujuan Pembangunan Berlanjutan (SDGs), dan juga RPJMD Kota Mojokerto 2018 – 2023. Indikator-indikator sasaran di sub-dimensi ekosistem pariwisata dibuat jika pemerintah kota telah berhasil melakukan penambahan destinasi wisata baru, dan juga menyediakan infrastruktur pendukung (*amenities*) pariwisata yang wisatawan merasa nyaman berada di Kota Mojokerto, seperti hotel, restoran, dan sebagainya.

Di sub-dimensi ekosistem bisnis, indikator sasaran diambil dari RPJMD 2018 – 2023. Karena, keberhasilan Kota Mojokerto untuk memaksimalkan daya saing, pada akhirnya adalah pertumbuhan PDRB di berbagai sektor, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, di sub-dimensi perwajahan kota, indikator ini digunakan merujuk pada keinginan dari pemerintah kota untuk membangkitkan kembali *Spirit of Mojopahit* dalam penataan *landmarks* kota.

### 2.2.3 Smart Economy

Di dimensi *Smart Economy*, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan *Smart City* Kota Mojokerto seperti terlihat di tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2. 9. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Economy*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Ekosistem Industri</b>	1. Meningkatkan konektivitas dan kerjasama dengan industri di sekitar Kota Mojokerto 2. Meningkatkan upaya intensifikasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan 3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan	1. Pertumbuhan PRDB sektor industri	1. RPJMD 2018 – 2023
		2. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	2. RPJMD 2018 – 2023
		3. Laju inflasi	3. RPJMD 2018 – 2023
		4. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	4. SNI ISO 37122 (indikator 20.1)
<b>Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Meningkatkan Angka Kesempatan Kerja 3. Peningkatan PDRB riil per kapita 4. Angka kemiskinan 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 6. Indeks Pengeluaran per kapita	1. RPJMD (2018 - 2023) 2. SDG (indikator 8.1.3) 3. SDG (indikator 8.1.2) 4. RPJMD (2018 - 2023) 5. RPJMD (2018 - 2023) 6. RPJMD (2018 - 2023)
<b>Ekosistem Transaksi Ekonomi</b>	Meningkatnya transaksi keuangan digital daerah, terdorongnya ekonomi digital (e-	1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase	1. SNI ISO 37122 (indikator 9.1) 2. SNI ISO 37122 (indikator 9.2)

commerce dan marketplace),

dari pendapatan sumber sendiri

2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktor elektronik

*Dari berbagai sumber, diolah*

Indikator-indikator sasaran di dimensi *Smart Economy* disusun baik dari indikator di SNI ISO 37122, SDGs, ataupun dari RPJMD. Di sub-dimensi ekosistem industri, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah tumbuhnya perekonomian daerah yang mampu menggenjot Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari berbagai sektor, baik industri ataupun perdagangan. Sementara PDRB diharapkan bisa naik, pemerintah daerah juga berupaya untuk menekan laju inflasi. Terciptanya ekosistem perekonomian daerah yang stabil ini juga mendukung di sub-dimensi kesejahteraan sosial. Dengan situasi perekonomian daerah yang semakin membaik, harapannya adalah angka TPT menurun dengan terbukanya semakin banyak kesempatan kerja. Dengan warga bekerja dan memiliki pendapatan, harapannya angka kemiskinan juga bisa turun. Jika perut penduduk sudah kenyang, maka upaya untuk mendorong pembangunan kesetaraan gender akan lebih gampang untuk dilakukan, sehingga di akhir, juga akan turut mendorong naiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan di sub-dimensi ekosistem transaksi ekonomi, indikator sasaran ini dipakai dengan pemerintah daerah berusaha untuk “mengembalikan” gairah masyarakat untuk menggunakan transaksi digital.

#### 2.2.4 *Smart Living*

Dimensi *Smart Living* fokus pada upaya untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang layak untuk ditinggali. Dan salah satunya dengan tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas. Indikator untuk yang digunakan mengukur upaya pemerintah kota untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai tempat tinggal yang layak bisa dilihat di tabel 2.10 seperti di bawah ini:

**Tabel 2. 10. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Living***

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	1. Terciptanya wajah kota dengan tata	1. Rasio pemanfaatan lahan dibandingkan dengan pertumbuhan	1. SDG (Indikator 11.3.1) 2. SDG (Indikator 11.3.)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruang yang berkualitas</li> <li>2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penduduk</li> <li>2. Jumlah pelibatan masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota</li> <li>3. Alokasi anggaran pemerintah daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. SDG (6.a.1)</li> </ul>
<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya kesehatan preventif dan promotif</li> <li>2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarpras dan pelayanan kesehatan yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan</li> <li>2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</li> <li>3. Cakupan layanan terhadap akses pelayanan kesehatan esensial (layanan KIA, penyakit menular, penyakit tidak menular, dll)</li> <li>4. Jumlah penduduk yang ditanggung oleh asuransi atau sistem kesehatan publik lainnya per 1,000 penduduk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO 37122 (indikator 11.1)</li> <li>2. SNI ISO 37122 (indikator 11.2)</li> <li>3. SDG (indikator 3.8.1)</li> <li>4. SDG (indikator 3.8.2)</li> </ul>
<b>Transportasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam bermobilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi penduduk yang memiliki akses ke transportasi umum yang nyaman (berdasarkan jenis kelamin dan umur) dan orang dengan disabilitas.</li> <li>2. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SDG (indikator 11.2.1)</li> <li>2. SNI ISO 37122 (indikator 19.3)</li> <li>3. SNI ISO 37122 (indikator 19.5)</li> <li>4. SNI ISO 37122 (indikator 19.6)</li> <li>5. SNI ISO 37122 (indikator 19.7)</li> <li>6. SNI ISO 37122</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
| yang merupakan kendaraan rendah emisi. | (indikator 19.9)<br>7. SNI ISO 37122<br>(indikator 19.12) |
|--|---|
3. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik
  4. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu
  5. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik
  6. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas
  7. Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter

*Dari berbagai sumber, diolah*

Di dimensi *Smart Living*, indikator-indikator sasaran disusun dari SNI ISO 37122 dan SDGs di Tujuan 6 terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi layak; dan Tujuan 11 yang berkaitan dengan perwujudan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Di sub-dimensi harmonisasi tata ruang, indikator-indikator ini perlu untuk digunakan mengingatkan pemerintah menjadikan isu penambahan RTH dan penyediaan air minum dan sanitasi yang layak sebagai sasaran yang ingin dicapai di sub-dimensi ini. Lebih lanjut, di sub-dimensi pelayanan kesehatan, indikator sasaran diatas digunakan karena keinginan dari pemerintah kota untuk mengembalikan fungsi Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat, bukan sebagai pusat pesakit masyarakat. Sehingga, upaya-upaya preventif dan promotif menjadi fokus Puskesmas, termasuk dalam upaya mereka untuk mencegah dan mengendalikan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang di masa depan bisa menjadi beban ganda pelayanan kesehatan di Indonesia.

## 2.2.5 *Smart Society*

Di dimensi *Smart Society*, indikator untuk mengukur capaian sasaran bisa dilihat di tabel 2.11 di bawah ini. Tiga elemen yang ingin dicapai di dimensi ini: komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan.

Tabel 2. 11. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Rujukan
<b>Interaksi Masyarakat</b>	1. Meningkatnya keterlibatan kelompok disabilitas dan kamu marginal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan	1. Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	1. SNI ISO 37122 (indikator 13.1) 2. SNI ISO 37122 (indikator 13.2) 3. SNI ISO 37122 (indikator 13.4)
	2. Menguatnya jejaring disabilitas di Kota Mojokerto sampai dengan tingkat nasional	2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus. 3. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.	
<b>Ekosistem Belajar</b>	1. Meningkatnya minat baca masyarakat 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal	1. Rata-rata partisipasi remaja dan orang dewasa di pendidikan formal dan non-formal 2. Proporsi remaja dan orang dewasa yang memiliki kemampuan TIK 3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	1. SDG (indikator 4.3.1) 2. SDG (indikator 4.3.2) 3. SNI ISO 37122 (indikator 17.3) 4. SNI ISO 37122 (indikator 17.4)

4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif

<b>Keamanan Masyarakat</b>	Meningkatnya sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat, baik dari resiko bencana alam, atau keamanan digital	1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	1. SNI ISO 37122 (indikator 15.1)
		2. Jumlah pengaduan kebencanaan melalui nomor tunggal panggilan darurat	2. SDG (indikator 11.b.1)
		3. Jumlah sosialisasi mitigasi cerdas kebencanaan	3. SDG (indikator 11.b.1)

*Dari berbagai sumber, diolah*

Indikator-indikator sasaran diatas yang diadopsi dari SNI ISO 37122 dan SDGs Tujuan 4 dan Tujuan 11, dimana Tujuan 4 bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan ini sangat berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan minat baca dan literasi, serta akses kepada pendidikan formal yang ditujukan untuk kaum perempuan. Saat ini, akses pendidikan dasar di Kota Mojokerto sudah bisa dijangkau oleh semua anak di Kota Mojokerto. Selain pendidikan dasar yang sudah bebas biaya (gratis), pemerintah kota juga menyediakan sarana pendukung siswa lainnya, seperti seragam sekolah dan buku gratis. Di Kota Mojokerto, rata-rata lama sekolah tertinggi ketiga di Jawa Timur dengan angka 10,47 (2021) di bawah Kota Surabaya (10,50) dan Kota Madiun (11,37). Ini berarti, bahwa rata-rata penduduk Kota Mojokerto sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Dengan penduduk yang mayoritas sudah selesai pendidikan wajib 9 tahun, sudah saatnya pemerintah kota mendorong tumbuhnya budaya baca, yang tidak hanya disediakan fasilitas fisik saja, tetapi juga peningkatan kesadaran literasi mereka.

### **2.2.6 Smart Environment**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran di dimensi *Smart Environment* bisa dilihat di tabel 2.12 di bawah ini.

Tabel 2. 12. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Proteksi Lingkungan</b>	Meningkatnya tata kelola lingkungan dengan terkendalinya polusi udara, dan perlindungan air, dan tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (KLDH)</li> <li>2. Persentase air limbah yang diolah kembali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>2. SNI ISO 37122 (indikator 22.1)</li> </ol>
<b>Pengelolaan Sampah &amp; Limbah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah cair domestik</li> <li>2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga</li> <li>2. Proporsi air limbah yang terolah dengan benar</li> <li>3. Persentase sampah plastik yang didaur ulang</li> <li>4. Proporsi limbah padat yang dikumpulkan dan diolah oleh pemerintah kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO 37122 (indikator 16.2)</li> <li>2. SDG (indikator 6.3.1)</li> <li>3. SNI ISO 37122 (indikator 16.4)</li> <li>4. SDG (indikator 11.6.1)</li> </ol>
<b>Tata Kelola Energi</b>	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan limbah untuk diubah menjadi energi baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya.</li> <li>2. Total bauran penggunaan energi terbarukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO 37122 (indikator 7.1)</li> <li>2. SDG (indikator 7.2.1)</li> <li>3. SNI ISO 37122 (indikator 7.2)</li> <li>4. SNI ISO 37122 (indikator 7.3)</li> </ol>

- dalam total akhir  
konsumsi energi
3. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun
  4. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

*Dari berbagai sumber, diolah*

Indikator sasaran *Smart Environment* diadopsi dari RPJMD, SDGs, dan juga ISO SNI 37122. Indikator-indikator ini digunakan, sebagai proyeksi yang dibutuhkan oleh pemerintah kota di masa yang akan datang. Persoalan-persoalan lingkungan hidup seperti perlindungan terhadap kualitas air, tanah, dan udara, pengelolaan sampah, limbah cair domestik dan tinja, serta limbah bahan berbahaya beracun (B3) masih belum menjadi fokus utama bagi pemerintah kota. Upaya-upaya yang dilakukan masih sebatas kegiatan-kegiatan rutin. Ataupun, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, namun tidak berjalan efektif, seperti sampah yang langsung dikirim ke TPA. Sehingga terobosan seperti pelibatan masyarakat dalam pemilahan sampah dari rumah dengan menggunakan Bank Sampah masih belum optimal, padahal di kota ini terdapat 150 Bank Sampah. Selain itu, infrastruktur pendukung untuk pengelolaan sampah ataupun limbah cair, masih kurang mendukung. Misalnya, TPA Randegan yang merupakan milik pemerintah kota kapasitas sudah hampir penuh, dan kota ini belum memiliki IPLT. Kota Mojokerto sebenarnya juga memiliki IPAL komunal, akan tetapi banyak yang tidak digunakan dan mangkrak. Padahal, masalah sampah dan limbah ini adalah bom waktu bagi daerah perkotaan seperti Kota Mojokerto. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah kota untuk lebih fokus terhadap isu-isu ini dan dijadikan bagian dari kegiatan-kegiatan dan program-program di *Smart City*.

**BAB III**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY***

### 3.1 SMART GOVERNANCE

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan di bab sebelumnya, berikut strategi yang ditetapkan di dimensi *Smart Governance*, seperti bisa dilihat di tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3. 1. Strategi Dimensi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Layanan Publik</b>	Meningkatnya ketersediaan pelayanan publik yang terintegrasi dan interoperabilitas	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik
	Meningkatkan penyebaran informasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota	Optimalisasi saluran informasi dan keluhan pelayanan publik yang tersedia untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
	Meningkatkan kemudahan akses dan integrasi layanan dengan daerah lain	Pembangunan database terpadu dan terintegrasi berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani
<b>Manajemen Birokrasi</b>	Meningkatnya layanan administrasi birokrasi yang terintegrasi dan interoperabilitas	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi
	Meningkatnya kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan mudah dipakai sesuai prinsip satu data Indonesia	Mendorong penggunaan Satikomo bagi OPD untuk mempublikasi data statistik sektoral
	Meningkatnya pengawasan dan kualitas pelayanan birokrasi	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan
<b>Kebijakan Publik</b>	Meningkatnya integrasi data dalam satu peta	Melakukan integrasi data dalam satu peta
	Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat – daerah	Melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap pembentukan dan diseminasi produk hukum daerah secara online
	Meningkatnya kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi

	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penjaringan aspirasi masyarakat lewat secara online
--	--	---

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Seperti yang diketahui, di Kota Mojokerto, telah menggunakan berbagai jenis sistem dan aplikasi baik untuk pelayanan yang ditujukan untuk publik, ataupun internal birokrasi. Yang terkait dengan pelayanan administratif internal birokrasi, telah ada 16 jenis layanan, berupa 10 sistem/aplikasi yang diadopsi dari pemerintah pusat, dan 6 sistem/aplikasi yang dibangun oleh pemerintah kota. Sedangkan sistem/aplikasi yang ditujukan untuk layanan kepada publik, tidak kurang dari 164 layanan yang terbesar di 42 OPD (4 OPD belum memiliki layanan). Sebanyak 87 layanan masih dilakukan secara manual. Sehingga, perlu bagi layanan yang masih menggunakan sistem manual ini bisa diintegrasikan dengan layanan online yang sudah ada saat ini, sehingga pemerintah kota tidak perlu menambah aplikasi (ternak aplikasi) yang manfaatnya bisa jadi sama dengan aplikasi yang telah ada. Oleh karena itulah pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi dan interoperabilitas sudah menjadi satu kebutuhan. Tidak saja layanan yang sudah terintegrasi dan saling bisa dioperasikan, di *Smart Governance* juga dibutuhkan keselarasan antara kebijakan di tingkat pusat dengan pemerintah daerah. Ini bisa dilihat dari *website* JDIH Kota Mojokerto yang tidak lagi bisa koneksi dengan JDIH pusat, sehingga agak menyulitkan pemerintah kota untuk melakukan sinkronisasi dengan produk hukum dari pusat.

### 3.2 SMART BRANDING

Di *Smart Branding*, sasaran yang telah dibahas di bab sebelumnya, diterjemahkan dalam beberapa strategi pembangunan di masing-masing sub-dimensi seperti bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2. Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Ekosistem Pariwisata</b>	Menambah destinasi wisata baru non-alam	Penambahan dan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru
	Meningkatnya infrastruktur fisik, sosial, dan budaya pendukung ekosistem pariwisata	Melakukan kerjasama dengan investor untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
	Menambah jumlah atraksi dan <i>event</i> pariwisata	Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholders di bidang pariwisata untuk pembuatan kalender event wisata terintegrasi

<b>Daya Saing Bisnis</b>	Meningkatnya investasi daerah, usaha perdagangan, dan pemasaran produk kreatif daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi dengan pengembangan Jempol Mempesona</li> <li>2. Pembuatan kebijakan untuk menarik investasi</li> </ol>
<b>Wajah Kota</b>	Meningkatnya jumlah landmarks yang bernuansa <i>Spirit of Mojopahit</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota berbasis TIK</li> </ol>
	Menurunnya jumlah PKL yang berjualan di badan jalan dan berhasil dilokasir	Penataan dan relokasi PKL sesuai dengan RTRW dan regulasi daerah

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Pengembangan ekosistem pariwisata merupakan hal yang harus dikembangkan oleh Kota Mojokerto, mengingat beberapa kelemahan daerah ini di sub-dimensi ini. Untuk itu, beberapa strategi seperti yang disebutkan di tabel diatas harus dilakukan. Di kalangan pemerintah daerah, tugas untuk mengembangkan ekosistem pariwisata tidak saja menjadi tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), tetapi juga harus didukung oleh OPD lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman (PUPERAKIM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Dan, ketika program ini sudah melibatkan multi OPD, juga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah.

Peran investor yang dapat mendukung penyediaan infrastruktur pendukung dan *stakeholders* pariwisata sangat diperlukan. Seperti diketahui, Kota Mojokerto memiliki fasilitas *amenities* yang sangat minim, seperti bisa dilihat dari ketersediaan hotel di kota ini. Padahal, dengan berbekal kedekatan dengan kota besar seperti Surabaya, daerah ini berpotensi mengembangkan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan dipadukan dengan kegiatan wisata yang sudah disusun dalam *calender of events*. Peran investor juga dibutuhkan untuk pengembangan destinasi baru. Tidak hanya dalam proses pembangunannya, tetapi juga dalam proses promosi dan pengembangannya.

### 3.3 SMART ECONOMY

Dimensi *Smart Economy* dengan tiga sub-dimensi, pemerintah kota menggunakan beberapa strategi untuk mencapai sasaran di dimensi ini, seperti yang bisa dilihat di tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3. 3. Strategi Dimensi *Smart Economy*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Ekosistem Industri</b>	Meningkatkan konektivitas dan kerjasama dengan industri di sekitar Kota Mojokerto	Membuat perjanjian kerjasama industri dengan daerah-daerah di sekitar
	Meningkatkan upaya intensifikasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasiskan industri, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto</li> <li>2. Fasilitasi UKM dan UMKM untuk sertifikasi usaha dan akses permodalan</li> </ol>
<b>Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kepada wirausaha baru dengan pelatihan dan akses permodalan</li> <li>2. Penerapan kebijakan pro-poor</li> </ol>
<b>Ekosistem Transaksi Ekonomi</b>	Meningkatnya transaksi keuangan digital daerah, terdorongnya ekonomi digital ( <i>e-commerce dan marketplace</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pembayaran elektronik</li> <li>2. <i>Capacity building</i> kalangan UKM dan UMKM di bidang <i>digital economy</i> (terutama pelaku UKM/UMKM perempuan)</li> </ol>

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di dimensi *Smart Economy*, fokus pemerintah kota adalah pada UMKM dan kelompok rentan. Dari sisi UMKM, Kota Mojokerto merupakan daerah sentra kerajinan alas kaki dari kulit, dan usaha di bidang makanan dan minuman. Pelaku UMKM ini banyak didominasi oleh kelompok perempuan. Untuk penguatan UMKM, pemerintah masih perlu memberikan fasilitasi untuk pengembangan usaha seperti akses ke permodalan dan berbagai macam sertifikasi yang diperlukan untuk usaha, seperti sertifikasi halal dan BPPOM.

Sedangkan fokus terkait dengan kelompok rentan, pemerintah kota telah banyak memiliki program-program untuk orang miskin, seperti Bantuan Non Tunai Pangan Daerah (BNTP

APBD) dan Bantuan Sosial yang dianggarkan dari APBD. Bantuan-bantuan yang lebih bersifat *charity* dan insidentil ini memang diperlukan untuk keadaan tertentu, akan tetapi perlu untuk diimbangi dengan pembuatan kegiatan yang lebih memberdayakan dan berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih mandiri. Banyaknya program yang bersifat *charity* dan pelayanan yang sudah gratis di Kota Mojokerto, berdampak pada masyarakat yang manja dan kurang mandiri.

### 3.4 SMART LIVING

Sebagai kota terkecil di Jawa Timur dengan jarak yang sudah lagi bukan masalah dalam akses layanan, pekerjaan rumah pemerintah kota adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan layanan warga sehingga menjadikan daerah kota yang lebih layak huni. Terlebih, sebagai satelit dari Kota Surabaya, kota ini dilirik oleh warga Kota Surabaya. Di tabel 3.4 di bawah ini adalah strategi yang disusun oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Living*:

Tabel 3. 4. Strategi Dimensi *Smart Living*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Terciptanya wajah kota dengan tata ruang yang berkualitas	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Penyediaan sarana dan prasarana terhadap air minum dan sanitasi yang layak
<b>Pelayanan Kesehatan</b>	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya kesehatan preventif dan promotif	Penyediaan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarpras dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
<b>Transportasi</b>	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam bermobilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem layanan transportasi umum yang nyaman dan berkualitas</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan</li> <li>3. Menjadikan kota layak sepeda</li> </ol>

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Seperti dilihat di tabel di atas, untuk menjalankan strategi di dimensi *Smart Living* diperlukan kolaborasi multi *stakeholders* di Kota Mojokerto, seperti Dinas PURERAKIM, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitbangda), DLH, dan sebagainya. Terutama untuk penegakan regulasi RTRW di kota ini. Bagaimanapun, dengan wilayah yang kecil dan padat, pemerintah kota harus tegas dengan regulasi RTRW yang sudah disusun.

### 3.5 SMART SOCIETY

Strategi yang dilakukan oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Society* bisa dilihat di tabel 3.5 di bawah ini. Potensi dan tantangan Kota Mojokerto di dimensi ini dipengaruhi oleh faktor kultur sebagai daerah urban dan kondisi alam, dimana secara hidrologis, berbentuk seperti lepek dan dekat dengan aliran DAS Brantas. Sehingga, ini berpengaruh terhadap pembuatan strategi di *Smart Society*. Di tabel 3.5 di bawah ini bisa kita lihat strategi di dimensi *Smart Society*:

Tabel 3. 5. Strategi Dimensi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Interaksi Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keterlibatan kelompok disabilitas dan kamu marginal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan</li> <li>2. Menguatnya jejaring disabilitas di Kota Mojokerto sampai dengan tingkat nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> <li>2. Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas</li> </ol>
<b>Ekosistem Belajar</b>	Meningkatnya minat baca masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat baca warga kota</li> <li>2. Jemput bola kepada masyarakat untuk peningkatan minat baca</li> </ol>
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non-formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan perempuan miskin melalui pendidikan dan pembinaan di luar sekolah</li> <li>2. Penyelenggaraan pendidikan iman dan taqwa di sekolah</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan</li> <li>4. Meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif berbasis sertifikasi kompetensi</li> </ol>
<b>Keamanan Masyarakat</b>	Meningkatnya sistem atau manajemen keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang</li> </ol>

	keselamatan bagi warga masyarakat, baik dari resiko bencana alam, atau keamanan digital	efektif, efisien, dan responsif 2. Mengembangkan sistem mitigasi kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi
--	---	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Layanan kedaruratan, peningkatan literasi, dan menjadikan Mojokerto kota yang inklusif menjadi fokus di dimensi ini. Layanan kedaruratan antara lain terkait dengan bencana alam, kecelakaan, tawuran, dan juga kebakaran. Hal-hal ini membutuhkan respon yang sangat cepat untuk penanganannya. Akan tetapi, yang tidak kalah penting dengan penanganan yang cepat adalah upaya untuk melakukan mitigasi bencana agar bisa diminimalisir korban jiwa dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, strategi utama yang dilakukan oleh Kota Mojokerto adalah bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan darurat kebencanaan yang masih berjalan sendiri-sendiri (belum terintegrasi). Dan, untuk mendukung strategi ini, diperlukan dukungan teknologi dan kolaborasi *stakeholder* di isu ini.

Menjadikan kota yang ramah disabilitas sudah menjadi satu kebutuhan sebuah kota saat ini. Warga dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan yang sama seperti dengan warga non-disabilitas. Akan tetapi, masih banyak layanan publik yang belum bisa diakses oleh mereka dan infrastruktur juga belum mendukung. Oleh karena itu, perlu bagi Kota Mojokerto untuk memasukkan penyediaan akses bagi orang dengan disabilitas ke dalam salah satu strategi di *Smart Society* ini. Literasi menjadi fokus selanjutnya. Karena, terlepas dari negara sudah memiliki rata-rata lama sekolah 10,7, minat baca warga masih relatif rendah.

### 3.6 SMART ENVIRONMENT

Di tabel 3.6 di bawah ini, kita bisa melihat strategi-strategi yang ingin ditempuh oleh Kota Mojokerto untuk menjadikan daerah ini kota yang pintar di bidang lingkungan; baik untuk perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah padat/sampah atau limbah cair yang berasal dari rumah tangga, dan tata kelola energi yang berkelanjutan:

Tabel 3. 6. Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Proteksi Lingkungan</b>	Meningkatnya tata kelola lingkungan dengan terkendalinya polusi udara, dan perlindungan air dan tanah	1. Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara dengan pemanfaatan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara</li> <li>3. Penambahan ruang terbuka hijau</li> </ol>
<b>Pengelolaan Sampah &amp; Limbah Daerah</b>	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air dan pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) dalam konsep ekonomi sirkular</li> </ol>
<b>Tata Kelola Energi</b>	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sampah dan limbah untuk diubah menjadi energi baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan kembali sampah, limbah cair, dan padat untuk energi baru</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur bagi energi alternatif</li> </ol>

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Dalam pelaksanaan strategi-strategi diatas, selain dibutuhkan komitmen bersama antara OPD di pemerintah daerah, juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan dukungan dari pemerintah pusat. Karena, dalam menjalankan strategi ini dibutuhkan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan limbah domestik cair, termasuk limbah tinja. Selama ini, Kota Mojokerto belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) sendiri. Tanpa adanya IPLT, limbah domestik cair atau tinja tidak bisa diolah dengan maksimal. Selama ini, untuk pengelolaan limbah air tinja, dilakukan dengan bekerjasama dengan daerah lainnya, seperti Kabupaten Gresik. Dengan adanya IPLT juga, akan mempermudah upaya Kota Mojokerto untuk mengelola kembali (*reuse*) limbah tinja untuk digunakan menjadi sumber energi lain. Sehingga, dari pengelolaan limbah cair atau sampah di sub-dimensi kedua bisa mendukung sub-dimensi ketiga dengan terciptanya energi baru yang dihasilkan dari pengolahan kedua jenis limbah tersebut. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan ini tidak saja bisa mengatasi masalah perkotaan, tetapi juga mendukung upaya untuk menciptakan ekonomi sirkular.

**BAB IV**  
**RENCANA AKSI SMART CITY**

## 4.1 SMART GOVERNANCE

Rencana Aksi (Renaksi) di dimensi *Smart Governance*, diklasifikasikan dalam tiga periode: jangka pendek (2023) dan jangka menengah (2024 – 20227); dan jangka panjang di 2028 – 2032. Rencana aksi di kedua periode dapat dilihat di Tabel 4.1 dan 4.2.

### 4.1.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2023 – 2027)

Pembuatan Renaksi di jangka pendek dan jangka menengah ini meliputi empat komponen: pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur pendukung (*hardware*), perangkat lunak pendukung, dan penguatan literasi. Berikut Renaksi di masing-masing komponen:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, kegiatan yang dilakukan antara lain persiapan pembuatan regulasi pendukung, baik dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali), Surat Keputusan (SK) Walikota, ataupun SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain regulasi, di komponen kegiatan lain yang dilakukan adalah pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembuatan petunjuk teknis (juknis) ataupun manual kegiatan, dan pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) jika melibatkan pihak eksternal, seperti sektor swasta ataupun institusi non-pemerintah daerah. Inovasi-inovasi di *Smart Governance* pada mayoritas melakukan kegiatan-kegiatan ini di komponen ini. Misalnya saja, di inovasi SATIKOMO (Satu Data Kota Mojokerto). Dalam inovasi ini, paling tidak diperlukan dua regulasi dari walikota: untuk inovasi itu sendiri, dan untuk pelaksanaan Forum Data. Selain itu, karena inovasi ini bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, juga dibuat perjanjian kerjasama dengan BPS. Di inovasi Curhat Ning Ita, petunjuk teknis inovasi, penjangkaran keluhan dari warga dan pemberian respon. Saat ini, warga Kota Mojokerto bisa mengadukan keluhan lewat delapan kanal: SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, SMS, *website*, dan datang langsung ke desk Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto di Jl. Gajahmada 100. Penyiapan kelembagaan ini pada umumnya dilakukan pada 2023.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung (*Hardware*):** di *Smart Governance*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komponen ini, pada umumnya berkaitan dengan penyediaan dan *maintenance* jaringan internet, *server*, dan ketersediaan komputer atau laptop. Namun, diperlukan juga penyediaan lokasi fisik untuk inovasi, seperti *desk* pengaduan secara langsung di inovasi Curhat Ning Ita di kantor MPP. Kegiatan-kegiatan ini diperlukan karena pada umumnya inovasi di dimensi ini banyak berkaitan dengan *e-government*. Inovasi yang membutuhkan kesiapan ini di komponen ini

antara lain: Curhat Ning Ita, SATIKOMO, e-SAKIP, e-KINERJA, Si MANKO, SimHP, dan pembuatan Dashboard Walikota. Pada umumnya, kegiatan ini dilakukan pada 2023 dan 2024.

- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** di komponen ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pembuatan dan penambahan fitur di website dan aplikasi, integrasi aplikasi jika merupakan penggabungan beberapa inovasi atau aplikasi, dan juga pembuatan kanal media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pembuatan kanal di media sosial ini dilakukan di inovasi Curhat Ning Ita – yang merupakan adopsi dari program LAPOR (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) di Kota Mojokerto. Warga, tidak saja bisa curhat atau menyampaikan aduan via WA, SMS, ataupun website, tetapi juga bisa melalui kanal media sosial. Pembuatan website merupakan kegiatan yang sangat penting dalam Satu Data Kota Mojokerto (SATIKOMO) karena website ini tidak saja berisi seluruh data sektoral di Kota Mojokerto yang disediakan oleh OPD teknis selaku produsen data, tetapi dengan website ini, harapannya data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mojokerto telah sama (satu versi) dan dari satu sumber. Dengan demikian, akan lebih mempermudah para pengambil kebijakan di Kota Mojokerto dalam membuat keputusan atau menyusun program pembangunan. Mayoritas inovasi membutuhkan pengembangan perangkat lunak pada 2023.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari sebuah inovasi. Dua kegiatan yang umumnya dilakukan di komponen ini: sosialisasi kegiatan kepada OPD ataupun kepada masyarakat; dan penguatan kapasitas melalui pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek). Komponen ini tidak saja untuk pengenalan dan peningkatan *awareness* (kesadaran) terhadap inovasi, tetapi juga untuk meningkatkan mutu inovasi atau pelayanan. Seperti misalnya di SATIKOMO, Bimtek kepada operator data di tiap OPD dan analisis data kepada SDM di Diskominfo sebagai walidata. Ini dilakukan karena banyak OPD, termasuk di Dinas Kominfo, tidak memiliki SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Statistik dan Analisis Data. Bimtek kepada operator di OPD perlu dilakukan agar terjadi penyeragaman format data; dan bimtek analisis dibutuhkan agar data bisa dimanfaatkan. Kegiatan ini bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pelaksanaan program Satu Data Indonesia karena belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

#### **4.1.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)**

Renaksi jangka panjang akan dilaksanakan pada 2028 – 2032. Tiga inovasi diusulkan di jangka panjang ini: Smart Kampung, Pengembangan *Knowledge Management*

*System* (KMS), dan Pengembangan Kelayanan Artificial Intelligent (AI) Kota Mojokerto. Sama dengan di Renaksi jangka pendek dan menengah, terdapat empat komponen di rencana jangka panjang ini.

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jangka panjang, sama dengan di jangka pendek dan menengah. Yaitu: penyiapan regulasi, SOP, dan juga pembuatan Perjanjian Kerjasama jika melibatkan institusi di luar pemerintah daerah (pihak eksternal). Misalnya, dalam pelaksanaan program **Smart Kampung**, pastinya dibutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti misalnya PT Telkom atau perusahaan *provider* internet lainnya sebagai pendukung inovasi ini.
- b. **Pengembangan Infrastruktur:** seperti di Renaksi di jangka pendek dan menengah, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan di komponen ini adalah penyiapan *hardware* seperti komputer (PC), laptop, ketersediaan jaringan internet, dan adanya server. Untuk ketersediaan internet, karena wilayahnya yang kecil dan berada di daerah urban, 100 persen wilayah di Kota Mojokerto sudah tidak memiliki daerah *blank spot*. Saat ini, pemerintah Kota Mojokerto telah menyediakan 220 titik hotspot gratis bagi warganya.<sup>2</sup> Keberadaan *hotspot* internet gratis yang disediakan oleh pemerintah kota ini bisa mendukung pelaksanaan **Smart Kampung**, sebab seluruh kelurahan sudah terjangkau oleh saluran internet.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** di komponen ini, kegiatan tidak berbeda dari Renaksi di jangka pendek dan menengah. Yaitu, pembuatan website atau aplikasi jika dibutuhkan. Seperti misalnya di dalam program **Smart Kampung**, dilakukan penambahan fitur atau restorasi website yang dimiliki oleh kelurahan karena kelurahan sudah memiliki website. Akan tetapi, karena keberadaan website yang dikelola oleh kelurahan masih beragam, perlu dilakukan restorasi atau penambahan fitur agar sesuai dengan program yang dijalankan.
- d. **Penguatan Literasi:** komponen ini memiliki dua kegiatan utama: sosialisasi dan penguatan kapasitas. Di inovasi **Smart Kampung** misalnya, penguatan kapasitas sangat diperlukan untuk para operator atau pengelola program **Smart Kampung**. Pelatihan atau penguatan kapasitas dibutuhkan karena kompetensi dan keterampilan terhadap penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SDM di kelurahan sangat beragam. Terkait sosialisasi, kegiatan ini bisa dilakukan tidak saja dengan pertemuan langsung (*luring*), tetapi juga melalui media sosial, seperti IG, Facebook, Twitter, ataupun Tiktok. Saat ini, sosialisasi melalui media

---

<sup>2</sup> <https://jatimtimes.com/baca/260919/20220222/091600/kota-mojokerto-perluas-wifi-gratis-tersebar-di-220-titik-di-18-kelurahan>

sosial juga efektif sama efektifnya dengan kegiatan luring, tetapi bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dan murah biaya.

Tabel 4. 1. Rencana Aksi Smart Governance Jangka Pendek – Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi	Palapa Mojo – Pelayanan Publik Terpadu Kota Mojokerto	Melakukan penyusunan pedoman pembangunan aplikasi	2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyediaan server	2023	Membangun aplikasi digital	2023	1. Pelatihan peningkatan SDM penyelenggara pelayanan publik 2. Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat	2023 – 2025
	Optimalisasi Diseminasi Informasi Pelayanan Publik	Curhat Ning Ita	1. Pembuatan petunjuk teknis penggunaan sistem Curhat Ning Ita 2. Pembentukan tim pelaksana Curhat Ning Ita di Diskominfo dan OPD teknis lainnya 3. Pemilihan staff pelayanan di desk kantor MPP, tim cyber patrol, dan tim cross check aduan.	2021	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyediaan server 4. Penyediaan perangkat (HP untuk menerima aduan) 5. Penyediaan <i>desk</i> (tempat) bagi penerima aduan di MPP	2021	1. Melakukan integrasi dengan aplikasi Whistle Blowing System (WBS) terkait aduan tindak pidana korupsi 2. Pembuatan <i>website</i> untuk menerima aduan 3. Pembuatan kanal di media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp)	2021 - 2022	1. Pelatihan dan <i>upgrade skill</i> SDM penerima aduan di kantor MPP 2. Bimtek bagi OPD untuk penanganan dan tindak lanjut aduan 3. Sosialisasi kepada masyarakat delapan kanal penyaluran aduan (SMS, WA, FB, Twitter, IG, dan <i>website</i> ). Sosialisasi dilakukan dengan cara daring atau luring (lewat pertemuan	2021-2027

									yang dihadiri walikota atau OPD)	
<b>Manajemen Birokrasi yang Efisien</b>	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Si Manko (Sistem Informasi Manajemen Risiko)	1. SK Walikota 2. Pembuatan SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan Si Manko 3. SK tim Si Manko	2023	1. Penyediaan jaringan internet (wifi) 2. Penyediaan komputer/laptop	2023	Pembuatan website <a href="https://risikomojokertokota.go.id">https://risikomojokertokota.go.id</a>	2023	1. Sosialisasi program ke OPD di pemerintah Kota Mojokerto 2. Pelatihan SDM di Inspektorat	2023
	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	SimHP (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan)	1. Pembuatan panduan teknis pelaksanaan 2. Pembuatan SK tim	2023	1. Penyediaan jaringan internet (wifi) 2. Penyediaan komputer/laptop	2023	Pembuatan website SimHP	2023	1. Sosialisasi program ke OPD di pemerintah Kota Mojokerto 2. Pelatihan SDM di Inspektorat	2023
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	E-Calender	Pembuatan SOP dan panduan teknis	2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya	2023	Pembuatan aplikasi <i>e-Calender</i>	2023	1. Pelatihan kepada para sekretaris pribadi pimpinan 2. Sosialisasi program ke kalangan OPD	2023
	Mendorong penggunaan Satikomo bagi OPD untuk mempublikasi data statistik sektoral	Pengembangan Satu Data Kota Mojokerto	1. Perwali Satu Data Kota Mojokerto 2. SK Walikota untuk Forum Satu Data 3. Penunjukan operator data di tiap OPD teknis (selaku produsen data) 4. Koordinasi dengan BPS	2020 - 2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyiapan server	2020 - 2021	1. Pembuatan website Satu Data Kota Mojokerto 2. Updating data makro di website Satu Data Kota Mojokerto	2022 2023	1. Sosialisasi kepada OPD untuk penggunaan satu data untuk pembuatan kebijakan 2. Pelatihan SDM di Diskominfo untuk data	2023

			sebagai pembina data						analyst dan statistisi 3. Pelatihan operator data di tiap OPD	
Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Pengembangan E-SAKIP	Pembuatan panduan teknis E-SAKIP	2022	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyiapan server	2023	Pengembangan aplikasi atau website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	2023	1. Sosialisasi kepada OPD terkait inovasi 2. Bimtek kepada SDM di Bagian Organisasi dan OPD lainnya 3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait e-SAKIP agar mereka bisa memberikan <i>feedback</i>	2023	
Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	e-Kinerja	Pembuatan panduan teknis inovasi	2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyiapan server	2023	Pembuatan aplikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	2023	1. Sosialisasi kepada OPD dan ASN 2. Bimtek SDM di Bagian Organisasi	2023	
Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Pembangunan Knowledge Management System (KMS)	1. Penunjukan tim pelaksana 2. Pembuatan SOP atau juknis kegiatan 3. Pembuatan blue print KMS Kota Mojokerto 4. Aktivasi blue print KMS Kota Mojokerto	2024  2026	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan dan maintenance server	2024	1. Pembuatan website atau penambahan fitur di website milik Pemkot yang saat ini sudah ada 2. Pembuatan fitur-fitur atau kamar-kemar yang tematik.	2024 – 2025	1. Penguatan kapasitas dan Bimtek kepada SDM OPD untuk pembentukan mindset. 2. Melakukan transfer of knowledge kepada ASN SDM di	2024 - 2027	

									Pemkot Mojokerto	
	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan tim pelaksana program</li> <li>2. Pembuatan SOP atau juknis program</li> <li>3. Pembuatan perjanjian Kerjasama dengan pihak eksternal (ketiga) untuk mendukung inovasi</li> </ol>	2026	Pengumpulan data dari OPD	2026 - 2027	Pembangunan sistem	2027	Penguatan kapasitas dan Bimtek kepada SDM di OPD	
<b>Efisiensi Kebijakan Publik</b>	Melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap program pembentukan dan diseminasi produk hukum daerah secara online	Revitalisasi JDIH (Penyematan TTE pada Produk Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Perwali tentang Produk Hukum Daerah (Prokumda)</li> <li>2. Penyusunan SOP Prokumda baru</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet</li> <li>2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan website</li> <li>2. Pembuatan format data yang sama</li> <li>3. Pembuatan TTE yang tersertifikasi</li> </ol>	2023	Sosialisasi kepada OPD untuk penyematan TTE agar terjadi keseragaman format	2023
	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Dashboard Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Walikota untuk Dashboard Walikota</li> <li>2. SK Tim</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet</li> <li>2. Penyediaan server</li> </ol>	2023	Pembuatan website dan aplikasi	2023	Sosialisasi kepada OPD	

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

Tabel 4. 2. Rencana Aksi Smart Governance Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Layanan Publik</b>	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik	Smart Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Penunjukan tim pelaksana</li> <li>3. Koordinasi dengan kelurahan</li> <li>4. Pembuatan PKS dengan Telkom atau perusahaan swasta di bidang telekomunikasi lainnya</li> </ol>	2028 - 2032	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan internet di kelurahan (kampung) di Kota Mojokerto</li> <li>2. Penyediaan komputer atau laptop di kelurahan</li> <li>3. Penyiapan ruangan untuk operator atau pusat kegiatan lainnya (missal: pelayanan perizinan)</li> <li>4. Penyiapan atau pembuatan kegiatan di masing-masing kelurahan</li> </ol>	2028 - 2032	Pembuatan aplikasi atau atau penambahan fitur di website di masing-masing kampung (kelurahan) secara bertahap	2028 - 2032	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program kepada kelurahan dan masyarakat di kelurahan</li> <li>2. Penguatan SDM di Diskominfo sebagai koordinator program</li> <li>3. Penguatan SDM di kelurahan sebagai pelaksana program ini</li> </ol>	2028 - 2032
<b>Manajemen Birokrasi yang Efisien</b>	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Pengembangan Knowledge Manajement System (KMS)	Updating SOP atau juknis kegiatan	2028	Maintenance server	2028	Penambahan fitur baru	2028	Penguatan atau Bimtek kepada SDM OPD	2028
<b>Efisiensi Kebijakan Publik</b>	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto	Pembaharuan SOP atau juknis kegiatan	2028	-	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada operator untuk pengolahan dan analisa data</li> <li>2. Sosialisasi kepada OPD untuk menggunakan data yang sudah dianalisa untuk pengambilan keputusan</li> </ol>	2028

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

## 4.2 SMART BRANDING

Rencana Aksi (Renaksi) di dimensi *Smart Branding* terdiri dari jangka pendek (2023), jangka menengah (2024 – 2027), dan jangka panjang (2028 – 2032). Masing-masing rencana aksi di inovasi *Smart Branding* bisa dilihat di tabel 4.3 dan 4.4 di bawah. Berikut rangkuman Renaksi Jangka Pendek – Jangka Menengah, dan Renaksi Jangka Panjang.

### 4.2.1 Rencana Aksi Jangka Pendek – Jangka Menengah

Renaksi jangka pendek dan menengah terdiri dari empat komponen. Yaitu: kesiapan kebijakan dan kelembagaan; kesiapan infrastruktur pendukung; kesiapan perangkat lunak, dan penguatan literasi. Beberapa program yang akan dilaksanakan di jangka pendek dan jangka menengah antara lain Tourism Information Center (TIC), Wisata Bahari Mojopahit, Pembuatan dan Aktivitasi Blue Print Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya, dan Perluasan Jempol Mempesona dengan penambahan Klinik OSS dan Call Center.

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan regulasi (Perwali, SK Walikota, SK Kepala OPD), pembuatan PKS/MoU jika melibatkan pihak eksternal, pembentukan tim pelaksana dan pemilihan SDM, dan pembuatan panduan berupa petunjuk teknis (juknis) atau SOP. Di inovasi Wisata Bahari Mojopahit, tidak saja melibatkan OPD di Kota Mojokerto saja, tetapi juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, karena Kota Mojokerto ini dialiri oleh empat DAS Brantas dan sembilan sub-DAS Brantas, dan sungai yang akan digunakan untuk pengembangan inovasi ini, merupakan Sungai Brantas. Sudah sewajarnya, BBWS menjadi pihak yang dilibatkan dalam inovasi ini. Karena pengembangan ini membutuhkan investasi yang besar, juga dibutuhkan peran sektor swasta untuk berkontribusi dalam pengembangannya. Dan juga, komunitas kreatif yang bisa berperan dalam memberikan kontribusi konten terhadap pengembangan inovasi ini. Koordinasi dengan komunitas juga diperlukan untuk mendukung program Creative Hub Kota Mojokerto. Dalam pembangunan Creative Hub juga diperlukan studi kelayakan. Tujuannya, agar bisa dimanfaatkan dengan optimal. Tumbuhnya sektor usaha digital *start-up* dan digital nomad, keberadaan *co-working space* menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat urban. Akan tetapi, yang lebih penting adalah pemilihan lokasi yang benar, sehingga tidak menjadi fasilitas yang mangkrak karena salah menentukan lokasi. Selain itu, pemerintah kota perlu menjalin kolaborasi dengan komunitas digital *start-up* dan kreatif yang ada di Kota Mojokerto.

- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** di komponen ini, infrastruktur yang diperlukan tidak saja berkaitan dengan TIK, tetapi juga infrastruktur fisik berupa bangunan (gedung) kebutuhan furniture, dan fasilitas pendukung fisik lainnya. Inovasi pengembangan Jempol Mempesona yang rencana akan dilengkapi dengan *call center* dan klinik konsultasi, tentunya membutuhkan ruangan yang bisa digunakan untuk konsultasi bagi pengusaha (selain juga perlu untuk mengembangkan konsultasi secara daring). Pengembangan Wisata Bahari Mojopahit juga akan melibatkan pembangunan infrastruktur fisik yang sangat banyak: seperti misalnya *dive center*, *surfing center*, tempat parkir yacht, perahu wisata, tempat UKM dan UMKM untuk berjualan, *food court*, tempat mitigasi bencana, dan dermaga wisata. Selain itu, untuk Creative Hub diperlukan pembangunan fasilitas gedung yang juga bisa digunakan sebagai *co-working space*. Pembangunan Gedung untuk *co-working space* di Creative Hub ini dilakukan secara *multi-years* dan dimulai pada 2023.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak berupa website dan aplikasi dilakukan di inovasi *project prospectus* wisata yang dikembangkan dengan menggunakan WebGIS. Dengan penggunaan GIS ini, pembaharuan data terus perlu untuk dilakukan, sehingga *update website* perlu dilakukan terus-menerus. Juga di *Tourism Information Center* (TIC), karena selain menyediakan sarana fisik untuk TIC, informasi destinasi wisata juga dilakukan di *website* yang sudah bisa diakses oleh semua warga, termasuk orang dengan disabilitas (buta). Kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada 2023.
- d. **Penguatan Literasi:** dua kegiatan dilakukan di penguatan literasi: sosialisasi dan penguatan kapasitas SDM pengelola. Sosialisasi yang masif sangat perlu dilakukan di inovasi Bulan Kunjungan dan Promosi Mojopahit yang didalamnya merupakan integrasi pembuatan 9 *events* budaya dan pariwisata daerah, diantaranya Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, dan Pemilihan Duta Wisata. Kegiatan-kegiatan perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat, tidak saja di Kota Mojokerto, tetapi harus diluar daerah. Agar gaung *event-event* ini lebih bisa menarik banyak wisatawan yang datang, bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan *stakeholders* pariwisata seperti Traveloka, Tiketdotcom, PHRI, dan sebagainya. Dalam pengembangan Wisata Bahari Mojopahit, upaya penguatan kapasitas juga dilakukan dengan melibatkan para pegiat komunitas kreatif, Pokdarwis, dan Karang Taruna. Misalnya saja, Pokdarwis untuk menjadi pemandu wisata, karena Kota Mojokerto berkeinginan untuk mengembangkan wisata unggulan di tiap-tiap kelurahan. Pelatihan juga rencana dilakukan untuk Balawista yang untuk memperkuat wisata susur sungai. Penguatan literasi dilakukan pada 2023.

## 4.2.2 Rencana Aksi Jangka Panjang

Di jangka panjang, terdapat tiga inovasi di dimensi *Smart Branding*: pengembangan pariwisata berbasis *Virtual Reality*, Penyediaan Shuttle di Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas, *Medical Tourism*, dan pembangunan *Smart Information Sign* (petunjuk arah pintar).

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di Renaksi jangka panjang, selain menyiapkan regulasi dan pembentukan tim penanggung jawab inovasi, adalah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak eksternal, seperti sektor swasta. Inovasi yang memerlukan MoU dengan sektor lain misalnya *Medical Tourism*, yang memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyedia transportasi.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** pengembangan infrastruktur yang diperlukan tidak saja berkaitan dengan TIK, tetapi juga pembangunan fasilitas (gedung) beserta isinya. Penyiapan *hardware* TIK berupa *smart phone* atau tablet yang sudah dilengkapi dengan MEMS, sangat diperlukan untuk pengembangan wisata berbasis *virtual reality*. Pengembangan infrastruktur lain yang perlu dikembangkan sebagai pendukung pariwisata berbasis *virtual reality* (RV) adalah lokasi fisik pariwisata seperti Galeri Soekarno di Kelurahan Purwotengah.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangann perangkat lunak diperlukan di inovasi pengembangan wisata berbasis *virtual reality*. Kegiatan yang dilakukan di komponen ini antara lain pembuatan alogaritma dan desain untuk VR yang akan disajikan kepada para pengunjung. Pengembangan perangkat lunak diperlukan di inovasi *Medical Tourism* dimana layanan ini diintegrasikan dengan layanan SIMAPAN.
- d. **Penguatan Literasi:** kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada OPD, masyarakat, komunitas kreatif, dan pelaku bisnis. Wisata berbasis VR, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas – tidak saja di Kota Mojokerto, tetapi juga daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Sedangkan, *co-working space* perlu juga disosialisasikan kepada pelaku bisnis, sebagai pengguna potensial untuk inovasi ini. Demikian juga dengan di inovasi *Medical Tourism* dimana diperlukan penguatan kapasitas SDM yang terlibat di dalamnya – tidak hanya tenaga kesehatan, seperti driver, pemandu wisata, dan sebagainya.

Tabel 4. 3. Rencana Aksi Smart Branding Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Pariwisata	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Tourism Information Center (TIC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan manual atau juknis TIC</li> <li>2. Pemilihan SDM pelaksana TIC (operator, customer service, dan sebagainya).</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet</li> <li>2. Penyediaan komputer atau laptop</li> <li>3. Penyediaan server</li> <li>4. Penyediaan lokasi TIC di lokasi-lokasi wisata prioritas</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan website</li> <li>2. Penambahan fitur <i>accessibility</i> pada tiap user objek wisata daya tarik daerah</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program kepada tiap user objek wisata daerah</li> <li>2. Pelatihan SDM di tiap user objek wisata daya tarik daerah, terutama untuk melakukan pembaharuan data</li> </ol>	2023
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan dan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan investor untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata</li> </ol>	Wisata Bahari Mojopahit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi kelayakan lokasi pembangunan kawasan ini</li> <li>2. Pembuatan Perwali</li> <li>3. Membuat SPK dengan BBWS</li> <li>4. Pembuatan SPK dengan sektor swasta</li> <li>5. Koordinasi dengan komunitas ekonomi kreatif di Kota Mojokerto</li> <li>6. Pembangunan Kawasan Wisata Bahari dan Perairan</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan TIC dan perlengkapan kawasan ini</li> <li>2. Fasilitas kebersihan</li> <li>3. Penataan lanskap dan perlengkapan</li> <li>4. Panggung kesenian/pertunjukan/amphiteater,</li> <li>5. Dive Center dan peralatannya,</li> <li>6. Surfing Center dan peralatannya,</li> <li>7. Titik labuh/singgah kapal yacht dan perlengkapan</li> <li>8. Dermaga wisata</li> <li>9. Fasilitas mitigasi bencana alam</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat, komunitas kreatif, dan Pokdarwis baik secara daring atau luring Wisata Bahari Mojopahit</li> <li>2. Pemberdayaan dan pelatihan UMKM yang akan menempati di pusat oleh-oleh dan food court.</li> <li>3. Pelatihan dan penguatan kapasitas dan kelembagaan Pokdarwis dan komunitas kreatif di Kota Mojokerto.</li> <li>4. Pelatihan kepada Satgas Balawista</li> </ol>	2023

			<p>7. Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertosusila, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan</p> <p>8. Pembuatan dan penguatan kelembagaan Pokdarwis di kelurahan.</p>		<p>10. Fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata</p> <p>11. Fasilitas umum</p> <p>12. Fasilitas aksesibilitas</p> <p>13. Visibilitas Geopark</p> <p>14. Perahu Wisata</p>				<p>dari pemuda atau Karang Taruna di kelurahan untuk mendukung wisata susur sungai.</p>	
<p>Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholders di bidang pariwisata untuk pembuatan kalender event wisata terintegrasi</p>	<p>Bulan Kunjungan dan Promosi Wisata (Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pentas Seni Budaya Daerah di TMII, Apeksi Regional, Apeksi Nasional, Jatim Specta)</p>	<p>1. Pembuatan Perwali</p> <p>2. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan stakeholders pariwisata di Kota Mojokerto</p> <p>3. Pembuatan dan penguatan kelembagaan Pokdarwis di kelurahan.</p>	2023	<p>Penyiapan lokasi tiap-tiap event</p>	2023	-	-	<p>1. Sosialisasi event melalui media sosial, media massa, dan komunitas.</p> <p>2. Penguatan SDM pariwisata (komunitas kreatif, Pokdarwis di kelurahan)</p>	2023	
<p>Melakukan pengembangan daya tarik dan</p>	<p>Penyusunan Blueprint Mojokerto Kota Wisata Berbasis</p>	<p>1. Pembuatan tim pelaksana</p> <p>2. Pembuatan MoU dengan pihak</p>	2023	<p>1. Melakukan survey untuk pembuatan blue print</p>	2023	-	-	<p>1. Pelaksanaan pelatihan bagi petugas yang melakukan survey atau pengambilan data</p>	2023	

	destinasi wisata baru	Sejarah dan Budaya	ketiga untuk melaksanakan pembuatan blue print		2. Pemetaan destinasi, atraksi, infrastruktur yang ada dan yang butuh untuk dikembangkan, dan landmarks.				untuk pembuatan blue print. 2. Melakukan sosialisasi kepada OPD hasil dari blue print yang dibuat	
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Aktivitas City Branding Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya	1. Pembuatan juknis atau aturan pelaksana 2. Pemilihan tim pelaksana <i>branding</i> Kota Mojokerto	2024	1. Penyediaan lokasi pusat branding Kota Mojokerto 2. Penyediaan komputer dan jaringan internet	2024	-	-	1. Pelatihan kepada SDM yang bertanggung jawab terhadap branding Kota Mojokerto (dengan dikoordinasi di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata). 2. Sosialisasi kepada OPD, masyarakat, sektor swasta, komunitas kreatif, dan sektor pendidikan terkait branding Kota Mojokerto sebagai kota wisata berbasis sejarah dan budaya. Sosialisasi dilakukan lewat media sosial atau secara langsung.	2024
<b>Membangun Daya Saing Bisnis</b>	Pembuatan kebijakan untuk menarik investasi	Menyediakan dokumen investasi project prospectus wisata (potensi berbasis WebGIS)	1. SK tim 2. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan	2023	1. Penyiapan server 2. Jaringan internet 3. PC/laptop		1. Pembuatan website 2. Updating data ke dalam peta web yang sudah dibuat	2023	1. Sosialisasi peta potensi wisata berbasis WebGIS kepada masyarakat dan investor 2. Bimtek kepada SDM yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melakukan pembaharuan data	
	Meningkatkan kualitas	Perluasan Jempol Mempesona	1. Menyediakan regulasi	2023	1. Penyediaan tempat klinik	2023	-	-	1. Sosialisasi call center dan klinik	

	<p>layanan investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi dengan pengembangan Jempol Mempesona</p>	<p>(Klinik Pendampingan OSS dan Call Center Perizinan)</p>	<p>pendukung untuk Klinik Pendampingan OSS dan Call Center Perizinan</p> <p>2. Persiapan SDM untuk Pendampingan OSS dan di Call Center</p>		<p>konsultasi dan call center</p> <p>2. Penyediaan fasilitas kantor, seperti furniture, telepon, dan sebagainya.</p> <p>3. Penyediaan saluran internet</p>				<p>pendampingan OSS kepada warga/pelaku UMKM lewat kepala desa</p> <p>2. Sosialisasi call center dan klinik pendampingan OSS kepada warga/pelaku UMKM lewat asosiasi UMKM</p> <p>3. Sosialisasi call center dan klinik pendampingan OSS kepada warga/pelaku UMKM lewat media sosial</p>	
	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi</p>	<p>Pengembangan Mojokerto Creative Hub</p>	<p>1. Pembuatan Perwali</p> <p>2. Pembuatan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga</p> <p>3. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan</p> <p>4. Studi kelayakan untuk lokasi co-working space (creative hub)</p> <p>5. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan universitas (Pentahelix) di Kota Mojokerto</p> <p>6. Pembuatan SOP untuk penggunaan creative hub (sewa, aturan</p>	<p>2023 - 2024</p>	<p>1. Pembangunan fasilitas fisik gedung (1 lokasi tiap tahun)</p> <p>2. Pengisian fasilitas, seperti furniture dan perlengkapan lainnya</p> <p>3. Pengisian komunitas kreatif sebagai tenant (pemakai) Creative Hub.</p> <p>4. Pembuatan atau penyusunan kegiatan-kegiatan regular di Creative Hub yang dilaksanakan untuk komunitas kreatif.</p>	<p>2023 – 2028</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1. Sosialisasi fasilitas kepada masyarakat Kota Mojokerto, kalangan swasta, komunitas kreatif, dan sebagainya.</p> <p>2. Penguatan kapasitas kelompok ekonomi kreatif, sebagai pendukung utama Creative Hub.</p>	<p>2023 - 2027</p>

			pakai atau penggunaan, dan sebagainya)							
<b>Penataan Wajah Kota</b>	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Pembuatan Trotoar Tematik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi walikota</li> <li>2. Koordinasi dengan komunitas seni dan budaya atau komunitas kreatif Kota Mojokerto untuk pembuatan tema di masing-masing Kawasan di Kota Mojokerto. Komunitas ini juga bisa menjadi pelaksana kegiatan</li> <li>3. Koordinasi dengan sektor swasta (CSR)</li> </ol>	2023	Penyiapan lokasi trotoar yang akan dijadikan lokasi	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Melakukan persiapan bagi komunitas kreatif, seni budaya yang dilibatkan</li> </ol>	2023
	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Pembuatan Gapura Majapahitan	Regulasi walikota	2022 - 2023	Pemilihan lokasi kantor pemerintahan sebagai target pembangunan gapura Majapahitan	2022 - 2023	-	-	Sosialisasi kepada OPD dan institusi pemerintah daerah lainnya	2022 - 2023

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

Tabel 4. 4. Rencana Aksi Smart Branding Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Pariwisata	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Pengembangan Wisata berbasis Virtual Reality	1. Pembuatan Perwali 2. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan stakeholders pariwisata di Kota Mojokerto	2028	1. Pemilihan lokasi yang dijadikan destinasi wisata 2. Melakukan renovasi yang diperlukan di lokasi yang ditunjuk 3. Penyediaan jaringan internet 4. Penyediaan dan maintenance server 5. Persiapan hardware, seperti smart phone dan computer tablet yang sudah dilengkapi dengan MEMS	2028 - 2030	1. Pembuatan alogaritma 2. Pembuatan desain	2028 – 2030	1. Penguatan SDM Pemkot Mojokerto, komunitas kreatif, pengelola destinasi wisata 2. Sosialisasi program kepada masyarakat luas	2028 - 2030
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Shuttle di Kawasan Destinasi Wisata Prioritas	1. Pembuatan Kerjasama dengan pihak ketiga 2. Koordinasi dengan sektor swasta untuk Kerjasama CSR	2028	1. Pengadaan kendaraan shuttle bis di Kawasan 2. Pembuatan atau pembangunan halte shuttle 3. Pembuatan rute shuttle	2028 – 2029	-	-	1. Pelatihan kepada SDM (sopir shuttle). 2. Pelatihan SDM pemandu wisata.	2028 - 2029
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Medical Tourism	1. Penetapan SK Walikota tentang Penetapan RSUD sebagai RS berbasis layanan <i>tourism</i> 2. Pembentukan tim pelaksana kegiatan	2028	Pembuatan paket wisata kesehatan di Kota Mojokerto	2028	1. Kesiapan system pendukung medical tourism (MCU Layanan Unggulan) 2. Pengembangan layanan	2028	1. Sosialisasi kepada seluruh karyawan RSUD terkait regulasi dan layanan medical tourism ini.	2028

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembuatan studi kelayakan (blue print) layanan RS berbasis turisme.</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan travel penyedia layanan transportasi</li> <li>5. Pembuatan jejaring dengan agen wisata, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan, Disporabud Jatim.</li> </ol>				Aplikasi SIMAPAN untuk pesanan layanan medical tourism		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelatihan SDM (customer service, sopir, guide, dan tenaga kesehatan) pendukung program.</li> <li>3. Sosialisasi kepada masyarakat dan OPD terkait pelayanan baru, melalui media sosial dan pertemuan offline.</li> <li>4. Sosialisasi kepada agen wisata baik yang ada di Kota Mojokerto atau berbasis platform, seperti Tiket.com, Traveloka, dan sebagainya.</li> </ol>	
<b>Membangun Daya Saing Bisnis</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Pengembangan Creative Hub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan universitas (Pentahelix) di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembuatan SOP untuk pelaksanaan co-working space (sewa, aturan pakai</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan (renovasi) infastruktur</li> <li>2. Pengisian furniture di co-working space</li> <li>3. Penyediaan jaringan internet dan fasilitas</li> </ol>	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi co-working space kepada masyarakat dan pelaku bisnis di Kota Mojokerto</li> <li>2. Penguatan komunitas</li> </ol>	2028

			atau penggunaan, dan sebagainya)		perkantoran lainnya				kreatif Kota Mojokerto	
<b>Penataan Wajah Kota</b>	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota berbasis TIK	Pembangunan Smart Information Sign (Penunjuk arah pintar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan stakeholders pariwisata di Kota Mojokerto.</li> <li>3. Koordinasi dengan sector swasta terkait dukungan dari anggaran CSR</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan lokasi petunjuk pintar</li> <li>2. Pembangunan fasilitas petunjuk pintar (signage).</li> </ol>	2028 - 2030	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan langsung ataupun media sosial	2028-2030

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan II Kota Mojokerto

## 4.3 SMART ECONOMY

Renaksi jangka pendek (2023), jangka menengah (2024 – 2027), dan jangka panjang (2028 – 2032) bisa dilihat secara lengkap di tabel 4.5 dan tabel 4.6 di bawah ini.

### 4.3.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Di jangka pendek dan menengah, beberapa inovasi yang disusun oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Economy* antara lain: urban farming, pengembangan aplikasi SI DIKUPASI, MomMI ECCIS (*Mojokerto's Small and Medium Enterprises Coaching Clinic*), dan Koperasi Roda Ekonomi Indonesia (KOROENA). Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di keempat komponen Renaksi:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, penyiapan regulasi yang diperlukan, antara lain Perwali/SK Walikota/SK Kepala OPD. Selain itu, juga diperlukan juknis atau manual pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga diperlukan naskah MoU karena beberapa inovasi memerlukan kerjasama dengan pihak eksternal (swasta) untuk inovasi *urban farming*. Karena, di inovasi ini, hasil panen tidak saja fokus untuk konsumsi pribadi, tetapi difokuskan untuk bisa dipasarkan di supermarket yang ada di Kota Mojokerto. Kerjasama dengan pihak eksternal dengan *marketplace* nasional seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya, juga perlu dilakukan di inovasi pemasaran online produk-produk Kota Mojokerto di griyaukm.com. Tidak saja untuk memperluas pasar dan jumlah omzet yang dihasilkan oleh para UKM dan UMKM, tetapi juga untuk kesinambungan inovasi ini sendiri. Kegiatan-kegiatan di inovasi ini akan dilakukan pada 2023 dan 2024.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** selain infrastruktur TIK, sarana pendukung diperlukan berupa lahan/pekarangan di inovasi *urban farming* dan Bedah Warung. *Urban farming*, ketersediaan lahan pekarangan perlu disiapkan oleh warga sebagai lokasi untuk pembibitan (demplot) ataupun penanaman sayuran. Sedangkan inovasi Bedah Warung yang diinisiasi oleh Bagian Perekonomian, memerlukan kerjasama dengan warung-warung (toko-toko) yang ada di Kota Mojokerto untuk menjalankan program ini.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak diantaranya meliputi pengembangan dan penambahan fitur di website dan aplikasi. Pengembangan website dan konek dengan *marketplace* dilakukan di inovasi pemasaran hasil UKM dan UMKM di Griya UKM. Program SI DIKUPASI melakukan pengembangan aplikasi Android yang didalamnya dilengkapi informasi UKM dan UMKM, seperti misalnya jenis perizinan, sertifikasi usaha, jumlah modal, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya.

- d. **Penguatan Literasi:** penguatan kapasitas kepada para petani urban perlu dilakukan, karena bisa saja mereka tidak memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pertanian. Penguatan kapasitas ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pelatihan yang diberikan bisa dari pembibitan, pembuatan demplot, dan pemupukan. Pelatihan lanjutan juga perlu dilakukan oleh OPD lainnya, seperti Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan jika para petani urban melakukan kerjasama dengan supermarket atau melakukan pemasaran hasil produk pertanian yang dihasilkan. Pelatihan bisa berupa pengemasan atau pemasaran. Penguatan SDM juga diperlukan di inovasi MomMI ECCIS (*Mojokerto's Small and Medium Enterprises Coaching Clinic*), terutama kepada SDM di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, karena merekalah yang akan melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM.

#### 4.3.2 Renaksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Empat inovasi direncanakan di jangka panjang (2028 – 2032). Yaitu, Fasilitasi Produk Unggulan Ekspor, Microfinance UKM dan UMKM di Kota Mojokerto, Urban Farming, dan BUMD Go Digital. Berikut Renaksi yang dilakukan di jangka panjang di empat komponen:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di pengembangan kebijakan dan kelembagaan, selain diperlukannya regulasi (Perwali, SK Walikota, ataupun SK Kepala OPD), surat perjanjian kerjasama perlu dipersiapkan karena tiga dari empat inovasi bekerjasama dengan pihak eksternal. Seperti di Fasilitasi Produk Unggulan Ekspor, pemerintah kota akan menggandeng kalangan eksportir dan juga asosiasi, seperti Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) karena Kota Mojokerto merupakan salah satu pusat sentra industri alas kaki (sepatu dan sandal) di Jawa Timur, sehingga fasilitasi kepada eksportir, perlu melibatkan asosiasi. Pembuatan perjanjian juga diperlukan untuk rencana kerjasama dengan BAZNAS di program Microfinance. Inovasi Microfinance, selain membutuhkan penyiapan rencana kerjasama, juga perlu mengadakan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena kelompok akan berfungsi sebagai penyalur modal dan juga untuk penguatan bagi anggota.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** penyiapan infrastruktur TIK seperti ketersediaan jaringan internet diperlukan di inovasi BUMD Go Digital. Inovasi lainnya, seperti *urban farming*, lebih membutuhkan persiapan infrastruktur fisik lainnya, seperti ketersediaan lahan dan bibit. Penyediaan infrastruktur pendukung lainnya diperlukan di program microfinance untuk UKM dan UMKM, berupa pembuatan rekening untuk menerima penyaluran dana bantuan.

- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak direncanakan di inovasi BUMD Go Digital dengan pembuatan website dan aplikasi. Sedangkan untuk ketiga inovasi lainnya tidak memerlukan pengembangan perangkat lunak.
- d. **Penguatan Literasi:** Peningkatan kapasitas diperlukan diberikan kepada UKM atau UMKM yang menjadi sasaran program Microfinance. Pelatihan dan penguatan kapasitas diberikan agar mereka bisa mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Tidak saja agar mereka bisa mengembalikan pinjaman modal yang mereka dapatkan, tetapi untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Pelatihan yang bisa diberikan seperti pelatihan pembukuan, pembuatan rencana kerja, dan pelatihan teknis yang berhubungan dengan produk yang mereka hasilkan. Sosialisasi juga diperlukan di penguatan literasi ini. Salah satunya di program *Urban Farming*, dengan mendatangi sekolah-sekolah. Tidak saja sekolah berpotensi untuk dijadikan mitra, tetapi juga memberikan kesadaran bagi para siswa agar tertarik untuk kegiatan pertanian. Sehingga, mereka diharapkan tertarik untuk menjadi petani urban – paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, dan bisa mengatasi krisis petani di Kota Mojokerto.

Tabel 4. 5. Rencana Aksi Smart Economy Jangka Pendek – Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Penataan Ekosistem Industri	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Urban Farming	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi daerah (SK/Perwali)</li> <li>2. Pembentukan dan penguatan kelompok petani</li> <li>3. Melakukan identifikasi sektor swasta untuk bekerjasama (misal: perusahaan retail)</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan sektor swasta untuk kemitraan pemasaran produk</li> </ol>	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan lahan oleh warga</li> <li>2. Persiapan pembibitan dan distribusi bibit bagi kalangan petani urban</li> <li>3. Pembuatan demplot</li> </ol>	2024	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada para petani urban oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Dinas Pertanian, termasuk untuk diversifikasi tanaman</li> <li>2. Pelatihan pemasaran dan pengemasan hasil produk pertanian oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Indag</li> <li>3. Sosialisasi program ini kepada masyarakat lewat media social</li> </ol>	2024 - 2027
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Pengembangan Aplikasi SI DIKUPASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK Tim Nomor 188.4/238/41 7.513.4/2021</li> <li>2. Pembuatan Surat Perjanjian</li> </ol>	2021 - 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan internet</li> <li>2. PC/laptop</li> <li>3. Penyiapan server</li> </ol>	2023	Pengembangan fitur aplikasi Android	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi aplikasi kepada UMKM</li> <li>2. Pelatihan kepada pendamping di klinik inkubasi untuk e-learning</li> </ol>	2023

			<p>Kerjasama (SPK) dengan pihak ketiga</p> <p>3. Pendataan UKM/M berdasarkan nama usaha, legalitas, kapasitas produksi, aset, dan NIP</p> <p>4. Penyiapan SDM untuk pendampingan di klinik e-learning inkubasi</p>						3. Sosialisasi e-learning kepada UKM/M	
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	MomMI ECCIS (Mojokerto's Small and Medium Entreprises Coaching Clinic)	<p>1. SK tim (Nomor 188.4/100/41 7.513.5/2023)</p> <p>2. Pembuatan petunjuk teknis kegiatan (materi pelatihan)</p> <p>3. Pendataan wirausaha pemula sebagai sasaran program</p> <p>4. Pembuatan Kerjasama dengan perbankan untuk akses modal bagi UKM/M (HIMBARA – Himpunan Bank Negara)</p>	2023	<p>1. Penyiapan lokasi untuk pemberian klinik konsultasi kepada UKM/M</p> <p>2. Penyusunan materi untuk fasilitasi kepada UKM/M</p>	2023	<p>1. Pembuatan aplikasi untuk update real time</p> <p>2. Pengembangan fitur direct consultation</p>	2024  2025	<p>1. Sosialisasi kegiatan (program) dan SOP layanan kepada para wirausahawan baru.</p> <p>2. Penguatan kapasitas Dinas Koperasi, UKM, dan Indag pendukung program ini (teknisi, admin).</p>	2023

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pembuatan SOP layanan</li> <li>6. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan BP POM dan lembaga lainnya</li> </ul>							
<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Penerapan kebijakan pro-poor	Program Bedah Warung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Perwali Bedah Warung</li> <li>2. Pendataan UMKM yang dilakukan oleh kelurahan</li> <li>3. Koordinasi antar OPD pendukung (Bagian Perekonomian, Dinas UKM dan Indag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)</li> <li>4. Koordinasi dengan 18 kelurahan di Kota Mojokerto</li> </ul>	2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan lahan (lokasi toko)</li> <li>2. Penyiapan pengusaha toko yang akan diajak kerjasama</li> <li>3. Penyiapan barang-barang yang akan dijual</li> </ul>	2023	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan SDM dengan pelatihan kepada pelaku UMKM (pemilik toko)</li> <li>2. Sosialisasi kepada warga melalui kelurahan</li> <li>3. Sosialisasi program ini kepada masyarakat melalui media social</li> </ul>	2023 – 2027
	Penerapan kebijakan pro-poor	Klinik KORENA (Koperasi Roda Ekonomi Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim untuk coaching clinics koperasi di Kota Mojokerto</li> <li>2. Penerbitan SK Tim Nomor 188.45/10/417.513.2/2021</li> <li>3. Pembuatan Rancangan Perwali tentang Pembinaan dan</li> </ul>	2023	Penyediaan server dan jaringan	2023	Pengembangan aplikasi berbasis Android untuk rekam “medis” kesehatan koperasi	2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program ke 187 koperasi di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pemberian pelatihan kepada tim coaching clinics koperasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi KOROENA</li> </ul>	2023 – 2025

			Pengawasan (dikembangkan dari junkis). 4. Pendataan dan pembuatan kategori kesehatan koperasi di Kota Mojokerto							
<b>Membangun Ekosistem Keuangan</b>	Membangun sistem pembayaran elektronik	REDJO ANGURIPI (Retribusi Non Tunai Menjaga OPD dan Melindungi Pelaku Usaha dari Korupsi)	1. SK Tim Nomor 188.45/235/4 17.513.4/2021 2. SPK dengan instansi di luar pemerintah kota (Bank Jatim, OJK)	2022	1. Penyiapan jaringan internet 2. PC/laptop 3. Server	2022 - 2023	1. Pembuatan fitur aplikasi 2. Pembuatan Qris	2022 - 2023	1. Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial, atau pertemuan langsung 2. Sosialisasi kepada para pedagang di pasar dan pelaku bisnis lainnya	2023 - 2024
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pemasaran Online (griyaumkm.com)	1. Pembuatan SK Tim 2. Pembuatan SPK dengan platform market place nasional	2023 - 2024	1. Penyiapan jaringan internet 2. PC/laptop 3. Server	2023	1. Pembuatan website (griyaumkmmojokertokota.com) 2. Konek dengan market place	2024	1. Sosialisasi program kepada masyarakat dengan cara luring ataupun daring 2. Penguatan pelaku ekonomi (UKM dan UMKM) untuk menghasilkan produk berkualitas. 3. Penguatan kapasitas pelaku bisnis untuk melekat teknologi	2023 - 2024
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pengembangan Pasar berbasis Transaksi Digital/ Mlijo Online - e-marketplace	1. Pembuatan SK Tim 188.4/200/41 7.513.5/2021 2. Pembuatan juknis pelaksanaan inovasi	2021 - 2023	1. Penyiapan jaringan internet 2. PC/laptop 3. Server	2023	Pembuatan aplikasi berbasis Android	2023	1. Sosialisasi program kepada masyarakat melalui media sosial atau secara langsung. 2. Sosialisasi program kepada para pedagang pasar	2023 - 2024

			3. Pembuatan SPK dengan platform market place							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber: FGD Bimbingan Teknis II dan III Kota Mojokerto*

Tabel 4. 6. Rencana Aksi Smart Economy Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Penataan Ekosistem Industri	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Fasilitasi ekspor produk unggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan regulasi walikota</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana</li> <li>3. Pemetaan pelaku usaha unggulan</li> <li>4. Pemetaan eksportir dan asosiasi produk unggulan (misal: APRISINDO untuk persepatuan dan alas kaki)</li> <li>5. Pembuatan PKS dengan eksportir</li> </ol>	2028	Pelaksanaan pertemuan dengan eksportir dan asosisasi	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada para pelaku usaha kecil</li> <li>2. Penguatan kapasitas tim pelaksana program, seperti bagaimana meyakinkan eksportir dan asosiasi produk unggulan</li> </ol>	2028
	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Urban Farming	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan kelompok petani</li> <li>2. Penguatan Kerjasama dengan pihak swasta (supermarket)</li> </ol>	2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bibit</li> <li>2. Pembuatan demplot</li> </ol>	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kelompok petani urban</li> <li>2. Sosialisasi kegiatan urban farming ke sekolah-sekolah untuk mendorong kecintaan anak mudah (anak sekolah) untuk menjadi petani.</li> <li>3. Pelatihan packaging dan pemasaran</li> </ol>	2028

									hasil urban farming	
<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Fasilitasi UKM dan UMKM untuk sertifikasi usaha dan akses permodalan	Pengembangan Microfinance untuk UMKM Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana</li> <li>3. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (kalangan UMKM)</li> <li>4. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan BAZNAS</li> <li>5. Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan program</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan rekening di bank untuk menerima bantuan keuangan</li> <li>2. Lokasi tempat kegiatan untuk kelompok</li> </ol>	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program kepada kelompok masyarakat</li> <li>2. Peningkatan kapasitas UMKM, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan produk yang mereka hasilkan</li> </ol>	2028 - 2030
<b>Membangun Ekosistem Keuangan</b>	Membangun sistem pembayaran elektronik	BUMD GO DIGITAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana</li> <li>3. Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan program</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan jaringan internet</li> <li>2. Penyiapan dan maintenance server</li> <li>3. Penyiapan hardware seperti PC dan laptop</li> </ol>	2028	Pembuatan website dan aplikasi	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi ke SDM di semua BUMD di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM BUMD di Kota Mojokerto</li> </ol>	2028 - 2029

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

## 4.4 SMART LIVING

Rencana Aksi di dimensi Smart Living jangka pendek (2023), jangka menengah (2024 – 2026), dan jangka panjang (2028 – 2032) secara lebih lengkap bisa dilihat di tabel 4.7 dan 4.8 di bawah.

### 4.4.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Renaksi di jangka pendek dan menengah meliputi inovasi seperti pengendalian tata ruang di Kota Mojokerto lewat MAGIS – Mojokerto Kota Geographic Information System, pengembangan GAYATRI – Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi, SIMAPAN – Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman, dan Pengembangan berbagai Jenis Layanan di RSUD Dr. Wahidin. Renaksi di jangka pendek dan jangka menengah ini dilihat dari keempat komponen: pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur pendukung, perangkat lunak, dan penguatan literasi.

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain kesiapan regulasi berupa Perwali, SK Walikota, ataupun SK Kepala OPD, di dimensi *Smart Living* ini, koordinasi banyak dilakukan untuk berjalannya inovasi. Seperti misalnya GENTALA - Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama – yang juga merupakan program dari pemerintah nasional. Sebagai upaya bersama, upaya penurunan prevalensi stunting memerlukan koordinasi solid dari tingkat kota, kecamatan (termasuk Puskesmas), sampai dengan tingkat kelurahan dengan kader sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk preventif stunting melalui pendidikan calon pengantin (catin) dan pengisian ELSIMIL. Pembuatan perjanjian kerjasama juga diperlukan di program *Smart Parking*, dimana pemerintah kota perlu bekerjasama dengan sektor swasta yang berpotensi menjadi mitra, seperti misalnya pemilik pusat perbelanjaan (mall). Pembuatan SOP dan pedoman layanan diperlukan untuk inovasi seperti pengembangan layanan di RSUD Dr. Wahidin. Berbagai layanan yang rencana dikembangkan sampai dengan 2027 antara lain meliputi: Transformasi Medical Record dalam bentuk Digital, Layanan Rehab Medik Terpadu, Klinik Fertilitas, Cardiac and Stroke Center, dan Pengembangan Poli Eksklusif.
- b. **Infrastruktur Pendukung:** selain infrastruktur yang berkaitan dengan TIK seperti ketersediaan jaringan internet, server, dan komputer/laptop, infrastruktur pendukung lainnya juga diperlukan untuk mendukung kegiatan seperti GENTALA, seperti adanya alat pengukuran dan penimbangan bayi yang standar

(Antropometri). Ketersediaan peralatan pendukung juga diperlukan untuk inovasi skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) POS TENSI OKE OYE SIP, dimana diperlukan ketersediaan alat pengukur tensi. Infrastruktur berupa kendaraan juga diperlukan di inovasi penyediaan angkutan gratis untuk anak sekolah, SIMANISKERTO. Di 2022, armada yang melayani anak sekolah di jam pergi dan jam pulang ini berupa 11 armada mikrolet dan 3 bus. Tidak hanya ketersediaan armada angkutan, tetapi juga dengan melakukan pembuatan rute. Pada umumnya, rute angkutan ditetapkan di jalur-jalur dengan sekolah yang saling berdekatan. Pembangunan gedung dan penyediaan alat-alat pendukung perlu disediakan di pengembangan layanan di RSUD Dr. Wahidin. Penyediaan infrastruktur fisik pendukung juga diperlukan di program *Smart Parking*, dimana pemerintah kota perlu menentukan titik-titik untuk dijadikan lokasi *smart parking* sekaligus melakukan pembangunan fasilitas.

- c. **Perangkat Lunak:** ketersediaan perangkat lunak seperti pembuatan dan penambahan fitur di aplikasi diperlukan di beberapa inovasi, seperti pengembangan GAYATRI, SIMAPAN, dan SIDIVA – Sistem Informasi Wahidin Virtual Care. Penambahan fitur dilakukan secara bertahap, seperti misalnya di SIMAPAN. Jika pada awalnya inovasi ini hanya menyediakan layanan untuk bisa mendaftar antrian melalui aplikasi, pada saat ini, sudah ditambahkan fitur untuk janji dengan dokter spesialis, sehingga pasien tidak harus melalui poli umum. Tetapi, bisa langsung ke poli spesialis. Sehingga, ini bisa memotong jalur layanan, dan pasien menjadi lebih hemat waktu. Aplikasi SIMAPAN saat ini sudah diunduh lebih dari 1,000 kali (asumsi, digunakan paling tidak empat orang dalam satu Kartu Keluarga). Dengan pasien sekitar 100 – 200 orang per hari, mayoritas pendaftaran warga atau pasien dilakukan melalui pesan di aplikasi WA.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi berupa sosialisasi dan penguatan kapasitas diperlukan di inovasi-inovasi yang direncanakan di jangka pendek dan jangka panjang ini. Penguatan kapasitas sangat diperlukan untuk inovasi seperti GENTALA ini dengan bervariasinya kompetensi dan kemampuan dari kader, termasuk untuk melakukan pengukuran dan penimbangan bayi yang benar. Sosialisasi diperlukan seperti pencegahan stunting melalui calon pengantin agar mereka menggunakan ELSIMIL. Sebab, dengan calon pengantin mengisi data di ELSIMIL, risiko stunting bisa dideteksi.

#### 4.4.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Inovasi yang rencana dilakukan pada 2028 – 2032 di dimensi *Smart Living* ini meliputi tiga: pengembangan layanan pemanfaatan tata ruang, pengembangan layanan di RSUD Dr. Wahidin, pengembangan Mojokerto sebagai kota ramah bagi sepeda (*bike-sharing*), terutama di destinasi wisata unggulan, dan pengembangan aplikasi *smart parking*. Berikut kegiatan yang dilakukan di masing-masing komponen Renaksi:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain regulasi, pengembangan kebijakan juga memerlukan pembuatan MoU dengan pihak ketiga, terutama untuk pengembangan Mojokerto sebagai kota yang ramah sepeda. Dalam penyediaan fasilitas sepeda dengan sistem berbagi – terutama di lokasi destinasi wisata unggulan, pemerintah kota memerlukan kerjasama dengan pihak swasta, terutama dengan CSR perusahaan swasta.
- b. **Infrastruktur Pendukung:** selain *hardware* TIK, penyediaan infrastruktur lain juga diperlukan. Misalnya, di inovasi untuk menjadikan Mojokerto sebagai kota yang ramah bagi pesepeda. Persiapan yang perlu dilakukan antara lain, pembuatan jalur sepeda, penyediaan sepeda, titik-titik lokasi parkir sepeda, termasuk penyediaan mesin jika persewaan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis. Penyediaan infrastruktur fisik juga diperlukan untuk program pengembangan layanan RSUD Dr. Wahidin, dimana di jangka panjang ini, pelayanan bertambah menjadi gedung terpadu rumah sakit pendidikan dan pengembangan rumah sakit berkonsep ramah lingkungan (*green hospital*). Tentunya di dalam pengembangan *green hospital* yang memerlukan pembangunan dengan desain khusus. Tidak saja gedung yang sudah dilengkapi dengan sarana fisik khusus, seperti tempat pengelolaan limbah dan sampah, tetapi juga fasilitas yang perlu dibangun dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga bisa melindungi Kesehatan para karyawan, pasien, dan pengunjung.
- c. **Perangkat Lunak:** pembuatan website perlu dilakukan untuk mendukung kedua inovasi dari RSUD Dr. Wahidin – *green hospital* dan rumah sakit pendidikan. Sedangkan di inovasi Mojokerto kota ramah untuk sepeda, perlu dilakukan penambahan fitur di website milik Dinas Perhubungan, sehingga masyarakat bisa melakukan pemesanan secara online. Pembuatan aplikasi diperlukan di Smart Parking yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, untuk memudahkan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pemesanan lokasi parkir.

d. **Penguatan Literasi:** sosialisasi yang masif perlu dilakukan di inovasi-inovasi yang rencana dilakukan di jangka panjang ini, baik lewat media sosial atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh walikota atau OPD. Terutama, untuk pengembangan kota ramah sepeda dan *green hospital*. Di Green Hospital, selain diperlukan penguatan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan, juga diperlukan pembuatan jejaring dengan pihak-pihak eksternal, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, dan Bank Sampah.

Tabel 4. 7. Rencana Aksi Smart Living Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Mojokerto Kota Geographic Information Sysem (MAGIS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi walikota</li> <li>2. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi</li> </ol>	2023-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan pusat data server</li> <li>2. Penyiapan jaringan internet</li> <li>3. Penyiapan PC/laptop</li> </ol>	2023 - 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan source code</li> <li>2. ArcGIS online</li> </ol>	2023 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan metadata</li> <li>2. Penguatan standarisasi data</li> <li>3. Sosialisasi untuk standarisasi data</li> <li>4. Sosialisasi kepada OPD untuk pemanfaatan MAGIS dalam pengambilan keputusan</li> </ol>	2023 - 2027
<b>Pelayanan Kesehatan</b>	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	GAYATRI (Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali terkait GAYATRI</li> <li>2. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi</li> <li>3. Penyiapan tim dan SDM pengelola</li> </ol>	2023 - 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan maintenance pusat data server</li> <li>2. Penyiapan jaringan internet</li> <li>3. Penyiapan PC/laptop</li> </ol>	2023 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. API dengan BPJS</li> <li>2. API dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ol>	2023 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan pendampingan tim internal GAYATRI Dinas Kesehatan</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk pengembangan program GAYATRI baik secara langsung atau media sosial</li> </ol>	2023 -2027

	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan</p>	<p>GENTALA (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama) (Puskesmas Blooto)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini</li> <li>3. Koordinasi dengan TPPS Kecamatan</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan KUA di Kecamatan</li> <li>5. Persiapan kader kelurahan</li> </ol>	<p>2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang untuk pelayanan konsultasi gizi</li> <li>2. Penyediaan alat timbang atau alat ukur untuk balita (Antropometri atau alat lain yang standar)</li> </ol>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat terkat program ini dan pencegahan stunting ketika kunjungan ke Puskesmas atau kader</li> <li>2. Peningkatan kapasitas kader, baik pengetahuan terkait stunting atau penimbangan dan pengukuran balita yang benar</li> <li>3. Sosialisasi kepada calon pengantin untuk penggunaan ELSIMIL</li> <li>4. Bimbingan kepada calon pengantin dengan bekerjasama dengan KUA Kecamatan terkait kesehatan reproduksi.</li> </ol>	<p>2023</p>
--	---	---	---	-------------	---	-------------	----------	----------	--	-------------

	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	SI DUTA ES DEGAN (Stiker Posyandu Balita Sehat Dan Peningkat Alarm Kentongan) (Puskesmas Blooto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini</li> <li>3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	2023	Penyiapan lokasi kentongan	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada kader</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat</li> </ol>	2023
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	TOTALITAS (Tuntaskan TBC sak Oyote Sak Lawase) (Puskesmas Blooto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini</li> <li>3. SK tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat konsultasi</li> <li>2. Penyiapan obat</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada kader</li> <li>2. Penjaringan masyarakat atau pasien TBC</li> <li>3. Sosialisasi kepada masyarakat</li> </ol>	
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara	POS TENSI OKE OYE SIP (Program sadar tensi dengan	1. SK Kepala Dinas Kesehatan	2023	1. Penyiapan lokasi konsultasi	2023	-	-	1. Pelatihan kepada kader atau Posyandu Lansia	2023

	terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	prolanis, perkesmas, kartu & kantong tensi, konsultasi gizi dan farmasi kampanye germas & skrining PTM) (Puskesmas	atau Kepala Puskesmas 2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini 3. SK tim pelaksana kegiatan 4. Koordinasi dengan Posyandu Lansia di Kelurahan		2. Penyiapan alat pengukur tensi atau gula darah 3. Penyiapan obat 4. Pembuatan jadwal kegiatan, dengan koordinasi dengan Posyandu Lansia				2. Penjaringan masyarakat (usia produktif dan lansia) dengan PTM 3. Sosialisasi kepada masyarakat	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	SIMAPAN (Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman)	1. Regulasi walikota 2. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi 3. Penyiapan tim dan SDM pengelola	2023 - 2024	1. Penyediaan dan maintenance pusat data server 2. Penyiapan jaringan internet 3. Penyiapan PC/laptop	2023 - 2027	1. Source code SIMAPAN 2. Penambahan fitur real time cost dan janji dengan dokter specialist	2023 - 2027	1. Pendampingan dari Bagian Keuangan dan developer kepada SDM pengelola 2. Sosialisasi kepada masyarakat penambahan fitur di SIMAPAN	2023 -2027
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan	SIDIVA (Sistem Informasi)	1. Regulasi walikota 2. Pembuatan SPK dengan Dinas	2023 - 2024	1. Penyediaan dan maintenance pusat data server	2023 - 2027	1. Source code SIDIVA 2. Integrasi sistem	2023 - 2027	1. Bimtek kepada SDM pengelola program	2023 - 2027

	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Wahidin Virtual Medical Care)	<p>Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS</p> <p>3. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi</p> <p>4. Penyiapan tim dan SDM pengelola</p>		<p>2. Penyiapan jaringan internet</p> <p>3. Penyiapan PC/laptop</p>		dengan BPJS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		<p>2. Sosialisasi kepada masyarakat lewat pertemuan langsung atau media sosial</p>	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Pengembangan Layanan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	<p><b>1. Transformasi Digital dengan Elektronik Medical Record</b></p> <p>a. Pedoman Layanan Rumah Sakit (updating disesuaikan dengan pengembangan layanan)</p> <p>b. SK Tim sesuai Pengembangan Layanan</p> <p>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</p>	2023	<p><b>1. Transformasi Digital dengan Elektronik Medical Record</b></p> <p>a. Penyediaan dan maintenance pusat data server</p> <p>b. Penyiapan jaringan internet</p> <p>c. Penyiapan PC/laptop</p>	2023	<p>a. Source code rekam medik dan e resep</p> <p>b. Integrasi dengan BPJS (data base layanan pasien)</p> <p>c. terintegrasi dengan SIMAPAN (riwayat penyakit pasien)</p>	2023	<p>a. Internalisasi dan pendampingan Pendampingan dari Tim IT kepada DPJP, admin, Medical Record dan farmasi</p> <p>b. Pembuatan user guide</p>	2023
			<p><b>2. Layanan Rehap Medik Terpadu</b></p> <p>a. Kebijakan Layanan Rehap Medik</p>	2024	<p><b>2. Layanan Rehap Medik Terpadu</b></p> <p>c. Pembangunan Gedung Rehap Medik</p>	2024	<p>a. Integrasi dengan BPJS (data base layanan)</p> <p>b. Integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN</p>	2024	<p>2. Layanan Rehap Medik Terpadu</p> <p>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi</p>	2024

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. SK Tim Rehap Medik</li> <li>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pemenuhan Alat Kesehatan</li> <li>e. Penyiapan jaringan internet</li> <li>f. Penyiapan PC/laptop</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</li> <li>b. Diklat kompetensi bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</li> <li>c. Penguatan jejaring terkait layanan</li> </ul>	
			<p><b>3. Klinik Fertilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Layanan Fertilitas</li> <li>b. SK Tim Layanan Fertilitas</li> <li>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</li> </ul>	2025	<p><b>3. Klinik Fertilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Gedung</li> <li>b. Pemenuhan Alat Kesehatan</li> <li>c. Penyiapan jaringan internet</li> <li>d. Penyiapan PC/laptop</li> </ul>	2025	Melakukan integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Klinik Fertilitas</li> <li>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</li> <li>b. Diklat kompetensi bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</li> <li>c. Penguatan jejaring terkait layanan</li> </ul>	2025

			<p><b>4. Cardiac dan Stroke Center</b></p> <p>a. Kebijakan Layanan Cardiac dan Stroke Center</p> <p>b. SK Tim Layanan Cardiac dan Stroke Center</p> <p>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</p>	2025	<p><b>4. Cardiac dan Stroke Center</b></p> <p>a. Pembangunan Gedung</p> <p>b. Pemenuhan Alat Kesehatan</p> <p>c. Penyiapan jaringan internet</p> <p>d. Penyiapan PC/laptop</p>	2025	<p>4. Cardiac dan Stroke Center</p> <p>a. Integrasi dengan BPJS (data base layanan)</p> <p>b. Integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN</p>	2025	<p>Cardiac dan Stroke Center</p> <p>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</p> <p>b. Diklat kompetensi bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</p>	2025
			<p><b>5. Pengembangan Poli Eksekutif</b></p> <p>a. Kebijakan Layanan Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>b. SK Tim Layanan Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</p>	2025	<p><b>5. Pengembangan Poli Eksekutif</b></p> <p>a. Pembangunan Gedung</p> <p>b. Pemenuhan Alat Kesehatan</p> <p>c. Penyiapan jaringan internet</p> <p>d. Penyiapan PC/laptop</p> <p>e. Penyiapan Sarana informasi lainnya</p>	2025	<p>5. Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>a. Integrasi dengan BPJS (data base layanan)</p> <p>b. Integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN</p>	2025	<p>Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</p> <p>b. Diklat servis <i>excellent</i> bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</p>	2025

									c. Penguatan jejaring terkait layanan	
<b>Sarana Transportasi</b>	Mengembangkan layanan transportasi umum yang nyaman dan berkualitas	Angkutan Sekolah Gratis (Pengembangan Rute dan Aplikasi SIMANISKERTO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan pemilik angkutan umum</li> <li>3. Penyiapan dan rute dan trayek baru angkutan sekolah gratis</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan kendaraan (angkutan kota)</li> <li>2. Pembagian jadwal dan rute trayek baru kepada angkuta kota yang ikut di dalam program ini</li> </ol>	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan website</li> <li>2. Pengembangan aplikasi Simaniskerto</li> </ol>	2024 - 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi atau kampanye angkutan sekolah gratis kepada siswa di sekolah di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembinaan kepada sopir angkutan sekolah gratis</li> </ol>	2026
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Smart Parking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK Tim</li> </ol>	2023 – 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi penyediaan fasilitas smart parking</li> </ol>	2025 - 2027	Pembuatan aplikasi Smart Parking	2025 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD lintas sektor terkait Smart Parking dengan Kepolisian, Satpol PP, Diskominfo, DPUPERKIM, Masyarakat, Swasta, Bappeda</li> </ol>	2023 - 2027

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pembuatan regulasi</li> <li>3. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (sektor swasta, seperti pusat perbelanjaan)</li> <li>4. Pembuatan kajian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(kantong parkir)</li> <li>2. Pembangunan lokasi smart parking</li> <li>3. Pembuatan tarif untuk smart parking</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait tarif smart parking lewat media sosial atau sosialisasi secara langsung agar mereka menggunakan fasilitas ini</li> </ul>	
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 4. 8. Rencana Aksi Smart Living Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Pengembangan Layanan Pemanfaatan Tata Ruang	1. Pembuatan regulasi pendukung 2. Pembentukan tim inovasi	2028	1. Penyediaan pusat data server 2. Penyiapan jaringan internet 3. Penyiapan PC/laptop 4. Penentuan jenis layanan	2028	-	-	1. Sosialisasi program kepada OPD 2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah 3. Penguatan SDM di OPD	2028
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Pengembangan layanan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	1. <b>Gedung Terpadu Rumah Sakit Pendidikan</b>  a. Kebijakan Layanan Pendidikan b. SK Tim Koordinator Pendidikan c. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan (dokter gigi/dokter, keperawatan/	2028	1. Gedung Terpadu Rumah Sakit Pendidikan a. Sarana dan prasarana ramah lingkungan b. Penyediaan dan maintenance pusat data server c. Penyiapan jaringan internet d. Penyiapan PC/laptop	2028	Pembuatan website dan sistem pendidikan terpadu	2028	Diklat pengelolaan koordinator pendidikan Rumah Sakit	2028

			kebidanan, nakesla, manajemen)							
			2. Green Hospital  a. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan (dokter gigi/dokter, keperawatan/kebidanan, nakesla, manajemen)  b. Pembuatan SK Tim Pelaksana Green Hospital  c. SOP kegiatan terkait Pelaksanaan Green Hospital	2029	Pengembangan Zona Pengawasan	2029	Pengembangan website Green Hospital	2029	a. Sosialisasi kepada seluruh karyawan RSUD terkait dengan Regulasi b. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial c. Diklat Pengelola Green Hospital d. Penguatan jejaring pendukung Green Hospital baik internal maupun eksternal (KLH, LH, Bagian Perekonomian, Bank Sampah Induk)	2029
Sarana Transportasi	Menjadikan kota layak sepeda	Mojokerto Kota Ramah Sepeda	1. Pembuatan Perwali 2. Pembuatan naskah kerjasama dengan sektor swasta (CSR)	2028 - 2029	1. Pembuatan rute jalur sepeda 2. Penetapan titik-titik parkir sepeda	2028 - 2029	Penambahan fitur di menu website Dinas Perhubungan terkait program ini atau jika ada calon pengguna ingin melakukan	2028 - 2029	Sosialisasi kepada warga Kota Mojokerto atau warga di luar Kota Mojokerto melalui pertemuan atau media sosial.	2028 - 2032

			atau kemitraan lainnya 3. Melakukan studi kelayakan		3. Pengadaan sepeda 4. Infrastruktur penyewaan sepeda (loket dengan petugas, atau dengan mesin)		booking penggunaan sepeda			
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Pengembangan Aplikasi Smart Parking	Pembaharuan regulasi	2029	1. Penambahan titik parkir 2. Penyediaan infrastruktur (hardware) pendukung 3. Penyediaan jaringan internet	2029	Pembuatan dan penambahan fitur layanan di aplikasi	2029	1. FGD lintas sektor terkait Smart Parking dengan Kepolisian, Satpol PP, Diskominfo, DPUPERKIM, Masyarakat, Swasta, Bappeda 2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait tarif smart parking lewat media sosial atau sosialisasi secara langsung agar mereka menggunakan fasilitas ini	2029

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 4.5 SMART SOCIETY

Secara lengkap, Rencana Aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimensi *Smart Society* Kota Mojokerto bisa dilihat di tabel 4.9 dan 4.10 di bawah.

### 4.5.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Renaksi jangka pendek dan jangka menengah di dimensi *Smart Society* meliputi beberapa inovasi, seperti GATI LANSIA yang ditujukan untuk lansia terlantar dan tanpa keluarga, Kota Mojokerto E-Library (KOMOLIB) yang merupakan layanan perpustakaan digital Kota Mojokerto, dan layanan darurat 112 yang ditujukan untuk layanan kebencanaan, E-Disabilitas, Ning Ita di Sekolah, dan Digitalisasi Catatan Budaya Kota. Renaksi akan dilihat di empat komponen, seperti di bawah ini:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain perlu diterbitkannya regulasi sebagai payung pelaksanaan kegiatan, rencana kerjasama juga perlu disiapkan di komponen ini. Sebab, beberapa inovasi yang akan melibatkan pihak eksternal di luar lingkup pemerintah daerah. Misalnya saja, program GATI LANSIA - Gerakan Ayo Tulung tlnulung Lanjut Usia terlantar – yang berencana menggandeng lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Duafa untuk mendukung inovasi ini, dan program Layanan 112 yang perlu menggandeng kepolisian, SAR, PLN, dan beberapa lembaga lainnya.
- b. **Infrastruktur Pendukung:** selain *hardware* TIK yang diperlukan dipersiapkan hampir di semua inovasi, beberapa infrastruktur lain juga perlu dipersiapkan, seperti gedung untuk menampung lansia terlantar di program GATI LANSIA. Inovasi ini juga perlu melakukan pemetaan RT atau tetangga yang akan merawat lansia yang memiliki rumah (tidak tinggal di wisma Dinsos). Layanan 112 memerlukan beberapa infrastruktur pendukung lainnya, seperti ruangan yang berfungsi untuk *command center*, *call center*, dan *ambulance* yang digunakan jika panggilan merupakan layanan *emergency* seperti kecelakaan. Di inovasi EWS bencana banjir, sarana pendukung yang juga perlu disiapkan adalah adanya perahu karet, jalur mitigasi, dan juga lokasi mitigasi jika bencana terjadi. Ini perlu disiapkan, karena Kota Mojokerto lumayan rawan terhadap terjadinya banjir, yang disebabkan oleh pengaruh topografi yang seperti lepek, dan beberapa DAS dan sub-DAS Brantas yang mengelilingi kota ini. Perangkat lunak seperti

*scanner* juga perlu dipersiapkan untuk digitalisasi catatan sejarah dan budaya kota, yang sebelumnya berbentuk naskah fisik.

- c. **Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak – aplikasi dan aktivasi kanal media sosial, dilakukan untuk dua inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Kedua inovasi ini adalah e-KOMOLIB dan Dongeng Online Kota Mojokerto. KOMOLIB merupakan perpustakaan online yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai respon terjadinya pandemik Covid-19 yang membuat warga kesulitan untuk pergi ke perpustakaan daerah. Sehingga, koleksi-koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah, dijadikan koleksi digital. Sebelum pandemik, kunjungan ke perpustakaan daerah (termasuk fasilitas di RTH dan kelurahan), berjumlah sekitar 100 orang. Aktivasi *account* Instagram dilakukan untuk inovasi Dogeng Online Kota Mojokerto (DOLEN KOMO). Lewat *account* ini, setiap bulannya, siswa-siswi dari sekolah-sekolah di Kota Mojokerto melakukan dongeng lewat *live* di *account* Instagram inovasi ini. Penyiapan aplikasi juga diperlukan untuk inovasi E-Disabilitas. Aplikasi ini diperlukan untuk melakukan pendataan orang dengan disabilitas di Kota Mojokerto.
- d. **Penguatan Literasi:** karena inovasi-inovasi di dimensi ini pada umumnya adalah pelibatan masyarakat, sosialisasi yang masif dan intensif perlu dilakukan. Misalnya, untuk pemanfaatan KOMOLIB, karena diakui atau tidak, layanan *digital library* juga bersaing dengan keberadaan media lain, seperti YouTube, media video dan film via *streaming*, atau fasilitas *e-book* lainnya. Dengan semakin banyaknya saingan, sosialisasi perlu dilakukan dengan masif dan intensif sehingga literasi masyarakat bisa terbangun dengan baik. Pelatihan dan penguatan kapasitas yang intensif perlu dilakukan terutama berkaitan dengan upaya penanggulangan kondisi darurat seperti di inovasi Layanan 112 atau EWS. Sebab, dalam upaya mitigasi dan penanganan situasi darurat dibutuhkan kesiapan yang matang dari SDM. Seperti misalnya, pelatihan kepada operator di *call center* 112 atau pelatihan relawan BNPT bersama dengan TAGANA.

#### 4.5.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Renaksi jangka panjang dibuat untuk lima inovasi di dimensi *Smart Society* ini, yang meliputi Mojokerto Kota Ramah Disabilitas, pembangunan universitas, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan QR buku di fasilitas

umum di Kota Mojokerto, dan IC yang merupakan integrasi CCTV dengan AI dengan *smart PJU*, *smart traffic light*, dan *e-warning system*. Berikut rencana aksi di masing-masing komponen di dimensi *Smart Society* untuk jangka panjang:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, regulasi seperti Perwali diperlukan untuk mendukung inovasi-inovasi diatas. Bahkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto ramah terhadap disabilitas, bisa jadi akan dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda). Selain kesiapan regulasi, juga diperlukan koordinasi dengan pihak eksternal, seperti misal untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang ramah disabilitas, pemerintah kota harus melakukan koordinasi yang intensif dengan komunitas atau organisasi disabilitas yang ada di Kota Mojokerto, untuk memastikan bahwa nantinya fasilitas yang dibangun atau layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.
- b. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung:** rencana jangka panjang di dimensi ini memerlukan pembangunan fisik yang tidak sedikit. Untuk mendukung Kota Mojokerto ramah disabilitas, pemerintah kota harus memastikan bahwa kantor pemerintah dan fasilitas umum sudah mengakomodasi kebutuhan orang dengan disabilitas, seperti misalnya trotoar yang sudah dilengkapi dengan *guiding block* (untuk orang buta) dan sudah bisa dilewati kursi roda, atau fasilitas umum sudah menyediakan bidang miring, atau fasilitas toilet yang bisa dimasuki oleh kursi roda. Penyediaan infrastruktur untuk orang disabilitas juga bisa berupa kendaraan bagi orang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Penyediaan infrastruktur bangunan menjadi kegiatan yang dilakukan untuk penyediaan akses pendidikan dengan membangun kampus baru ataupun BLK guna meningkatkan kualitas SDM di Kota Mojokerto.
- c. **Perangkat Lunak:** penyediaan perangkat lunak diperlukan untuk inovasi IC, karena inovasi ini melakukan berbagai sistem yang ada, seperti CCTV, *smart PJU*, *smart traffic light*, dan *e-warning system*. Pembuatan kode QR diperlukan untuk buku cerita dan dogeng yang ditempatkan di fasilitas-fasilitas umum. Pembuatan kode QR ini akan mempermudah masyarakat untuk mengakses buku-buku atau dongeng-dongeng yang sudah diubah dalam bentuk digital.
- d. **Penguatan Literasi:** gerakan penyadaran (*awareness raising*) perlu dilakukan terutama di inovasi menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang ramah terhadap disabilitas. Gerakan penyadaran ini tidak saja perlu

dilakukan kepada masyarakat secara luas, tetapi juga di kalangan OPD. Saat ini, belum semua OPD (Dinas PUPERAKIM) mengetahui standar bangunan yang ramah dengan disabilitas, sehingga ketika melakukan pembangunan fasilitas baru seperti gedung atau trotoar baru, belum mempertimbangkan aksesibilitas orang dengan disabilitas. Penguatan literasi (*awareness raising*) juga diperlukan untuk mendorong penyediaan pelayanan publik yang ramah dan bisa diakses oleh orang dengan disabilitas.

Tabel 4. 9. Rencana Aksi Smart Society Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Interaksi Masyarakat yang Efisien</b>	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	GATI LANSIA (Gerakan Ayo Tulung tinulung Lanjut Usia terlantar)	1. Pembuatan regulasi pendukung	2023	1. Penyiapan tempat atau lokasi yang digunakan untuk menampung orang tua terlantar 2. Pengaturan donasi setiap bulan 3. Distribusi bantuan kepada lansia yang berada di luar rumah penampungan 4. Pemilihan tetangga atau RT yang bertanggung jawab merawat lansia terlantar dan tanpa keluarga	2023	-	-	1. Sosialisasi program ini kepada masyarakat umum atau donatur yang potensial 2. Melakukan pendekatan dan sosialisasi program kepada program-program berbasis shodaqoh dan donasi seperti BAZNAS, Kita Bisa, dan Dompot Duafa untuk keberlangsungan program 3. Pemberian pelatihan usaha produktif kepada para lansia	2023 - 2027
			2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023						
			3. Penyiapan SDM di Rumah Lansia	2023						
			4. Koordinasi dengan kelurahan	2023						
			5. Pemetaan donatur pribadi	2023		2023 – 2027				
			6. Pembuatan rencana kerjasama dengan sektor lainnya seperti BAZNAS, Kita Bisa, Dompot Duafa, dan sebagainya.	2024		2023 – 2027				

	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	BOLANG (Bantuan Orang terlantar dan terhiLANG dari keluarganya)	1. Pembuatan regulasi pelaksanaan inovasi programi 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Koordinasi dengan OPD lainnya seperti Satpol PP dan pihak kepolisian	2023	-	-	-	-	1. Sosialisasi program kepada masyarakat lewat media sosial atau pertemuan secara langsung 2. Bimtek SDM Dinsos	2023 - 2027
	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	TAREK SIS (Tanggap Apresiatif REspon Kebutuhan Sosial Sehari-hari)	1. Pembuatan regulasi untuk pendukung inovasi 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Identifikasi penerima manfaat kegiatan	2023 - 2027	-	-	-	-	1. Sosialisasi program kepada masyarakat melalui media sosial atau pertemuan langsung untuk pelibatan mereka di program ini 2. Bimtek SDM Dinsos	2023 - 2027
	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	E-Disabilitas	1. Pembuatan juknis atau SOP program 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Koordinasi dengan Lembaga-lembaga untuk orang dengan disabilitas (misal: PPD)	2023	-	-	-	-	1. Pelatihan kepada SDM Dinsos yang akan menjadi pelaksana E-Disabilitas 2. Sosialisasi program lewat organisasi orang dengan disabilitas	2023
<b>Ekosistem Belajar</b>	Penyelenggaraan pendidikan iman dan taqwa di sekolah	Ning Ita di Sekolah	1. Pembuatan Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023	1. Pembuatan jadwal di sekolah	2023	-	-	1. Sosialisasi kepada	2023

			3. Penyiapan guru yang terlibat di kegiatan ini		2. Pembuatan materi untuk pelajaran tambahan ngaji di sekolah				siswa untuk kegiatan ini 2. Penguatan SDM (guru) di sekolah	
Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Kota Mojokerto E-Library (KOMOLIB)	1. Pembuatan Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023	1. Jaringan internet 2. Penyediaan dan maintenance server 3. Penyediaan PC dan laptop 4. Penyiapan buku dalam bentuk digital (digitalisasi buku)	2023	Pembuatan fitur dan aplikasi KOMOLIB	2023	Sosialisasi kepada masyarakat luas terkait inovasi, baik melalui sekolah, komunitas, pertemuan langsung, ataupun media sosial.	2023	
Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Dongeng Online Kota Mojokerto (Dolen Komo)	1. Pembuatan Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023	1. Jaringan internet 2. Hardware berupa handphone atau tablet untuk live streaming 3. Penyiapan lokasi kegiatan	2023	Aktivasi account Instagram Dinas Perpustakaan dan Arsip	2023	1. Sosialisasi ke sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ini 2. Sosialisasi informasi kegiatan ini lewat account media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip, terutama lewat IG.	2023	
Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Digitalisasi Catatan Budaya Kota	1. Pembentukan tim pelaksana inovasi 2. Koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki catatan terkait sejarah Kota Mojokerto.	2023	1. Penyiapan hardware untuk digitalisasi (scanner) 2. Penyediaan fisik naskah	2023	Integrasi hasil naskah yang sudah digitalkan di KOMOLIB	2023	Sosialisasi hasil digitalisasi naskah kepada masyarakat lebih media sosial atau sosialisasi secara fisik	2023	

					yang akan digitalisasikan				lewat kegiatan yang dilakukan oleh Walikota atau Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	perempuan melalui pendidikan dan pembinaan	SKOPER (Sekolah Berbasis Peningkatan Kerja)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan rencana kerjasama dengan pihak penyedia pelatihan (narasumber)</li> </ol>	2023 - 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan terhadap peserta</li> <li>2. Pembuatan kurikulum untuk pelatihan</li> <li>3. Pemilihan trainer</li> <li>4. Penentuan lokasi pelatihan</li> </ol>	2023 - 2024	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program lewat kelurahan atau tim pendamping sosial di kelurahan</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan kepada para perempuan penerima manfaat program</li> </ol>	2023 - 2024
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang efektif, efisien, dan responsif	Pengembangan Layanan 112 (Bencana Alam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis program</li> <li>4. Pembuatan naskah kerjasama dengan pihak eksternal pemilik layanan panggilan darurat (Kepolisian, Dinkes, Pemadam Kebakaran, PLN, SAR, dan sebagainya)</li> <li>5. Pemilihan petugas untuk di call center 112</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet dan telepon</li> <li>2. Penyediaan dan maintenance server</li> <li>3. Penyediaan call center</li> <li>4. PC/laptop dan telepon</li> <li>5. Furniture untuk call center</li> <li>6. Penyiapan ambulance</li> </ol>	2023	Koneksi jaringan antara situs-situs panggilan darurat yang ada	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Layanan 112 lewat pertemuan langsung atau media sosial</li> <li>2. Pelatihan kepada petugas (operator) yang berada di call center 112</li> <li>3. Pelatihan kepada tim dispatcher</li> </ol>	2023

	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Early Warning System (Banjir)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>2. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis program</li> <li>3. Pembuatan kerjasama dengan dengan pihak eksternal seperti Taruna Tanggap Bencana (TAGANA)</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan alat pendeteksi banjir (telemetry)</li> <li>2. Penyediaan server</li> <li>3. Penyiapan peralatan untuk mitigasi jika terjadi bencana, seperti perahu karet dan tenda</li> <li>4. Penyiapan rute mitigasi</li> <li>5. Penyiapan lokasi untuk mitigasi</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini</li> <li>2. Pelatihan rutin petugas dari BPBD dan TAGANA untuk mitigasi bencana</li> </ol>	2023
--	---	-------------------------------	---	------	--	------	---	---	--	------

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 4. 10. Rencana Aksi Smart Society Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Interaksi Masyarakat yang Efisien</b>	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	Mojokerto Kota Inklusif (Alat Bantu Mobilitas, Perangkat, dan Teknologi untuk Warga Berkebutuhan Khusus)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. SK Tim</li> <li>3. Pembuatan SOP atau juknis kegiatan</li> <li>4. Koordinasi dengan komunitas atau organisasi orang dengan disabilitas</li> </ol>	2028 - 2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung yang bisa diakses orang dengan disabilitas</li> <li>2. Penyediaan trotoar yang ramah kursi roda dan dilengkapi guiding block untuk tunanetra</li> <li>3. Gedung yang dilengkapi warning yang ramah bagi disabilitas tuli</li> <li>4. Penyediaan alat bantu mobilitas bagi warga berkebutuhan khusus, seperti mobil.</li> </ol>	2028 - 2032	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program lewat luring atau media sosial</li> <li>2. Sosialisasi bangunan dan fasilitas yang ramah disabilitas kepada OPD di Kota Mojokerto</li> <li>3. Penyadaran untuk disabilitas (disability raising awareness)</li> <li>4. Pelibatan warga dengan disabilitas atau lembaga dengan disabilitas ke Musrenbang dan kegiatan perencanaan lainnya</li> </ol>	2028 - 2032
<b>Ekosistem Belajar</b>	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat baca warga	QR Akses Digital Library di Tempat Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan naskah digital (dongeng, atau cerita lainnya)</li> </ol>	2028 - 2029	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat terkait inovasi	2028 - 2029

	kota		komunitas budaya dan sejarah di Kota Mojokerto 3. Kerjasama dengan perusahaan swasta		2. Pembuatan titik QR di tempat umum					
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Pembangunan Akademi/ Universitas terakreditasi B	1. Perwali atau regulasi pendukung lainnya 2. Pembentukan tim yang bertanggung jawab apda kegiatan 3. Studi kelayakan lokasi universitas 4. Tender kegiatan 5. Staffing (pengisian SDM)	2032	1. Pembangunan universitas 2. Pengisian furniture dan penyediaan jaringan internet 3. Pembuatan kurikulum 4. Rekrutmen mahasiswa	2032	-	-	1. Sosialisasi kampus kepada masyarakat luas lewat media sosial, atau kegiatan face to face 2. Diklat untuk para pendidik dan staff administrasi yang lainnya	2032
	Meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif berbasis sertifikasi kompetensi	Pembangunan Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi	1. Perwali 2. Studi kelayakan lokasi universitas 3. Tender kegiatan 4. Koordinasi dengan pemerintah provinsi (Dinas Tenaga Kerja Provinsi) 5. Pembuatan kerjasama	2030	1. Pembangunan BLK 2. Pengisian furniture dan penyediaan jaringan internet 3. Pembuatan kurikulum	2030	-	-	1. Sosialisasi kepada sektor swasta 2. Sosialisasi kepada para pencari kerja atau siswa SMK 3. Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas untuk instruktur di BLK	2030

			dengan sektor-sektor lain, seperti SMK dan perusahaan swasta 6. Staffing di BLK (instruktur, dan SDM pendukung)							
<b>Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat</b>	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	IC/I See (Integrated CCTV) Ai CCTV yang terintegrasi dengan smart PJU/ Smart Traffic Light, dan Warning System	1. Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Pembuatan MoU dengan sektor swasta	2028	1. Pemetaan pemasangan sensor pintar 2. Pemasangan sensor pintar (CCTV) di titik-titik yang sudah ditentukan 3. Lokasi control room center	2028 - 2039	Integrasi dengan Smart PJU dan Warnig System	2028 - 2029	1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan SDM di call center	2028 - 2029
	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	e-Warning System Secara Real Time	1. Pembaharuan SOP 2. Pembaharuan perjanjian Kerjasama dengan pihak-pihak lain pendukung program, seperti TAGANA	2028	1. Penambahan alat deteksi dini banjir (telemetry) 2. Server dan jaringan internet 3. Penambahan alat mitigasi, seperti perahu karet.	2028	Pembuatan aplikasi EWS berbasis Android	2028	1. Sosialisasi EWS kepada masyarakat lewat media sosial atau melalui kegiatan 2. Pelatihan kepada TAGANA	2028

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 4.6 SMART ENVIRONMENT

Rencana Aksi (Renaksi) di *Smart Environment* lengkap bisa dilihat dengan tabel 4.11 dan 4.12 di bawah, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### 4.6.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Renaksi di jangka pendek (2023) dan jangka menengah (2024 – 2027) disusun di beberapa inovasi, seperti Jaringan Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup (JiRoLu), pengelolaan limbah cair domestik dan limbah tinja, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pembayaran pajak dengan sampah (Bajak Sambal Terasi). Renaksi akan dilihat di empat komponen seperti di bawah ini:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain payung regulasi di inovasi-inovasi ini, penyiapan kelembagaan yang perlu dilakukan lainnya adalah penyiapan perjanjian kerjasama dan SDM. Penyiapan kerjasama diperlukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Minimnya jumlah RTH menjadi salah satu isu urgent di Kota Mojokerto yang harus segera diselesaikan. Akan tetapi, untuk penambahan RTH, diperlukan peran serta tidak saja dari OPD, tetapi juga sektor swasta dan komunitas di masyarakat. Sedangkan di rencana revitalisasi pengelolaan limbah domestik cair, perlu juga dipersiapkan SDM yang akan menjalankan program ini baik dari *call center*, petugas yang melakukan penyedotan limbah tinja, dan yang melakukan pengolahan air limbah di IPLT. Di inovasi Bajak Sambal Terasi, diperlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), karena secara teknis program dan aplikasi dikembangkan oleh BPKPD, tetapi dalam pelaksanaan inovasi melibatkan Bank Sampah yang berada di bawah DLH.
- b. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung:** penyediaan infrastruktur fisik di rencana aksi jangka pendek dan menengah antara lain adalah pembangunan IPLT sebagai salah satu fasilitas utama yang harus dimiliki untuk pengelolaan air limbah domestik dan limbah tinja. Saat ini, Kota Mojokerto belum memiliki fasilitas ini. Infrastruktur fisik lainnya yang perlu untuk dibangun adalah RTH dan fasilitas pendukung di RTH yang diperlukan, seperti tempat bermain, toilet, tempat duduk, dan sebagainya. Untuk mendukung inovasi Bajak Sambal Terasi, infrastruktur fisik yang harus disediakan antara lain lahan di sekitar Bank Sampah untuk menyimpan hasil sampah yang sudah dipilah dan belum diolah atau

digunakan kembali. Lahan menjadi persoalan serius bagi Bank Sampah, karena 70 Bank Sampah yang ikut mendukung inovasi ini memiliki lahan yang relative sempit.

- c. **Penyediaan Perangkat Lunak:** penyediaan perangkat lunak diperlukan untuk inovasi seperti Bajak Sambal Terasi, berupa aplikasi Android. Aplikasi yang sudah terhubung dengan SISMIOP ini memungkinkan wajib pajak bisa memantau secara *real time* pajak mereka sudah dibayarkan dari saldo di Bank Sampah.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi, terutama untuk penguatan kapasitas diperlukan untuk SDM yang mengelola IPLT. Sebab, pengelolaan limbah tinja memerlukan *skill* dan adanya standar-standar yang harus dilakukan. Seperti misalnya, standar aman air hasil pengelolaan limbah ketika dibuang ke sungai atau aliran air lainnya. Jika standar-standar ini tidak dipatuhi, maka bisa membahayakan manusia, seperti misalnya adanya bakteri E. coli. Penguatan literasi, berupa pelatihan juga perlu diberikan kepada Bank Sampah untuk melakukan pemilahan dan penggunaan kembali sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah. Serta, penguatan kapasitas pengurus dalam mengelola program ini.

#### 4.6.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Renaksi jangka panjang disusun untuk tiga inovasi: restorasi DAS Brantas untuk mendukung wisata berbasis sungai, penerapan Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT), Pemantau Kualitas Air dan Udara Real Time, Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sirkular Berbasis Sampah dan Limbah, dan penyediaan *charging station* untuk mobil listrik. Berikut Renaksi yang disusun di setiap komponen:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** untuk inovasi restorasi sungai, pemerintah kota memerlukan perjanjian kerjasama dengan BBWS Brantas, karena Kota Mojokerto dilewati empat DAS Brantas dan sembilan sub-DAS Brantas. Inovasi restorasi sungai ini, juga akan menjadi daya dukung bagi pengembangan Wisata Bahari Mojopahit. Begitu juga dengan LLTT, diperlukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan swasta penyedot limbah tinja. Karena, jika LLTT dilaksanakan, bisa jadi armada truk milik pemerintah kota tidak bisa lagi melayani penyedotan limbah tinja bagi warga kota. Oleh karena itu, peran swasta dibutuhkan.

- b. **Infrastruktur Pendukung:** di komponen ini, kegiatan yang diperlukan antara lain penyediaan alat pendukung untuk restorasi sungai, mulai dari pembersihan sungai, sehingga dibutuhkan alat-alat berat. Begitu juga dengan LLTT. Jika secara rutin akan ada limbah tinja yang masuk ke IPLT setiap hari, maka diperlukan mesin untuk mengolah limbah yang masuk. Jika tidak, akan terjadi *over capacity* di IPLT, yang bisa menyebabkan dampak serius. Pelaksanaan LLTT juga memerlukan *hardware* berupa HP pintar atau tablet yang *compatible* dengan aplikasi. Penyediaan sarana fisik juga dibutuhkan untuk penyediaan charging station untuk mobil listrik di Kota Mojokerto.
- c. **Perangkat Lunak:** penyediaan perangkat lunak diperlukan adalah aplikasi untuk LLTT. Perangkat lunak juga dibutuhkan untuk inovasi pemasangan alat pemantau kualitas udara dan air (telemetering) *real time*.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi berupa sosialisasi dibutuhkan untuk semua inovasi yang diusulkan ini. Terutama, untuk inovasi LLTT. Saat ini, banyak masyarakat umum yang masih belum sadar perlunya melakukan penyedotan limbah tinja secara rutin dan terjadwal. Mereka akan melakukan penyedotan, jika WC sudah mampet. Penguatan literasi juga dibutuhkan di inovasi Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Sampah dan Limbah. Masyarakat, lewat Bank Sampah, harus diberi pelatihan dan peningkatan pengetahuan untuk melakukan ini.

Tabel 4. 11. Rencana Aksi Smart Environment Jangka Pendek & Jangka Menengah 2023 – 2027

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Perindungan Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi</li> <li>2. Dukungan alat untuk memantau kualitas udara</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan</li> </ol>	2023 - 2027
	Penambahan ruang terbuka hijau	Penambahan jumlah RTH yang mendukung KLA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan sektor swasta (CSR) dan komunitas</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi perluasan RTH</li> <li>2. Perluasan RTH dengan penanaman pohon</li> <li>3. Penambahan fasilitas fisik di RTH, seperti tempat duduk, area bermain, dan sebagainya</li> </ol>	2023 - 2024	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam penambhan RTH (penanaman pohon)</li> <li>3. RTH sebagai pusat kegiatan</li> </ol>	2023 - 2024

			pecinta lingkungan						bagi masyarakat	
<b>Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik</b>	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Revitalisasi Pengelolaan Sampah, Limbah Pada, dan Limbah Cair	1. Pembuatan regulasi pendukung 2. Pembentukan tim	2023	1. Pembangunan fasilitas fisik (IPLT) 2. Maintenance kolam-kolam pengelolaan limbah tinja di IPLT	2023 2023 - 2027	-	-	1. Sosialisasi kepada sektopr swasta (perusahaan penyedot tinja) untuk keberadaan IPLT 2. Pelatihan kepada petugas (operator) di IPLT untuk pengelolaan kolam-kolam di IPLT	2023 - 2027
	Melakukan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah	Bajak Sambal Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi)	1. Penguatan pengurus di Bank Sampah (kelurahan/RW/RT) 2. Penguatan koordinasi antara DLH dan BPKPD (pembagian tugas dan fungsi)	2023 – 2024 2023	1. Penambahan jaringan khusus server 2. Penyediaan lahan lebih luas (di Bank Sampah)	1. 2023 2. 2023 - 2027	1. Pengembangan fitur di aplikasi Bajak Sambal Terasi 2. Melakukan koneksi dengan aplikasi JiRoLu dari DLH	2023	1. Sosialisasi kepada masyarakat lewat Bank Sampah di masing-masing kelurahan/RT dan media sosial milik pemerintah kota 2. Penguatan kapasitas pengurus Bank Sampah (kelurahan/RW/RT)	2023 - 2027

Tata Kelola Energi	Pemanfaatan (pengelolaan) kembali limbah cair dan padat untuk energi baru	Penambahan Jaringan Gas Metan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan sektor swasta (perusahaan mobil)</li> </ol>	2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pembangunan</li> <li>2. Pembangunan charging station</li> </ol>	2029 - 2030	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial	2029 - 2030
--------------------	---	-------------------------------	---	------	---	-------------	---	---	--	-------------

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 4. 12. Rencana Aksi Smart Environment Jangka Panjang 2028 – 2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Perindungan Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Restorasi DAS Brantas untuk Dukung Wisata Susur Sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan BBWS</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi</li> <li>2. Dukungan alat untuk membersihkan dan restorasi sungai</li> </ol>	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan</li> </ol>	2028
	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pemantau Kualitas Udara dan Air <i>Real Time</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi pemasangan Air Quality Monitoring Station (AQMS)</li> <li>2. Pemasangan AQMS</li> </ol>	2028 - 2029	Pembuatan aplikasi/website atau konek dengan aplikasi DLH yang sudah ada agar bisa melakukan pemantauan real time dan memudahkan akses oleh masyarakat	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial atau sosialisasi secara langsung kepada lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DLH atau walikota</li> <li>2. Pelatihan kepada operator yang akan melakukan pemantauan kualitas udara</li> </ol>	2028 - 2029

<b>Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik</b>	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali atau regulasi pendukung lainnya</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan sektor swasta (perusahaan penyedotan limbah tinja)</li> <li>3. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>4. Pemetaan pelanggan di Kota Mojokerto</li> </ol>	2028 - 2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan jadwal penyedotan</li> <li>2. Penyediaan kendaraan penyedot limbah tinja</li> <li>3. Penyediaan tempat penampungan dan pengolahan limbah (IPLT)</li> <li>4. Hardware (HP pintar atau tablet) untuk pelayanan</li> <li>5. Telepon atau tempat call center</li> </ol>	2028 - 2032	Pembuatan aplikasi untuk LLTT	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Penguatan kapasitas petugas di IPLT (call center, sopir, dan tenaga penyedot)</li> </ol>	2028 - 2032
	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) dalam konsep ekonomi sirkular	Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Limbah dan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK tim</li> <li>2. Pembuatan juknis inovasi</li> <li>3. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta</li> <li>4. Koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan atau Bank Sampah</li> </ol>	2028 - 2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lokasi untuk pengelolaan sampah</li> <li>2. Pemetaan daur ulang yang mungkin dilakukan dan pembuatan strategi pemasaran</li> </ol>	2028 - 2029	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat atau Bank Sampah</li> <li>2. Pelatihan kepada masyarakat atau Bank Sampah untuk pengelolaan limbah sampah agar bernilai ekonomis</li> <li>3. Pelatihan kepada masyarakat atau Bank Sampah untuk pemasaran produk yang dihasilkan</li> </ol>	2028 - 2032
<b>Tata Kelola Energi</b>	Penyediaan infrastruktur bagi energi alternatif	Charging Station Mobil Listrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembuatan perjanjian kerjasama</li> </ol>	2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pembangunan</li> <li>2. Pembangunan charging station</li> </ol>	2029 - 2030	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial	2029 - 2030

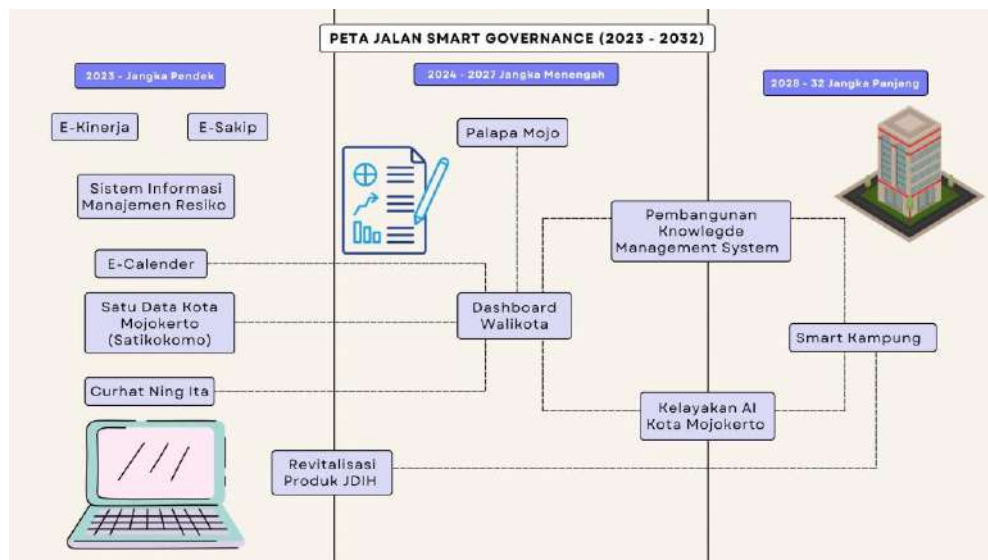
			dengan sektor swasta (perusahaan mobil)							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

**BAB V**  
**PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY***

## 6.1 SMART GOVERNANCE

Di dimensi *Smart Governance*, program-program yang akan dilaksanakan di jangka pendek dan menengah diantaranya adalah Palapa Mojo dan Curhat Ning Sistem Manajemen Risiko (Si Manko), Satu Data, Dashboard Walikota, Pengembangan Knowledge Management System (KMS), Pengembangan Kelayakan Artificial Intelligent (AI) Kota Mojokerto, dan Penyematan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk dokumen-dokumen produk hukum daerah, serta koneksi sinkronisasi dengan JDIH milik pemerintah pusat. Inovasi-inovasi yang menggunakan aplikasi atau TIK, pada umumnya tidak bisa dipisahkan dari peran Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom), yang berperan dalam pembuatan sistem atau aplikasi.



Gambar 5. 1. Peta Jalan Smart Governance Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut program-program yang akan diselenggarakan di Kota Mojokerto pada 2023 – 2027:

- a. **Curhat Ning Ita:** inovasi ini merupakan pelaksanaan dari program nasional LAPOR dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Lewat inovasi ini, warga di Kota Mojokerto dapat melakukan aduan melalui delapan kanal. Yaitu, SMS, pesan di WA, Instagram, Facebook, Twitter, website, dan mengadu secara langsung ke desk Dinas Kominfo yang terletak di Lantai 2 Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto di Jalan Gajahmada 100. Didukung oleh anggaran Rp. 135 juta pada 2023, Rp. 145 juta pada 2024, Rp. 150 juta pada 2025, Rp. 160 juta, dan Rp. 175 juta pada 2026 dan 2027, merupakan program di bawah komando Dinas Kominfo. Di inovasi ini, aduan tidak saja ditampung, tetapi juga akan dicarikan

solusi dengan diteruskan kepada OPD bersangkutan. Selain itu, Curhat Ning Ita juga menyediakan *Tim Cyber Patrol* yang bertugas untuk menyisir aduan yang beredar atau viral di media sosial selain di kanal Curhat Ning Ita.

- b. **Satu Data Kota Mojokerto:** inovasi ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto, sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan *leading sector* (wali data) Dinas Infokom dan Bappelitbangda sebagai coordinator Forum Data. Inovasi ini berupaya untuk menjadikan “satu” data sectoral yang selama ini banyak berbeda (berbagai versi). Seperti banyak daerah di Indonesia lainnya, terlepas dari inovasi ini belum memiliki pedoman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk Kota Mojokerto telah melaksanakannya.
- c. **E-SAKIP:** dibangun oleh Dinas Kominfo, e-SAKIP merupakan aplikasi yang dibangun untuk memantau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) pemerintah Kota Mojokerto. Dalam lima tahun terakhir ini, SAKIP Kota Mojokerto berada pada nilai BB, dan targetnya, dalam beberapa tahun ke depan, ingin menaikkan paling tidak menjadi A.
- d. **Penyematan TTE pada Dokumen Regulasi Daerah:** inovasi yang di bawah komando Bagian Hukum Kota Mojokerto dan didukung oleh Dinas Infokom merupakan upaya untuk melakukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Sebab, ketika Kota Mojokerto melakukan perbaikan website JDIH, website ini tidak lagi terkoneksi dengan pemerintah pusat (JDHN). Oleh karena itu, selain melakukan rekoneksi dengan JDHN, Bagian Hukum menambahkan tanda tangan elektronik (TTE) yang ramah terhadap pengguna di dokumen-dokumen produk hukum daerah yang dihasilkan.
- e. **Dashboard Walikota:** inovasi ini direncanakan untuk mempermudah walikota dalam pembuatan keputusan, karena di Dashboard Walikota ini, data-data capaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing OPD telah terpapar dengan jelas. Inovasi ini didukung oleh anggaran Rp. 162 juta pada 2023 dan 2024, dan naik menjadi Rp. 165 juta pada 2025. Pada 2026 naik menjadi Rp. 170 juta, dan Rp. 175 juta pada 2027.
- f. **Pembangunan Knowledge Management System (KMS):** inovasi yang diselenggarakan pada 2024 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan anggaran sebesar Rp. 100 juta untuk pembuatan aplikasi. Akan tetapi, untuk bisa beroperasi dengan optimal, KMS ini sendiri membutuhkan waktu beberapa tahun. KMS yang merupakan program dari Kemen PANRB, akan tetapi masih mengalami kesulitan untuk

diimplementasikan di Kota Mojokerto karena hambatan *mindset* SDM di pemerintah kota. Meskipun dianggarkan hanya di 2024, program akan berlanjut sampai dengan jangka panjang (2028 – 2032).

- g. **Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto:** inovasi yang diiniasi oleh Dinas Kominfo ini akan mulai dilaksanakan pada 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 200 juta. Program ini juga akan dilanjutkan pada jangka panjang (2028 – 2032).

Inovasi-inovasi yang dilakukan di jangka panjang (2028 – 2032), diantaranya meliputi *Smart Kampung*. Inovasi ini dilakukan dengan melibatkan 18 kelurahan yang ada di tiga kecamatan di Kota Mojokerto. Dengan berbekal tidak kurang dari 220 titik wifi gratis di Kota Mojokerto, sudah semestinya fasilitas ini dimanfaatkan dengan optimal, terutama untuk program yang berpusat di tingkat kelurahan. Di dalam inovasi *Smart Kampung* ini, selain revitalisasi Perpustakaan di kelurahan, beberapa pelayanan sudah bisa dilaksanakan di kelurahan, seperti layanan NIB dan layanan kependudukan. Di jangka pendek dan menengah ini, untuk pelayanan NIB sudah mulai dilaksanakan di kelurahan dengan Program Jempol Mempesona, yang nantinya juga akan ditambahkan layanan berupa klinik OSS dan *call center*. Selain itu, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di jangka panjang merupakan kelanjutan di jangka menengah, seperti KMS dan Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto.

Tabel 5. 1. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik	Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase layanan yang terintegrasi	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Mojokerto Smart City (Palapa Mojo) Pelayanan Publik Terpadu Kota Mojokerto	30%	162	60%	162	100%	162	-	-	-	-	APBN	Diskominfo
	Melakukan optimalisasi pelayanan publik yang tersedia untuk meningkatkan kepuasan masyarakat	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengaduan publik yang terselesaikan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Cuhat Ning Ita	85%	135	90%	145	90%	150	90%	160	90%	175	APBN	Diskominfo
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Program penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	Nilai Kapabilitas APIP	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Si Manko (Sistem Informasi Manajemen Risiko)												Inspektorat
	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	1. Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi/kegiatan pendampingan dan asistensi 2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 3. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2. MRI dan Kapabilitas APIP 3. Nilai SAKIP	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	SimHP (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan)												Inspektorat
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan statistik sektoral di	Jumlah layanan yang sudah diintegrasikan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	E-Calender	1 aplikasi	27 juta										

		lingkup daerah kabupaten/kota 3. Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota 4. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan																
	Mendorong penggunaan Satikomo bagi OPD untuk mempublikasi data statistik sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pengembangan Satu Data Kota Mojokerto												Disko minfo	
	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan E-SAKIP	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dialokasikan anggaran, dibuat oleh Disko minfo	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Program Kepegawaian Daerah/Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis atas kesenjangan kinerja	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	e-Kinerja	1 aplikasi	48.49 6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Bagian Organisasi
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Program Kepegawaian Daerah/Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang melaksanakan budaya berbagi pengetahuan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pembangunan Knowledge Management System (KMS)	-	-	1 aplikasi	100 juta									Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Efisiensi Kebijakan Publik</b>	Melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap program pembentukan dan diseminasi produk hukum daerah secara online	1. Program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat 2. Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum yang terfasilitasi	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Revitalisasi JDIH (Penyematan TTE pada Produk Hukum)	Integrasi produk hukum Pemerintah Kota Mojokerto dengan JDIHN; Penyematan TTE pada Produk Hukum;	-	Peningkatan partisipasi stakeholder JDIH; penjangkaran aspirasi pembentukan produk hukum daerah	-	Produk hukum braille, produk hukum bahasa isyarat	-	Produk hukum terpihah dan kompilasi	-	Penyusunan produk hukum digital sepenuhnya	-	-	Tidak dialokasikan anggaran, dibuat oleh Disko minfo	Bagian Hukum, Disko minfo

	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya database capaian kinerja Perangkat Daerah	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Dashboard Walikota	60%	162	65%	162	70%	165	75%	170	100%	175	APBN	Disko minfo
	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya database capaian kinerja Perangkat Daerah dan big data kota mojkerto	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan Kelayakan AI Kota	-	-	-	-	-	-	50%	200 juta	100%	200 juta	APBD	Disko minfo

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

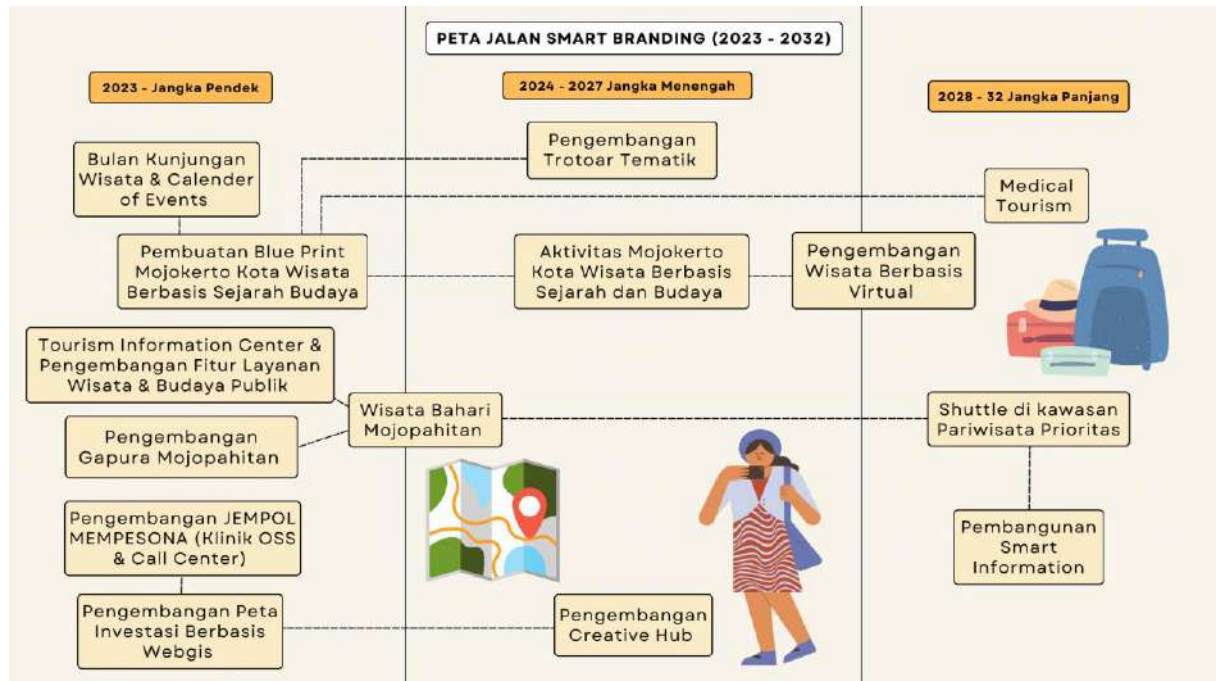
Tabel 5. 2. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik	Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentasi pengguna layanan publik	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Smart Kampung	1 Kelurahan	200 juta	3 Kelurahan	200 juta	6 Kelurahan	200 juta	3 Kelurahan	200 juta	10 Kelurahan	200 juta	AP BD	Diskominfo, DPMPPT SPNAKER, Dispenduk
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Program Kepegawaian Daerah/Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang melaksanakan budaya berbagi pengetahuan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pembangunan Knowledge Management System (KMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
Efisiensi Kebijakan Publik	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database capaian kinerja Perangkat Daerah dan big data kota Mojokerto	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan Kelayakan AI Kota	100%	200 juta	100%	200 juta	-	-	-	-	-	-	AP BN	Diskominfo

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 1.2 SMART BRANDING

Di *Smart Branding*, beberapa inovasi yang rencana akan dilaksanakan di Kota Mojokerto banyak dilatar belakangi oleh miskinnya daerah ini oleh potensi pariwisata alam. Beberapa inovasi yang rencana dilakukan antara lain: Wisata Bahari Mojopahit, pembuatan bulan kunjungan pariwisata, pembuatan profil investasi berdasarkan pada WebGIS, pembuatan trotoar tematik, dan pengembangan program Jempol Mempesona.



Gambar 5. 2. Peta Jalan Smart Branding Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut inovasi-inovasi yang rencana akan dilaksanakan pada kurun waktu 2023 – 2027 (tabel 5.3):

- Wisata Bahari Mojopahit:** rencana untuk dibangun di Kelurahan Rejoso, inovasi ini bertujuan untuk “membangkitkan” kembali *spirit of Mojopahit* untuk pengembangan destinasi wisata non-alam ini. Karena menggunakan Sungai Brantas sebagai pusat destinasi ini, pemerintah kota tidak saja melibatkan instansi/OPD di bawah pemerintah kota (Bappelitbangda, DLH, Dinas PUPERAKIM, Dinas Koperasi, UKM, dan Indag), tetapi juga dengan BBWS Brantas dan juga sektor swasta. Diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp. 36.476.496.000, 00, inovasi ini rencana akan dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Di lokasi ini akan dilengkapi dengan plaza bahari, tempat pertunjukan, perahu, dan juga UKM center.

- b. **Tourism Information Center (TIC):** merupakan penyediaan data dan informasi pariwisata berupa titik lokasi destinasi pariwisata di Kota Mojokerto beserta sarana pendukung yang kemungkinan dibutuhkan oleh wisatawan dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkatnya. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan sehingga bisa menjadi salah satu bagian dari infrastruktur Wisata Bahari Mojopahit. Di bawah *leading sector* Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, inovasi ini dilaksanakan pada 2023 dan 2024, dengan anggaran Rp. 37 juta di tahun pertama, dan Rp. 20 juta di tahun kedua untuk penambahan fitur di aplikasi.
- c. **Pembuatan Bulan Kunjungan Wisata:** saat ini Kota Mojokerto telah memiliki beberapa agenda kegiatan pariwisata, seperti Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pentas Seni Budaya Daerah di TMII, Apeksi Regional, Apeksi Nasional, dan Jatim Specta. Akan tetapi, sayangnya, event-event yang ada ini belum terintegrasi. Dalam pembuatan event dan bulan promosi kunjungan wisata ini, idealnya Kota Mojokerto juga melakukan koordinasi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, untuk membuat rangkaian kegiatan bersama. Di bawah *leading sector* Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1,9 milyar dalam satu tahun untuk menyelenggarakan sembilan *events*.
- d. **Pembuatan dan Aktivasi *Blue Print* Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya:** rangkaian kedua kegiatan ini dilaksanakan mulai 2023 untuk pembuatan *blue print*, dan aktivasi yang dilaksanakan pada 2024 – 2026. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100 tiap tahun dari 2024 sampai dengan 2026.
- e. **Pembuatan Profil Investasi berbasis WebGIS (Project Prospectus Wisata):** dikomando oleh Dinas DPMPSTNAKER, inovasi ini berupaya untuk memberikan gambaran potensi investasi di Kota Mojokerto dengan menggunakan GIS. Sehingga, investor memiliki gambaran lebih jelas dan berdasarkan *real time* untuk kondisi potensi inovasi di Kota Mojokerto. Profil Investasi Kota berupa penyusunan peta potensi investasi yang berisi tentang potensi dan peluang investasi dilihat dari beberapa sektor yang disajikan dengan memaksimalkan penggunaan peta. Sehingga, penyajian datanya menjadi lebih komunikatif dan menarik. **Project Prospectus Wisata** merupakan pengembangan dari peta potensi investasi khusus untuk pengembangan

pariwisata di Kota Mojokerto yang berisi berisi profil wisata, *master plan*, sampai dengan analisis keuangan secara lengkap untuk kelayakan investasi.

- f. **Pembangunan Trotoar Tematik:** menindaklanjuti upaya Kota Mojokerto untuk mengembangkan perwajahan kota yang menonjolkan nilai ke"Mojo pahitan" lewat pembuatan gapura Mojo pahitan, pembangunan trotoar tematik menjadi agenda selanjutnya. Inovasi ini sangat ideal dikembangkan di Kota Mojokerto mengingat luasan kota yang hanya sekitar 20 km<sup>2</sup>. Inovasi ini mulai dilaksanakan pada 2024, dengan *leading sector* Dinas PUPERAKIM. Pelaksanaan inovasi ini juga akan melibatkan komunitas kreatif di Kota Mojokerto.
- g. **Pengembangan Jempol Mempesona:** merupakan singkatan dari Jemput Bola Memberikan Pelayanan Sistem OSS (NIB) Tanpa Biaya), inovasi ini telah mampu memberikan layanan perizinan di tingkat kelurahan. Ke depan, inovasi ini dikembangkan tidak saja memberikan layanan perizinan, tetapi juga akan memberikan pendampingan OSS kepada para pengusaha di tingkat kelurahan dengan menyediakan satu orang personel, dan juga menyediakan call center yang siap sedia memberikan layanan konsultasi ataupun jika ada pengusaha mengalami hambatan perizinan. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 45 juta, dan dilaksanakan pada 2023.
- h. **Pembuatan Creative Hub Kota Mojokerto:** inovasi yang diselenggarakan dengan *leading sector* DPMPSTNAKER mulai dilaksanakan pada 2023 dengan anggaran Rp. 4 Milyar. *Creative Hub* ini tidak saja menyediakan *co-working space*, tetapi merupakan sarana berkumpulnya komunitas kreatif di Kota Mojokerto dan membuat kegiatan bersama serta menjadi *show case* karya mereka. Kegiatan ini tidak saja terbatas di jangka menengah, tetapi juga akan dilanjutkan di jangka panjang.

Di jangka panjang (2028 – 2032), seperti yang disajikan di tabel 5.4, inovasi yang akan dilaksanakan diantaranya pengembangan wisata berbasis *reality virtual*, pengembangan *creative hub* Kota Mojokerto, penyediaan *shuttle* di kawasan destinasi wisata prioritas, *medical tourism*, dan pembuatan *Smart Information Sign* atau petunjuk arah pintar. *Medical tourism* merupakan kegiatan yang dikembangkan oleh RSUD Dr. Wahidin, yang mengkolaborasikan antara layanan Kesehatan dan wisata. Misalnya, ketika *customers* (pasien) melakukan check-up Kesehatan atau perawatan, maka disediakan layanan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kota Mojokerto dan di wilayah sekitarnya.

Tabel 5. 3. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
						2023		2024		2025		2026		2027				
						Target Kinerja	Angg. .	Target Kinerja	Angg. .	Target Kinerja	Angg. .	Target Kinerja	Angg. .	Target Kinerja	Angg. .			
Ekosistem Pariwisata	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Tourism Information Centre (TIC) dan Pengembangan Fitur Layanan Rekreasi Publik dan Budaya Daring	1 dokumen	37.000.000	Penambahan fitur di TIC	Rp. 20 juta	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPAPAR	
	1. Penambahan dan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru 2. Melakukan kerjasama dengan investor untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari Mojopahit	1. Jumlah destinasi wisata baru yang terbangun 2. Jumlah kunjungan wisata ke Kota Mojokerto	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Wisata Bahari Mojopahit	1 Kawasan	36.476.496.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAK	DISPOPAPAR DISKOPUKM PERINDAG, DLH, DPUPERAKIM, BBWS, BAPPELITBANGDA
	Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholders di bidang pariwisata untuk pembuatan kalender event wisata terintegrasi	Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pentas Seni Budaya Daerah di TMII, Apeksi Regional, Apeksi Nasional, Jatim Specta	1. Jumlah event yang diselenggarakan 2. Jumlah kunjungan wisatawan	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Bulan Kunjungan dan Promosi Wisata	9 events	1.664.539.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPAPAR

	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah destinasi wisata baru yang terbangun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Penyusunan Blueprint Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya	1 dokumen blueprint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPAPAR
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah destinasi wisata baru yang terbangun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aktivitas City Branding Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya	-	-	100 juta	-	100 juta	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPAPAR
<b>Membangun Daya Saing Bisnis</b>	Pembuatan kebijakan untuk menarik investasi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah dokumen informasi potensi investasi	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pengembangan Profil Investasi Kota Mojokerto (Peta potensi berbasis WebGIS, Project Prospectus Wisata)	1 Dokumen	190.011.652									APBD	DPMPPTSPN AKER
	Meningkatkan kualitas pelayanan investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi dengan pengembangan Jempol Mempesona	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	1. Jempol mempesona (dikembangkan menjadi klinik pendampingan OSS) 2. Call Center Perizinan	500 kegiatan usaha	45.844.900									APBD	DPMPPTSPN AKER

	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah investor/ startup yang memanfaatkan fasilitas layanan investasi		Pengembangan Mojokerto Creative Hub	1 lokasi	-	1 lokasi	4 milyar	1 lokasi	4 milyar	1 lokasi		1 lokasi		APBD	DPMPTSPN AKER
Wajah Kota	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Pengembangan Trotoar Tematik	Jumlah landmarks kota yang terbangun	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan Trotoar Tematik	-	-	1 kawasan	-	1 kawasan	-	1 kawasan	-	-	-	-	DPUPERAKIM
	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Gapura Majapahitan	Jumlah Gapura Majapahitan yang terbangun	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Gapura Majapahitan												DPUPERAKIM

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

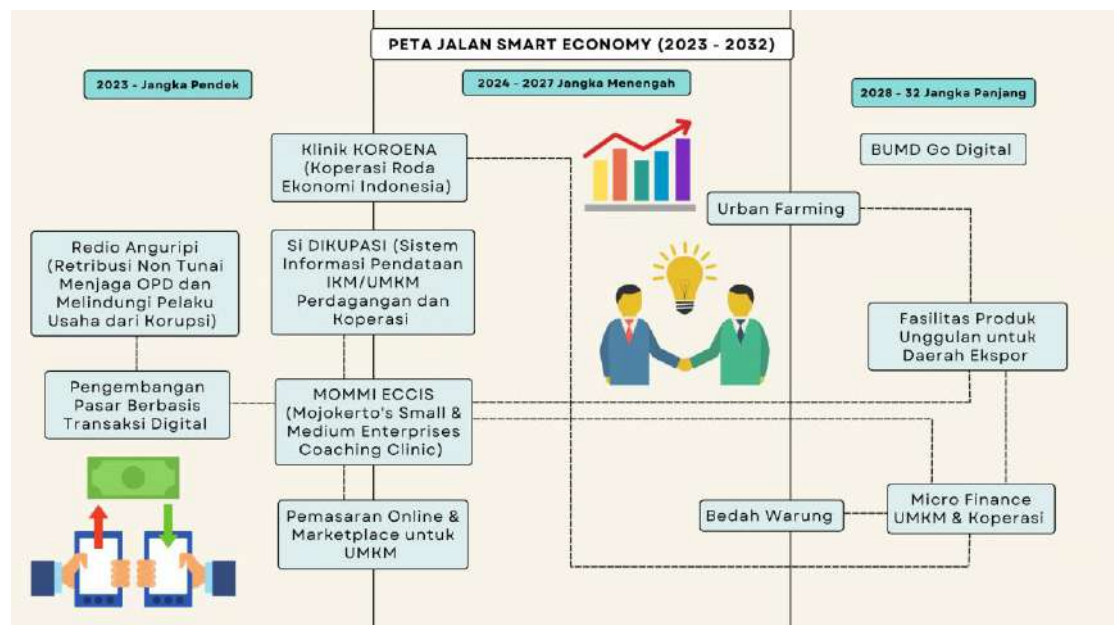
Tabel 5. 4. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
<b>Ekosistem Pariwisata</b>	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan	Pengembangan Wisata berbasis Virtual Reality	1 Lokasi Wisata	250 juta	2 Lokasi Wisata	250 juta	3 Lokasi Wisata	250 juta	-	-	-	-	APBD	Dispora, Diskominfo
Membangun Daya Saing Bisnis	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah investor/ startup yang memanfaatkan fasilitas layanan investasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Pembangunan Co-Working Space	1 Lokasi	4 Milyar	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DPMP TSP NAKER
<b>Wajah Kota</b>	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota berbasis TIK	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan	Pembangunan Smart Information Sign (Penunjuk arah pintar)	1 Lokasi	100 juta	2 Lokasi	200 juta	3 Lokasi	200 juta	-	-	-	-	APBD	DPUPRPE RAKIM, DISHUB, DISKOMINFO

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 2.2 SMART ECONOMY

Inovasi-inovasi yang rencana dilakukan di *Smart Economy* antara lain pengembangan urban farming (pertanian perkotaan), SI DIKUPASI (Sistem Informasi Pendataan IKM/UMKM Perdagangan dan Koperasi), pembayaran retribusi non-tunai Redjo Angurupi, Koperasi Roda Ekonomi Indonesia (KOROENA), dan MomMI ECCIS (Mojokerto's Small & Medium Enterprises Coaching Clinics).



Gambar 5. 3. Peta Jalan Smart Economy Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut inovasi-inovasi yang dikembangkan pada 2023 – 2027 di Kota Mojokerto (lengkap di tabel 5.5):

- a. **Urban Farming:** pertanian daerah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan sempit merupakan inovasi ideal untuk daerah urban seperti Kota Mojokerto yang memiliki lahan sempit. Tidak saja ini bisa menjadi alternatif untuk intensifikasi pertanian, tetapi juga bisa menjadi strategi untuk menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang. Targetnya, program ini tidak saja bisa mencukupi konsumsi rumah tangga, tetapi produknya bisa dijual di supermarket. Didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 115 juta pada 2023.
- b. **SI DIKUPASI:** merupakan inovasi di bawah Dinas Koperasi, UKM, dan Indag, merupakan inovasi berwujud aplikasi android yang di dalamnya telah ada

database UKM dan UMKM di Kota Mojokerto. Data yang masuk didalamnya termasuk nama usaha, aset, legalitas, kapasitas produk, dan sebagainya. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 150 juta.

- c. **Redjo Anguripi**: singkatan dari Retribusi Non Tunai Menjaga OPD dan Melindungi Pelaku Usaha dari Korupsi, Redjo Anguripi merupakan inovasi yang digagas oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Indag. Program yang ditujukan kepada para pedagang pasar, saat ini masih dilaksanakan di satu pasar (Tanjung Anyar), dan akan dilaksanakan di lima pasar lainnya. Dilaksanakan sederhana menggunakan tapping mesin, autodebit di rekening, atau QRIS, harapannya akan mencegah terjadinya korupsi (penggelapan) uang retribusi pedagang pasar ketika masih dikumpulkan dengan manual (dibayar *cash*).<sup>3</sup>
- d. **MomMI ECCIS**: merupakan gagasan asli yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan layanan bidang ekonomi dalam memberdayakan UMKM dan wirausaha baru dari inkubasi. Inovasi ini menampung semua permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM termasuk wirausaha baru yang lahir dari program Inkubasi di 2021. Guna mendukung pembinaan terhadap UMKM, MomMi ECCIS sudah didukung oleh aplikasi. Di 2021, dari 4.479 Usulan Wirausaha Baru dari program Inkubasi dengan 17 Jenis Usaha, 1.903 telah terfasilitasi dan terdampingi. Sedangkan di 2022 mentargetkan 2.041 Usulan Wirausaha Baru dari program Inkubasi dengan 4 Jenis Usaha untuk bisa terfasilitasi di MomMi ECCIS.
- e. **Klinik Koperasi Roda Ekonomi Indonesia (KOROENA)**: merupakan inovasi digawangi oleh Dinas Koperasi UMKM, Industri, dan Perdagangan. Inovasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah koperasi di Kota Mojokerto yang memiliki status sehat dengan memberikan konsultasi atau klinik pelatihan. Saat ini, dari 187 koperasi yang ada di Kota Mojokerto, hanya 19 koperasi dalam kategori 'sehat.' Inovasi ini akan diselenggarakan pada 2023 sampai dengan 2025, dengan sasaran sebanyak 90 koperasi pada 2023 (Rp. 236 juta), 130 koperasi di 2024 dengan dukungan anggaran Rp. 260 juta, dan 180 koperasi di 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 280 juta.

Di jangka panjang, beberapa inovasi yang dirancang antara lain (di tabel 5.6), beberapa inovasi yang diselenggarakan antara lain:

---

<sup>3</sup> <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/379887/launching-e-retribusi-rejo-anguripi-upaya-digitalisasi-pemkot-mojokerto-cegah-korupsi>

- a. **Pengembangan Microfinance UMKM:** merupakan rencana program di jangka panjang yang dilaksanakan pada 2028 – 2029. Program yang direncanakan tidak saja dibiayai dari APBD, tetapi juga dari bantuan zakat, infaq, dan shodaqoh (melalui BAZNAS) akan menyasar 500 pengusaha pada 2028, dan 1.000 pengusaha pada 2029. Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 500 juta di tahun pertama, dan Rp. 1 miliar di tahun kedua.
- b. **Fasilitasi Pengusaha UKM dan UMKM Tembus Pasar Ekspor:** Kota Mojokerto merupakan salah satu sentra industri kecil di bidang alas kaki (sepatu dan sandal). Para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto telah menjadi produsen untuk produk-produk alas kaki di Matahari, seperti Fladeo. Oleh karena itu, di 2028, pemerintah kota ingin melakukan fasilitasi industri-industri unggulan Kota Mojokerto untuk tidak saja menjadi produsen untuk produk-produk yang dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, perlu untuk difasilitasi untuk jaringan dengan eksportir dan asosiasi pengusaha.
- c. **Pengembangan Urban Farming:** *urban farming* tidak saja sebatas program di jangka menengah, tetapi juga di jangka panjang. Di periode ini, urban farming sudah dikembangkan dengan melibatkan sekolah-sekolah di Kota Mojokerto. Pengenalan pertanian urban kepada siswa-siswa sekolah ini juga bisa bertujuan menumbuhkan kecintaan anak-anak sekolah terhadap pertanian. Sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk menciptakan petani-petani muda di Kota Mojokerto.

Tabel 5. 5. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Industri Berdaya Saing	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Urban Farming	-	-	-	-	70%	115 juta	80%	115 juta	90%	115 juta	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sektor Swasta
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional/ Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	Pengembangan SI DIKUPASI (Sistem Informasi Pendataan IKM/UMKM Perdagangan dan Koperasi)	80%	200 juta	80%	225 juta	80%	250 juta	80%	275 juta	80%	300 juta	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah WUP & UMKM yang difasilitasi Coaching Clinic	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	MomMI ECCIS (Mojokerto's Small and Medium Enterprises Coaching Clinic)	120 pelaku usaha (WUP dan UMKM)	55 juta	180 pelaku usaha	75 juta	240 pelaku usaha	100 juta	300 pelaku usaha	150 juta	320 pelaku usaha	175 juta	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kesejahteraan Masyarakat	Penerapan kebijakan pro-poor	Program Bedah Warung	Jumlah wirausaha baru yang muncul	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	Bedah Warung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Kelurahan	Bagian Perekonomian, Kelurahan

	Penerapan kebijakan pro-poor	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan omzet koperasi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	KLINIK KOROENA (Koperasi Roda Ekonomi Nasional)	90 koperasi	236.981.465	130 koperasi	260 juta	180 koperasi	280 juta	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
<b>Transaksi Keuangan</b>	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	REDJO ANGURIPI (Retribusi Non Tunai Menjaga OPD dan Melindungi Pelaku Usaha dari Korupsi)	500 pedagang (Tematik, Krangan, Prapurna, Ketidur, Kliwon)	150 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan omzet usaha mikro	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Pemasaran Online (griyaumkm.com, e-marketplace dengan Tokopedia, Shopee, dsb)	2% dari total total UMK M)	150 juta	3%	100 juta	4%	100 juta	5%	100 juta	6%	100 juta	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Pengembangan Pasar berbasis Transaksi Digital/ Mljo Online - e-marketplace	1 pasar	150 juta	2 pasar	150 juta	-	-	-	-	-	-	APBD, CSR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

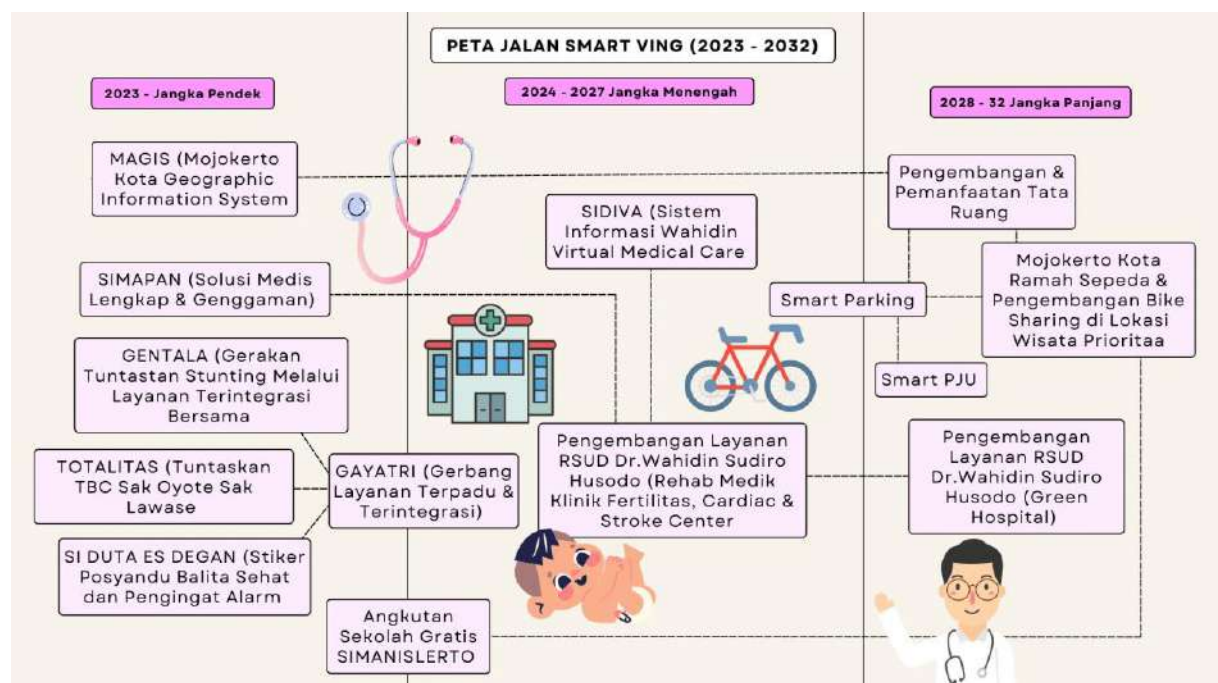
Tabel 5. 6. Peta Jalan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Industri Berdaya Saing	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah produk unggulan yang di ekspor	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Fasilitasi ekspor produk unggulan	1000 pengusaha	50 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Kerjasama
	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	20.1. Persentase anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Urban Farming	100%	100 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sektor Swasta
Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi UKM dan UMKM untuk sertifikasi usaha dan akses permodalan	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Masyarakat miskin yang di dibantu	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pengembangan Microfinance untuk UMKM dan Koperasi Kota Mojokerto	500 pengusaha	500 juta	1000 pengusaha	1 Milyar	-	-	-	-	-	-	APBD, Bantuan Zakat, Infaq, Sodaqoh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Baznas
Transaksi Keuangan	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pengelolaan BUMD	Jumlah BUMD yang menerapkan transaksi elektronik	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	BUMD GO DIGITAL	1 BUMD	300 juta	1 BUMD	300 juta	-	-	-	-	-	-	APBD, CSR	Bagian Perekonomian

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 2.3 SMART LIVING

Inovasi-inovasi yang dikembangkan di *Smart Living* antara lain MAGIS – Mojokerto Kota *Geographical Information System*, pengembangan GAYATRI, inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas seperti GENTALA untuk pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, POS TENSI OYE SIP untuk pengendalian hipertensi dan PTM lainnya, dan tiga inovasi dari RSUD Dr. Wahidin yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien, SIMAPAN, SIDIVA, dan Pengembangan Layanan di Rumah Sakit. Di bidang transportasi, Dinas Perhubungan merencanakan untuk pengembangan inovasi SIMANISKERTO – yang merupakan penyediaan transportasi gratis kepada anak sekolah.



Gambar 5. 4. Peta Jalan Smart Living Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Living* di 2023 – 2027:

- MAGIS – Mojokerto Kota Geographical Information System:** merupakan inovasi yang diiniasi oleh Bappelitbangda dan Dinas PUPERAKIM. Inovasi ini merupakan penyediaan informasi spasial yang berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan data *real time*, pengambilan kebijakan bisa dilakukan dengan lebih tepat karena sesuai dengan kewilayahan atau situasi saat itu (<http://magis.mojokertokota.go.id:4138/public/>). Inovasi ini juga

berguna untuk memberikan informasi terkait zonasi, yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Pada 2023, inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 60 juta.

- b. **Pengembangan GAYATRI - Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi**, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejak 2020. Di dalam *dashboard* GAYATRI ini terdapat dua menu utama: untuk masyarakat dan pemerintah daerah. GAYATRI merupakan upaya konkret pemerintah Kota Mojokerto memfasilitasi warga masyarakat untuk aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu contoh adalah masyarakat yang ingin berobat, hanya tinggal mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di GAYATRI ini. Karena, sebelum adanya GAYATRI ini, sering ada antrian panjang untuk berobat di Puskesmas. Selain itu, fitur seperti family folder, cek status kesehatan, pemeriksaan, dan kontrol penyakit, juga tersedia. Masyarakat juga bisa melakukan komunikasi dua arah penanganan Covid-19. Sedangkan untuk pemerintah daerah, inovasi ini berguna untuk membantu dalam pembuatan kebijakan karena situasi Kesehatan warga bisa dipantau secara *real time*. Misalnya, terkait dengan *stunting*. Pada 2023, pengembangan inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 37 juta, dan pada 2024, juga didukung oleh anggaran yang sama jumlahnya, Rp. 37 juta.
- c. **POS TENSI YES OKE SIP** - merupakan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Blooto, yang diselenggarakan untuk pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM). Ke depan, berpotensi menjadi *double burden* untuk biaya kesehatan di Indonesia, sudah saatnya PTM menjadi perhatian serius mulai dari tingkat Puskesmas.
- d. **SIMPAN – Solusi Medis Lengkap Dalam Genggaman**, merupakan inovasi yang diajukan oleh RSUD Dr. Wahidin. Inovasi yang sebelumnya hanya digunakan untuk pendaftaran calon pasien karena ada persoalan antrian panjang di pendaftaran. Saat ini akan dikembangkan kepada pelayanan lainnya, seperti pembuatan janji dengan dokter spesialis. Dengan adanya fitur ini, pasien tidak saja bisa memotong antrian pendaftaran, tetapi juga bisa memotong prosedur tidak perlu pergi ke poli umum, tetapi langsung ke poli spesialis. Inovasi ini juga didukung layanan pengantaran obat gratis bagi para pasien yang tinggal di dalam Kota Mojokerto. Di 2023, inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50 juta.
- e. **SIDIVA – Sistem Informasi Wahidin Medical Virtual Care**, merupakan inovasi lain yang dilakukan oleh RSUD Dr. Wahidin. Di 2022 ini, inovasi ini

masih dalam tahap pembangunan, dan rencana akan di-launching pada 2023. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50 juta.

- f. **SIMANISKERTO - Angkutan Sekolah Gratis** – penyediaan angkutan umum yang nyaman dan layak menjadi masalah di hampir daerah perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Mojokerto. Sebagai langkah awal penyediaan transportasi yang layak ini, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto menginisiasi inovasi SIMANISKERTO, yaitu dengan menyediakan angkutan sekolah gratis. Karena Dinas Perhubungan hanya memiliki tiga buah armada bus, dan tidak cukup untuk melayani seluruh wilayah daerahnya, Dinas Perhubungan kemudian juga mengandeng armada angkutan umum (mikrolet). Saat ini, kerjasama dilakukan dengan 11 armada mikrolet, dan angkutan gratis disediakan selama jam pergi (pagi) dan pulang sekolah (siang hari). Di 2023 dan 2024, inovasi ini akan mengembangkan rute dan juga aplikasi yang ada, dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2 miliar pada 2023 dan juga Rp. 2 miliar pada 2024.
- g. **Pengembangan Layanan RSUD Dr. Wahidin:** inovasi yang dikembangkan pada 2023 – 2025 ini terdiri dari beberapa tahapan. Pengembangan *electronic medical records* akan dilaksanakan pada 2023 dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1 Milyar; disusul dengan pengembangan Gedung Rehab Medik Terpadu pada 2024 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 11 Milyar. Dan, di 2025, dilakukan dua pengembangan berupa Klinik Fertilitas dan Stroke & Cardiac Clinic. Pengembangan kedua layanan ini dibiayai oleh anggaran sebesar Rp. 82 Milyar.
- h. **Smart Parking:** sistem parkir pintar ini dikembangkan oleh Dinas Perhubungan pada 2023 – 2027. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan di jangka panjang dengan menambahkan aplikasi *Smart Parking* untuk semakin memudahkan pengguna untuk mencari parkir di tempat yang mereka kehendaki.

Untuk jangka panjang, di dimensi *Smart Living* ini, beberapa program yang ingin dikembangkan oleh Kota Mojokerto meliputi pemanfaatan tata ruang, pengembangan aplikasi Smart Parking, *Smart PJU*, dan pengembangan Kota Mojokerto sebagai kota ramah sepeda (tabel 5.8).

- a. **Smart PJU (Penerangan Jalan Umum):** merupakan program yang direncanakan di jangka panjang (2028 – 2032). Di program ini, 50 unit PJU pintar akan terbangun dalam kurun waktu lima tahun. Setiap tahunnya, Dinas Perhubungan menganggarkan Rp. 700 juta. Dengan penggunaan *Smart PJU*

ini, harapannya bisa dilakukan penghematan biaya listrik karena kekuatan nyala lampu bisa diatur sesuai dengan situasi dan kebutuhan di jalan saat itu, dan penghematan biaya perawatan PJU.

- b. **Mojokerto Kota Ramah Sepeda:** sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia, Kota Mojokerto bisa menjadi satu *protipe* penerapan kota yang ramah sepeda di Indonesia. Inovasi ini tidak saja mampu menyediakan sarana transportasi yang ramah lingkungan, tetapi juga bisa menjadi salah satu atraksi bagi para wisatawan atau pengunjung di Kota Mojokerto. Pengembangan Mojokerto sebagai kota ramah sepeda ini dilakukan pada 2028 dan 2029, dengan alokasi anggaran di tiap-tiap tahun. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan swasta atau komunitas. Pengembangan kota yang ramah sepeda ini juga didukung oleh penyediaan *bike sharing* di lokasi-lokasi destinasi wisata prioritas.
- c. **Pengembangan Rumah Sakit RSUD Dr. Wahidin:** inovasi ini dilaksanakan pada 2028 – 2029, dengan melakukan pengembangan Gedung Pendidikan Terpadu di 2028 didukung oleh anggaran Rp. 40 Milyar, dan pengembangan green hospital pada 2029 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar.

Tabel 5. 7. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan informasi geospasial	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	MAGIS (Mojokerto Kota Geographic Information System)	7 Dashboard peta analisa	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Bappedalitbang dan Dinas PUPERAKIM
<b>Sarana Prasarana Kesehatan</b>	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial 90%  AKI per 100.000 KH (target: < 94.6 per 100.000 KH) AKB per 1.000 KH (target: < 4,22 per 1.000 KH)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan  11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pengembangan GAYATRI (Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi)	1 paket	37.621.045.710,47	1 paket	37.621.045.710,47	-	-	-	-	-	-	DBHCHT, DID	Dinkes PPKB
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting balita 5,04%	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	GENTALA (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama) (Puskesmas Blooto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes PPKB

	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	AKI per 100.000 KH (target: < 94.6 per 100.000 KH)  AKB per 1.000 KH (target: < 4.22 per 1.000 KH)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SI DUTA ES DEGAN (Stiker Posyandu Balita Sehat Dan Pengingat Alarm Kentongan) (Puskesmas Blooto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes PPKB	
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk target 265 per 100.000 penduduk	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	TOTALITAS (Tuntaskan TBC sak Oyote Sak Lawase) (Puskesmas Blooto)												Dinkes PPKB	
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) target 50 per 1.000 Penduduk	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 143ublic143ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 143ublic143ka	POS TENSI OKE OYE SIP (Program sadar tensi dengan prolanis, perkesmas, kartu & kantong tensi, konsultasi gizi dan farmasi kampanye gernas & skrining PTM) (Puskesmas												Dinkes PPKB	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 143ublic143ka terpadu daring yang dapat diakses oleh	SIMPAPAN (Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman)	1 paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dana BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota	BLUD RSUD Dr..Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

				<p>penyedia layanan 144ublic144ka</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p>													Mojokerto		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	<p>11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 144ublic144ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 144ublic144ka</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p>	SIDIVA (Sistem Informasi Wahidin Virtual Medical Care)	-	-	1 paket	50.000.000									Dana BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan kualitas layanan (diukur dari IKM)	<p>11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 144ublic144ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 144ublic144ka</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p>	Pengembangan Layanan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	1 Paket (Transformasi Digital dengan Elektronik Medical Record)	Rp. 1 Milyar	1 paket Gedung Rehab Medik Terpadu	Rp. 11 M	3 Paket (Klinik Fertilitas, Cardiac dan Stroke Center, Pengembangan Poli Eksekutif)	Rp. 82 M	-	-	-	-	-		Dana BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

					Eksektif (2025)												
Sarana Transportasi	Mengembangkan layanan transportasi umum yang nyaman dan berkualitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk  19.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	Angkutan Sekolah Gratis (Pengembangan Rute dan Aplikasi SIMANISKE RTO)	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	-	-	-	-	DAU	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir	19.7. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan 145system pembayaran elektronik  19.8. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan 145system ketersediaan parkir langsung (real-time)	Smart Parking	1 dokumen	Rp. 300 juta	1 regulasi	Rp. 200 juta	1 titik	Rp 1 M	1 titik	Rp. 1 M	1 titik	Rp. 1 M	DAU	Dinas Perhubungan

Tabel 5. 8. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

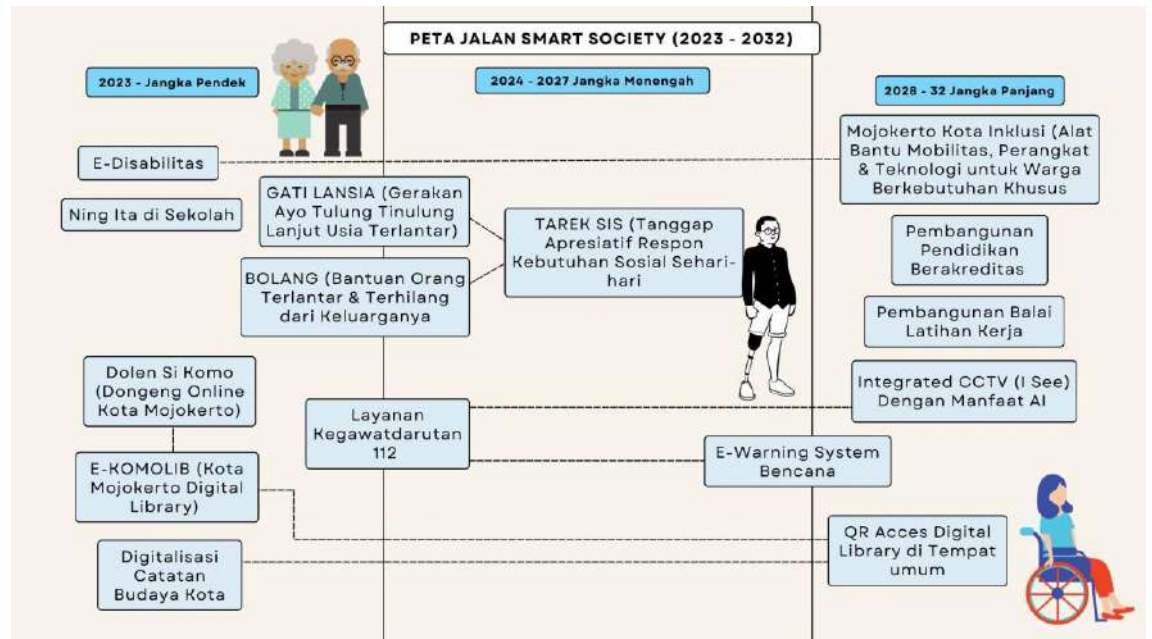
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan informasi layanan tata ruang	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Pengembangan Layanan Pemanfaatan Tata Ruang	1 Aplikasi	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas PU PERAKIM
<b>Sarana Prasarana Kesehatan</b>	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Elektronik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 146public 146ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 146public 146ka  11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pengembangan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Gedung Terpadu RS Terpadu di Green Hospital di 2029)	1 Paket (Gedung Terpadu Rumah Sakit Pendidikan)	Rp. 40 M	1 paket Green Hospital	Rp. 5 M	-	-	-	-	-	-	Dana BLU RSUD	RSUD Dr. Wahidin

Sarana Transportasi	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah Smart PJJ	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Smart PJJ	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase jalan di Kota Mojokerto yang ramah sepeda	19.10. Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (real-time) sebagai persentase dari total luas kota	Mojokerto Kota Ramah Sepeda dan Pengembangan Bike-Share System di Destinasi Wisata	2 titik	Rp. 250 juta	2 titik	Rp. 250 juta	-	-	-	-	--	-	APBD, CSR, Sektor Swasta	Dinas Perhubungan, Sektor Swasta, NGO
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir	19.7. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan public pembayaran elektronik  19.8. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan public ketersediaan parkir langsung (real-time)	Smart Parking	1 titik	Rp. 1 M	1 titik	Rp. 1 M	-	-	-	-	-	-	DAU	Dinas Perhubungan

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 2.4 SMART SOCIETY

Di *Smart Society*, beberapa program yang dilakukan oleh Kota Mojokerto antara lain meliputi GATI LANSIA yang ditujukan untuk orang tua terlantar dan tanpa keluarga, Ning Ita di Sekolah, e-KOMOLIB, DOLEN SI KOMO, Layanan 112, dan *Early Warning System* (EWS) pada 2023 – 2027.



Gambar 5. 5. Peta Jalan Smart Society Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut di bawah gambaran inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan di Kota Mojokerto.

- d. **GATI LANSIA – Gerakan Ayo Tulung tinulung Lanjut Usia terlantar**, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Inovasi ini diperuntukkan bagi para lansia yang terlantar atau tanpa keluarga. Dari dana yang didukung dari APBD dan dari donatur, para lansia ini ditempatkan di Rumah Lansia milik Dinsos P3A bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki rumah, RT atau tetangga yang mengurus mereka, dengan Dinsos menyalurkan bantuan yang diterima dari donatur guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ke depannya, inovasi ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada donatur pribadi, sehingga perlu untuk merangkul lembaga seperti BAZNAS, Dompot Duafa, dan Kita Bisa untuk mendukung keberlanjutan

inovasi ini karena donatur pribadi berpotensi untuk putus di tengah jalan. Saat ini, 56 lansia menjadi penerima manfaat program ini, dan anggaran yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp. 200 juta di 2023; Rp. 300 juta pada 2024; Rp. 400 juta pada 2025; Rp. 450 juta pada 2026, dan menjadi Rp. 500 juta pada 2027.

- e. **E-KOMOLIB – Kota Mojokerto E-Library** – merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Inovasi ini lahir ketika pandemik Covid-19 dimana warga tidak lagi mengunjungi perpustakaan daerah, ruang baca di kelurahan, dan perpustakaan di RTH. Sebelum pandemik, perpustakaan Kota Mojokerto dikunjungi tidak kurang dari 100 orang per hari. Oleh karena itulah, saat ini buku-buku yang menjadi koleksi di perpustakaan daerah juga hadir dalam bentuk digital. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 130 juta pada 2023, untuk membiayai digitalisasi buku sebanyak 80.100 buku.
- f. **DOLEN SIKOMO** – Dongeng Online Kota Mojokerto, merupakan program yang diselenggarakan di bawah Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan menyelenggarakan dongeng yang dilakukan oleh siswa sekolah melalui live di account Instagram inovasi ini. Setiap bulan, tidak kurang dari 48 siswa mendongeng secara *live*.
- g. **Digitalisasi Catatan Budaya Kota**: dikomando oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, inovasi ini bertujuan untuk melakukan digitalisasi catatan-catatan sejarah dan budaya di Kota Mojokerto, mengingat kota ini merupakan bekas Kerajaan Mojopahit. Selain itu di Kota Mojokerto juga banyak terdapat catatan-catatan dari kitab-kitab yang banyak di pondok pesantren di sekitar Kota Mojokerto.
- a. **Ning Ita di Sekolah** – merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa siswa di sekolah dengan menyelenggarakan tambahan pelajaran agama selama 1 jam setelah jam pulang sekolah. Ini berlaku untuk seluruh sekolah di Kota Mojokerto, dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 80 juta di 2023.
- b. **Layanan darurat 112**, merupakan integrasi semua layanan panggilan darurat yang ada selama ini, baik kebencanaan ataupun non kebencanaan. Misalnya saja kecelakaan di di 110, layanan kebakaran di 113, PLN di 123, atau layanan darurat PSC 119, dan 115 untuk SAR. Nomor-nomor panggilan darurat ini kemudian dijadikan satu di 112. Karena inovasi ini mengintegrasikan layanan darurat yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai instansi yang terpisah, perlu dilakukan koordinasi ketika dilakukan inovasi ini. Anggaran yang dialokasikan untuk inovasi ini adalah Rp. 25 juta di 2023.

- c. **Early Warning System**, merupakan inovasi yang ditujukan untuk kedaruratan banjir. Sistem manajemen monitoring dan peringatan dini banjir pada bendung dan sepanjang bantaran sungai. Di Kota Mojokerto, EWS akan dipasang di Kali Sadar. Sistem ini dilengkapi dengan *Internet of Things* (Iot). EWS akan dapat memberikan data analisa yang cepat dan akurat, sebagai data acuan pengambilan kebijakan meminimalisasi banjir. Inovasi ini sangat penting bagi Kota Mojokerto yang dengan posisi tofografis seperti lepek dan dekat dengan DAS and Sub-DAS Brantas menjadi rentan terhadap banjir. Pelaksanaan inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 95 juta pada 2023.

Sedangkan di periode 2028 – 2032, inovasi-inovasi yang dilakukan di dimensi ini antara lain menjadikan Mojokerto sebagai kota ramah disabilitas, peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan universitas dan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK), serta menjadikan kota dalam kondisi aman terpantau dengan IC – yang mengintegrasikan layanan CCTV dengan IA, dengan *Smart PJU*, *Smart Traffic Light*, dan *early warning system* yang sudah real time. Berikut di bawah gambaran inovasi yang akan dilakukan di jangka panjang:

- a. **Mojokerto Ramah Disabilitas:** inovasi yang rencana dilakukan di jangka panjang ini tidak saja menyediakan fasilitas publik yang sudah ramah terhadap disabilitas, seperti trotoar yang ramah kursi roda dan dilengkapi *guiding block* bagi orang buta atau gedung-gedung yang sudah dilengkapi dengan bidang miring yang memudahkan kursi roda untuk lewat, tetapi juga pelayanan yang ramah disabilitas, program-program pemerintah kota yang memiliki keberpihakan kepada kaum disabilitas.
- b. **Peningkatan Kompetensi SDM Kota Mojokerto:** upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendirian universitas atau akademi yang terakreditasi pada 2032 dan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) pada 2030. Anggaran yang dialokasikan untuk pendirian universitas adalah Rp. 40 miliar, dan Rp. 15 miliar untuk pendirian BLK.
- c. **Pembuatan QR Access Digital Library di Tempat Umum di Kota Mojokerto:** inovasi ini merupakan kelanjutan dari KOMOLIB dan digitalisasi catatan sejarah dan budaya Kota Mojokerto. Buku-buku dan catatan yang sudah dalam bentuk digital ini agar bisa dengan mudah diakses warga, rencana akan dibuatkan Code QR dan diletakkan di fasilitas-fasilitas umum, seperti RTH.

Tabel 5. 9. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Interaksi Masyarakat yang Efisien	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang tertangani	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	GATI LANSIA (Gerakan Ayo Tulung tlnulung Lanjut Usia terlantar)	100%	200 juta	100%	300 juta	100%	400 juta	100%	450 juta	100%	500 juta	APBD (DAU)	Dinsos P3A
	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah Orang terlantar yang dipulangkan/ direunifikasi.	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	BOLANG (Bantuan Orang terlantar dan terhiLANG dari keluarganya	100%	30 juta	100%	50 juta	100%	80 juta	100%	100 juta	100%	110 juta	APBD (DAU)	Dinsos P3A
	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah PMKS dan masyarakat umum yang mengalami permasalahan sosial/ membutuhkan layanan psikososial	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	TAREK SIS (Tanggap Apresiasi RESpon Kebutuhan Sosial Sehari-hari)	100%	-	100%	30 juta	100%	50 juta	100%	70 juta	100%	85 juta	APBD (DAU)	Dinsos P3A

	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah orang dengan disabilitas yang masuk dalam database	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	E-Disabilitas	100%	Rp. 10 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinsos P3A
<b>Ekosistem Belajar</b>	Penyelenggaraan pendidikan iman dan taqwa di sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah siswa yang menjalankan kegiatan iman dan taqwa	6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	Ning Ita di Sekolah	Seluruh sekolah di Kota Mojokerto	80.200.000.000,-									DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Program: Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk  17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Kota Mojokerto E-Library (KOMOLIB)	80.100 eksemplar	130.380.600									DAU	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Program Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Dongeng Online Kota Mojokerto (Dolen Komo)	576 siswa	-									APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Kab/Kota  Program Perizinan Penggunaan Arsip	1. Jumlah Naskah Kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik 2. Jumlah Naskah Sumber Arsip yang disusun dan diterbitkan	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Digitalisasi Catatan Budaya Kota	1 dokumen, 3 buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD

		Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup															
	Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pembinaan	Program: Perlindungan Perempuan  Kegiatan: Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan yang Memiliki Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah perempuan yang telah mandiri dan dibina	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SKOPER (Sekolah Berbasis Peningkatan Kerja)	500 perempuan rawan ekonomi	33 juta	500 perempuan rawan ekonomi	50 juta							DAU	Dinsos P3A
<b>Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat</b>	Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang efektif, efisien, dan responsif	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan yang dilayani dan ditindaklanjuti	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pengembangan Layanan 112 (Bencana Alam)		25 juta										Diskominfo, Satpol PP BPBD
	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	e-Warning System (Banjir)	1 aplikasi	95 juta										Diskominfo, Satpol PP BPBD

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 5. 10. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

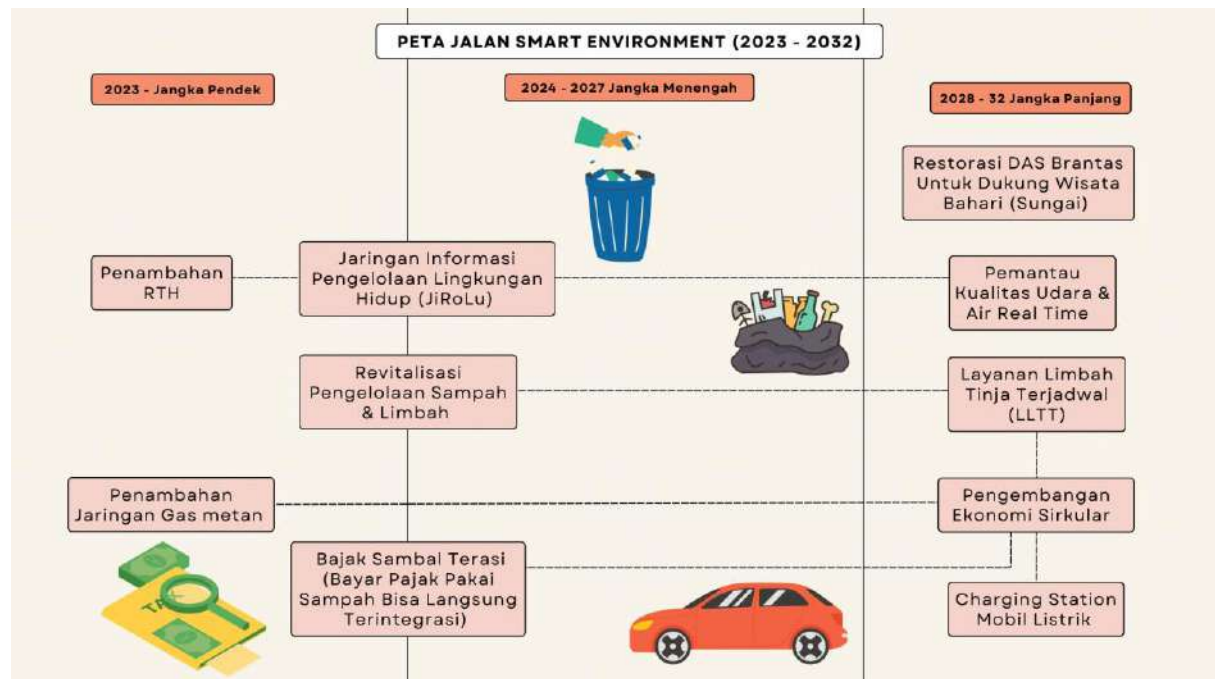
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
<b>Interaksi Masyarakat yang Efisien</b>	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah fasilitas di Kota Mojokerto yang telah ramah disabilitas	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	Kota Mojokerto Inklusif (Alat Bantu Mobilitas, Perangkat, dan Teknologi untuk Warga Berkebutuhan Khusus)	30% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	50% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	70% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	85% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	100% fasilitas umum dan pelayanan	-	APBD, CSR	Dinsos P3A, Dinas PUPER AKIM, Dinkes PPKB
<b>Ekosistem Belajar</b>	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat baca warga kota	Program Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku digital yang bisa diakses dengan QR	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	QR Akses Digital Library di Tempat Umum	3 lokasi	-	5 lokasi	-							APBD, CSR	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Sektor Swasta, Komunitas

	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Jumlah Universitas dengan Akreditasi B	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Pembangunan Akademi/ Universitas terakreditasi B	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	40 M	APBD	DISDIKB UD
	Meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif berbasis sertifikasi kompetensi	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Masyarakat Usia Produktif bersertifikasi kompetensi	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Pembangunan Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi					1 Gedung	15 M					APBD, CSR	DPMP SPNAKER, DISDIKB UD
<b>Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat</b>	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	IC/ I See (Integrated CCTV) Ai CCTV yang terintegrasi dengan smart PJU/ Smart Traffic Light, dan Warning System	5 Titik	400 Jt	10 Titik	400 Jt								Satpol PP, Dishub, Diskominfo, DLH
	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	e-Warning System Secara Real Time	1 sistem aplikasi	100 juta									APBD	Diskominfo, Satpol PP, BPBD

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 5.6 SMART ENVIRONMENT

Di *Smart Environment*, beberapa inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota antara lain penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), revitalisasi pengelolaan limbah cair domestik, Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu), dan penambahan jaringan gas metan untuk inovasi di jangka pendek dan jangka menengah (2023 – 2027). Sedangkan di jangka panjang (2028 – 2032), Kota Mojokerto merencanakan untuk menyelenggarakan Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT), restorasi sungai, dan penyediaan *charging station* untuk mobil listrik.



Gambar 5. 6. Peta Jalan Smart Environment Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut di bawah gambaran inovasi program yang akan dilakukan di Kota Mojokerto pada 2023 – 2032:

- Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu):** merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 2023 – 2027. Berguna untuk memantau kualitas udara di Kota Mojokerto, inovasi ini dibiayai oleh APBD sebesar Rp. 135 juta pada 2023, Rp. 150 juta pada 2024, Rp. 160 juta pada 2025, dan Rp. 200 juta pada 2026.
- Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH):** dilaksanakan guna mendukung Kota Layak Anak (KLA), penambahan RTH ini dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup pada 2023 dan 2024, dan dibiayai oleh anggaran sebesar Rp. 10 miliar pada 2023, dan Rp. 12 miliar pada 2024.

- c. **Bajak Sambal Terasi:** merupakan singkatan dari Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi, program yang diiniasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini menggunakan cara, masyarakat yang menyetorkan sampah lewat Bank Sampah di lingkungan mereka (kelurahan, RT, atau RW), uangnya bisa digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Saat ini, pelaksanaan inovasi ini masih manual, sehingga warga belum bisa memastikan uang dari penukaran sampah digunakan untuk membayar pajak. Akan tetapi, dengan pengembangan aplikasi, warga bisa memantau secara *real time*.
- d. **Revitalisasi Pengelolaan Limbah Cair:** di jangka pendek, revitalisasi pengelolaan limbah cair, dilakukan dengan penyediaan fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) karena hingga 2022, Kota Mojokerto belum memiliki sarana ini. Dengan dibiayai oleh DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp. 6 miliar, kegiatan dilaksanakan pada 2023. Selain itu, revitalisasi dilakukan dengan pengelolaan sistem pembuangan limbah terpadu, dengan menasar rumah-rumah di Kota Mojokerto pada 2023 – 2027. Di jangka panjang, Kota Mojokerto juga merencanakan untuk menerapkan program Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT) bagi rumah-rumah di Kota Mojokerto.
- e. **Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Sampah dan Limbah:** inovasi ini bisa dianggap sebagai “kelanjutan” dari Bajak Sambal Terasi ataupun LLTT. Dalam artian, bahwa limbah dan sampah yang sudah dihasilkan oleh masyarakat bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, termasuk juga untuk menciptakan energi terbarukan yang baru. Misalnya, limbah tinja bisa diolah menjadi briket/arang yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energi baru.
- f. **Restorasi Sungai DAS Brantas Untuk Dukong Wisata Bahari Mojopahit:** pembersihan dan restorasi sungai-sungai di Kota Mojokerto, termasuk DAS Brantas perlu dilakukan. Selain itu kebersihan dan preservasi sungai, juga bisa berguna untuk mendukung upaya Kota Mojokerto dalam pengembangan Wisata Bahari Mojopahit.

Tabel 5. 11. Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Proteksi Lingkungan	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara	23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per km2	Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu)	50,12	135 juta	50,25	150 juta	51	160 juta	51,50	200 juta	52		APBD	DLH
						81,64		81,68			81,70		81,72		81,74		
	Penambahan ruang terbuka hijau	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan	8.1 Jumlah bangunan yang dibangun lima tahun terakhir sesuai prinsip bangunan hijau	Penambahan jumlah RTH yang mendukung KLA	27,16	10.493.730.191		12 M							APBD	DLH

Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik/ Daerah	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Revitalisasi Pengelolaan Sampah, Limbah Pada, dan Limbah Cair (Pembangunan IPLT)	1. Persentase sampah yang dikelola 2. Persentase limbah cair yang dikelola	22.1 Presentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Revitalisasi Pengelolaan Sampah, Limbah Pada, dan Limbah Cair	94,60%  50%	6.110.1 12.560	100%									DAK	DLH, Dinas PUPR PERAKIM
	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Jumlah rumah tangga yang tersambung sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat kota	22.1 Presentase air limbah olahan yang digunakan kembali		50 Rumah	2.860.0 00.000	45 Rumah	2.860.0 00.000	40 Rumah	2.860.0 00.000	35 Rumah	2.860.0 00.000	30 Rumah	2.860 .000. 000		DAK	Dinas PUPRPER AKIM
	Melakukan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah	Membayar Pajak dengan Sampah	Sistem atau aplikasi yang terbangun	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga  16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga  16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Bajak Sambel Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi)	Aplikasi terkoneksi dengan Bank Sampah	5 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD

Tata Kelola Energi	Pemanfaatan (pengelolaan) kembali limbah cair dan padat untuk energi baru	Pemanfaatan limbah cair dan limbah padat untuk energi	Jumlah limbah cair dan padat yang berhasil dimanfaatkan kembali	7.2. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun  7.3. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun	Penambahan Jaringan Gas Metan												DLH
--------------------	---	---	---	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 5. 12. Peta Jalan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector	
						2028		2029		2030		2031		2032				
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.			
Proteksi Lingkungan	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang direstorasi	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	Restorasi DAS Brantas untuk Dukung Wisata Sungai	1 DAS	Rp. 50 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD. CSR	DLH, BBWS, Dinas PUPERAK IM Masyaraka t
	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah alat pemantau air dan kualitas udara <i>real time</i> yang terpasang	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	Pemantau Kualitas Udara dan Air <i>Real Time</i>	1 lokasi	Rp. 50 juta	1 lokasi	Rp. 50 juta	1 lokasi	Rp. 50 juta	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik/ Daerah	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Persentase masyarakat yang sudah terlayani LLTT	16.1. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering	Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT)	30%		50%		70%		85%		100%		APBD	DLH, IPLT, Dinas PUPERAK IM	

	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) dalam konsep ekonomi sirkular	Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Persentase sampah dan limbah yang dimanfaatkan kembali	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Limbah dan Sampah	5% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	10% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	12% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	15%	Rp. 100 juta	17% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	APBD, CSR	DLH, Bank Sampah, Sektor Swasta
<b>Tata Kelola Energi</b>	Penyediaan infrastruktur bagi energi alternatif	Program penggunaan energi alternatif	Jumlah fasilitas yang terpasang	7.10. Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar	Charging Station Mobil Listrik	1 lokasi	-	3 lokasi	-	5 lokasi						APBD, sektor swasta	DLH, Dishub

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

**BAB VI**  
**PENUTUP**

*Master Plan Smart City* Kota Mojokerto merupakan dokumen peta jalan dan rencana aksi untuk pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto selama 10 tahun, dari 2023 sampai dengan 2032. Pembuatan dokumen peta jalan dan rencana aksi di masing-masing dimensi *Smart City* dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan Dewan *Smart City* dan OPD terkait di Kota Mojokerto.

Hasil dari FGD tersebut, dapat disusun sasaran, strategi, peta jalan, dan rencana aksi untuk program di masing-masing dimensi (*Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, dan Smart Environment*) beserta OPD yang menjadi *leading sector* kegiatan atau program yang direncanakan beserta anggaran yang rencana akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak ketinggalan rencana aksi baik kebijakan, infrastruktur, aplikasi, ataupun literasi di masing-masing inovasi. Rencana aksi juga dilengkapi dengan tahun pelaksanaan, sehingga ini mempermudah *leading sector* dan pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi di *Smart City* tersebut.

Agar dokumen ini bisa menjadi panduan yang efektif dan efisien, perlu disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan dan para pembuat kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto, baik di tingkat Dewan *Smart City*, OPD, instansi lain di luar pemerintah Kota Mojokerto, akademisi, dan forum-forum di Kota Mojokerto. Selanjutnya *Master Plan* ini diharapkan bisa berfungsi sebagai:

- a. Acuan dan pedoman dasar untuk pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto selama 10 tahun mendatang;
- b. Acuan dan pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart City* di Kota Mojokerto dalam 10 tahun mendatang;
- c. Dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto.

Karena dokumen ini merupakan “dokumen hidup”, pemerintah Kota Mojokerto bisa dilakukan perubahan terhadap isi dokumen (sasaran, strategi, peta jalan, dan rencana aksi) sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan pembangunan di Kota Mojokerto. Termasuk, untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto di periode 2024 – 2029.

WALIKOTA MOJOKERTO,  
  
IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
MASTERPLAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2023 - 2032

MASTERPLAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2023 - 2032

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## 1.1 LATAR BELAKANG

Warga yang semakin pintar, dan masalah yang semakin kompleks dan beragam yang dihadapi oleh suatu negara atau kota, menjadikan entitas-entitas ini memberikan jawaban dan solusi atas tuntutan-tuntutan ini. Saat ini, warga tidak saja menuntut negara atau pemerintah kota agar mampu menjaga “perut mereka kenyang” dengan memberikan kemudahan bekerja dan berusaha, tetapi juga tuntutan akan sebuah kota yang layak untuk ditinggali. Di kota ini, mereka akan menuntut tersedianya ruang terbuka hijau, kota yang rendah polusi, jalur khusus pesepeda, dan kualitas pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan lebih transparan.

Untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapi ini diperlukan pendekatan dan strategi yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien. Seperti misalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Barcelona, Spanyol. Kota yang menjadi tuan rumah “Smart City Expo and World Congress” pada 2011 ini telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya tiang lampu LED yang mampu digunakan untuk memantau kemacetan lalu lintas, aktivitas pejalan kaki, kualitas udara, dan polusi suara. Selain itu, di kota ini, juga telah terpasang tempat sampah cerdas, dimana tempat sampah ini menyedot sampah dan meletakkan mereka di penyimpanan bawah tanah sehingga bisa mengurangi bau sampah, dan volume sampah di dalam truk pengangkut.<sup>1</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Kota Barcelona tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan konsep kota cerdas, atau *Smart City*. Yaitu, sebuah konsep yang digunakan untuk mengatasi persoalan dengan lebih terintegrasi, kolaboratif, dan sinergis. Upaya ini menjadi mungkin dilakukan dengan adanya dukungan teknologi informasi, yang menjadi ciri khas dari Revolusi Industri 4.0 atau lebih dikenal dengan revolusi digital. Keberadaan teknologi informasi ini, bisa menjadi sarana untuk mempermudah atau menjadi salah satu infrastruktur pendukung pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Di Indonesia, pembangunan *Smart City* di kabupaten/kota di Indonesia dimulai pada 2017 dengan “Gerakan Menuju 100 *Smart City*” yang dikomando oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Target 100 *Smart City* ini dicapai pada 2017 dan 2018. Di 2017, 25 kabupaten/kota menjadi sasaran kegiatan ini, dan dilanjutkan dengan 75 kabupaten/kota lainnya pada 2018. Konsep *Smart City* yang dikembangkan di kabupaten/kota ini diharapkan akan mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh

---

<sup>1</sup> Disarikan dari: <https://businesschief.com/top10/top-10-smart-cities-worldwide>

pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang terkenal dengan kompleksitas dan heterogenitas. Harapannya, dengan *Smart City*, daerah akan mampu menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Mengingat, Indonesia tidak saja beragam kondisi geografisnya, tetapi juga situasi sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahannya. Karenanya, dengan potensi dan permasalahan yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, kota cerdas yang dikembangkan di Kota Mojokerto akan berbeda dengan yang dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Meskipun, tidak menutup kemungkinan, penerapan *Smart City* di Kota Mojokerto juga dengan melihat dan mengadopsi praktik-praktik yang sudah berhasil dilakukan di daerah lainnya di Indonesia, atau bahkan telah diterapkan oleh negara lainnya.

Sukses dengan 100 kabupaten/kota cerdas di 2017-2018, Kementerian Kominfo melanjutkan mengembangkan kabupaten/kota cerdas sejalan dengan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan 10 kawasan yang menjadi destinasi pariwisata prioritas dan ibukota negara (IKN) baru. Total, 45 kabupaten/kota di 10 kawasan destinasi pariwisata dan tiga kabupaten/kota di IKN menjadi sasaran program ini di 2020. Pengembangan 10 kawasan prioritas ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di Indonesia. Melanjutkan upaya di 2021, di 2022 ini, Kementerian Kominfo kembali menginisiasi *Smart City* di 50 kabupaten/kota di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Di Jawa Timur, bersama dengan tujuh kabupaten/kota lainnya, Kota Mojokerto menjadi salah satu lokasi sasaran *Smart City* di Provinsi Jawa Timur. Perencanaan pengembangan *Smart City* di kota ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti, posisi Kota Mojokerto sebagai bagian dari aglomerasi ekonomi Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan), kota satelit dari Surabaya, kekayaan potensi ekonomi kerakyatan, dan potensi budaya daerah sebagai bekas pusat Kerajaan Mojopahit.

Master Plan ini akan berisi enam bagian utama. Di Bab I tentang Pendahuluan yang membahas latarbelakang, tujuan, landasan hukum, dan kerangka berpikir penulisan *master plan Smart City* Kota Mojokerto. Bab II tentang Arah Pembangunan *Smart City* Daerah akan membahas visi, misi, dan sasaran *Smart City* daerah; dan indikator utama *Smart City* daerah. Bab III akan membahas strategi pembangun di masing-masing dimensi *Smart City*. Lebih lanjut di Bab IV, akan dibahas rencana aksi *Smart City* daerah yang meliputi

pengembangan kebijakan dan kelembagaan; pengembangan infrastruktur pendukung; pengembangan aplikasi dan perangkat lunak; dan penguatan literasi. Lebih lanjut Bab V akan membahas peta jalan atau program daerah di masing-masing dimensi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di bab inilah, tertulis rencana program kerja daerah selama 10 tahun mendatang di masing-masing dimensi *Smart City*. Dan, Bab VI akan menjadi penutup untuk Master Plan ini.

## 1.2 TUJUAN

*Master Plan Smart City* Kota Mojokerto ini berisi tentang peta jalan *Smart City* dan rencana aksi di enam dimensi *Smart City* selama 10 tahun ke depan (2023 – 2032). Adapun tujuan disusunnya Master Plan ini adalah:

- a. Menyediakan peta jalan atau program-program perencanaan dan rencana aksi Kota Mojokerto 2023 – 2032.
- b. Menyelaraskan program dan kegiatan *Smart City* Kota Mojokerto dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di RPJMD ataupun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- c. Menyediakan buku panduan bagi Kota Mojokerto dalam mengembangkan *Smart City* sehingga akan berjalan dengan sistematis, efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## 1.3 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan *Smart City* dan pembuatan *Master Plan* di Kota Mojokerto berdasarkan pada regulasi-regulasi yang ada baik di tingkat nasional ataupun Kota Mojokerto. Regulasi-regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/219/417.101.3/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Mojokerto.

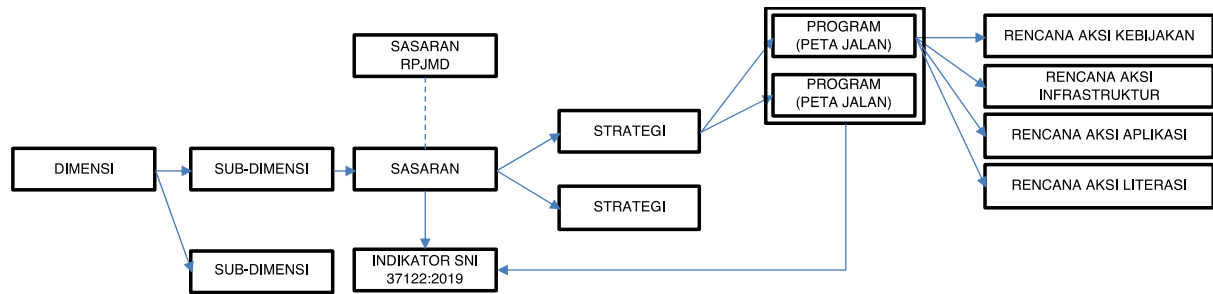
## 1.4 KERANGKA BERPIKIR

### 1.4.1 Kerangka Berpikir *Smart City*

Enam dimensi *Smart City* digunakan sebagai dasar pengembangan *Smart City* di Kota Mojokerto. Keenam dimensi tersebut adalah: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Di **Gambar 1.1** berikut merupakan Kerangka Penyusunan *Smart City* di Kota Mojokerto. Secara singkat, pengembangan *Smart City* di enam dimensi dan 18 sub-dimensi tersebut didasarkan pada permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang dihadapi oleh Kota Mojokerto. Dari permasalahan itu, kemudian ditentukan sasaran tiap-tiap dimensi dan sub-dimensi. Sasaran-sasaran di *Smart City* ini tentunya dilakukan dengan merujuk pada sasaran-sasaran di RPJMD Kota Mojokerto dan Indikator SNI ISO 37122:2019. Ini dilakukan agar sasaran *Smart City* yang disusun tidak bertolak belakang atau biar harmonis dengan sasaran-sasaran di RPJMD. Sedangkan harmonisasi dengan ISO SNI 37122:2019 diperlukan untuk standar referensi pengembangan *Smart City*, terutama di masa yang akan datang. Dari sasaran yang sudah disusun, strategi di masing-masing sasaran. Dari strategi inilah kemudian dibuat peta jalan atau rencana program yang akan dikembangkan di Kota Mojokerto. Bersama dengan pembuatan peta jalan (program/inovasi), juga disusun rencana aksi di masing-masing program/inovasi. Rencana aksi ini meliputi rencana aksi kebijakan, infrastruktur (*hardware*),

aplikasi (*software*), dan literasi. Baik peta jalan ataupun rencana aksi juga akan ditulis tahapan tahun pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini akan mempermudah implementasi masing-masing inovasi yang direncanakan dalam *Smart City* Kota Mojokerto.



Gambar 1. 1. Kerangka Penyusunan Smart City

Adapun keenam dimensi *Smart City*, seperti yang disebutkan di bawah ini, meskipun secara fokus berbeda, keberadaannya sama pentingnya, karena saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya. Secara singkat, berikut pengertian untuk masing-masing dimensi *Smart City*:

a. **Smart Governance**, merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar. Dengan *Smart Governance* ini, tata kelola pemerintahan akan mampu mengubah pola-pola birokrasi konvensional agar dapat menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan senantiasa melakukan perbaikan. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

b. **Smart Branding**, yaitu serangkaian cara yang dilakukan daerah memasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Dengan *Smart Branding*, untuk memenuhi kebutuhan kotanya, dia tidak lagi hanya bisa mengandalkan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki, akan tetapi juga harus bisa melibatkan partisipasi masyarakat, baik dari warga setempat ataupun dari luar daerah. Dukungan dan kolaborasi juga diperlukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku bisnis dan investor. Sehingga, bersama pemerintah daerah, akan dapat mendorong percepatan pembangunan.

c. **Smart Economy**, dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut adaptasi yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Tiga elemen di *Smart Economy* yang disasar, yaitu terciptanya ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terselenggaranya ekosistem transaksi keuangan.

d. **Smart Living**, merupakan satu dimensi yang bertujuan untuk menjadikan sebuah kota

merupakan sebuah tempat yang lebih layak untuk tinggal dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, tata ruang yang harmonis, dan adanya dukungan kelayakan mobilitas baik untuk orang ataupun barang.

e. **Smart Society**, merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Dengan mediasi teknologi, dimensi fisik dan virtual kehidupan warga kota akan semakin terjalin secara intensif. Tiga hal yang menjadi fokus di dimensi ini, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

6. **Smart Environment**, sebuah kota yang pintar tidak saja mampu melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang besar-besaran dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang layak bagi warganya, tetapi juga sebuah kota yang mampu memberikan perlindungan bagi daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa elemen penting di dalam dimensi ini adalah perlindungan air, udara, dan tanah, pengelolaan sampah padat dan limbah cair, serta upaya daerah untuk mengelola energi baru.

#### 1.4.2 Keterkaitan **Smart City** dengan RPJMD Kota Mojokerto

Perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto saat ini menggunakan RPJMD 2018 – 2023, yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota. Jika kita cermati, ketujuh Misi pembangunan Kota Mojokerto sudah sesuai dengan dimensi-dimensi *Smart City*.

**Misi Pertama, Mewujudkan SDM Berkualitas melalui Akses dan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan**, sudah sesuai dengan dimensi *Smart Living* dan *Smart Society*, dimana pelayanan kesehatan menjadi bagian dari *Smart Living*, dan pelayanan pendidikan merupakan bagian dari sub-dimensi ekosistem pendidikan di *Smart Society*. **Misi Kedua, Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, dan HAM** berkaitan dengan *Smart Society*, terutama terkait dengan sub-dimensi interaksi masyarakat dan keamanan masyarakat.

**Misi Ketiga, Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Efektif, Demokratis, Profesional, dan Adil dalam Melayani Masyarakat**, telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*. **Misi Keempat, Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah**, telah selaras dengan dimensi *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. Meskipun di dalam Misi ini tidak “tertulis” dengan jelas hal-hal yang berkaitan dengan *Smart Living* dan *Smart Environment*, jika dilihat ke Indikator Sasaran, akan terlihat bahwa dua dimensi ini telah masuk di dalamnya.

**Misi Kelima, Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dalam Kerangka Integrasi Nasional pada Tatanan Masyarakat yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila,** sejalan dengan *Smart Society*. **Misi Keenam, Mewujudkan Partisipasi Masyarakat melalui Pemberian Akses dan Kesempatan dalam Pembangunan,** telah selaras dengan *Smart Economy* dan *Smart Society*. Dan, Misi Ketujuh, Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat, telah selaras dengan dimensi *Smart Economy*.

Berikut di bawah gambaran singkat keterkaitan antara RPJMD, Misi *Smart City*, dan Dimensi *Smart City*:

**Tabel 1.1 Keterkaitan antara RPJMD dan Dimensi *Smart City* di Kota Mojokerto**

No	Isu Strategis	RPJMD	Misi Smart City	Dimensi Smart City
1.	Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.	Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	Mewujudkan kota yang layak untuk ditinggali dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas dan mobilitas yang mudah dan nyaman	<i>Smart Economy, Smart Living, dan Smart Society</i>
2.	Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota yang tertib, aman, dan stabil	Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang profesional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	<i>Smart Governance dan Smart Society</i>
3.	Mewujudkan good governance dan pelayanan yang prima	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang profesional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	<i>Smart Governance</i>
4.	Peningkatan infrastruktur yang mendorong daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.	Mewujudkan kota berdaya saing tinggi yang ditunjang oleh ekonomi kreatif dan industri pariwisata berbasis sejarah dan budaya	<i>Smart Branding, Smart Economy, dan Smart Environment</i>
5.	Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak	Mewujudkan masyarakat perkotaan yang toleran, rukun, aman, inklusif, dan melek literasi.	<i>Smart Society</i>

		mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila		
6.	Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi.	Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	Membangun kota yang mandiri yang didukung oleh sektor unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.	<i>Smart Economy dan Smart Society</i>
7.	Anggaran yang berbasis pada pelayanan masyarakat	Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	Membangun kota yang mandiri yang didukung oleh sektor unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.	<i>Smart Economy</i>

Sumber: RPJMD Kota Mojokerto dan Dimensi Smart City, diolah

Dari tabel di atas, Kota Mojokerto memang tidak menjadikan pembangunan lingkungan (*Smart Environment*) di dalam Misi pembangunan di RPJMD. Akan tetapi, komitmen kota terhadap pembangunan di bidang lingkungan, disebutkan di indikator sasaran di Misi Keempat RPJMD, dimana di dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri juga diimbangi dengan upaya bagaimana menjaga keseimbangan di bidang lingkungan hidup. Jika dicermati, hal itu dipaparkan dengan jelas di dalam indikator sasaran pembangunan di Misi Keempat. Di Misi Keempat ini, pemerintah Kota Mojokerto memiliki dua tujuan: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup, dimana salah satu sasasannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup (dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah/IKLHD).

### 1.4.3 Keterkaitan *Smart City* dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto

Karena *Smart City* yang ingin diwujudkan oleh Kota Mojokerto sudah menjadi prioritas di dalam RPJMD, sudah sewajarnya jika pembangunan *Smart City* sudah selaras dengan Rencana Strategis OPD di Kota Mojokerto. Sebab, program kerja yang disusun oleh OPD di lingkup pemerintah daerah Kota Mojokerto merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi kepala daerah di RPJMD. Program-program sedang diusulkan oleh OPD untuk dijadikan bagian dari *Master Plan Smart City* tidak sedikit yang merupakan pengembangan dari program-program yang sudah berjalan saat ini dan menjadi bagian dari Renstra OPD 2018 – 2023. Contoh, program **Cuhat Ning Ita** yang dikomando oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskomfo) yang merupakan contoh program di *Smart Governance* di sub-dimensi Layanan Publik juga merupakan upaya untuk mewujudkan Misi Ketiga di RPJMD “**Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat.**” Contoh lain adalah program Gerbang Layanan Informasi Terpadu

dan Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan **GAYATRI** yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan Misi Pertama di RPJMD “**Mewujudkan kota yang layak untuk ditinggali dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas dan mobilitas yang mudah dan nyaman.**” GAYATRI ini merupakan salah satu contoh program di dimensi *Smart Living* di sub-dimensi Layanan Kesehatan.

#### **1.4.4 Keterkaitan *Smart City* dengan SNI ISO 37122:2019 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

SNI ISO 37122:2019 merupakan standar pertama dalam SNI ISO 37120 “Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat – Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup. Standar ini menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi serangkaian indikator untuk *Smart City*. Dalam *Smart City*, SNI ISO 37122:2019 ini digunakan bersama dengan ISO 37120 agar dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi indikator untuk menerapkan sistem manajemen pemerintah daerah, mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan. Sehingga pemerintah daerah dapat:

- Menanggapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi, dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat;
- Menerapkan metode kepemimpinan kolaboratif;
- Memanfaatkan informasi data dan teknologi modern untuk menyediakan layanan dan meningkatkan kualitas hidup dan menjadikan kota nyaman bagi siapa saja yang berada di kota (penduduk, bisnis, pengunjung);
- Menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dengan dukungan kebijakan, praktik, dan teknologi yang cerdas;
- Mengidentifikasi kebutuhan dan manfaat infrastruktur pintar;
- Memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan;
- Membangun ekonomi yang dinamis dan inovatif yang siap menghadapi tantangan masa depan;

Di dalam penyusunan rencana induk *Smart City*, indikator-indikator yang terdapat di dalam SNI ISO 37122:2019 dapat digunakan sebagai indikator pada sasaran pembangunan *Smart City* bersama dengan indikator-indikator pembangunan daerah lainnya yang terdapat di dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau indikator-indikator di dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Total terdapat 80 indikator *Smart City* di SNI ISO 37122:2019, baik kelompok indikator atau turunannya.

Indikator-indikator di SNI ISO 37122:2019 yang digunakan untuk dimensi di *Smart City* juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ditetapkan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015, SDGs merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) yang berakhir pada 2015. Tujuh belas tujuan SDGs yang disepakati di markas PBB di New York ini, harapannya bisa dicapai pada 2030, dan juga menjadi bagian dari Resolusi PBB yang dikenal dengan Agenda 2030. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto, dalam pembuatan perencanaan pembangunan daerah juga sudah merujuk pada indikator-indikator di SDGs.

Kecuali Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender dan 17 tentang Kerjasama Global untuk Mencapai 16 Tujuan yang sudah disebutkan, setiap Tujuan yang ditetapkan di SDGs secara spesifik berkaitan dengan beberapa indikator di dalam SNI ISO 37122:2019. Misalnya saja, di Tujuan 7 “Memastikan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang” sesuai dengan Indikator SNI ISO terkait dengan energi (indikator 7), lingkungan dan perubahan iklim di indikator 8, indikator 12 tentang perumahan, limbah padat di indikator 16, dan indikator 22 terkait dengan air limbah. Jika dilihat dari dimensi di *Smart City*, sudah sesuai dengan *Smart Living* dan *Smart Environment*.

Selain Tujuan 7, Tujuan 11 “Membuat kota-kota dan pemukiman-pemukiman yang inklusif, aman, tahan, dan berkelanjutan” juga cukup menarik untuk dilihat. Tujuan ini tidak hanya selaras dengan 13 indikator di SNI ISO 37122:2019, tetapi juga dengan lima dimensi di *Smart City* (*Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*). Tigabelas indikator yang selaras dengan Tujuan 11 ini adalah terkait dengan energi, lingkungan dan perubahan iklim, pemerintahan, kesehatan, perumahan, populasi dan kondisi sosial, rekreasi, keamanan, limbah padat, olahraga dan budaya, transportasi, pertanian perkotaan, dan perencanaan perkotaan.

Selain beberapa kesesuaian yang sudah disebutkan di atas, beberapa contoh lainnya bisa dilihat di Tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2 Kesesuaian antara Indikator SNI ISO 37122/2019 dan Indikator SDGs**

Dimensi	Sub-Dimensi	SNI ISO 37122/2019	SDGs
Smart Branding	Pariwisata	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring  17b.1. Jumlah pemesanan daring untuk	8.9.2 Jumlah lapangan pekerjaan di bidang industri pariwisata sebagai proporsi dari total pekerjaan, rata-rata pertumbuhan pekerjaan, menurut jenis kelamin

		<p>fasilitas budaya per 100.000 penduduk</p> <p>17b.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan</p>	
<b>Smart Economy</b>	<b>Ekosistem Industri</b>	<p>20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan</p> <p>20.2. Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)</p> <p>20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring</p>	<p>9.3.1: Proporsi industri kecil dalam total nilai tambah industri</p> <p>9.3.2: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau jalur kredit</p>
<b>Smart Living</b>	<b>Kesehatan</b>	<p>11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p> <p>11.3. Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan public langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air</p>	<p>3.8.1 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau jalur kredit cakupan layanan kesehatan dasar (didefinisikan sebagai cakupan rata-rata layanan penting berdasarkan intervensi pelacak yang mencakup kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular dan layanan kapasitas dan akses, di antara populasi umum dan paling tidak beruntung).</p> <p>3.8.2 Jumlah orang yang ditanggung oleh asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk</p>
<b>Smart Society</b>		<p>6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu Bahasa</p> <p>6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa</p>	<p>4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin</p> <p>4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan kemampuan</p>

		6.3. Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	teknologi informasi dan komunikasi (TIK) keterampilan, menurut jenis keterampilan
<b>Smart Environment</b>	<b>Proteksi Lingkungan</b>	22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali  22.2. Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering)  22.3. Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota  22.4. Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi  22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	6.3.1 Proporsi air limbah yang diolah dengan aman  6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik

Sumber: Indikator SNI ISO 37122/2019 dan Indikator SDGs, diolah

#### 1.4.5 Keterkaitan *Smart City* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia

Pelaksanaan *Smart City* tidak bisa dipisahkan dengan dua kebijakan di Indonesia terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Disahkan dengan Peraturan Presiden 95/2018, SPBE atau lebih jamak dikenal dengan *e-government* bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Ini dilakukan dengan cara penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan SPBE, diharapkan kualitas pelayanan publik akan meningkat dan bisa menjangkau daerah yang lebih luas, serta bisa menekan penyalahgunaan wewenang, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dengan adanya pengawasan dan pengaduan yang berbasis elektronik.

Dalam konteks pelaksanaan *Smart City*, SPBE ini sangat mendukung pelaksanaan terutama untuk dimensi *Smart Governance*. Terutama, untuk mencapai SPBE yang terintegrasi/terpadu di semua lini pemerintahan, baik di tingkat nasional ataupun sub-nasional (provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Sampai saat ini, untuk pelaksanaan SPBE masih sangat bervariasi dan belum terintegrasi baik di tingkat nasional ataupun daerah dengan adanya perbedaan situasi dan kondisi. Variasi yang terjadi antara lain tidak semua daerah di Indonesia didukung oleh infrastruktur internet yang bagus karena kondisi geografis.

Di Kota Mojokerto, pelaksanaan SPBE di tingkat daerah direspon dengan pembuatan Arsitektur SPBE. Di Kota Mojokerto, layanan SPBE dibagi menjadi dua: layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang ditujukan untuk internal birokrasi; dan layanan publik berbasis elektronik yang diperuntukkan buat masyarakat dan kalangan bisnis. Kota Mojokerto, telah menggunakan 16 aplikasi administrasi pemerintahan, yang terdiri dari 10 aplikasi pusat dan 6 aplikasi daerah. Diantara aplikasi daerah yang digunakan untuk urusan administrasi diantaranya adalah Simpeg, Ekinerja, epresensi, Sim Cuti. Sedangkan untuk aplikasi dari pemerintah pusat yang digunakan saat ini adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, dan keuangan daerah.

Selain aplikasi yang digunakan untuk manajemen birokrasi, juga tersedia layanan untuk publik (eksternal) yang sudah interoperabel yang disediakan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Total layanan kepada publik di Kota Mojokerto sebanyak 164 yang tersebar di 42 instansi pemerintah di Kota Mojokerto. Saat ini, sebanyak 44 layanan (28%), sudah online dan didukung aplikasi, 87 layanan (57%) masih manual, dan 26 layanan (25%) memiliki opsi untuk online atau manual. Diantara layanan online yang sudah disediakan antara lain perizinan online, ebhptp, uji kir *online*, dan pelayanan kelurahan online.

#### **1.4.6 Keterkaitan *Smart City* dengan Kawasan Gerbang Kertosusila**

Pengembangan *Smart City* di Kota Mojokerto tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia Gerbang Kertosusila – Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) ini dibuat menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah 47/1996 tentang RTRW Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Saat ini, landasan yang digunakan sebagai dasar pembangunan di kawasan Gerbang Kertosusila ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80/2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Di dalam Perpres ini, kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Gerbang Kertosusila telah berkembang dari tujuh daerah berubah menjadi 10 dengan tambahan tiga kabupaten – Jombang, Bojonegoro, dan Tuban.

Kawasan yang didominasi oleh budaya perkotaan ini, secara umum sudah memiliki kualitas SDM yang sudah cukup baik karena didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik formal ataupun informal. Dengan potensi ekonomi di bidang industri manufaktur, makanan minuman, dan industri lainnya, 50 persen perekonomian Provinsi Jawa Timur disumbang oleh kawasan ini. Kawasan ini sangat diuntungkan dengan kemudahan konektivitas dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, seperti Bandara Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Kamal (Madura), dan Pelabuhan Gresik (Gresik). Selain itu, kawasan ini pada umumnya sudah dilewati oleh jalan tol nasional, dan dukungan jalur kereta api, sehingga daerah-daerah yang berada di kawasan ini sudah semuanya bisa diakses dengan kereta api. Selain industri yang sudah relatif berkembang, kawasan ini banyak memiliki potensi yang masih dikembangkan lagi, seperti agropolitan di Kabupaten Tuban, dan juga sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang potensial di beberapa daerah. Bagi Kota Mojokerto, menjadi bagian dari Kawasan Gerbang Kertosusila bisa menciptakan kesempatan (*opportunity*) ataupun tantangan bagi Kota Mojokerto. Seperti diketahui, Kota Mojokerto memiliki potensi di bidang industri kecil seperti alas kaki dan makanan-minuman, potensi wisata budaya dan sejarah, dan juga dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif mumpuni.



**BAB II**  
**ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH**

## 2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN SMART CITY KOTA MOJOKERTO

### 2.1.1 Visi dan Misi *Smart City* Kota Mojokerto

Keberadaan Visi dan Misi Kota Mojokerto *Smart City* tidak bisa dipisahkan dengan Visi dan Misi Kota Mojokerto yang disebutkan di dalam RPJMD 2018-2023, yang saat ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk *Smart City* Kota Mojokerto 2023 - 2032. Visi dan Misi *Smart City* Kota Mojokerto ditentukan sudah selaras dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto yang tercantum di RPJMD 2018 – 2023, dan telah sesuai dengan enam dimensi *Smart City*.

Visi Kota Mojokerto *Smart City* adalah: **MEWUJUDKAN KOTA MOJOKERTO YANG CERDAS, INOVATIF, BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN**

Visi ini diturunkan menjadi enam Misi:

- **Misi 1:** Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan birokrasi yang profesional untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.
- **Misi 2:** Mewujudkan kota berdaya saing tinggi yang ditunjang oleh ekonomi kreatif dan industri pariwisata berbasis sejarah dan budaya.
- **Misi 3:** Membangun kota yang mandiri yang didukung oleh sektor unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.
- **Misi 4:** Mewujudkan kota yang layak untuk ditinggali dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas dan mobilitas yang mudah dan nyaman.
- **Misi 5:** Mewujudkan masyarakat perkotaan yang toleran, rukun, aman, inklusif, dan melek literasi.
- **Misi 6:** Mewujudkan tatakelola lingkungan yang berkelanjutan dengan pelibatan aktif masyarakat.

### 2.1.2 Sasaran *Smart City* Kota Mojokerto

Berikut di bawah adalah sasaran yang ingin dicapai oleh *Smart City* Kota Mojokerto di tiap dimensi dan sub-dimensi:

#### 2.1.2.1 *Smart Governance*

Berikut di bawah adalah sasaran *Smart City* di dimensi *Smart Governance* yang ingin diwujudkan di Kota Mojokerto. Sasaran-sasaran ini disusun dari persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Governance*.

Tabel 2. 1. Sasaran Dimensi *Smart Governance*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Layanan Publik</b>	Akses informasi dan keluhan layanan publik yang belum merata	Meningkatkan penyebaran informasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota
	Belum semua pelayanan publik terintegrasi	Meningkatnya ketersediaan pelayanan pyboik yang terintegrasi dan interoperabilitas
	Belum adanya layanan publik yang terintegrasi dengan daerah lain	Meningkatkan kemudahan akses dan integrasi layanan dengan daerah lain
<b>Manajemen Birokrasi</b>	Layanan bagi birokrasi (kepegawaian, pensiun) yang belum seluruhnya terintegrasi dan interoperabilitas	Meningkatnya layanan administrasi birokrasi yang terintegrasi dan interoperabilitas
	Portal satu data dan informasi (Satikomo) belum optimal difungsikan menjadi pusat data dan referensi pembuatan kebijakan di Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan mudah dipakai sesuai prinsip satu data Indonesia
	Audit internal dan pengawasan berbasis risiko belum optimal karena keterbatasan SDM (Auditor)	Meningkatnya pengawasan dan kualitas pelayanan birokrasi
<b>Rancangan Kebijakan</b>	Kebijakan satu peta yang belum optimal disosialisasikan	Meningkatnya integrasi data dalam satu peta
	Kualitas perencanaan pembangunan yang masih belum optimal	Meningkatnya kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan
	Masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dengan optimal (pelibatan hanya di Musrenbang)	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
	JDIH Kota Mojokerto yang tidak terkoneksi dengan JDIH pemerintah pusat	Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat – daerah

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi layanan publik, sasaran ini ingin dicapai karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kota belum semuanya saling terintegrasi dan interoperabilitas. Bahkan dari 167 layanan kepada publik, 87 diantaranya masih manual, dan 26 layanan masih manual, atau ada pilihan online. Belum lagi, 44 layanan yang berupa aplikasi yang mayoritas masih berjalan sendiri-sendiri.

Di sub-dimensi manajemen birokrasi, sasaran ini ingin dicapai. Sama dengan masalah di sub-dimensi pelayanan publik, belum semua sistem/aplikasi administrasi yang digunakan oleh birokrasi di Kota Mojokerto sudah terintegrasi. Misalnya, terkait dengan perencanaan dan penganggaran telah menggunakan SIPD, akan tetapi untuk pengelolaan keuangan masih menggunakan SIMDA, dimana kedua sistem ini belum terintegrasi sehingga menyulitkan untuk pengawasan. Begitu juga dengan layanan kepegawaian lainnya, seperti cuti dan pension.

Di pembuatan kebijakan publik, kedua sasaran ingin dicapai karena masih kurang selarasnya kebijakan di Kota Mojokerto dengan yang ada di pemerintah pusat. Salah satu masalah yang dikeluhkan adalah JDIH Kota Mojokerto yang tidak bisa koneksi dengan JDIH pemerintah pusat setelah adanya perbaikan. Tidak ketinggalan, adanya keinginan untuk perbaikan *input* atau *feedback* terhadap perencanaan pembangunan yang selama ini hanya dilakukan lewat Musrenbang, yang diagendakan setiap satu tahun sekali secara bertingkat. Meskipun Musrenbang tetap menjadi sarana utama untuk menjalin aspirasi masyarakat dalam pembangunan, diperlukan alternatif penjangkaran aspirasi dalam pembangunan lainnya. Sehingga, proses pengumpulan aspirasi terhadap pembangunan dan perencanaan pembangunan lebih bersifat fleksibel dan tidak hanya bergantung pada satu *event* yang diselenggarakan dalam satu waktu tertentu (rapat Musrenbang).

### 2.1.2.2 Smart Branding

Untuk sasaran di dimensi *Smart Branding Smart City* di Kota Mojokerto bisa dilihat seperti tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2. 2. Sasaran Dimensi *Smart Branding*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
Pariwisata	Kurangnya destinasi wisata alam	Menambah destinasi wisata baru non-alam
	Belum adanya event/kalender wisata Kota Mojokerto	Menambah jumlah atraksi dan <i>event</i> pariwisata
	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana fisik pendukung	Meningkatnya infrastruktur fisik, sosial, dan budaya

	pariwisata di Kota Mojokerto, contoh hotel	pendukung ekosistem pariwisata
<b>Ekosistem Bisnis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyediaan fasilitas iklim berusaha yang lebih mudah</li> <li>2. Program Jempol Mempesona belum dimanfaatkan secara maksimal</li> </ol>	Meningkatnya investasi daerah, usaha perdagangan, dan pemasaran produk kreatif daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
<b>Tampilan (Wajah Kota)</b>	Masih belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana bernuansa Mojopahit ( <i>Spirit of Mojopahit</i> )	Meningkatnya jumlah landmarks yang bernuansa <i>Spirit of Mojopahit</i>
	PKL yang menggunakan badan jalan untuk berjualan	Menurunnya jumlah PKL yang berjualan di badan jalan dan berhasil dilokasir

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Sasaran di sub-dimensi pariwisata didasari oleh Kota Mojokerto tidak memiliki potensi wisata alam, dan untuk potensi wisata buatan dan budaya juga masih terbatas. Selain itu, keberadaan fasilitas pendukung wisata (*amenities*) di kota ini, seperti hotel, juga masih sangat kurang. Saat ini, Kota Mojokerto – sebagai bekas pusat Kerajaan Mojopahit – ingin menghidupkan kembali *Spirit of Mojopahit* ke dalam pengembangan ekosistem pariwisata untuk pengembangan industri pariwisata berbabiskan sejarah dan budaya.

Di sub-dimensi daya saing ekonomi, sasaran ini dibuat untuk memfaatkan posisi dan potensi Kota Mojokerto sebagai bagian dari aglomerasi ekonomi Kawasan Gerbang Kertosusilo. Berada di posisi ini, Kota Mojokerto bisa memanfaatkan untuk menarik investor untuk menanamkan permodalan di kota ini. Berada di posisi ini, juga mempermudah Kota Mojokerto untuk memasarkan potensi-potensi lokal daerah yang dia miliki karena memudahnya jaringan dan distribusi logistik. Misalnya, dekat dengan bandara, pelabuhan, jalan tol nasional, dan memiliki stasiun kereta api. Kota Mojokerto telah memiliki program untuk mempermudah perizinan lewat Program Jempol Mempesona, yang merupakan layanan jemput bola perizinan di kelurahan. Sayangnya, program ini belum terlalu banyak dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi, terutama UKM.

Sasaran di perwajahan kota dibuat selaras dengan keinginan dari walikota untuk mengembalikan kembali *Spirit of Mojopahit* yang itu ditunjukkan melalui *landmarks* di kota ini. Upaya yang sudah mulai untuk dilakukan adalah dengan membuat pembuatan gerbang atau gedung-gedung dengan nuansa arsitektur Mojopahit. Selain itu, pemerintah kota juga perlu

menyelesaikan persoalan PKL yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di Kota Mojokerto. Seperti disampaikan dalam FGD, pemerintah kota sebenarnya sudah melakukan upaya lokalisasi PKL di beberapa lokasi, seperti misalnya di Benteng Pancasila. Akan tetapi, para PKL juga memilih berjualan meluar di trotoar dan badan jalan di Kawasan Benteng Pancasila. Persoalan ini tidak saja merusak keindahan kota, tetapi juga membahayakan bagi para pejalan kaki. Karena trotoar dan badan jalan yang bisa digunakan untuk tempat berjalan, digunakan untuk berjualan.

### 2.1.2.3 *Smart Economy*

Tabel 2.3 berikut di bawah merupakan sasaran di dimensi *Smart Economy* Kota Mojokerto di masing-masing sub-dimensinya:

**Tabel 2. 3. Sasaran Dimensi *Smart Economy***

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Ekosistem Industri</b>	Belum adanya konektivitas industri di Kota Mojokerto dan wilayah sekitarnya	Meningkatkan konektivitas dan kerjasama dengan industri di sekitar Kota Mojokerto
	Menurunnya jumlah lahan pertanian di Kota Mojokerto	Meningkatkan upaya intensifikasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan
	Perlunya mempermudah akses UMK/UMKM terhadap akses permodalan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan
<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat miskin belum berjalan dengan baik</li> <li>2. Perlunya penciptaan wirausaha baru</li> </ol>	Meningkatkan kemandirian masyarakat
<b>Ekosistem Transaksi Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan transaksi keuangan koperasi yang belum berbasis IT/digitalisasi</li> <li>2. Transaksi pembayaran retribusi pasar masih manual</li> </ol>	Meningkatnya transaksi keuangan digital daerah, terdorongnya ekonomi digital ( <i>e-commerce dan marketplace</i> )

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Sasaran yang dibuat di sub-dimensi ekosistem industri dibuat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto. Yaitu, posisi yang dikelilingi oleh kawasan industri di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo, sementara itu, di kota sendiri juga memiliki

potensi untuk ekonomi kerakyatan, seperti potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak bergerak di bidang makanan dan kerajinan kulit (alas kaki). Selain itu, sasaran lainnya yang ditetapkan adalah bagaimana mengatasi lahan pertanian jumlah lahan pertanian yang semakin sempit, akan tetapi di satu sisi, harus memikirkan upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Mengingat, usaha pengembangan pertanian dengan penggunaan lahan luas (ekstensifikasi) sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan. Disinilah Kota Mojokerto perlu untuk menetapkan sasaran untuk mengatasi kelemahan yang mereka miliki.

Di sub-dimensi kesejahteraan sosial, sasaran dibuat dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat Kota Mojokerto tidak memiliki tingkat kemandirian yang solid atau yang kuat karena pemerintah kota sudah banyak menyediakan berbagai fasilitas gratis kepada masyarakat, seperti misalnya layanan pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Tidak dipungkiri bahwa dengan ukuran daerah yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak sebanyak daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, menjadikan pemerintah daerah mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar bagi penduduknya.

Dan, di sasaran di sub-dimensi ekosistem transaksi digital ditetapkan dengan penggunaan transaksi digital belum sepenuhnya dilakukan di Kota Mojokerto. Penggunaan QRIS sempat *trending* digunakan pada saat pandemik Covid-19 meningkat pada 2021 yang lalu. Akan tetapi, dengan pandemic mulai mereda, mayoritas masyarakat sudah kembali lagi ke pola transaksi konvensional dengan uang tunai (*cash*). Karenanya, penggunaan transaksi *cashless* ini perlu untuk didorong kembali. Selain itu, pemerintah kota juga menasar pemberian kemudahan kepada UMKM untuk mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.

#### 2.1.2.4 Smart Living

Terbagi dalam tiga sub-dimensi tabel 2.4 berikut di bawah menjelaskan sasaran yang ingin dicapai di dimensi *Smart Living* di *Master Plan Smart City* Kota Mojokerto 2023 – 2032. Sasaran-sasaran ini disusun berdasarkan persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Living* yang diidentifikasi pada saat FGD Bimbingan Teknis.

Tabel 2. 4. Sasaran Dimensi *Smart Living*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
Harmonisasi Tata Ruang	1. Kurangnya ruang terbuka hijau yang nyaman	Terciptanya wajah kota dengan tata ruang yang berkualitas

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kebutuhan permukiman baru karena dengan posisi Kota Mojokerto sebagai kota satelit Surabaya</li> <li>3. Bekas bangunan WC komunal SANIMAS yang mangkrak</li> <li>4. Munculnya perkampungan kumuh</li> <li>5. Banjir sebagai konsekuensi dengan perkembangan permukiman</li> </ol>	
	Belum meratanya akses air minum dan sanitasi yang layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak
<b>Kesehatan</b>	Akses kepada pelayanan sehat masih kurang bagus, seperti antrian pendaftaran panjang di fasilitas kesehatan (RS)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarpras dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan preventif dan promotif layanan kesehatan, termasuk Penyakit Tidak Menular (PTM)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya kesehatan preventif dan promotif
<b>Transportasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume kendaraan padat</li> <li>2. Mobilitas masyarakat terbatas karena tidak tersedianya sarana transportasi umum yang layak</li> <li>3. Ketersediaan lahan parkir sempit dan mahal biaya parkir</li> </ol>	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam bermobilitas

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi harmonisasi tata ruang, sasaran ini ditetapkan karena adanya tuntutan masyarakat untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Seperti diketahui, ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto masih sangat terbatas, yaitu hanya satu ruang terbuka hijau per satu kelurahan. Berkembangnya kebutuhan akan RTH ini juga sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dihadapi di sub-dimensi harmonisasi tata ruang adalah dengan fasilitas yang dibangun di program SANIMAS yang mangkrak.

Di sub-dimensi pelayanan kesehatan, sasaran-sasaran ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk kualitas pelayanan kesehatan yang lebih bagus. Dengan akses atau jarak

ke pelayanan kesehatan yang sudah tidak sulit lagi, peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah hal yang disasar oleh kota ini, termasuk untuk mengembalikan Puskesmas pada fungsi awalnya, sebagai pusat “kesehatan” masyarakat, bukan pusat “kesakitan” masyarakat. Sehingga, kegiatan-kegiatan perlu dilakukan adalah upaya-upaya promotif dan preventif, seperti fokus pada pencegahan PTM, yang di masa depan bisa menjadi beban ganda biaya kesehatan di Indonesia.

Di sub-dimensi transportasi, sasaran dibuat berdasarkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Mojokerto diantaranya adalah kesulitan mobilitas karena tidak tersedianya transportasi umum yang murah dan layak. Sedangkan, bagi masyarakat pengguna kendaraan sendiri, dihadapkan pada terbatasnya lahan parkir dan biaya parkir yang mahal. Persoalan-persoalan inilah yang mendasari lahirnya sasaran ini.

### 2.1.2.5 *Smart Society*

Tabel di bawah menjelaskan sasaran yang ingin dicapai di dimensi *Smart Society* di Kota Mojokerto *Smart City*. Sasaran-sasaran ini disusun berdasarkan masalah-masalah pembangunan yang masih dihadapi di Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 5. Sasaran Dimensi *Smart Society***

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Interaksi Masyarakat</b>	Pemberdayaan disabilitas dan kaum marginal yang masih belum optimal	1. Meningkatnya keterlibatan kelompok disabilitas dan kaum marginal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan 2. Menguatnya jejaring disabilitas di Kota Mojokerto sampai dengan tingkat nasional
<b>Ekosistem Belajar (Pendidikan)</b>	1. Belum tersedianya kanal literasi 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat Perpustakaan 3. Kurangnya masyarakat tentang literasi	Meningkatnya minat baca masyarakat

	4. Rendahnya kunjungan masyarakat ke Perpustakaan	
	Masih ada masyarakat yang tidak bisa melakukan akses ke pendidikan formal	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non-formal
<b>Keamanan Masyarakat</b>	1. Masih terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 2. Risiko bencana alam dan non-alam	Meningkatnya sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat, baik dari resiko bencana alam, atau keamanan digital

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi interaksi masyarakat, persoalan disabilitas yang masih belum menjadi arus utama pembangunan di masyarakat. Misalnya, keterlibatan mereka dalam pembangunan masih belum optimal. Juga, pemerintah kota juga belum optimal menyediakan infrastruktur (akomodasi yang layak) dan layanan yang bisa diakses oleh mereka.

Di sub-dimensi ekosistem belajar, sasaran ini dibuat dengan dasar masih rendahnya literasi dan minat baca masyarakat. Meskipun, perpustakaan daerah dan juga perpustakaan keliling juga telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sedangkan di sub-dimensi keamanan masyarakat, sasaran ini dibuat dengan belum adanya sistem atau manajemen bencana yang sangat berguna digunakan untuk melakukan mitigasi jika terjadi bencana. Sehingga, adanya korban dan kerugian bisa diminimalisir. Selain itu, adanya layanan kedaruratan yang selama ini masih disediakan oleh instansi yang berbeda-beda, dan tentunya dengan kanal (nomor telpon yang berbeda). Misalnya, layanan 119 untuk PSC *ambulance* atau 113 untuk pemadam kebakaran. Beragam nomor telepon darurat ini akan menyulitkan masyarakat untuk menghapalnya. Sebagai daerah yang berada di 4 DAS dan 9 sub-DAS Brantas dan berbatasan dengan daerah pegunungan yang menjadi wilayah Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto rawan terhadap bencana banjir. Apalagi ditunjang dengan letak hidrologis kota yang bentuknya seperti *lepek*, sehingga hujan dengan curah tinggi dalam waktu yang lama juga menjadikan daerah ini berpotensi terhadap banjir. Oleh karena itu, diperlukan satu layanan kedaruratan yang sudah terintegrasi.

#### **2.1.2.6 Smart Environment**

Dimensi terakhir di *Smart City* adalah *Smart Environment*. Di tabel berikut di bawah, dapat dilihat sasaran di masing-masing sub-dimensi.

Tabel 2. 6. Sasaran Dimensi *Smart Environment*

Sub Dimensi	Dasar Pemikiran	Sasaran
<b>Proteksi Lingkungan</b>	Banjir karena timbunan sampah atau perkembangan permukiman yang tidak terkendal	Meningkatnya tata kelola lingkungan dengan ter kendalinya polusi udara, dan perlindungan air dan tanah
	Kualitas udara yang tidak terpantau	
	Kurangnya ruang terbuka hijau	
<b>Pengelolaan Limbah dan Sampah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan volume sampah</li> <li>2. Pengelolaan sampah yang belum bagus karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah</li> <li>3. Kapasitas TPA terbatas dan prediksi sudah penuh dalam waktu 4 tahun ke depan</li> <li>4. Belum adanya teknologi pengelolaan sampah</li> </ol>	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah
	Limbah B3 dan limbah cair rumah tangga yang belum terolah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air dan pengelolaan limbah cair domestik
	Daerah yang belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT)	Meningkatnya jumlah limbah cair rumah tangga dan limbah tinja yang terolah
<b>Tata Kelola Energi</b>	Belum dimanfaatkannya potensi sampah, limbah padat, dan cair untuk dijadikan sumber energi alternatif dengan optimal	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sampah dan limbah untuk diubah menjadi energi baru

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di sub-dimensi proteksi lingkungan, sasaran ini dibuat dengan adanya penurunan kualitas udara, air, dan tanah di Kota Mojokerto, yang diantaranya disebabkan oleh perkembangan

permukiman yang tidak terkendali dan kualitas udara yang tidak terkontrol. Di sub-dimensi pengelolaan sampah dan limbah cair diantaranya disebabkan oleh adanya kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk mengelola sampa dari rumah, misalnya dengan pemilahan. Sedangkan di sisi lainnya, kapasitas TPA Randegan sangat terbatas untuk menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga kota. Padahal di Kota Mojokerto telah memiliki potensi Bank Sampah yang berada di tingkat RT/RW/Kelurahan, tidak kurang dari 150. Masalah sampah ini menjadi bom waktu di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Sedangkan di pengelolaan limbah cair/tinja belum bisa dilakukan secara optimal karena salah satu penyebab adalah kota ini juga belum memiliki sarana untuk pengelolaannya (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu/IPLT). Selama ini, pengelolaan limbah cair, seperti tinja, masih menggantungkan daerah lainnya, seperti Kota Gresik. Dan, di sub-dimensi tata kelola energi, ada keinginan untuk menciptakan energi baru yang berasal dari pengelolahn kembali limbah dari sampah ataupun limbah cair/tinja.

## 2.2 INDIKATOR UTAMA *SMART CITY* KOTA MOJOKERTO

Penyusunan Indikator Utama *Smart City* Kota Mojokerto di keenam dimensi akan dibuat berdasarkan beberapa acuan (rujukan) indikator. Yaitu, RPJMD, regulasi dari pemerintah pusat, SNI ISO 37122/2019, dan SDGs. Penggunaan indikator rujukan ini akan saling melengkapi. Misal, jika rujukan indikator tidak ditemukan di SNI ISO 37122/2019, bisa digunakan indikator di SDGs, terutama untuk sasaran-sasaran program yang digunakan untuk peta jalan di jangka panjang.

### 2.2.1 *Smart Governance*

Untuk mengukur capaian sasaran *Smart Governance* diperlukan indikator utama capaian sasaran. Di tabel 2.7, bisa dilihat indikator utama yang ingin dicapai di tiap sub-dimensi *Smart Governance*.

Tabel 2. 7. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Layanan Publik</b>	1. Meningkatnya ketersediaan pelayanan publik yang terintegrasi dan interoperabilitas	1. Persentase layanan administrasi masyarakat online terintegrasi	1. Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekur SPBE Kota Mojokerto
	2. Meningkatnya penyebaran informasi dan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Peraturan Menteri Pemberdayaan

	kepuasaan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan diadopsi di RPJMD 2018 – 2023
<b>Manajemen Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya layanan administrasi birokrasi yang terintegrasi dan interoperabilitas</li> <li>2. Meningkatnya kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan mudah dipakai sesuai prinsip satu data Indonesia</li> <li>3. Meningkatnya pengawasan dan kualitas pelayanan birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</li> <li>2. Sistem Merit</li> <li>3. Indeks Kematangan SPBE</li> <li>4. Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>5. Indeks Manajemen Risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>2. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>3. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>4. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>5. RPJMD 2018 – 2023</li> </ol>
<b>Kebijakan Publik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya integrasi data dalam satu peta</li> <li>2. Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat – daerah</li> <li>3. Meningkatnya kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kebijakan/regulasi pemerintah daerah yang sudah selaras dengan pemerintah pusat</li> <li>2. Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekur SPBE Kota Mojokerto</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang</li> </ol>

4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekur SPBE Kota Mojokerto

*Dari berbagai sumber, diolah*

Di sub-dimensi layanan publik, persentase layanan yang sudah terintegrasi perlu untuk dimasukkan ke dalam indikator sasaran, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, layanan publik di Kota Mojokerto masih banyak yang belum terintegrasi. Bahkan, mayoritas pelayanan juga masih manual. Oleh karena itu, integrasi sistem layanan memang harus sudah mulai diintegrasikan demi peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat. Di sub-dimensi manajemen birokrasi, indikator-indikator sasaran tersebut dimasukkan dengan merujuk pada RPJMD Kota Mojokerto 2018 – 2013, dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80/2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2024 (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25/2020). Apalagi, terkait dengan manajemen birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Mojokerto tidak bergerak dari status BB selama lima tahun terakhir. Yang menjadi persoalan adalah ketidaksesuain Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan RPJMD.

### 2.2.2 *Smart Branding*

Beberapa indikator utama terkait dengan *Smart Branding*, dapat dilihat di tabel 2.8 di bawah:

**Tabel 2. 8. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Branding***

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
Pariwisata	1. Bertambahnya destinasi wisata baru non-alam	1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	1. SDG (Target 8.9, indikator 8.9.2)
	2. Meningkatnya infrastruktur fisik, sosial, dan budaya pendukung ekosistem pariwisata	2. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	2. SNI ISO 37122 (indikator 14.1) 3. SNI ISO 37122 (indikator 17b.1)
	3. Menambah jumlah atraksi dan <i>event</i> pariwisata	3. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 4. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	4. SNI ISO 37122 (indikator 17b.2) 5. RPJMD 2018 – 2023

		5. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	
Daya Saing Bisnis	Meningkatnya investasi daerah, usaha perdagangan, dan pemasaran produk kreatif daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1. Nilai realisasi Investasi (PMA dan PMDN) 2. Pertumbuhan PRDB sektor industri 3. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	1. RPJMD 2018 – 2023 2. RPJMD 2018 – 2023 3. RPJMD 2018 – 2023
Wajah Kota	1. Meningkatnya jumlah landmarks yang bernuansa <i>Spirit of Mojopahit</i> yang mendukung terciptanya wajah kota yang berkualitas, indah, rapi, dan sesuai dengan standar arsitektur internasional 2. Menurunnya jumlah PKL yang berjualan di badan jalan dan berhasil dilokasir	Total anggaran yang dialokasikan untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi seluruh warisan budaya dan alam.	SDG (Target 11.4, indikator 11.4.1)

Dari berbagai sumber, diolah

Di dimensi *Smart Branding*, indikator-indikator sasaran disusun berdasarkan ISO SNI 37122, Tujuan Pembangunan Berlanjutan (SDGs), dan juga RPJMD Kota Mojokerto 2018 – 2023. Indikator-indikator sasaran di sub-dimensi ekosistem pariwisata dibuat jika pemerintah kota telah berhasil melakukan penambahan destinasi wisata baru, dan juga menyediakan infrastruktur pendukung (*amenities*) pariwisata yang wisatawan merasa nyaman berada di Kota Mojokerto, seperti hotel, restoran, dan sebagainya.

Di sub-dimensi ekosistem bisnis, indikator sasaran diambil dari RPJMD 2018 – 2023. Karena, keberhasilan Kota Mojokerto untuk memaksimalkan daya saing, pada akhirnya adalah pertumbuhan PDRB di berbagai sektor, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, di sub-dimensi perwajahan kota, indikator ini digunakan merujuk pada keinginan dari pemerintah kota untuk membangkitkan kembali *Spirit of Mojopahit* dalam penataan *landmarks* kota.

### 2.2.3 Smart Economy

Di dimensi *Smart Economy*, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan *Smart City* Kota Mojokerto seperti terlihat di tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2. 9. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Economy*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Ekosistem Industri</b>	1. Meningkatkan konektivitas dan kerjasama dengan industri di sekitar Kota Mojokerto 2. Meningkatkan upaya intensifikasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan 3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan	1. Pertumbuhan PRDB sektor industri	1. RPJMD 2018 – 2023
		2. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	2. RPJMD 2018 – 2023
		3. Laju inflasi	3. RPJMD 2018 – 2023
		4. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	4. SNI ISO 37122 (indikator 20.1)
<b>Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Meningkatkan Angka Kesempatan Kerja 3. Peningkatan PDRB riil per kapita 4. Angka kemiskinan 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 6. Indeks Pengeluaran per kapita	1. RPJMD (2018 - 2023) 2. SDG (indikator 8.1.3) 3. SDG (indikator 8.1.2) 4. RPJMD (2018 - 2023) 5. RPJMD (2018 - 2023) 6. RPJMD (2018 - 2023)
<b>Ekosistem Transaksi Ekonomi</b>	Meningkatnya transaksi keuangan digital daerah, terdorongnya ekonomi digital (e-	1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase	1. SNI ISO 37122 (indikator 9.1) 2. SNI ISO 37122 (indikator 9.2)

commerce dan marketplace),

dari pendapatan sumber sendiri

2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktor elektronik

*Dari berbagai sumber, diolah*

Indikator-indikator sasaran di dimensi *Smart Economy* disusun baik dari indikator di SNI ISO 37122, SDGs, ataupun dari RPJMD. Di sub-dimensi ekosistem industri, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah tumbuhnya perekonomian daerah yang mampu menggenjot Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari berbagai sektor, baik industri ataupun perdagangan. Sementara PDRB diharapkan bisa naik, pemerintah daerah juga berupaya untuk menekan laju inflasi. Terciptanya ekosistem perekonomian daerah yang stabil ini juga mendukung di sub-dimensi kesejahteraan sosial. Dengan situasi perekonomian daerah yang semakin membaik, harapannya adalah angka TPT menurun dengan terbukanya semakin banyak kesempatan kerja. Dengan warga bekerja dan memiliki pendapatan, harapannya angka kemiskinan juga bisa turun. Jika perut penduduk sudah kenyang, maka upaya untuk mendorong pembangunan kesetaraan gender akan lebih gampang untuk dilakukan, sehingga di akhir, juga akan turut mendorong naiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan di sub-dimensi ekosistem transaksi ekonomi, indikator sasaran ini dipakai dengan pemerintah daerah berusaha untuk “mengembalikan” gairah masyarakat untuk menggunakan transaksi digital.

#### 2.2.4 *Smart Living*

Dimensi *Smart Living* fokus pada upaya untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang layak untuk ditinggali. Dan salah satunya dengan tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas. Indikator untuk yang digunakan mengukur upaya pemerintah kota untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai tempat tinggal yang layak bisa dilihat di tabel 2.10 seperti di bawah ini:

**Tabel 2. 10. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Living***

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	1. Terciptanya wajah kota dengan tata	1. Rasio pemanfaatan lahan dibandingkan dengan pertumbuhan	1. SDG (Indikator 11.3.1) 2. SDG (Indikator 11.3.)

	<p>ruang yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak</p>	<p>penduduk</p> <p>2. Jumlah pelibatan masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota</p> <p>3. Alokasi anggaran pemerintah daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak</p>	<p>3. SDG (6.a.1)</p>
<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya kesehatan preventif dan promotif</p> <p>2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarpras dan pelayanan kesehatan yang berkualitas</p>	<p>1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan</p> <p>2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p> <p>3. Cakupan layanan terhadap akses pelayanan kesehatan esensial (layanan KIA, penyakit menular, penyakit tidak menular, dll)</p> <p>4. Jumlah penduduk yang ditanggung oleh asuransi atau sistem kesehatan publik lainnya per 1,000 penduduk.</p>	<p>1. SNI ISO 37122 (indikator 11.1)</p> <p>2. SNI ISO 37122 (indikator 11.2)</p> <p>3. SDG (indikator 3.8.1)</p> <p>4. SDG (indikator 3.8.2)</p>
<b>Transportasi</b>	<p>Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam bermobilitas</p>	<p>1. Proporsi penduduk yang memiliki akses ke transportasi umum yang nyaman (berdasarkan jenis kelamin dan umur) dan orang dengan disabilitas.</p> <p>2. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota</p>	<p>1. SDG (indikator 11.2.1)</p> <p>2. SNI ISO 37122 (indikator 19.3)</p> <p>3. SNI ISO 37122 (indikator 19.5)</p> <p>4. SNI ISO 37122 (indikator 19.6)</p> <p>5. SNI ISO 37122 (indikator 19.7)</p> <p>6. SNI ISO 37122</p>

- |  |   |
|--|---|
| yang merupakan kendaraan rendah emisi. | (indikator 19.9)<br>7. SNI ISO 37122<br>(indikator 19.12) |
|--|---|
3. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik
  4. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu
  5. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik
  6. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas
  7. Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter

*Dari berbagai sumber, diolah*

Di dimensi *Smart Living*, indikator-indikator sasaran disusun dari SNI ISO 37122 dan SDGs di Tujuan 6 terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi layak; dan Tujuan 11 yang berkaitan dengan perwujudan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Di sub-dimensi harmonisasi tata ruang, indikator-indikator ini perlu untuk digunakan mengingatkan pemerintah menjadikan isu penambahan RTH dan penyediaan air minum dan sanitasi yang layak sebagai sasaran yang ingin dicapai di sub-dimensi ini. Lebih lanjut, di sub-dimensi pelayanan kesehatan, indikator sasaran diatas digunakan karena keinginan dari pemerintah kota untuk mengembalikan fungsi Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat, bukan sebagai pusat pesakit masyarakat. Sehingga, upaya-upaya preventif dan promotif menjadi fokus Puskesmas, termasuk dalam upaya mereka untuk mencegah dan mengendalikan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang di masa depan bisa menjadi beban ganda pelayanan kesehatan di Indonesia.

## 2.2.5 *Smart Society*

Di dimensi *Smart Society*, indikator untuk mengukur capaian sasaran bisa dilihat di tabel 2.11 di bawah ini. Tiga elemen yang ingin dicapai di dimensi ini: komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan.

Tabel 2. 11. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Rujukan
<b>Interaksi Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keterlibatan kelompok disabilitas dan kamu marginal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan</li> <li>Menguatnya jejaring disabilitas di Kota Mojokerto sampai dengan tingkat nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus</li> <li>Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.</li> <li>Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SNI ISO 37122 (indikator 13.1)</li> <li>SNI ISO 37122 (indikator 13.2)</li> <li>SNI ISO 37122 (indikator 13.4)</li> </ol>
<b>Ekosistem Belajar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya minat baca masyarakat</li> <li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata partisipasi remaja dan orang dewasa di pendidikan formal dan non-formal</li> <li>Proporsi remaja dan orang dewasa yang memiliki kemampuan TIK</li> <li>Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SDG (indikator 4.3.1)</li> <li>SDG (indikator 4.3.2)</li> <li>SNI ISO 37122 (indikator 17.3)</li> <li>SNI ISO 37122 (indikator 17.4)</li> </ol>

4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif

<b>Keamanan Masyarakat</b>	Meningkatnya sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat, baik dari resiko bencana alam, atau keamanan digital	1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	1. SNI ISO 37122 (indikator 15.1)
		2. Jumlah pengaduan kebencanaan melalui nomor tunggal panggilan darurat	2. SDG (indikator 11.b.1)
		3. Jumlah sosialisasi mitigasi cerdas kebencanaan	3. SDG (indikator 11.b.1)

*Dari berbagai sumber, diolah*

Indikator-indikator sasaran diatas yang diadopsi dari SNI ISO 37122 dan SDGs Tujuan 4 dan Tujuan 11, dimana Tujuan 4 bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan ini sangat berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan minat baca dan literasi, serta akses kepada pendidikan formal yang ditujukan untuk kaum perempuan. Saat ini, akses pendidikan dasar di Kota Mojokerto sudah bisa dijangkau oleh semua anak di Kota Mojokerto. Selain pendidikan dasar yang sudah bebas biaya (gratis), pemerintah kota juga menyediakan sarana pendukung siswa lainnya, seperti seragam sekolah dan buku gratis. Di Kota Mojokerto, rata-rata lama sekolah tertinggi ketiga di Jawa Timur dengan angka 10,47 (2021) di bawah Kota Surabaya (10,50) dan Kota Madiun (11,37). Ini berarti, bahwa rata-rata penduduk Kota Mojokerto sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Dengan penduduk yang mayoritas sudah selesai pendidikan wajib 9 tahun, sudah saatnya pemerintah kota mendorong tumbuhnya budaya baca, yang tidak hanya disediakan fasilitas fisik saja, tetapi juga peningkatan kesadaran literasi mereka.

### **2.2.6 Smart Environment**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran di dimensi *Smart Environment* bisa dilihat di tabel 2.12 di bawah ini.

Tabel 2. 12. Indikator Sasaran Dimensi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator Sasaran	Rujukan Indikator
<b>Proteksi Lingkungan</b>	Meningkatnya tata kelola lingkungan dengan terkendalinya polusi udara, dan perlindungan air, dan tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (KLDH)</li> <li>2. Persentase air limbah yang diolah kembali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2018 – 2023</li> <li>2. SNI ISO 37122 (indikator 22.1)</li> </ol>
<b>Pengelolaan Sampah &amp; Limbah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah cair domestik</li> <li>2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga</li> <li>2. Proporsi air limbah yang terolah dengan benar</li> <li>3. Persentase sampah plastik yang didaur ulang</li> <li>4. Proporsi limbah padat yang dikumpulkan dan diolah oleh pemerintah kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO 37122 (indikator 16.2)</li> <li>2. SDG (indikator 6.3.1)</li> <li>3. SNI ISO 37122 (indikator 16.4)</li> <li>4. SDG (indikator 11.6.1)</li> </ol>
<b>Tata Kelola Energi</b>	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan limbah untuk diubah menjadi energi baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya.</li> <li>2. Total bauran penggunaan energi terbarukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI ISO 37122 (indikator 7.1)</li> <li>2. SDG (indikator 7.2.1)</li> <li>3. SNI ISO 37122 (indikator 7.2)</li> <li>4. SNI ISO 37122 (indikator 7.3)</li> </ol>

- dalam total akhir  
konsumsi energi
3. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun
  4. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun

*Dari berbagai sumber, diolah*

Indikator sasaran *Smart Environment* diadopsi dari RPJMD, SDGs, dan juga ISO SNI 37122. Indikator-indikator ini digunakan, sebagai proyeksi yang dibutuhkan oleh pemerintah kota di masa yang akan datang. Persoalan-persoalan lingkungan hidup seperti perlindungan terhadap kualitas air, tanah, dan udara, pengelolaan sampah, limbah cair domestik dan tinja, serta limbah bahan berbahaya beracun (B3) masih belum menjadi fokus utama bagi pemerintah kota. Upaya-upaya yang dilakukan masih sebatas kegiatan-kegiatan rutin. Ataupun, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, namun tidak berjalan efektif, seperti sampah yang langsung dikirim ke TPA. Sehingga terobosan seperti pelibatan masyarakat dalam pemilahan sampah dari rumah dengan menggunakan Bank Sampah masih belum optimal, padahal di kota ini terdapat 150 Bank Sampah. Selain itu, infrastruktur pendukung untuk pengelolaan sampah ataupun limbah cair, masih kurang mendukung. Misalnya, TPA Randegan yang merupakan milik pemerintah kota kapasitas sudah hampir penuh, dan kota ini belum memiliki IPLT. Kota Mojokerto sebenarnya juga memiliki IPAL komunal, akan tetapi banyak yang tidak digunakan dan mangkrak. Padahal, masalah sampah dan limbah ini adalah bom waktu bagi daerah perkotaan seperti Kota Mojokerto. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah kota untuk lebih fokus terhadap isu-isu ini dan dijadikan bagian dari kegiatan-kegiatan dan program-program di *Smart City*.

**BAB III**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY***

### 3.1 SMART GOVERNANCE

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan di bab sebelumnya, berikut strategi yang ditetapkan di dimensi *Smart Governance*, seperti bisa dilihat di tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3. 1. Strategi Dimensi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Layanan Publik</b>	Meningkatnya ketersediaan pelayanan publik yang terintegrasi dan interoperabilitas	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik
	Meningkatkan penyebaran informasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota	Optimalisasi saluran informasi dan keluhan pelayanan publik yang tersedia untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
	Meningkatkan kemudahan akses dan integrasi layanan dengan daerah lain	Pembangunan database terpadu dan terintegrasi berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani
<b>Manajemen Birokrasi</b>	Meningkatnya layanan administrasi birokrasi yang terintegrasi dan interoperabilitas	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi
	Meningkatnya kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan mudah dipakai sesuai prinsip satu data Indonesia	Mendorong penggunaan Satikomo bagi OPD untuk mempublikasi data statistik sektoral
	Meningkatnya pengawasan dan kualitas pelayanan birokrasi	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan
<b>Kebijakan Publik</b>	Meningkatnya integrasi data dalam satu peta	Melakukan integrasi data dalam satu peta
	Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat – daerah	Melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap pembentukan dan diseminasi produk hukum daerah secara online
	Meningkatnya kualitas dan keselarasan perencanaan pembangunan	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi

	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penjaringan aspirasi masyarakat lewat secara online
--	--	---

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Seperti yang diketahui, di Kota Mojokerto, telah menggunakan berbagai jenis sistem dan aplikasi baik untuk pelayanan yang ditujukan untuk publik, ataupun internal birokrasi. Yang terkait dengan pelayanan administratif internal birokrasi, telah ada 16 jenis layanan, berupa 10 sistem/aplikasi yang diadopsi dari pemerintah pusat, dan 6 sistem/aplikasi yang dibangun oleh pemerintah kota. Sedangkan sistem/aplikasi yang ditujukan untuk layanan kepada publik, tidak kurang dari 164 layanan yang terbesar di 42 OPD (4 OPD belum memiliki layanan). Sebanyak 87 layanan masih dilakukan secara manual. Sehingga, perlu bagi layanan yang masih menggunakan sistem manual ini bisa diintegrasikan dengan layanan online yang sudah ada saat ini, sehingga pemerintah kota tidak perlu menambah aplikasi (ternak aplikasi) yang manfaatnya bisa jadi sama dengan aplikasi yang telah ada. Oleh karena itulah pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi dan interoperabilitas sudah menjadi satu kebutuhan. Tidak saja layanan yang sudah terintegrasi dan saling bisa dioperasikan, di *Smart Governance* juga dibutuhkan keselarasan antara kebijakan di tingkat pusat dengan pemerintah daerah. Ini bisa dilihat dari *website* JDIH Kota Mojokerto yang tidak lagi bisa koneksi dengan JDIH pusat, sehingga agak menyulitkan pemerintah kota untuk melakukan sinkronisasi dengan produk hukum dari pusat.

### 3.2 SMART BRANDING

Di *Smart Branding*, sasaran yang telah dibahas di bab sebelumnya, diterjemahkan dalam beberapa strategi pembangunan di masing-masing sub-dimensi seperti bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2. Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Ekosistem Pariwisata</b>	Menambah destinasi wisata baru non-alam	Penambahan dan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru
	Meningkatnya infrastruktur fisik, sosial, dan budaya pendukung ekosistem pariwisata	Melakukan kerjasama dengan investor untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
	Menambah jumlah atraksi dan <i>event</i> pariwisata	Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholders di bidang pariwisata untuk pembuatan kalender event wisata terintegrasi

<b>Daya Saing Bisnis</b>	Meningkatnya investasi daerah, usaha perdagangan, dan pemasaran produk kreatif daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi dengan pengembangan Jempol Mempesona</li> <li>2. Pembuatan kebijakan untuk menarik investasi</li> </ol>
<b>Wajah Kota</b>	Meningkatnya jumlah landmarks yang bernuansa <i>Spirit of Mojopahit</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota berbasis TIK</li> </ol>
	Menurunnya jumlah PKL yang berjualan di badan jalan dan berhasil dilokasir	Penataan dan relokasi PKL sesuai dengan RTRW dan regulasi daerah

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Pengembangan ekosistem pariwisata merupakan hal yang harus dikembangkan oleh Kota Mojokerto, mengingat beberapa kelemahan daerah ini di sub-dimensi ini. Untuk itu, beberapa strategi seperti yang disebutkan di tabel diatas harus dilakukan. Di kalangan pemerintah daerah, tugas untuk mengembangkan ekosistem pariwisata tidak saja menjadi tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), tetapi juga harus didukung oleh OPD lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman (PUPERAKIM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Dan, ketika program ini sudah melibatkan multi OPD, juga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah.

Peran investor yang dapat mendukung penyediaan infrastruktur pendukung dan *stakeholders* pariwisata sangat diperlukan. Seperti diketahui, Kota Mojokerto memiliki fasilitas *amenities* yang sangat minim, seperti bisa dilihat dari ketersediaan hotel di kota ini. Padahal, dengan berbekal kedekatan dengan kota besar seperti Surabaya, daerah ini berpotensi mengembangkan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan dipadukan dengan kegiatan wisata yang sudah disusun dalam *calender of events*. Peran investor juga dibutuhkan untuk pengembangan destinasi baru. Tidak hanya dalam proses pembangunannya, tetapi juga dalam proses promosi dan pengembangannya.

### 3.3 SMART ECONOMY

Dimensi *Smart Economy* dengan tiga sub-dimensi, pemerintah kota menggunakan beberapa strategi untuk mencapai sasaran di dimensi ini, seperti yang bisa dilihat di tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3. 3. Strategi Dimensi *Smart Economy*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Ekosistem Industri</b>	Meningkatkan konektivitas dan kerjasama dengan industri di sekitar Kota Mojokerto	Membuat perjanjian kerjasama industri dengan daerah-daerah di sekitar
	Meningkatkan upaya intensifikasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasiskan industri, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto</li> <li>2. Fasilitasi UKM dan UMKM untuk sertifikasi usaha dan akses permodalan</li> </ol>
<b>Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kepada wirausaha baru dengan pelatihan dan akses permodalan</li> <li>2. Penerapan kebijakan pro-poor</li> </ol>
<b>Ekosistem Transaksi Ekonomi</b>	Meningkatnya transaksi keuangan digital daerah, terdorongnya ekonomi digital ( <i>e-commerce dan marketplace</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pembayaran elektronik</li> <li>2. <i>Capacity building</i> kalangan UKM dan UMKM di bidang <i>digital economy</i> (terutama pelaku UKM/UMKM perempuan)</li> </ol>

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Di dimensi *Smart Economy*, fokus pemerintah kota adalah pada UMKM dan kelompok rentan. Dari sisi UMKM, Kota Mojokerto merupakan daerah sentra kerajinan alas kaki dari kulit, dan usaha di bidang makanan dan minuman. Pelaku UMKM ini banyak didominasi oleh kelompok perempuan. Untuk penguatan UMKM, pemerintah masih perlu memberikan fasilitasi untuk pengembangan usaha seperti akses ke permodalan dan berbagai macam sertifikasi yang diperlukan untuk usaha, seperti sertifikasi halal dan BPPOM.

Sedangkan fokus terkait dengan kelompok rentan, pemerintah kota telah banyak memiliki program-program untuk orang miskin, seperti Bantuan Non Tunai Pangan Daerah (BNTP

APBD) dan Bantuan Sosial yang dianggarkan dari APBD. Bantuan-bantuan yang lebih bersifat *charity* dan insidentil ini memang diperlukan untuk keadaan tertentu, akan tetapi perlu untuk diimbangi dengan pembuatan kegiatan yang lebih memberdayakan dan berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih mandiri. Banyaknya program yang bersifat *charity* dan pelayanan yang sudah gratis di Kota Mojokerto, berdampak pada masyarakat yang manja dan kurang mandiri.

### 3.4 SMART LIVING

Sebagai kota terkecil di Jawa Timur dengan jarak yang sudah lagi bukan masalah dalam akses layanan, pekerjaan rumah pemerintah kota adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan layanan warga sehingga menjadikan daerah kota yang lebih layak huni. Terlebih, sebagai satelit dari Kota Surabaya, kota ini dilirik oleh warga Kota Surabaya. Di tabel 3.4 di bawah ini adalah strategi yang disusun oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Living*:

Tabel 3. 4. Strategi Dimensi *Smart Living*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Terciptanya wajah kota dengan tata ruang yang berkualitas	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Penyediaan sarana dan prasarana terhadap air minum dan sanitasi yang layak
<b>Pelayanan Kesehatan</b>	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya kesehatan preventif dan promotif	Penyediaan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarpras dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
<b>Transportasi</b>	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam bermobilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem layanan transportasi umum yang nyaman dan berkualitas</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan</li> <li>3. Menjadikan kota layak sepeda</li> </ol>

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Seperti dilihat di tabel di atas, untuk menjalankan strategi di dimensi *Smart Living* diperlukan kolaborasi multi *stakeholders* di Kota Mojokerto, seperti Dinas PURERAKIM, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitbangda), DLH, dan sebagainya. Terutama untuk penegakan regulasi RTRW di kota ini. Bagaimanapun, dengan wilayah yang kecil dan padat, pemerintah kota harus tegas dengan regulasi RTRW yang sudah disusun.

### 3.5 SMART SOCIETY

Strategi yang dilakukan oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Society* bisa dilihat di tabel 3.5 di bawah ini. Potensi dan tantangan Kota Mojokerto di dimensi ini dipengaruhi oleh faktor kultur sebagai daerah urban dan kondisi alam, dimana secara hidrologis, berbentuk seperti lepek dan dekat dengan aliran DAS Brantas. Sehingga, ini berpengaruh terhadap pembuatan strategi di *Smart Society*. Di tabel 3.5 di bawah ini bisa kita lihat strategi di dimensi *Smart Society*:

**Tabel 3. 5. Strategi Dimensi *Smart Society***

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Interaksi Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keterlibatan kelompok disabilitas dan kamu marginal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan</li> <li>2. Menguatnya jejaring disabilitas di Kota Mojokerto sampai dengan tingkat nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> <li>2. Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas</li> </ol>
<b>Ekosistem Belajar</b>	Meningkatnya minat baca masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat baca warga kota</li> <li>2. Jemput bola kepada masyarakat untuk peningkatan minat baca</li> </ol>
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non-formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan perempuan miskin melalui pendidikan dan pembinaan di luar sekolah</li> <li>2. Penyelenggaraan pendidikan iman dan taqwa di sekolah</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan</li> <li>4. Meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif berbasis sertifikasi kompetensi</li> </ol>
<b>Keamanan Masyarakat</b>	Meningkatnya sistem atau manajemen keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang</li> </ol>

	keselamatan bagi warga masyarakat, baik dari resiko bencana alam, atau keamanan digital	efektif, efisien, dan responsif 2. Mengembangkan sistem mitigasi kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi
--	---	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Layanan kedaruratan, peningkatan literasi, dan menjadikan Mojokerto kota yang inklusif menjadi fokus di dimensi ini. Layanan kedaruratan antara lain terkait dengan bencana alam, kecelakaan, tawuran, dan juga kebakaran. Hal-hal ini membutuhkan respon yang sangat cepat untuk penanganannya. Akan tetapi, yang tidak kalah penting dengan penanganan yang cepat adalah upaya untuk melakukan mitigasi bencana agar bisa diminimalisir korban jiwa dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, strategi utama yang dilakukan oleh Kota Mojokerto adalah bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan darurat kebencanaan yang masih berjalan sendiri-sendiri (belum terintegrasi). Dan, untuk mendukung strategi ini, diperlukan dukungan teknologi dan kolaborasi *stakeholder* di isu ini.

Menjadikan kota yang ramah disabilitas sudah menjadi satu kebutuhan sebuah kota saat ini. Warga dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan yang sama seperti dengan warga non-disabilitas. Akan tetapi, masih banyak layanan publik yang belum bisa diakses oleh mereka dan infrastruktur juga belum mendukung. Oleh karena itu, perlu bagi Kota Mojokerto untuk memasukkan penyediaan akses bagi orang dengan disabilitas ke dalam salah satu strategi di *Smart Society* ini. Literasi menjadi fokus selanjutnya. Karena, terlepas dari negara sudah memiliki rata-rata lama sekolah 10,7, minat baca warga masih relatif rendah.

### 3.6 SMART ENVIRONMENT

Di tabel 3.6 di bawah ini, kita bisa melihat strategi-strategi yang ingin ditempuh oleh Kota Mojokerto untuk menjadikan daerah ini kota yang pintar di bidang lingkungan; baik untuk perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah padat/sampah atau limbah cair yang berasal dari rumah tangga, dan tata kelola energi yang berkelanjutan:

Tabel 3. 6. Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Sasaran	Strategi
<b>Proteksi Lingkungan</b>	Meningkatnya tata kelola lingkungan dengan terkendalinya polusi udara, dan perlindungan air dan tanah	1. Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara dengan pemanfaatan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara</li> <li>3. Penambahan ruang terbuka hijau</li> </ol>
<b>Pengelolaan Sampah &amp; Limbah Daerah</b>	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air dan pengelolaan limbah cair domestik	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) dalam konsep ekonomi sirkular</li> </ol>
<b>Tata Kelola Energi</b>	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sampah dan limbah untuk diubah menjadi energi baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan kembali sampah, limbah cair, dan padat untuk energi baru</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur bagi energi alternatif</li> </ol>

Sumber: FGD Bimbingan Teknis I Kota Mojokerto, diolah

Dalam pelaksanaan strategi-strategi diatas, selain dibutuhkan komitmen bersama antara OPD di pemerintah daerah, juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan dukungan dari pemerintah pusat. Karena, dalam menjalankan strategi ini dibutuhkan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan limbah domestik cair, termasuk limbah tinja. Selama ini, Kota Mojokerto belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) sendiri. Tanpa adanya IPLT, limbah domestik cair atau tinja tidak bisa diolah dengan maksimal. Selama ini, untuk pengelolaan limbah air tinja, dilakukan dengan bekerjasama dengan daerah lainnya, seperti Kabupaten Gresik. Dengan adanya IPLT juga, akan mempermudah upaya Kota Mojokerto untuk mengelola kembali (*reuse*) limbah tinja untuk digunakan menjadi sumber energi lain. Sehingga, dari pengelolaan limbah cair atau sampah di sub-dimensi kedua bisa mendukung sub-dimensi ketiga dengan terciptanya energi baru yang dihasilkan dari pengolahan kedua jenis limbah tersebut. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan ini tidak saja bisa mengatasi masalah perkotaan, tetapi juga mendukung upaya untuk menciptakan ekonomi sirkular.

**BAB IV**  
**RENCANA AKSI SMART CITY**

## 4.1 SMART GOVERNANCE

Rencana Aksi (Renaksi) di dimensi *Smart Governance*, diklasifikasikan dalam tiga periode: jangka pendek (2023) dan jangka menengah (2024 – 20227); dan jangka panjang di 2028 – 2032. Rencana aksi di kedua periode dapat dilihat di Tabel 4.1 dan 4.2.

### 4.1.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2023 – 2027)

Pembuatan Renaksi di jangka pendek dan jangka menengah ini meliputi empat komponen: pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur pendukung (*hardware*), perangkat lunak pendukung, dan penguatan literasi. Berikut Renaksi di masing-masing komponen:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, kegiatan yang dilakukan antara lain persiapan pembuatan regulasi pendukung, baik dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali), Surat Keputusan (SK) Walikota, ataupun SK Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain regulasi, di komponen kegiatan lain yang dilakukan adalah pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembuatan petunjuk teknis (juknis) ataupun manual kegiatan, dan pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) jika melibatkan pihak eksternal, seperti sektor swasta ataupun institusi non-pemerintah daerah. Inovasi-inovasi di *Smart Governance* pada mayoritas melakukan kegiatan-kegiatan ini di komponen ini. Misalnya saja, di inovasi SATIKOMO (Satu Data Kota Mojokerto). Dalam inovasi ini, paling tidak diperlukan dua regulasi dari walikota: untuk inovasi itu sendiri, dan untuk pelaksanaan Forum Data. Selain itu, karena inovasi ini bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, juga dibuat perjanjian kerjasama dengan BPS. Di inovasi Curhat Ning Ita, petunjuk teknis inovasi, penjangkaran keluhan dari warga dan pemberian respon. Saat ini, warga Kota Mojokerto bisa mengadukan keluhan lewat delapan kanal: SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, SMS, *website*, dan datang langsung ke desk Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto di Jl. Gajahmada 100. Penyiapan kelembagaan ini pada umumnya dilakukan pada 2023.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung (*Hardware*):** di *Smart Governance*, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komponen ini, pada umumnya berkaitan dengan penyediaan dan *maintenance* jaringan internet, *server*, dan ketersediaan komputer atau laptop. Namun, diperlukan juga penyediaan lokasi fisik untuk inovasi, seperti *desk* pengaduan secara langsung di inovasi Curhat Ning Ita di kantor MPP. Kegiatan-kegiatan ini diperlukan karena pada umumnya inovasi di dimensi ini banyak berkaitan dengan *e-government*. Inovasi yang membutuhkan kesiapan ini di komponen ini

antara lain: Curhat Ning Ita, SATIKOMO, e-SAKIP, e-KINERJA, Si MANKO, SimHP, dan pembuatan Dashboard Walikota. Pada umumnya, kegiatan ini dilakukan pada 2023 dan 2024.

- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** di komponen ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pembuatan dan penambahan fitur di website dan aplikasi, integrasi aplikasi jika merupakan penggabungan beberapa inovasi atau aplikasi, dan juga pembuatan kanal media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pembuatan kanal di media sosial ini dilakukan di inovasi Curhat Ning Ita – yang merupakan adopsi dari program LAPOR (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) di Kota Mojokerto. Warga, tidak saja bisa curhat atau menyampaikan aduan via WA, SMS, ataupun website, tetapi juga bisa melalui kanal media sosial. Pembuatan website merupakan kegiatan yang sangat penting dalam Satu Data Kota Mojokerto (SATIKOMO) karena website ini tidak saja berisi seluruh data sektoral di Kota Mojokerto yang disediakan oleh OPD teknis selaku produsen data, tetapi dengan website ini, harapannya data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mojokerto telah sama (satu versi) dan dari satu sumber. Dengan demikian, akan lebih mempermudah para pengambil kebijakan di Kota Mojokerto dalam membuat keputusan atau menyusun program pembangunan. Mayoritas inovasi membutuhkan pengembangan perangkat lunak pada 2023.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari sebuah inovasi. Dua kegiatan yang umumnya dilakukan di komponen ini: sosialisasi kegiatan kepada OPD ataupun kepada masyarakat; dan penguatan kapasitas melalui pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek). Komponen ini tidak saja untuk pengenalan dan peningkatan *awareness* (kesadaran) terhadap inovasi, tetapi juga untuk meningkatkan mutu inovasi atau pelayanan. Seperti misalnya di SATIKOMO, Bimtek kepada operator data di tiap OPD dan analisis data kepada SDM di Diskominfo sebagai walidata. Ini dilakukan karena banyak OPD, termasuk di Dinas Kominfo, tidak memiliki SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Statistik dan Analisis Data. Bimtek kepada operator di OPD perlu dilakukan agar terjadi penyeragaman format data; dan bimtek analisis dibutuhkan agar data bisa dimanfaatkan. Kegiatan ini bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pelaksanaan program Satu Data Indonesia karena belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

#### **4.1.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)**

Renaksi jangka panjang akan dilaksanakan pada 2028 – 2032. Tiga inovasi diusulkan di jangka panjang ini: Smart Kampung, Pengembangan *Knowledge Management*

*System* (KMS), dan Pengembangan Kelayanan Artificial Intelligent (AI) Kota Mojokerto. Sama dengan di Renaksi jangka pendek dan menengah, terdapat empat komponen di rencana jangka panjang ini.

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jangka panjang, sama dengan di jangka pendek dan menengah. Yaitu: penyiapan regulasi, SOP, dan juga pembuatan Perjanjian Kerjasama jika melibatkan institusi di luar pemerintah daerah (pihak eksternal). Misalnya, dalam pelaksanaan program **Smart Kampung**, pastinya dibutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti misalnya PT Telkom atau perusahaan *provider* internet lainnya sebagai pendukung inovasi ini.
- b. **Pengembangan Infrastruktur:** seperti di Renaksi di jangka pendek dan menengah, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan di komponen ini adalah penyiapan *hardware* seperti komputer (PC), laptop, ketersediaan jaringan internet, dan adanya server. Untuk ketersediaan internet, karena wilayahnya yang kecil dan berada di daerah urban, 100 persen wilayah di Kota Mojokerto sudah tidak memiliki daerah *blank spot*. Saat ini, pemerintah Kota Mojokerto telah menyediakan 220 titik hotspot gratis bagi warganya.<sup>2</sup> Keberadaan *hotspot* internet gratis yang disediakan oleh pemerintah kota ini bisa mendukung pelaksanaan **Smart Kampung**, sebab seluruh kelurahan sudah terjangkau oleh saluran internet.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** di komponen ini, kegiatan tidak berbeda dari Renaksi di jangka pendek dan menengah. Yaitu, pembuatan website atau aplikasi jika dibutuhkan. Seperti misalnya di dalam program **Smart Kampung**, dilakukan penambahan fitur atau restorasi website yang dimiliki oleh kelurahan karena kelurahan sudah memiliki website. Akan tetapi, karena keberadaan website yang dikelola oleh kelurahan masih beragam, perlu dilakukan restorasi atau penambahan fitur agar sesuai dengan program yang dijalankan.
- d. **Penguatan Literasi:** komponen ini memiliki dua kegiatan utama: sosialisasi dan penguatan kapasitas. Di inovasi **Smart Kampung** misalnya, penguatan kapasitas sangat diperlukan untuk para operator atau pengelola program **Smart Kampung**. Pelatihan atau penguatan kapasitas dibutuhkan karena kompetensi dan keterampilan terhadap penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SDM di kelurahan sangat beragam. Terkait sosialisasi, kegiatan ini bisa dilakukan tidak saja dengan pertemuan langsung (*luring*), tetapi juga melalui media sosial, seperti IG, Facebook, Twitter, ataupun Tiktok. Saat ini, sosialisasi melalui media

---

<sup>2</sup> <https://jatimtimes.com/baca/260919/20220222/091600/kota-mojokerto-perluas-wifi-gratis-tersebar-di-220-titik-di-18-kelurahan>

sosial juga efektif sama efektifnya dengan kegiatan luring, tetapi bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dan murah biaya.

Tabel 4. 1. Rencana Aksi Smart Governance Jangka Pendek – Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi	Palapa Mojo – Pelayanan Publik Terpadu Kota Mojokerto	Melakukan penyusunan pedoman pembangunan aplikasi	2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyediaan server	2023	Membangun aplikasi digital	2023	1. Pelatihan peningkatan SDM penyelenggara pelayanan publik 2. Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat	2023 – 2025
	Optimalisasi Diseminasi Informasi Pelayanan Publik	Curhat Ning Ita	1. Pembuatan petunjuk teknis penggunaan sistem Curhat Ning Ita 2. Pembentukan tim pelaksana Curhat Ning Ita di Diskominfo dan OPD teknis lainnya 3. Pemilihan staff pelayanan di desk kantor MPP, tim cyber patrol, dan tim cross check aduan.	2021	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyediaan server 4. Penyediaan perangkat (HP untuk menerima aduan) 5. Penyediaan <i>desk</i> (tempat) bagi penerima aduan di MPP	2021	1. Melakukan integrasi dengan aplikasi Whistle Blowing System (WBS) terkait aduan tindak pidana korupsi 2. Pembuatan <i>website</i> untuk menerima aduan 3. Pembuatan kanal di media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp)	2021 - 2022	1. Pelatihan dan <i>upgrade skill</i> SDM penerima aduan di kantor MPP 2. Bimtek bagi OPD untuk penanganan dan tindak lanjut aduan 3. Sosialisasi kepada masyarakat delapan kanal penyaluran aduan (SMS, WA, FB, Twitter, IG, dan website). Sosialisasi dilakukan dengan cara daring atau luring (lewat pertemuan	2021-2027

									yang dihadiri walikota atau OPD)	
<b>Manajemen Birokrasi yang Efisien</b>	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Si Manko (Sistem Informasi Manajemen Risiko)	1. SK Walikota 2. Pembuatan SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan Si Manko 3. SK tim Si Manko	2023	1. Penyediaan jaringan internet (wifi) 2. Penyediaan komputer/laptop	2023	Pembuatan website <a href="https://risikomojokertokota.go.id">https://risikomojokertokota.go.id</a>	2023	1. Sosialisasi program ke OPD di pemerintah Kota Mojokerto 2. Pelatihan SDM di Inspektorat	2023
	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	SimHP (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan)	1. Pembuatan panduan teknis pelaksanaan 2. Pembuatan SK tim	2023	1. Penyediaan jaringan internet (wifi) 2. Penyediaan komputer/laptop	2023	Pembuatan website SimHP	2023	1. Sosialisasi program ke OPD di pemerintah Kota Mojokerto 2. Pelatihan SDM di Inspektorat	2023
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	E-Calender	Pembuatan SOP dan panduan teknis	2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya	2023	Pembuatan aplikasi <i>e-Calender</i>	2023	1. Pelatihan kepada para sekretaris pribadi pimpinan 2. Sosialisasi program ke kalangan OPD	2023
	Mendorong penggunaan Satikomo bagi OPD untuk mempublikasi data statistik sektoral	Pengembangan Satu Data Kota Mojokerto	1. Perwali Satu Data Kota Mojokerto 2. SK Walikota untuk Forum Satu Data 3. Penunjukan operator data di tiap OPD teknis (selaku produsen data) 4. Koordinasi dengan BPS	2020 - 2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyiapan server	2020 - 2021	1. Pembuatan website Satu Data Kota Mojokerto 2. Updating data makro di website Satu Data Kota Mojokerto	2022 2023	1. Sosialisasi kepada OPD untuk penggunaan satu data untuk pembuatan kebijakan 2. Pelatihan SDM di Diskominfo untuk data	2023

			sebagai pembina data						analyst dan statistisi 3. Pelatihan operator data di tiap OPD	
Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Pengembangan E-SAKIP	Pembuatan panduan teknis E-SAKIP	2022	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyiapan server	2023	Pengembangan aplikasi atau website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	2023	1. Sosialisasi kepada OPD terkait inovasi 2. Bimtek kepada SDM di Bagian Organisasi dan OPD lainnya 3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait e-SAKIP agar mereka bisa memberikan <i>feedback</i>	2023	
Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	e-Kinerja	Pembuatan panduan teknis inovasi	2023	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya 3. Penyiapan server	2023	Pembuatan aplikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	2023	1. Sosialisasi kepada OPD dan ASN 2. Bimtek SDM di Bagian Organisasi	2023	
Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Pembangunan Knowledge Management System (KMS)	1. Penunjukan tim pelaksana 2. Pembuatan SOP atau juknis kegiatan 3. Pembuatan blue print KMS Kota Mojokerto 4. Aktivasi blue print KMS Kota Mojokerto	2024  2026	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan dan maintenance server	2024	1. Pembuatan website atau penambahan fitur di website milik Pemkot yang saat ini sudah ada 2. Pembuatan fitur-fitur atau kamar-kemar yang tematik.	2024 – 2025	1. Penguatan kapasitas dan Bimtek kepada SDM OPD untuk pembentukan mindset. 2. Melakukan transfer of knowledge kepada ASN SDM di	2024 - 2027	

									Pemkot Mojokerto	
	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan tim pelaksana program</li> <li>2. Pembuatan SOP atau juknis program</li> <li>3. Pembuatan perjanjian Kerjasama dengan pihak eksternal (ketiga) untuk mendukung inovasi</li> </ol>	2026	Pengumpulan data dari OPD	2026 - 2027	Pembangunan sistem	2027	Penguatan kapasitas dan Bimtek kepada SDM di OPD	
<b>Efisiensi Kebijakan Publik</b>	Melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap program pembentukan dan diseminasi produk hukum daerah secara online	Revitalisasi JDIH (Penyematan TTE pada Produk Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Perwali tentang Produk Hukum Daerah (Prokumda)</li> <li>2. Penyusunan SOP Prokumda baru</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet</li> <li>2. Penyediaan PC, laptop, dan sarana TIK penunjang lainnya</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan website</li> <li>2. Pembuatan format data yang sama</li> <li>3. Pembuatan TTE yang tersertifikasi</li> </ol>	2023	Sosialisasi kepada OPD untuk penyematan TTE agar terjadi keseragaman format	2023
	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Dashboard Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Walikota untuk Dashboard Walikota</li> <li>2. SK Tim</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet</li> <li>2. Penyediaan server</li> </ol>	2023	Pembuatan website dan aplikasi	2023	Sosialisasi kepada OPD	

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

Tabel 4. 2. Rencana Aksi Smart Governance Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Layanan Publik</b>	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik	Smart Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Penunjukan tim pelaksana</li> <li>3. Koordinasi dengan kelurahan</li> <li>4. Pembuatan PKS dengan Telkom atau perusahaan swasta di bidang telekomunikasi lainnya</li> </ol>	2028 - 2032	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan internet di kelurahan (kampung) di Kota Mojokerto</li> <li>2. Penyediaan komputer atau laptop di kelurahan</li> <li>3. Penyiapan ruangan untuk operator atau pusat kegiatan lainnya (missal: pelayanan perizinan)</li> <li>4. Penyiapan atau pembuatan kegiatan di masing-masing kelurahan</li> </ol>	2028 - 2032	Pembuatan aplikasi atau atau penambahan fitur di website di masing-masing kampung (kelurahan) secara bertahap	2028 - 2032	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program kepada kelurahan dan masyarakat di kelurahan</li> <li>2. Penguatan SDM di Diskominfo sebagai koordinator program</li> <li>3. Penguatan SDM di kelurahan sebagai pelaksana program ini</li> </ol>	2028 - 2032
<b>Manajemen Birokrasi yang Efisien</b>	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Pengembangan Knowledge Manajement System (KMS)	Updating SOP atau juknis kegiatan	2028	Maintenance server	2028	Penambahan fitur baru	2028	Penguatan atau Bimtek kepada SDM OPD	2028
<b>Efisiensi Kebijakan Publik</b>	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto	Pembaharuan SOP atau juknis kegiatan	2028	-	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada operator untuk pengolahan dan analisa data</li> <li>2. Sosialisasi kepada OPD untuk menggunakan data yang sudah dianalisa untuk pengambilan keputusan</li> </ol>	2028

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

## 4.2 SMART BRANDING

Rencana Aksi (Renaksi) di dimensi *Smart Branding* terdiri dari jangka pendek (2023), jangka menengah (2024 – 2027), dan jangka panjang (2028 – 2032). Masing-masing rencana aksi di inovasi *Smart Branding* bisa dilihat di tabel 4.3 dan 4.4 di bawah. Berikut rangkuman Renaksi Jangka Pendek – Jangka Menengah, dan Renaksi Jangka Panjang.

### 4.2.1 Rencana Aksi Jangka Pendek – Jangka Menengah

Renaksi jangka pendek dan menengah terdiri dari empat komponen. Yaitu: kesiapan kebijakan dan kelembagaan; kesiapan infrastruktur pendukung; kesiapan perangkat lunak, dan penguatan literasi. Beberapa program yang akan dilaksanakan di jangka pendek dan jangka menengah antara lain Tourism Information Center (TIC), Wisata Bahari Mojopahit, Pembuatan dan Aktivitasi Blue Print Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya, dan Perluasan Jempol Mempesona dengan penambahan Klinik OSS dan Call Center.

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan regulasi (Perwali, SK Walikota, SK Kepala OPD), pembuatan PKS/MoU jika melibatkan pihak eksternal, pembentukan tim pelaksana dan pemilihan SDM, dan pembuatan panduan berupa petunjuk teknis (juknis) atau SOP. Di inovasi Wisata Bahari Mojopahit, tidak saja melibatkan OPD di Kota Mojokerto saja, tetapi juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, karena Kota Mojokerto ini dialiri oleh empat DAS Brantas dan sembilan sub-DAS Brantas, dan sungai yang akan digunakan untuk pengembangan inovasi ini, merupakan Sungai Brantas. Sudah sewajarnya, BBWS menjadi pihak yang dilibatkan dalam inovasi ini. Karena pengembangan ini membutuhkan investasi yang besar, juga dibutuhkan peran sektor swasta untuk berkontribusi dalam pengembangannya. Dan juga, komunitas kreatif yang bisa berperan dalam memberikan kontribusi konten terhadap pengembangan inovasi ini. Koordinasi dengan komunitas juga diperlukan untuk mendukung program Creative Hub Kota Mojokerto. Dalam pembangunan Creative Hub juga diperlukan studi kelayakan. Tujuannya, agar bisa dimanfaatkan dengan optimal. Tumbuhnya sektor usaha digital *start-up* dan digital nomad, keberadaan *co-working space* menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat urban. Akan tetapi, yang lebih penting adalah pemilihan lokasi yang benar, sehingga tidak menjadi fasilitas yang mangkrak karena salah menentukan lokasi. Selain itu, pemerintah kota perlu menjalin kolaborasi dengan komunitas digital *start-up* dan kreatif yang ada di Kota Mojokerto.

- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** di komponen ini, infrastruktur yang diperlukan tidak saja berkaitan dengan TIK, tetapi juga infrastruktur fisik berupa bangunan (gedung) kebutuhan furniture, dan fasilitas pendukung fisik lainnya. Inovasi pengembangan Jempol Mempesona yang rencana akan dilengkapi dengan *call center* dan klinik konsultasi, tentunya membutuhkan ruangan yang bisa digunakan untuk konsultasi bagi pengusaha (selain juga perlu untuk mengembangkan konsultasi secara daring). Pengembangan Wisata Bahari Mojopahit juga akan melibatkan pembangunan infrastruktur fisik yang sangat banyak: seperti misalnya *dive center*, *surfing center*, tempat parkir yacht, perahu wisata, tempat UKM dan UMKM untuk berjualan, *food court*, tempat mitigasi bencana, dan dermaga wisata. Selain itu, untuk Creative Hub diperlukan pembangunan fasilitas gedung yang juga bisa digunakan sebagai *co-working space*. Pembangunan Gedung untuk *co-working space* di Creative Hub ini dilakukan secara *multi-years* dan dimulai pada 2023.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak berupa website dan aplikasi dilakukan di inovasi *project prospectus* wisata yang dikembangkan dengan menggunakan WebGIS. Dengan penggunaan GIS ini, pembaharuan data terus perlu untuk dilakukan, sehingga *update website* perlu dilakukan terus-menerus. Juga di *Tourism Information Center* (TIC), karena selain menyediakan sarana fisik untuk TIC, informasi destinasi wisata juga dilakukan di *website* yang sudah bisa diakses oleh semua warga, termasuk orang dengan disabilitas (buta). Kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada 2023.
- d. **Penguatan Literasi:** dua kegiatan dilakukan di penguatan literasi: sosialisasi dan penguatan kapasitas SDM pengelola. Sosialisasi yang masif sangat perlu dilakukan di inovasi Bulan Kunjungan dan Promosi Mojopahit yang didalamnya merupakan integrasi pembuatan 9 *events* budaya dan pariwisata daerah, diantaranya Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, dan Pemilihan Duta Wisata. Kegiatan-kegiatan perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat, tidak saja di Kota Mojokerto, tetapi harus diluar daerah. Agar gaung *event-event* ini lebih bisa menarik banyak wisatawan yang datang, bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan *stakeholders* pariwisata seperti Traveloka, Tiketdotcom, PHRI, dan sebagainya. Dalam pengembangan Wisata Bahari Mojopahit, upaya penguatan kapasitas juga dilakukan dengan melibatkan para pegiat komunitas kreatif, Pokdarwis, dan Karang Taruna. Misalnya saja, Pokdarwis untuk menjadi pemandu wisata, karena Kota Mojokerto berkeinginan untuk mengembangkan wisata unggulan di tiap-tiap kelurahan. Pelatihan juga rencana dilakukan untuk Balawista yang untuk memperkuat wisata susur sungai. Penguatan literasi dilakukan pada 2023.

## 4.2.2 Rencana Aksi Jangka Panjang

Di jangka panjang, terdapat tiga inovasi di dimensi *Smart Branding*: pengembangan pariwisata berbasis Virtual Reality, Penyediaan Shuttle di Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas, Medical Tourism, dan pembangunan Smart Information Sign (petunjuk arah pintar).

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di Renaksi jangka panjang, selain penyiapan regulasi dan pembentukan tim penanggung jawab inovasi, adalah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak eksternal, seperti sektor swasta. Inovasi yang memerlukan MoU dengan sektor lain misalnya Medical Tourism, yang memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyedia transportasi.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** pengembangan infrastruktur yang diperlukan tidak saja berkaitan dengan TIK, tetapi juga pembangunan fasilitas (gedung) beserta isinya. Penyiapan *hardware* TIK berupa *smart phone* atau tablet yang sudah dilengkapi dengan MEMS, sangat diperlukan untuk pengembangan wisata berbasis *virtual reality*. Pengembangan infrastruktur lain yang perlu dikembangkan sebagai pendukung pariwisata berbasis *virtual reality* (RV) adalah lokasi fisik pariwisata seperti Galeri Soekarno di Kelurahan Purwotengah.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangann perangkat lunak diperlukan di inovasi pengembangan wisata berbasis *virtual reality*. Kegiatan yang dilakukan di komponen ini antara lain pembuatan alogaritma dan desain untuk VR yang akan disajikan kepada para pengunjung. Pengembangan perangkat lunak diperlukan di inovasi Medical Tourism dimana layanan ini diintegrasikan dengan layanan SIMAPAN.
- d. **Penguatan Literasi:** kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada OPD, masyarakat, komunitas kreatif, dan pelaku bisnis. Wisata berbasis VR, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas – tidak saja di Kota Mojokerto, tetapi juga daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Sedangkan, *co-working space* perlu juga disosialisasikan kepada pelaku bisnis, sebagai pengguna potensial untuk inovasi ini. Demikian juga dengan di inovasi Medical Tourism dimana diperlukan penguatan kapasitas SDM yang terlibat di dalamnya – tidak hanya tenaga kesehatan, seperti driver, pemandu wisata, dan sebagainya.

Tabel 4. 3. Rencana Aksi Smart Branding Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Pariwisata	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Tourism Information Center (TIC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan manual atau juknis TIC</li> <li>2. Pemilihan SDM pelaksana TIC (operator, customer service, dan sebagainya).</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet</li> <li>2. Penyediaan komputer atau laptop</li> <li>3. Penyediaan server</li> <li>4. Penyediaan lokasi TIC di lokasi-lokasi wisata prioritas</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan website</li> <li>2. Penambahan fitur <i>accessibility</i> pada tiap user objek wisata daya tarik daerah</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program kepada tiap user objek wisata daerah</li> <li>2. Pelatihan SDM di tiap user objek wisata daya tarik daerah, terutama untuk melakukan pembaharuan data</li> </ol>	2023
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan dan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan investor untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata</li> </ol>	Wisata Bahari Mojopahit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi kelayakan lokasi pembangunan kawasan ini</li> <li>2. Pembuatan Perwali</li> <li>3. Membuat SPK dengan BBWS</li> <li>4. Pembuatan SPK dengan sektor swasta</li> <li>5. Koordinasi dengan komunitas ekonomi kreatif di Kota Mojokerto</li> <li>6. Pembangunan Kawasan Wisata Bahari dan Perairan</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan TIC dan perlengkapan kawasan ini</li> <li>2. Fasilitas kebersihan</li> <li>3. Penataan lanskap dan perlengkapan</li> <li>4. Panggung kesenian/pertunjukan/amphiteater,</li> <li>5. Dive Center dan peralatannya,</li> <li>6. Surfing Center dan peralatannya,</li> <li>7. Titik labuh/singgah kapal yacht dan perlengkapan</li> <li>8. Dermaga wisata</li> <li>9. Fasilitas mitigasi bencana alam</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat, komunitas kreatif, dan Pokdarwis baik secara daring atau luring Wisata Bahari Mojopahit</li> <li>2. Pemberdayaan dan pelatihan UMKM yang akan menempati di pusat oleh-oleh dan food court.</li> <li>3. Pelatihan dan penguatan kapasitas dan kelembagaan Pokdarwis dan komunitas kreatif di Kota Mojokerto.</li> <li>4. Pelatihan kepada Satgas Balawista</li> </ol>	2023

			<p>7. Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertosusila, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan</p> <p>8. Pembuatan dan penguatan kelembagaan Pokdarwis di kelurahan.</p>		<p>10. Fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata</p> <p>11. Fasilitas umum</p> <p>12. Fasilitas aksesibilitas</p> <p>13. Visibilitas Geopark</p> <p>14. Perahu Wisata</p>				<p>dari pemuda atau Karang Taruna di kelurahan untuk mendukung wisata susur sungai.</p>	
<p>Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholders di bidang pariwisata untuk pembuatan kalender event wisata terintegrasi</p>	<p>Bulan Kunjungan dan Promosi Wisata (Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pentas Seni Budaya Daerah di TMII, Apeksi Regional, Apeksi Nasional, Jatim Specta)</p>	<p>1. Pembuatan Perwali</p> <p>2. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan stakeholders pariwisata di Kota Mojokerto</p> <p>3. Pembuatan dan penguatan kelembagaan Pokdarwis di kelurahan.</p>	2023	<p>Penyiapan lokasi tiap-tiap event</p>	2023	-	-	<p>1. Sosialisasi event melalui media sosial, media massa, dan komunitas.</p> <p>2. Penguatan SDM pariwisata (komunitas kreatif, Pokdarwis di kelurahan)</p>	2023	
<p>Melakukan pengembangan daya tarik dan</p>	<p>Penyusunan Blueprint Mojokerto Kota Wisata Berbasis</p>	<p>1. Pembuatan tim pelaksana</p> <p>2. Pembuatan MoU dengan pihak</p>	2023	<p>1. Melakukan survey untuk pembuatan blue print</p>	2023	-	-	<p>1. Pelaksanaan pelatihan bagi petugas yang melakukan survey atau pengambilan data</p>	2023	

	destinasi wisata baru	Sejarah dan Budaya	ketiga untuk melaksanakan pembuatan blue print		2. Pemetaan destinasi, atraksi, infrastruktur yang ada dan yang butuh untuk dikembangkan, dan landmarks.				untuk pembuatan blue print. 2. Melakukan sosialisasi kepada OPD hasil dari blue print yang dibuat	
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Aktivitas City Branding Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya	1. Pembuatan juknis atau aturan pelaksana 2. Pemilihan tim pelaksana <i>branding</i> Kota Mojokerto	2024	1. Penyediaan lokasi pusat branding Kota Mojokerto 2. Penyediaan komputer dan jaringan internet	2024	-	-	1. Pelatihan kepada SDM yang bertanggung jawab terhadap branding Kota Mojokerto (dengan dikoordinasi di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata). 2. Sosialisasi kepada OPD, masyarakat, sektor swasta, komunitas kreatif, dan sektor pendidikan terkait branding Kota Mojokerto sebagai kota wisata berbasis sejarah dan budaya. Sosialisasi dilakukan lewat media sosial atau secara langsung.	2024
<b>Membangun Daya Saing Bisnis</b>	Pembuatan kebijakan untuk menarik investasi	Menyediakan dokumen investasi project prospectus wisata (potensi berbasis WebGIS)	1. SK tim 2. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan	2023	1. Penyiapan server 2. Jaringan internet 3. PC/laptop		1. Pembuatan website 2. Updating data ke dalam peta web yang sudah dibuat	2023	1. Sosialisasi peta potensi wisata berbasis WebGIS kepada masyarakat dan investor 2. Bimtek kepada SDM yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melakukan pembaharuan data	
	Meningkatkan kualitas	Perluasan Jempol Mempesona	1. Menyediakan regulasi	2023	1. Penyediaan tempat klinik	2023	-	-	1. Sosialisasi call center dan klinik	

	<p>layanan investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi dengan pengembangan Jempol Mempesona</p>	<p>(Klinik Pendampingan OSS dan Call Center Perizinan)</p>	<p>pendukung untuk Klinik Pendampingan OSS dan Call Center Perizinan</p> <p>2. Persiapan SDM untuk Pendampingan OSS dan di Call Center</p>		<p>konsultasi dan call center</p> <p>2. Penyediaan fasilitas kantor, seperti furniture, telepon, dan sebagainya.</p> <p>3. Penyediaan saluran internet</p>				<p>pendampingan OSS kepada warga/pelaku UMKM lewat kepala desa</p> <p>2. Sosialisasi call center dan klinik pendampingan OSS kepada warga/pelaku UMKM lewat asosiasi UMKM</p> <p>3. Sosialisasi call center dan klinik pendampingan OSS kepada warga/pelaku UMKM lewat media sosial</p>	
	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi</p>	<p>Pengembangan Mojokerto Creative Hub</p>	<p>1. Pembuatan Perwali</p> <p>2. Pembuatan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga</p> <p>3. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan</p> <p>4. Studi kelayakan untuk lokasi co-working space (creative hub)</p> <p>5. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan universitas (Pentahelix) di Kota Mojokerto</p> <p>6. Pembuatan SOP untuk penggunaan creative hub (sewa, aturan</p>	<p>2023 - 2024</p>	<p>1. Pembangunan fasilitas fisik gedung (1 lokasi tiap tahun)</p> <p>2. Pengisian fasilitas, seperti furniture dan perlengkapan lainnya</p> <p>3. Pengisian komunitas kreatif sebagai tenant (pemakai) Creative Hub.</p> <p>4. Pembuatan atau penyusunan kegiatan-kegiatan regular di Creative Hub yang dilaksanakan untuk komunitas kreatif.</p>	<p>2023 – 2028</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1. Sosialisasi fasilitas kepada masyarakat Kota Mojokerto, kalangan swasta, komunitas kreatif, dan sebagainya.</p> <p>2. Penguatan kapasitas kelompok ekonomi kreatif, sebagai pendukung utama Creative Hub.</p>	<p>2023 - 2027</p>

			pakai atau penggunaan, dan sebagainya)							
<b>Penataan Wajah Kota</b>	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Pembuatan Trotoar Tematik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi walikota</li> <li>2. Koordinasi dengan komunitas seni dan budaya atau komunitas kreatif Kota Mojokerto untuk pembuatan tema di masing-masing Kawasan di Kota Mojokerto. Komunitas ini juga bisa menjadi pelaksana kegiatan</li> <li>3. Koordinasi dengan sektor swasta (CSR)</li> </ol>	2023	Penyiapan lokasi trotoar yang akan dijadikan lokasi	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Melakukan persiapan bagi komunitas kreatif, seni budaya yang dilibatkan</li> </ol>	2023
	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Pembuatan Gapura Majapahitan	Regulasi walikota	2022 - 2023	Pemilihan lokasi kantor pemerintahan sebagai target pembangunan gapura Majapahitan	2022 - 2023	-	-	Sosialisasi kepada OPD dan institusi pemerintah daerah lainnya	2022 - 2023

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

Tabel 4. 4. Rencana Aksi Smart Branding Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Pariwisata	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Pengembangan Wisata berbasis Virtual Reality	1. Pembuatan Perwali 2. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan stakeholders pariwisata di Kota Mojokerto	2028	1. Pemilihan lokasi yang dijadikan destinasi wisata 2. Melakukan renovasi yang diperlukan di lokasi yang ditunjuk 3. Penyediaan jaringan internet 4. Penyediaan dan maintenance server 5. Persiapan hardware, seperti smart phone dan computer tablet yang sudah dilengkapi dengan MEMS	2028 - 2030	1. Pembuatan alogaritma 2. Pembuatan desain	2028 – 2030	1. Penguatan SDM Pemkot Mojokerto, komunitas kreatif, pengelola destinasi wisata 2. Sosialisasi program kepada masyarakat luas	2028 - 2030
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Shuttle di Kawasan Destinasi Wisata Prioritas	1. Pembuatan Kerjasama dengan pihak ketiga 2. Koordinasi dengan sektor swasta untuk Kerjasama CSR	2028	1. Pengadaan kendaraan shuttle bis di Kawasan 2. Pembuatan atau pembangunan halte shuttle 3. Pembuatan rute shuttle	2028 – 2029	-	-	1. Pelatihan kepada SDM (sopir shuttle). 2. Pelatihan SDM pemandu wisata.	2028 - 2029
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Medical Tourism	1. Penetapan SK Walikota tentang Penetapan RSUD sebagai RS berbasis layanan <i>tourism</i> 2. Pembentukan tim pelaksana kegiatan	2028	Pembuatan paket wisata kesehatan di Kota Mojokerto	2028	1. Kesiapan system pendukung medical tourism (MCU Layanan Unggulan) 2. Pengembangan layanan	2028	1. Sosialisasi kepada seluruh karyawan RSUD terkait regulasi dan layanan medical tourism ini.	2028

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembuatan studi kelayakan (blue print) layanan RS berbasis turisme.</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan travel penyedia layanan transportasi</li> <li>5. Pembuatan jejaring dengan agen wisata, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan, Disporabud Jatim.</li> </ol>				Aplikasi SIMAPAN untuk pesanan layanan medical tourism		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelatihan SDM (customer service, sopir, guide, dan tenaga kesehatan) pendukung program.</li> <li>3. Sosialisasi kepada masyarakat dan OPD terkait pelayanan baru, melalui media sosial dan pertemuan offline.</li> <li>4. Sosialisasi kepada agen wisata baik yang ada di Kota Mojokerto atau berbasis platform, seperti Tiket.com, Traveloka, dan sebagainya.</li> </ol>	
<b>Membangun Daya Saing Bisnis</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Pengembangan Creative Hub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan universitas (Pentahelix) di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembuatan SOP untuk pelaksanaan co-working space (sewa, aturan pakai</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan (renovasi) infastruktur</li> <li>2. Pengisian furniture di co-working space</li> <li>3. Penyediaan jaringan internet dan fasilitas</li> </ol>	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi co-working space kepada masyarakat dan pelaku bisnis di Kota Mojokerto</li> <li>2. Penguatan komunitas</li> </ol>	2028

			atau penggunaan, dan sebagainya)		perkantoran lainnya				kreatif Kota Mojokerto	
<b>Penataan Wajah Kota</b>	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota berbasis TIK	Pembangunan Smart Information Sign (Penunjuk arah pintar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Koordinasi dengan sektor swasta, komunitas kreatif, dan stakeholders pariwisata di Kota Mojokerto.</li> <li>3. Koordinasi dengan sector swasta terkait dukungan dari anggaran CSR</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan lokasi petunjuk pintar</li> <li>2. Pembangunan fasilitas petunjuk pintar (signage).</li> </ol>	2028 - 2030	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan langsung ataupun media sosial	2028-2030

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan II Kota Mojokerto

## 4.3 SMART ECONOMY

Renaksi jangka pendek (2023), jangka menengah (2024 – 2027), dan jangka panjang (2028 – 2032) bisa dilihat secara lengkap di tabel 4.5 dan tabel 4.6 di bawah ini.

### 4.3.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Di jangka pendek dan menengah, beberapa inovasi yang disusun oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Economy* antara lain: urban farming, pengembangan aplikasi SI DIKUPASI, MomMI ECCIS (*Mojokerto's Small and Medium Enterprises Coaching Clinic*), dan Koperasi Roda Ekonomi Indonesia (KOROENA). Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di keempat komponen Renaksi:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, penyiapan regulasi yang diperlukan, antara lain Perwali/SK Walikota/SK Kepala OPD. Selain itu, juga diperlukan juknis atau manual pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga diperlukan naskah MoU karena beberapa inovasi memerlukan kerjasama dengan pihak eksternal (swasta) untuk inovasi *urban farming*. Karena, di inovasi ini, hasil panen tidak saja fokus untuk konsumsi pribadi, tetapi difokuskan untuk bisa dipasarkan di supermarket yang ada di Kota Mojokerto. Kerjasama dengan pihak eksternal dengan *marketplace* nasional seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya, juga perlu dilakukan di inovasi pemasaran online produk-produk Kota Mojokerto di griyaukm.com. Tidak saja untuk memperluas pasar dan jumlah omzet yang dihasilkan oleh para UKM dan UMKM, tetapi juga untuk kesinambungan inovasi ini sendiri. Kegiatan-kegiatan di inovasi ini akan dilakukan pada 2023 dan 2024.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** selain infrastruktur TIK, sarana pendukung diperlukan berupa lahan/pekarangan di inovasi *urban farming* dan Bedah Warung. *Urban farming*, ketersediaan lahan pekarangan perlu disiapkan oleh warga sebagai lokasi untuk pembibitan (demplot) ataupun penanaman sayuran. Sedangkan inovasi Bedah Warung yang diinisiasi oleh Bagian Perekonomian, memerlukan kerjasama dengan warung-warung (toko-toko) yang ada di Kota Mojokerto untuk menjalankan program ini.
- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak diantaranya meliputi pengembangan dan penambahan fitur di website dan aplikasi. Pengembangan website dan konek dengan *marketplace* dilakukan di inovasi pemasaran hasil UKM dan UMKM di Griya UKM. Program SI DIKUPASI melakukan pengembangan aplikasi Android yang didalamnya dilengkapi informasi UKM dan UMKM, seperti misalnya jenis perizinan, sertifikasi usaha, jumlah modal, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya.

- d. **Penguatan Literasi:** penguatan kapasitas kepada para petani urban perlu dilakukan, karena bisa saja mereka tidak memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pertanian. Penguatan kapasitas ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pelatihan yang diberikan bisa dari pembibitan, pembuatan demplot, dan pemupukan. Pelatihan lanjutan juga perlu dilakukan oleh OPD lainnya, seperti Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan jika para petani urban melakukan kerjasama dengan supermarket atau melakukan pemasaran hasil produk pertanian yang dihasilkan. Pelatihan bisa berupa pengemasan atau pemasaran. Penguatan SDM juga diperlukan di inovasi MomMI ECCIS (*Mojokerto's Small and Medium Enterprises Coaching Clinic*), terutama kepada SDM di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, karena merekalah yang akan melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM.

#### 4.3.2 Renaksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Empat inovasi direncanakan di jangka panjang (2028 – 2032). Yaitu, Fasilitasi Produk Unggulan Ekspor, Microfinance UKM dan UMKM di Kota Mojokerto, Urban Farming, dan BUMD Go Digital. Berikut Renaksi yang dilakukan di jangka panjang di empat komponen:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di pengembangan kebijakan dan kelembagaan, selain diperlukannya regulasi (Perwali, SK Walikota, ataupun SK Kepala OPD), surat perjanjian kerjasama perlu dipersiapkan karena tiga dari empat inovasi bekerjasama dengan pihak eksternal. Seperti di Fasilitasi Produk Unggulan Ekspor, pemerintah kota akan menggandeng kalangan eksportir dan juga asosiasi, seperti Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) karena Kota Mojokerto merupakan salah satu pusat sentra industri alas kaki (sepatu dan sandal) di Jawa Timur, sehingga fasilitasi kepada eksportir, perlu melibatkan asosiasi. Pembuatan perjanjian juga diperlukan untuk rencana kerjasama dengan BAZNAS di program Microfinance. Inovasi Microfinance, selain membutuhkan penyiapan rencana kerjasama, juga perlu mengadakan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena kelompok akan berfungsi sebagai penyalur modal dan juga untuk penguatan bagi anggota.
- b. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** penyiapan infrastruktur TIK seperti ketersediaan jaringan internet diperlukan di inovasi BUMD Go Digital. Inovasi lainnya, seperti *urban farming*, lebih membutuhkan persiapan infrastruktur fisik lainnya, seperti ketersediaan lahan dan bibit. Penyediaan infrastruktur pendukung lainnya diperlukan di program microfinance untuk UKM dan UMKM, berupa pembuatan rekening untuk menerima penyaluran dana bantuan.

- c. **Pengembangan Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak direncanakan di inovasi BUMD Go Digital dengan pembuatan website dan aplikasi. Sedangkan untuk ketiga inovasi lainnya tidak memerlukan pengembangan perangkat lunak.
- d. **Penguatan Literasi:** Peningkatan kapasitas diperlukan diberikan kepada UKM atau UMKM yang menjadi sasaran program Microfinance. Pelatihan dan penguatan kapasitas diberikan agar mereka bisa mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Tidak saja agar mereka bisa mengembalikan pinjaman modal yang mereka dapatkan, tetapi untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Pelatihan yang bisa diberikan seperti pelatihan pembukuan, pembuatan rencana kerja, dan pelatihan teknis yang berhubungan dengan produk yang mereka hasilkan. Sosialisasi juga diperlukan di penguatan literasi ini. Salah satunya di program *Urban Farming*, dengan mendatangi sekolah-sekolah. Tidak saja sekolah berpotensi untuk dijadikan mitra, tetapi juga memberikan kesadaran bagi para siswa agar tertarik untuk kegiatan pertanian. Sehingga, mereka diharapkan tertarik untuk menjadi petani urban – paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, dan bisa mengatasi krisis petani di Kota Mojokerto.

Tabel 4. 5. Rencana Aksi Smart Economy Jangka Pendek – Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Penataan Ekosistem Industri	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Urban Farming	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi daerah (SK/Perwali)</li> <li>2. Pembentukan dan penguatan kelompok petani</li> <li>3. Melakukan identifikasi sektor swasta untuk bekerjasama (misal: perusahaan retail)</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan sektor swasta untuk kemitraan pemasaran produk</li> </ol>	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan lahan oleh warga</li> <li>2. Persiapan pembibitan dan distribusi bibit bagi kalangan petani urban</li> <li>3. Pembuatan demplot</li> </ol>	2024	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada para petani urban oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Dinas Pertanian, termasuk untuk diversifikasi tanaman</li> <li>2. Pelatihan pemasaran dan pengemasan hasil produk pertanian oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Indag</li> <li>3. Sosialisasi program ini kepada masyarakat lewat media social</li> </ol>	2024 - 2027
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optomalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Pengembangan Aplikasi SI DIKUPASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK Tim Nomor 188.4/238/41 7.513.4/2021</li> <li>2. Pembuatan Surat Perjanjian</li> </ol>	2021 - 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan internet</li> <li>2. PC/laptop</li> <li>3. Penyiapan server</li> </ol>	2023	Pengembangan fitur aplikasi Android	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi aplikasi kepada UMKM</li> <li>2. Pelatihan kepada pendamping di klinik inkubasi untuk e-learning</li> </ol>	2023

			<p>Kerjasama (SPK) dengan pihak ketiga</p> <p>3. Pendataan UKM/KM berdasarkan nama usaha, legalitas, kapasitas produksi, aset, dan NIP</p> <p>4. Penyiapan SDM untuk pendampingan di klinik e-learning inkubasi</p>						3. Sosialisasi e-learning kepada UKM/KM	
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	MomMI ECCIS (Mojokerto's Small and Medium Entreprises Coaching Clinic)	<p>1. SK tim (Nomor 188.4/100/41 7.513.5/2023)</p> <p>2. Pembuatan petunjuk teknis kegiatan (materi pelatihan)</p> <p>3. Pendataan wirausaha pemula sebagai sasaran program</p> <p>4. Pembuatan Kerjasama dengan perbankan untuk akses modal bagi UKM (HIMBARA – Himpunan Bank Negara)</p>	2023	<p>1. Penyiapan lokasi untuk pemberian klinik konsultasi kepada UKM/KM</p> <p>2. Penyusunan materi untuk fasilitasi kepada UKM/KM</p>	2023	<p>1. Pembuatan aplikasi untuk update real time</p> <p>2. Pengembangan fitur direct consultation</p>	2024  2025	<p>1. Sosialisasi kegiatan (program) dan SOP layanan kepada para wirausahawan baru.</p> <p>2. Penguatan kapasitas Dinas Koperasi, UKM, dan Indag pendukung program ini (teknisi, admin).</p>	2023

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pembuatan SOP layanan</li> <li>6. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan BP POM dan lembaga lainnya</li> </ul>							
<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Penerapan kebijakan pro-poor	Program Bedah Warung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Perwali Bedah Warung</li> <li>2. Pendataan UMKM yang dilakukan oleh kelurahan</li> <li>3. Koordinasi antar OPD pendukung (Bagian Perekonomian, Dinas UKM dan Indag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)</li> <li>4. Koordinasi dengan 18 kelurahan di Kota Mojokerto</li> </ul>	2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan lahan (lokasi toko)</li> <li>2. Penyiapan pengusaha toko yang akan diajak kerjasama</li> <li>3. Penyiapan barang-barang yang akan dijual</li> </ul>	2023	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan SDM dengan pelatihan kepada pelaku UMKM (pemilik toko)</li> <li>2. Sosialisasi kepada warga melalui kelurahan</li> <li>3. Sosialisasi program ini kepada masyarakat melalui media social</li> </ul>	2023 – 2027
	Penerapan kebijakan pro-poor	Klinik KORENA (Koperasi Roda Ekonomi Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim untuk coaching clinics koperasi di Kota Mojokerto</li> <li>2. Penerbitan SK Tim Nomor 188.45/10/417.513.2/2021</li> <li>3. Pembuatan Rancangan Perwali tentang Pembinaan dan</li> </ul>	2023	Penyediaan server dan jaringan	2023	Pengembangan aplikasi berbasis Android untuk rekam “medis” kesehatan koperasi	2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program ke 187 koperasi di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pemberian pelatihan kepada tim coaching clinics koperasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi KOROENA</li> </ul>	2023 – 2025

			Pengawasan (dikembangkan dari junkis). 4. Pendataan dan pembuatan kategori kesehatan koperasi di Kota Mojokerto							
<b>Membangun Ekosistem Keuangan</b>	Membangun sistem pembayaran elektronik	REDJO ANGURIPI (Retribusi Non Tunai Menjaga OPD dan Melindungi Pelaku Usaha dari Korupsi)	1. SK Tim Nomor 188.45/235/4 17.513.4/2021 2. SPK dengan instansi di luar pemerintah kota (Bank Jatim, OJK)	2022	1. Penyiapan jaringan internet 2. PC/laptop 3. Server	2022 - 2023	1. Pembuatan fitur aplikasi 2. Pembuatan Qris	2022 - 2023	1. Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial, atau pertemuan langsung 2. Sosialisasi kepada para pedagang di pasar dan pelaku bisnis lainnya	2023 - 2024
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pemasaran Online (griyaumkm.com)	1. Pembuatan SK Tim 2. Pembuatan SPK dengan platform market place nasional	2023 - 2024	1. Penyiapan jaringan internet 2. PC/laptop 3. Server	2023	1. Pembuatan website (griyaumkmmojokertokota.com) 2. Konek dengan market place	2024	1. Sosialisasi program kepada masyarakat dengan cara luring ataupun daring 2. Penguatan pelaku ekonomi (UKM dan UMKM) untuk menghasilkan produk berkualitas. 3. Penguatan kapasitas pelaku bisnis untuk melek teknologi	2023 - 2024
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pengembangan Pasar berbasis Transaksi Digital/ Mlijo Online - e-marketplace	1. Pembuatan SK Tim 188.4/200/41 7.513.5/2021 2. Pembuatan juknis pelaksanaan inovasi	2021 - 2023	1. Penyiapan jaringan internet 2. PC/laptop 3. Server	2023	Pembuatan aplikasi berbasis Android	2023	1. Sosialisasi program kepada masyarakat melalui media sosial atau secara langsung. 2. Sosialisasi program kepada para pedagang pasar	2023 - 2024

			3. Pembuatan SPK dengan platform market place							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis II dan III Kota Mojokerto

Tabel 4. 6. Rencana Aksi Smart Economy Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Penataan Ekosistem Industri	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Fasilitasi ekspor produk unggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan regulasi walikota</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana</li> <li>3. Pemetaan pelaku usaha unggulan</li> <li>4. Pemetaan eksportir dan asosiasi produk unggulan (misal: APRISINDO untuk persepatuan dan alas kaki)</li> <li>5. Pembuatan PKS dengan eksportir</li> </ol>	2028	Pelaksanaan pertemuan dengan eksportir dan asosisasi	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada para pelaku usaha kecil</li> <li>2. Penguatan kapasitas tim pelaksana program, seperti bagaimana meyakinkan eksportir dan asosiasi produk unggulan</li> </ol>	2028
	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Urban Farming	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan kelompok petani</li> <li>2. Penguatan Kerjasama dengan pihak swasta (supermarket)</li> </ol>	2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bibit</li> <li>2. Pembuatan demplot</li> </ol>	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kelompok petani urban</li> <li>2. Sosialisasi kegiatan urban farming ke sekolah-sekolah untuk mendorong kecintaan anak mudah (anak sekolah) untuk menjadi petani.</li> <li>3. Pelatihan packaging dan pemasaran</li> </ol>	2028

									hasil urban farming	
<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Fasilitasi UKM dan UMKM untuk sertifikasi usaha dan akses permodalan	Pengembangan Microfinance untuk UMKM Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana</li> <li>3. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (kalangan UMKM)</li> <li>4. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan BAZNAS</li> <li>5. Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan program</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan rekening di bank untuk menerima bantuan keuangan</li> <li>2. Lokasi tempat kegiatan untuk kelompok</li> </ol>	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program kepada kelompok masyarakat</li> <li>2. Peningkatan kapasitas UMKM, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan produk yang mereka hasilkan</li> </ol>	2028 - 2030
<b>Membangun Ekosistem Keuangan</b>	Membangun sistem pembayaran elektronik	BUMD GO DIGITAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana</li> <li>3. Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan program</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan jaringan internet</li> <li>2. Penyiapan dan maintenance server</li> <li>3. Penyiapan hardware seperti PC dan laptop</li> </ol>	2028	Pembuatan website dan aplikasi	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi ke SDM di semua BUMD di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM BUMD di Kota Mojokerto</li> </ol>	2028 - 2029

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan III Kota Mojokerto

## 4.4 SMART LIVING

Rencana Aksi di dimensi Smart Living jangka pendek (2023), jangka menengah (2024 – 2026), dan jangka panjang (2028 – 2032) secara lebih lengkap bisa dilihat di tabel 4.7 dan 4.8 di bawah.

### 4.4.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Renaksi di jangka pendek dan menengah meliputi inovasi seperti pengendalian tata ruang di Kota Mojokerto lewat MAGIS – Mojokerto Kota Geographic Information System, pengembangan GAYATRI – Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi, SIMAPAN – Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman, dan Pengembangan berbagai Jenis Layanan di RSUD Dr. Wahidin. Renaksi di jangka pendek dan jangka menengah ini dilihat dari keempat komponen: pengembangan kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur pendukung, perangkat lunak, dan penguatan literasi.

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain kesiapan regulasi berupa Perwali, SK Walikota, ataupun SK Kepala OPD, di dimensi *Smart Living* ini, koordinasi banyak dilakukan untuk berjalannya inovasi. Seperti misalnya GENTALA - Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama – yang juga merupakan program dari pemerintah nasional. Sebagai upaya bersama, upaya penurunan prevalensi stunting memerlukan koordinasi solid dari tingkat kota, kecamatan (termasuk Puskesmas), sampai dengan tingkat kelurahan dengan kader sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk preventif stunting melalui pendidikan calon pengantin (catin) dan pengisian ELSIMIL. Pembuatan perjanjian kerjasama juga diperlukan di program *Smart Parking*, dimana pemerintah kota perlu bekerjasama dengan sektor swasta yang berpotensi menjadi mitra, seperti misalnya pemilik pusat perbelanjaan (mall). Pembuatan SOP dan pedoman layanan diperlukan untuk inovasi seperti pengembangan layanan di RSUD Dr. Wahidin. Berbagai layanan yang rencana dikembangkan sampai dengan 2027 antara lain meliputi: Transformasi Medical Record dalam bentuk Digital, Layanan Rehab Medik Terpadu, Klinik Fertilitas, Cardiac and Stroke Center, dan Pengembangan Poli Eksklusif.
- b. **Infrastruktur Pendukung:** selain infrastruktur yang berkaitan dengan TIK seperti ketersediaan jaringan internet, server, dan komputer/laptop, infrastruktur pendukung lainnya juga diperlukan untuk mendukung kegiatan seperti GENTALA, seperti adanya alat pengukuran dan penimbangan bayi yang standar

(Antropometri). Ketersediaan peralatan pendukung juga diperlukan untuk inovasi skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) POS TENSI OKE OYE SIP, dimana diperlukan ketersediaan alat pengukur tensi. Infrastruktur berupa kendaraan juga diperlukan di inovasi penyediaan angkutan gratis untuk anak sekolah, SIMANISKERTO. Di 2022, armada yang melayani anak sekolah di jam pergi dan jam pulang ini berupa 11 armada mikrolet dan 3 bus. Tidak hanya ketersediaan armada angkutan, tetapi juga dengan melakukan pembuatan rute. Pada umumnya, rute angkutan ditetapkan di jalur-jalur dengan sekolah yang saling berdekatan. Pembangunan gedung dan penyediaan alat-alat pendukung perlu disediakan di pengembangan layanan di RSUD Dr. Wahidin. Penyediaan infrastruktur fisik pendukung juga diperlukan di program *Smart Parking*, dimana pemerintah kota perlu menentukan titik-titik untuk dijadikan lokasi *smart parking* sekaligus melakukan pembangunan fasilitas.

- c. **Perangkat Lunak:** ketersediaan perangkat lunak seperti pembuatan dan penambahan fitur di aplikasi diperlukan di beberapa inovasi, seperti pengembangan GAYATRI, SIMAPAN, dan SIDIVA – Sistem Informasi Wahidin Virtual Care. Penambahan fitur dilakukan secara bertahap, seperti misalnya di SIMAPAN. Jika pada awalnya inovasi ini hanya menyediakan layanan untuk bisa mendaftar antrian melalui aplikasi, pada saat ini, sudah ditambahkan fitur untuk janji dengan dokter spesialis, sehingga pasien tidak harus melalui poli umum. Tetapi, bisa langsung ke poli spesialis. Sehingga, ini bisa memotong jalur layanan, dan pasien menjadi lebih hemat waktu. Aplikasi SIMAPAN saat ini sudah diunduh lebih dari 1,000 kali (asumsi, digunakan paling tidak empat orang dalam satu Kartu Keluarga). Dengan pasien sekitar 100 – 200 orang per hari, mayoritas pendaftaran warga atau pasien dilakukan melalui pesan di aplikasi WA.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi berupa sosialisasi dan penguatan kapasitas diperlukan di inovasi-inovasi yang direncanakan di jangka pendek dan jangka panjang ini. Penguatan kapasitas sangat diperlukan untuk inovasi seperti GENTALA ini dengan bervariasinya kompetensi dan kemampuan dari kader, termasuk untuk melakukan pengukuran dan penimbangan bayi yang benar. Sosialisasi diperlukan seperti pencegahan stunting melalui calon pengantin agar mereka menggunakan ELSIMIL. Sebab, dengan calon pengantin mengisi data di ELSIMIL, risiko stunting bisa dideteksi.

#### 4.4.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Inovasi yang rencana dilakukan pada 2028 – 2032 di dimensi *Smart Living* ini meliputi tiga: pengembangan layanan pemanfaatan tata ruang, pengembangan layanan di RSUD Dr. Wahidin, pengembangan Mojokerto sebagai kota ramah bagi sepeda (*bike-sharing*), terutama di destinasi wisata unggulan, dan pengembangan aplikasi *smart parking*. Berikut kegiatan yang dilakukan di masing-masing komponen Renaksi:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain regulasi, pengembangan kebijakan juga memerlukan pembuatan MoU dengan pihak ketiga, terutama untuk pengembangan Mojokerto sebagai kota yang ramah sepeda. Dalam penyediaan fasilitas sepeda dengan sistem berbagi – terutama di lokasi destinasi wisata unggulan, pemerintah kota memerlukan kerjasama dengan pihak swasta, terutama dengan CSR perusahaan swasta.
- b. **Infrastruktur Pendukung:** selain *hardware* TIK, penyediaan infrastruktur lain juga diperlukan. Misalnya, di inovasi untuk menjadikan Mojokerto sebagai kota yang ramah bagi pesepeda. Persiapan yang perlu dilakukan antara lain, pembuatan jalur sepeda, penyediaan sepeda, titik-titik lokasi parkir sepeda, termasuk penyediaan mesin jika persewaan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis. Penyediaan infrastruktur fisik juga diperlukan untuk program pengembangan layanan RSUD Dr. Wahidin, dimana di jangka panjang ini, pelayanan bertambah menjadi gedung terpadu rumah sakit pendidikan dan pengembangan rumah sakit berkonsep ramah lingkungan (*green hospital*). Tentunya di dalam pengembangan *green hospital* yang memerlukan pembangunan dengan desain khusus. Tidak saja gedung yang sudah dilengkapi dengan sarana fisik khusus, seperti tempat pengelolaan limbah dan sampah, tetapi juga fasilitas yang perlu dibangun dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga bisa melindungi Kesehatan para karyawan, pasien, dan pengunjung.
- c. **Perangkat Lunak:** pembuatan website perlu dilakukan untuk mendukung kedua inovasi dari RSUD Dr. Wahidin – *green hospital* dan rumah sakit pendidikan. Sedangkan di inovasi Mojokerto kota ramah untuk sepeda, perlu dilakukan penambahan fitur di website milik Dinas Perhubungan, sehingga masyarakat bisa melakukan pemesanan secara online. Pembuatan aplikasi diperlukan di Smart Parking yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, untuk memudahkan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pemesanan lokasi parkir.

d. **Penguatan Literasi:** sosialisasi yang masif perlu dilakukan di inovasi-inovasi yang rencana dilakukan di jangka panjang ini, baik lewat media sosial atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh walikota atau OPD. Terutama, untuk pengembangan kota ramah sepeda dan *green hospital*. Di Green Hospital, selain diperlukan penguatan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan, juga diperlukan pembuatan jejaring dengan pihak-pihak eksternal, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, dan Bank Sampah.

Tabel 4. 7. Rencana Aksi Smart Living Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Mojokerto Kota Geographic Information Sysem (MAGIS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi walikota</li> <li>2. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi</li> </ol>	2023-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan pusat data server</li> <li>2. Penyiapan jaringan internet</li> <li>3. Penyiapan PC/laptop</li> </ol>	2023 - 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan source code</li> <li>2. ArcGIS online</li> </ol>	2023 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan metadata</li> <li>2. Penguatan standarisasi data</li> <li>3. Sosialisasi untuk standarisasi data</li> <li>4. Sosialisasi kepada OPD untuk pemanfaatan MAGIS dalam pengambilan keputusan</li> </ol>	2023 - 2027
<b>Pelayanan Kesehatan</b>	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	GAYATRI (Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali terkait GAYATRI</li> <li>2. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi</li> <li>3. Penyiapan tim dan SDM pengelola</li> </ol>	2023 - 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan maintenance pusat data server</li> <li>2. Penyiapan jaringan internet</li> <li>3. Penyiapan PC/laptop</li> </ol>	2023 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. API dengan BPJS</li> <li>2. API dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ol>	2023 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan pendampingan tim internal GAYATRI Dinas Kesehatan</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk pengembangan program GAYATRI baik secara langsung atau media sosial</li> </ol>	2023 -2027

	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan</p>	<p>GENTALA (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama) (Puskesmas Blooto)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini</li> <li>3. Koordinasi dengan TPPS Kecamatan</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan KUA di Kecamatan</li> <li>5. Persiapan kader kelurahan</li> </ol>	<p>2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan untuk pelayanan konsultasi gizi</li> <li>2. Penyediaan alat timbang atau alat ukur untuk balita (Antropometri atau alat lain yang standar)</li> </ol>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat terkat program ini dan pencegahan stunting ketika kunjungan ke Puskesmas atau kader</li> <li>2. Peningkatan kapasitas kader, baik pengetahuan terkait stunting atau penimbangan dan pengukuran balita yang benar</li> <li>3. Sosialisasi kepada calon pengantin untuk penggunaan ELSIMIL</li> <li>4. Bimbingan kepada calon pengantin dengan bekerjasama dengan KUA Kecamatan terkait kesehatan reproduksi.</li> </ol>	<p>2023</p>
--	---	---	---	-------------	---	-------------	----------	----------	--	-------------

	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	SI DUTA ES DEGAN (Stiker Posyandu Balita Sehat Dan Peningkat Alarm Kentongan) (Puskesmas Blooto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini</li> <li>3. Pembentukan tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	2023	Penyiapan lokasi kentongan	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada kader</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat</li> </ol>	2023
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	TOTALITAS (Tuntaskan TBC sak Oyote Sak Lawase) (Puskesmas Blooto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini</li> <li>3. SK tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat konsultasi</li> <li>2. Penyiapan obat</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kepada kader</li> <li>2. Penjaringan masyarakat atau pasien TBC</li> <li>3. Sosialisasi kepada masyarakat</li> </ol>	
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara	POS TENSI OKE OYE SIP (Program sadar tensi dengan	1. SK Kepala Dinas Kesehatan	2023	1. Penyiapan lokasi konsultasi	2023	-	-	1. Pelatihan kepada kader atau Posyandu Lansia	2023

	terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	prolanis, perkesmas, kartu & kantong tensi, konsultasi gizi dan farmasi kampanye germas & skrining PTM) (Puskesmas	atau Kepala Puskesmas 2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan pelaksanaan inovasi ini 3. SK tim pelaksana kegiatan 4. Koordinasi dengan Posyandu Lansia di Kelurahan		2. Penyiapan alat pengukur tensi atau gula darah 3. Penyiapan obat 4. Pembuatan jadwal kegiatan, dengan koordinasi dengan Posyandu Lansia				2. Penjaringan masyarakat (usia produktif dan lansia) dengan PTM 3. Sosialisasi kepada masyarakat	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	SIMAPAN (Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman)	1. Regulasi walikota 2. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi 3. Penyiapan tim dan SDM pengelola	2023 - 2024	1. Penyediaan dan maintenance pusat data server 2. Penyiapan jaringan internet 3. Penyiapan PC/laptop	2023 - 2027	1. Source code SIMAPAN 2. Penambahan fitur real time cost dan janji dengan dokter specialist	2023 - 2027	1. Pendampingan dari Bagian Keuangan dan developer kepada SDM pengelola 2. Sosialisasi kepada masyarakat penambahan fitur di SIMAPAN	2023 -2027
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan	SIDIVA (Sistem Informasi)	1. Regulasi walikota 2. Pembuatan SPK dengan Dinas	2023 - 2024	1. Penyediaan dan maintenance pusat data server	2023 - 2027	1. Source code SIDIVA 2. Integrasi sistem	2023 - 2027	1. Bimtek kepada SDM pengelola program	2023 - 2027

	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Wahidin Virtual Medical Care)	<p>Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS</p> <p>3. Pembuatan SOP pelaksanaan inovasi</p> <p>4. Penyiapan tim dan SDM pengelola</p>		<p>2. Penyiapan jaringan internet</p> <p>3. Penyiapan PC/laptop</p>		dengan BPJS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		<p>2. Sosialisasi kepada masyarakat lewat pertemuan langsung atau media sosial</p>	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Pengembangan Layanan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	<p><b>1. Transformasi Digital dengan Elektronik Medical Record</b></p> <p>a. Pedoman Layanan Rumah Sakit (updating disesuaikan dengan pengembangan layanan)</p> <p>b. SK Tim sesuai Pengembangan Layanan</p> <p>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</p>	2023	<p><b>1. Transformasi Digital dengan Elektronik Medical Record</b></p> <p>a. Penyediaan dan maintenance pusat data server</p> <p>b. Penyiapan jaringan internet</p> <p>c. Penyiapan PC/laptop</p>	2023	<p>a. Source code rekam medik dan e resep</p> <p>b. Integrasi dengan BPJS (data base layanan pasien)</p> <p>c. terintegrasi dengan SIMAPAN (riwayat penyakit pasien)</p>	2023	<p>a. Internalisasi dan pendampingan Pendampingan dari Tim IT kepada DPJP, admin, Medical Record dan farmasi</p> <p>b. Pembuatan user guide</p>	2023
			<p><b>2. Layanan Rehap Medik Terpadu</b></p> <p>a. Kebijakan Layanan Rehap Medik</p>	2024	<p><b>2. Layanan Rehap Medik Terpadu</b></p> <p>c. Pembangunan Gedung Rehap Medik</p>	2024	<p>a. Integrasi dengan BPJS (data base layanan)</p> <p>b. Integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN</p>	2024	<p>2. Layanan Rehap Medik Terpadu</p> <p>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi</p>	2024

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. SK Tim Rehap Medik</li> <li>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pemenuhan Alat Kesehatan</li> <li>e. Penyiapan jaringan internet</li> <li>f. Penyiapan PC/laptop</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</li> <li>b. Diklat kompetensi bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</li> <li>c. Penguatan jejaring terkait layanan</li> </ul>	
			<p><b>3. Klinik Fertilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Layanan Fertilitas</li> <li>b. SK Tim Layanan Fertilitas</li> <li>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</li> </ul>	2025	<p><b>3. Klinik Fertilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Gedung</li> <li>b. Pemenuhan Alat Kesehatan</li> <li>c. Penyiapan jaringan internet</li> <li>d. Penyiapan PC/laptop</li> </ul>	2025	Melakukan integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN	2025	<p>3. Klinik Fertilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</li> <li>b. Diklat kompetensi bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</li> <li>c. Penguatan jejaring terkait layanan</li> </ul>	2025

			<p><b>4. Cardiac dan Stroke Center</b></p> <p>a. Kebijakan Layanan Cardiac dan Stroke Center</p> <p>b. SK Tim Layanan Cardiac dan Stroke Center</p> <p>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</p>	2025	<p><b>4. Cardiac dan Stroke Center</b></p> <p>a. Pembangunan Gedung</p> <p>b. Pemenuhan Alat Kesehatan</p> <p>c. Penyiapan jaringan internet</p> <p>d. Penyiapan PC/laptop</p>	2025	<p>4. Cardiac dan Stroke Center</p> <p>a. Integrasi dengan BPJS (data base layanan)</p> <p>b. Integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN</p>	2025	<p>Cardiac dan Stroke Center</p> <p>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</p> <p>b. Diklat kompetensi bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</p>	2025
			<p><b>5. Pengembangan Poli Eksekutif</b></p> <p>a. Kebijakan Layanan Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>b. SK Tim Layanan Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>c. SOP Pelaksanaan Pengembangan Layanan</p>	2025	<p><b>5. Pengembangan Poli Eksekutif</b></p> <p>a. Pembangunan Gedung</p> <p>b. Pemenuhan Alat Kesehatan</p> <p>c. Penyiapan jaringan internet</p> <p>d. Penyiapan PC/laptop</p> <p>e. Penyiapan Sarana informasi lainnya</p>	2025	<p>5. Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>a. Integrasi dengan BPJS (data base layanan)</p> <p>b. Integrasi dengan SIMRS dan SIMAPAN</p>	2025	<p>Pengembangan Poli Eksekutif</p> <p>a. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial</p> <p>b. Diklat servis <i>excellent</i> bagi DPJP, petugas administrasi dan nakes terkait layanan</p>	2025

									c. Penguatan jejaring terkait layanan	
<b>Sarana Transportasi</b>	Mengembangkan layanan transportasi umum yang nyaman dan berkualitas	Angkutan Sekolah Gratis (Pengembangan Rute dan Aplikasi SIMANISKERTO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan pemilik angkutan umum</li> <li>3. Penyiapan dan rute dan trayek baru angkutan sekolah gratis</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan kendaraan (angkutan kota)</li> <li>2. Pembagian jadwal dan rute trayek baru kepada angkuta kota yang ikut di dalam program ini</li> </ol>	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan website</li> <li>2. Pengembangan aplikasi Simaniskerto</li> </ol>	2024 - 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi atau kampanye angkutan sekolah gratis kepada siswa di sekolah di Kota Mojokerto</li> <li>2. Pembinaan kepada sopir angkutan sekolah gratis</li> </ol>	2026
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Smart Parking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK Tim</li> </ol>	2023 – 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi penyediaan fasilitas smart parking</li> </ol>	2025 - 2027	Pembuatan aplikasi Smart Parking	2025 - 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD lintas sektor terkait Smart Parking dengan Kepolisian, Satpol PP, Diskominfo, DPUPERKIM, Masyarakat, Swasta, Bappeda</li> </ol>	2023 - 2027

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pembuatan regulasi</li> <li>3. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (sektor swasta, seperti pusat perbelanjaan)</li> <li>4. Pembuatan kajian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(kantong parkir)</li> <li>2. Pembangunan lokasi smart parking</li> <li>3. Pembuatan tarif untuk smart parking</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait tarif smart parking lewat media sosial atau sosialisasi secara langsung agar mereka menggunakan fasilitas ini</li> </ul>	
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 4. 8. Rencana Aksi Smart Living Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Pengembangan Layanan Pemanfaatan Tata Ruang	1. Pembuatan regulasi pendukung 2. Pembentukan tim inovasi	2028	1. Penyediaan pusat data server 2. Penyiapan jaringan internet 3. Penyiapan PC/laptop 4. Penentuan jenis layanan	2028	-	-	1. Sosialisasi program kepada OPD 2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah 3. Penguatan SDM di OPD	2028
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Pengembangan layanan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	1. <b>Gedung Terpadu Rumah Sakit Pendidikan</b>  a. Kebijakan Layanan Pendidikan b. SK Tim Koordinator Pendidikan c. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan (dokter gigi/dokter, keperawatan/	2028	1. Gedung Terpadu Rumah Sakit Pendidikan a. Sarana dan prasarana ramah lingkungan b. Penyediaan dan maintenance pusat data server c. Penyiapan jaringan internet d. Penyiapan PC/laptop	2028	Pembuatan website dan sistem pendidikan terpadu	2028	Diklat pengelolaan koordinator pendidikan Rumah Sakit	2028

			kebidanan, nakesla, manajemen)							
			2. Green Hospital  a. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan (dokter gigi/dokter, keperawatan/kebidanan, nakesla, manajemen)  b. Pembuatan SK Tim Pelaksana Green Hospital  c. SOP kegiatan terkait Pelaksanaan Green Hospital	2029	Pengembangan Zona Pengawasan	2029	Pengembangan website Green Hospital	2029	a. Sosialisasi kepada seluruh karyawan RSUD terkait dengan Regulasi b. Sosialisasi dan atau promosi kepada masyarakat dan OPD/institusi terkait melalui pertemuan langsung atau media sosial c. Diklat Pengelola Green Hospital d. Penguatan jejaring pendukung Green Hospital baik internal maupun eksternal (KLH, LH, Bagian Perekonomian, Bank Sampah Induk)	2029
Sarana Transportasi	Menjadikan kota layak sepeda	Mojokerto Kota Ramah Sepeda	1. Pembuatan Perwali 2. Pembuatan naskah kerjasama dengan sektor swasta (CSR)	2028 - 2029	1. Pembuatan rute jalur sepeda 2. Penetapan titik-titik parkir sepeda	2028 - 2029	Penambahan fitur di menu website Dinas Perhubungan terkait program ini atau jika ada calon pengguna ingin melakukan	2028 - 2029	Sosialisasi kepada warga Kota Mojokerto atau warga di luar Kota Mojokerto melalui pertemuan atau media sosial.	2028 - 2032

			atau kemitraan lainnya 3. Melakukan studi kelayakan		3. Pengadaan sepeda 4. Infrastruktur penyewaan sepeda (loket dengan petugas, atau dengan mesin)		booking penggunaan sepeda			
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Pengembangan Aplikasi Smart Parking	Pembaharuan regulasi	2029	1. Penambahan titik parkir 2. Penyediaan infrastruktur (hardware) pendukung 3. Penyediaan jaringan internet	2029	Pembuatan dan penambahan fitur layanan di aplikasi	2029	1. FGD lintas sektor terkait Smart Parking dengan Kepolisian, Satpol PP, Diskominfo, DPUPERKIM, Masyarakat, Swasta, Bappeda 2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait tarif smart parking lewat media sosial atau sosialisasi secara langsung agar mereka menggunakan fasilitas ini	2029

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 4.5 SMART SOCIETY

Secara lengkap, Rencana Aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimensi *Smart Society* Kota Mojokerto bisa dilihat di tabel 4.9 dan 4.10 di bawah.

### 4.5.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Renaksi jangka pendek dan jangka menengah di dimensi *Smart Society* meliputi beberapa inovasi, seperti GATI LANSIA yang ditujukan untuk lansia terlantar dan tanpa keluarga, Kota Mojokerto E-Library (KOMOLIB) yang merupakan layanan perpustakaan digital Kota Mojokerto, dan layanan darurat 112 yang ditujukan untuk layanan kebencanaan, E-Disabilitas, Ning Ita di Sekolah, dan Digitalisasi Catatan Budaya Kota. Renaksi akan dilihat di empat komponen, seperti di bawah ini:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain perlu diterbitkannya regulasi sebagai payung pelaksanaan kegiatan, rencana kerjasama juga perlu disiapkan di komponen ini. Sebab, beberapa inovasi yang akan melibatkan pihak eksternal di luar lingkup pemerintah daerah. Misalnya saja, program GATI LANSIA - Gerakan Ayo Tulung tlnulung Lanjut Usia terlantar – yang berencana menggandeng lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Duafa untuk mendukung inovasi ini, dan program Layanan 112 yang perlu menggandeng kepolisian, SAR, PLN, dan beberapa lembaga lainnya.
- b. **Infrastruktur Pendukung:** selain *hardware* TIK yang diperlukan dipersiapkan hampir di semua inovasi, beberapa infrastruktur lain juga perlu dipersiapkan, seperti gedung untuk menampung lansia terlantar di program GATI LANSIA. Inovasi ini juga perlu melakukan pemetaan RT atau tetangga yang akan merawat lansia yang memiliki rumah (tidak tinggal di wisma Dinsos). Layanan 112 memerlukan beberapa infrastruktur pendukung lainnya, seperti ruangan yang berfungsi untuk *command center*, *call center*, dan *ambulance* yang digunakan jika panggilan merupakan layanan *emergency* seperti kecelakaan. Di inovasi EWS bencana banjir, sarana pendukung yang juga perlu disiapkan adalah adanya perahu karet, jalur mitigasi, dan juga lokasi mitigasi jika bencana terjadi. Ini perlu disiapkan, karena Kota Mojokerto lumayan rawan terhadap terjadinya banjir, yang disebabkan oleh pengaruh topografi yang seperti lepek, dan beberapa DAS dan sub-DAS Brantas yang mengelilingi kota ini. Perangkat lunak seperti

*scanner* juga perlu dipersiapkan untuk digitalisasi catatan sejarah dan budaya kota, yang sebelumnya berbentuk naskah fisik.

- c. **Perangkat Lunak:** pengembangan perangkat lunak – aplikasi dan aktivasi kanal media sosial, dilakukan untuk dua inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Kedua inovasi ini adalah e-KOMOLIB dan Dongeng Online Kota Mojokerto. KOMOLIB merupakan perpustakaan online yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai respon terjadinya pandemik Covid-19 yang membuat warga kesulitan untuk pergi ke perpustakaan daerah. Sehingga, koleksi-koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah, dijadikan koleksi digital. Sebelum pandemik, kunjungan ke perpustakaan daerah (termasuk fasilitas di RTH dan kelurahan), berjumlah sekitar 100 orang. Aktivasi *account* Instagram dilakukan untuk inovasi Dogeng Online Kota Mojokerto (DOLEN KOMO). Lewat *account* ini, setiap bulannya, siswa-siswi dari sekolah-sekolah di Kota Mojokerto melakukan dongeng lewat *live* di *account* Instagram inovasi ini. Penyiapan aplikasi juga diperlukan untuk inovasi E-Disabilitas. Aplikasi ini diperlukan untuk melakukan pendataan orang dengan disabilitas di Kota Mojokerto.
- d. **Penguatan Literasi:** karena inovasi-inovasi di dimensi ini pada umumnya adalah pelibatan masyarakat, sosialisasi yang masif dan intensif perlu dilakukan. Misalnya, untuk pemanfaatan KOMOLIB, karena diakui atau tidak, layanan *digital library* juga bersaing dengan keberadaan media lain, seperti YouTube, media video dan film via *streaming*, atau fasilitas *e-book* lainnya. Dengan semakin banyaknya saingan, sosialisasi perlu dilakukan dengan masif dan intensif sehingga literasi masyarakat bisa terbangun dengan baik. Pelatihan dan penguatan kapasitas yang intensif perlu dilakukan terutama berkaitan dengan upaya penanggulangan kondisi darurat seperti di inovasi Layanan 112 atau EWS. Sebab, dalam upaya mitigasi dan penanganan situasi darurat dibutuhkan kesiapan yang matang dari SDM. Seperti misalnya, pelatihan kepada operator di *call center* 112 atau pelatihan relawan BNPT bersama dengan TAGANA.

#### 4.5.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Renaksi jangka panjang dibuat untuk lima inovasi di dimensi *Smart Society* ini, yang meliputi Mojokerto Kota Ramah Disabilitas, pembangunan universitas, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan QR buku di fasilitas

umum di Kota Mojokerto, dan IC yang merupakan integrasi CCTV dengan AI dengan *smart PJU*, *smart traffic light*, dan *e-warning system*. Berikut rencana aksi di masing-masing komponen di dimensi *Smart Society* untuk jangka panjang:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** di komponen ini, regulasi seperti Perwali diperlukan untuk mendukung inovasi-inovasi diatas. Bahkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto ramah terhadap disabilitas, bisa jadi akan dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda). Selain kesiapan regulasi, juga diperlukan koordinasi dengan pihak eksternal, seperti misal untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang ramah disabilitas, pemerintah kota harus melakukan koordinasi yang intensif dengan komunitas atau organisasi disabilitas yang ada di Kota Mojokerto, untuk memastikan bahwa nantinya fasilitas yang dibangun atau layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.
- b. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung:** rencana jangka panjang di dimensi ini memerlukan pembangunan fisik yang tidak sedikit. Untuk mendukung Kota Mojokerto ramah disabilitas, pemerintah kota harus memastikan bahwa kantor pemerintah dan fasilitas umum sudah mengakomodasi kebutuhan orang dengan disabilitas, seperti misalnya trotoar yang sudah dilengkapi dengan *guiding block* (untuk orang buta) dan sudah bisa dilewati kursi roda, atau fasilitas umum sudah menyediakan bidang miring, atau fasilitas toilet yang bisa dimasuki oleh kursi roda. Penyediaan infrastruktur untuk orang disabilitas juga bisa berupa kendaraan bagi orang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Penyediaan infrastruktur bangunan menjadi kegiatan yang dilakukan untuk penyediaan akses pendidikan dengan membangun kampus baru ataupun BLK guna meningkatkan kualitas SDM di Kota Mojokerto.
- c. **Perangkat Lunak:** penyediaan perangkat lunak diperlukan untuk inovasi IC, karena inovasi ini melakukan berbagai sistem yang ada, seperti CCTV, *smart PJU*, *smart traffic light*, dan *e-warning system*. Pembuatan kode QR diperlukan untuk buku cerita dan dogeng yang ditempatkan di fasilitas-fasilitas umum. Pembuatan kode QR ini akan mempermudah masyarakat untuk mengakses buku-buku atau dongeng-dongeng yang sudah diubah dalam bentuk digital.
- d. **Penguatan Literasi:** gerakan penyadaran (*awareness raising*) perlu dilakukan terutama di inovasi menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang ramah terhadap disabilitas. Gerakan penyadaran ini tidak saja perlu

dilakukan kepada masyarakat secara luas, tetapi juga di kalangan OPD. Saat ini, belum semua OPD (Dinas PUPERAKIM) mengetahui standar bangunan yang ramah dengan disabilitas, sehingga ketika melakukan pembangunan fasilitas baru seperti gedung atau trotoar baru, belum mempertimbangkan aksesibilitas orang dengan disabilitas. Penguatan literasi (*awareness raising*) juga diperlukan untuk mendorong penyediaan pelayanan publik yang ramah dan bisa diakses oleh orang dengan disabilitas.

Tabel 4. 9. Rencana Aksi Smart Society Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Interaksi Masyarakat yang Efisien</b>	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	GATI LANSIA (Gerakan Ayo Tulung tinulung Lanjut Usia terlantar)	1. Pembuatan regulasi pendukung	2023	1. Penyiapan tempat atau lokasi yang digunakan untuk menampung orang tua terlantar 2. Pengaturan donasi setiap bulan 3. Distribusi bantuan kepada lansia yang berada di luar rumah penampungan 4. Pemilihan tetangga atau RT yang bertanggung jawab merawat lansia terlantar dan tanpa keluarga	2023	-	-	1. Sosialisasi program ini kepada masyarakat umum atau donatur yang potensial 2. Melakukan pendekatan dan sosialisasi program kepada program-program berbasis shodaqoh dan donasi seperti BAZNAS, Kita Bisa, dan Dompot Duafa untuk keberlangsungan program 3. Pemberian pelatihan usaha produktif kepada para lansia	2023 - 2027
			2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023		2023 – 2027				
			3. Penyiapan SDM di Rumah Lansia	2023		2023 – 2027				
			4. Koordinasi dengan kelurahan	2023		2023				
			5. Pemetaan donatur pribadi	2023						
			6. Pembuatan rencana kerjasama dengan sektor lainnya seperti BAZNAS, Kita Bisa, Dompot Duafa, dan sebagainya.	2024						

	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	BOLANG (Bantuan Orang terlantar dan terhiLANG dari keluarganya)	1. Pembuatan regulasi pelaksanaan inovasi programi 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Koordinasi dengan OPD lainnya seperti Satpol PP dan pihak kepolisian	2023	-	-	-	-	1. Sosialisasi program kepada masyarakat lewat media sosial atau pertemuan secara langsung 2. Bimtek SDM Dinsos	2023 - 2027
	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	TAREK SIS (Tanggap Apresiatif REspon Kebutuhan Sosial Sehari-hari)	1. Pembuatan regulasi untuk pendukung inovasi 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Identifikasi penerima manfaat kegiatan	2023 - 2027	-	-	-	-	1. Sosialisasi program kepada masyarakat melalui media sosial atau pertemuan langsung untuk pelibatan mereka di program ini 2. Bimtek SDM Dinsos	2023 - 2027
	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	E-Disabilitas	1. Pembuatan juknis atau SOP program 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Koordinasi dengan Lembaga-lembaga untuk orang dengan disabilitas (misal: PPD)	2023	-	-	-	-	1. Pelatihan kepada SDM Dinsos yang akan menjadi pelaksana E-Disabilitas 2. Sosialisasi program lewat organisasi orang dengan disabilitas	2023
<b>Ekosistem Belajar</b>	Penyelenggaraan pendidikan iman dan taqwa di sekolah	Ning Ita di Sekolah	1. Pembuatan Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023	1. Pembuatan jadwal di sekolah	2023	-	-	1. Sosialisasi kepada	2023

			3. Penyiapan guru yang terlibat di kegiatan ini		2. Pembuatan materi untuk pelajaran tambahan ngaji di sekolah				siswa untuk kegiatan ini 2. Penguatan SDM (guru) di sekolah	
Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Kota Mojokerto E-Library (KOMOLIB)	1. Pembuatan Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023	1. Jaringan internet 2. Penyediaan dan maintenance server 3. Penyediaan PC dan laptop 4. Penyiapan buku dalam bentuk digital (digitalisasi buku)	2023	Pembuatan fitur dan aplikasi KOMOLIB	2023	Sosialisasi kepada masyarakat luas terkait inovasi, baik melalui sekolah, komunitas, pertemuan langsung, ataupun media sosial.	2023	
Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Dongeng Online Kota Mojokerto (Dolen Komo)	1. Pembuatan Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi	2023	1. Jaringan internet 2. Hardware berupa handphone atau tablet untuk live streaming 3. Penyiapan lokasi kegiatan	2023	Aktivasi account Instagram Dinas Perpustakaan dan Arsip	2023	1. Sosialisasi ke sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ini 2. Sosialisasi informasi kegiatan ini lewat account media sosial Dinas Perpustakaan dan Arsip, terutama lewat IG.	2023	
Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Digitalisasi Catatan Budaya Kota	1. Pembentukan tim pelaksana inovasi 2. Koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki catatan terkait sejarah Kota Mojokerto.	2023	1. Penyiapan hardware untuk digitalisasi (scanner) 2. Penyediaan fisik naskah	2023	Integrasi hasil naskah yang sudah digitalkan di KOMOLIB	2023	Sosialisasi hasil digitalisasi naskah kepada masyarakat lebih media sosial atau sosialisasi secara fisik	2023	

					yang akan digitalisasikan				lewat kegiatan yang dilakukan oleh Walikota atau Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	perempuan melalui pendidikan dan pembinaan	SKOPER (Sekolah Berbasis Peningkatan Kerja)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan rencana kerjasama dengan pihak penyedia pelatihan (narasumber)</li> </ol>	2023 - 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan terhadap peserta</li> <li>2. Pembuatan kurikulum untuk pelatihan</li> <li>3. Pemilihan trainer</li> <li>4. Penentuan lokasi pelatihan</li> </ol>	2023 - 2024	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program lewat kelurahan atau tim pendamping sosial di kelurahan</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan kepada para perempuan penerima manfaat program</li> </ol>	2023 - 2024
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang efektif, efisien, dan responsif	Pengembangan Layanan 112 (Bencana Alam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis program</li> <li>4. Pembuatan naskah kerjasama dengan pihak eksternal pemilik layanan panggilan darurat (Kepolisian, Dinkes, Pemadam Kebakaran, PLN, SAR, dan sebagainya)</li> <li>5. Pemilihan petugas untuk di call center 112</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan internet dan telepon</li> <li>2. Penyediaan dan maintenance server</li> <li>3. Penyediaan call center</li> <li>4. PC/laptop dan telepon</li> <li>5. Furniture untuk call center</li> <li>6. Penyiapan ambulance</li> </ol>	2023	Koneksi jaringan antara situs-situs panggilan darurat yang ada	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Layanan 112 lewat pertemuan langsung atau media sosial</li> <li>2. Pelatihan kepada petugas (operator) yang berada di call center 112</li> <li>3. Pelatihan kepada tim dispatcher</li> </ol>	2023

	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Early Warning System (Banjir)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>2. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis program</li> <li>3. Pembuatan kerjasama dengan dengan pihak eksternal seperti Taruna Tanggap Bencana (TAGANA)</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan alat pendeteksi banjir (telemetry)</li> <li>2. Penyediaan server</li> <li>3. Penyiapan peralatan untuk mitigasi jika terjadi bencana, seperti perahu karet dan tenda</li> <li>4. Penyiapan rute mitigasi</li> <li>5. Penyiapan lokasi untuk mitigasi</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini</li> <li>2. Pelatihan rutin petugas dari BPBD dan TAGANA untuk mitigasi bencana</li> </ol>	2023
--	---	-------------------------------	---	------	--	------	---	---	--	------

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 4. 10. Rencana Aksi Smart Society Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
<b>Interaksi Masyarakat yang Efisien</b>	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	Mojokerto Kota Inklusif (Alat Bantu Mobilitas, Perangkat, dan Teknologi untuk Warga Berkebutuhan Khusus)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. SK Tim</li> <li>3. Pembuatan SOP atau juknis kegiatan</li> <li>4. Koordinasi dengan komunitas atau organisasi orang dengan disabilitas</li> </ol>	2028 - 2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung yang bisa diakses orang dengan disabilitas</li> <li>2. Penyediaan trotoar yang ramah kursi roda dan dilengkapi guiding block untuk tunanetra</li> <li>3. Gedung yang dilengkapi warning yang ramah bagi disabilitas tuli</li> <li>4. Penyediaan alat bantu mobilitas bagi warga berkebutuhan khusus, seperti mobil.</li> </ol>	2028 - 2032	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program lewat luring atau media sosial</li> <li>2. Sosialisasi bangunan dan fasilitas yang ramah disabilitas kepada OPD di Kota Mojokerto</li> <li>3. Penyadaran untuk disabilitas (disability raising awareness)</li> <li>4. Pelibatan warga dengan disabilitas atau lembaga dengan disabilitas ke Musrenbang dan kegiatan perencanaan lainnya</li> </ol>	2028 - 2032
<b>Ekosistem Belajar</b>	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat baca warga	QR Akses Digital Library di Tempat Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan naskah digital (dongeng, atau cerita lainnya)</li> </ol>	2028 - 2029	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat terkait inovasi	2028 - 2029

	kota		komunitas budaya dan sejarah di Kota Mojokerto 3. Kerjasama dengan perusahaan swasta		2. Pembuatan titik QR di tempat umum					
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Pembangunan Akademi/ Universitas terakreditasi B	1. Perwali atau regulasi pendukung lainnya 2. Pembentukan tim yang bertanggung jawab apda kegiatan 3. Studi kelayakan lokasi universitas 4. Tender kegiatan 5. Staffing (pengisian SDM)	2032	1. Pembangunan universitas 2. Pengisian furniture dan penyediaan jaringan internet 3. Pembuatan kurikulum 4. Rekrutmen mahasiswa	2032	-	-	1. Sosialisasi kampus kepada masyarakat luas lewat media sosial, atau kegiatan face to face 2. Diklat untuk para pendidik dan staff administrasi yang lainnya	2032
	Meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif berbasis sertifikasi kompetensi	Pembangunan Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi	1. Perwali 2. Studi kelayakan lokasi universitas 3. Tender kegiatan 4. Koordinasi dengan pemerintah provinsi (Dinas Tenaga Kerja Provinsi) 5. Pembuatan kerjasama	2030	1. Pembangunan BLK 2. Pengisian furniture dan penyediaan jaringan internet 3. Pembuatan kurikulum	2030	-	-	1. Sosialisasi kepada sektor swasta 2. Sosialisasi kepada para pencari kerja atau siswa SMK 3. Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas untuk instruktur di BLK	2030

			dengan sektor-sektor lain, seperti SMK dan perusahaan swasta 6. Staffing di BLK (instruktur, dan SDM pendukung)							
<b>Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat</b>	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	IC/I See (Integrated CCTV) Ai CCTV yang terintegrasi dengan smart PJU/ Smart Traffic Light, dan Warning System	1. Perwali 2. Pembentukan tim pelaksana inovasi 3. Pembuatan MoU dengan sektor swasta	2028	1. Pemetaan pemasangan sensor pintar 2. Pemasangan sensor pintar (CCTV) di titik-titik yang sudah ditentukan 3. Lokasi control room center	2028 - 2039	Integrasi dengan Smart PJU dan Warnig System	2028 - 2029	1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Penguatan SDM di call center	2028 - 2029
	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	e-Warning System Secara Real Time	1. Pembaharuan SOP 2. Pembaharuan perjanjian Kerjasama dengan pihak-pihak lain pendukung program, seperti TAGANA	2028	1. Penambahan alat deteksi dini banjir (telemetry) 2. Server dan jaringan internet 3. Penambahan alat mitigasi, seperti perahu karet.	2028	Pembuatan aplikasi EWS berbasis Android	2028	1. Sosialisasi EWS kepada masyarakat lewat media sosial atau melalui kegiatan 2. Pelatihan kepada TAGANA	2028

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 4.6 SMART ENVIRONMENT

Rencana Aksi (Renaksi) di *Smart Environment* lengkap bisa dilihat dengan tabel 4.11 dan 4.12 di bawah, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### 4.6.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Renaksi di jangka pendek (2023) dan jangka menengah (2024 – 2027) disusun di beberapa inovasi, seperti Jaringan Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup (JiRoLu), pengelolaan limbah cair domestik dan limbah tinja, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pembayaran pajak dengan sampah (Bajak Sambal Terasi). Renaksi akan dilihat di empat komponen seperti di bawah ini:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** selain payung regulasi di inovasi-inovasi ini, penyiapan kelembagaan yang perlu dilakukan lainnya adalah penyiapan perjanjian kerjasama dan SDM. Penyiapan kerjasama diperlukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Minimnya jumlah RTH menjadi salah satu isu urgent di Kota Mojokerto yang harus segera diselesaikan. Akan tetapi, untuk penambahan RTH, diperlukan peran serta tidak saja dari OPD, tetapi juga sektor swasta dan komunitas di masyarakat. Sedangkan di rencana revitalisasi pengelolaan limbah domestik cair, perlu juga dipersiapkan SDM yang akan menjalankan program ini baik dari *call center*, petugas yang melakukan penyedotan limbah tinja, dan yang melakukan pengolahan air limbah di IPLT. Di inovasi Bajak Sambal Terasi, diperlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), karena secara teknis program dan aplikasi dikembangkan oleh BPKPD, tetapi dalam pelaksanaan inovasi melibatkan Bank Sampah yang berada di bawah DLH.
- b. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung:** penyediaan infrastruktur fisik di rencana aksi jangka pendek dan menengah antara lain adalah pembangunan IPLT sebagai salah satu fasilitas utama yang harus dimiliki untuk pengelolaan air limbah domestik dan limbah tinja. Saat ini, Kota Mojokerto belum memiliki fasilitas ini. Infrastruktur fisik lainnya yang perlu untuk dibangun adalah RTH dan fasilitas pendukung di RTH yang diperlukan, seperti tempat bermain, toilet, tempat duduk, dan sebagainya. Untuk mendukung inovasi Bajak Sambal Terasi, infrastruktur fisik yang harus disediakan antara lain lahan di sekitar Bank Sampah untuk menyimpan hasil sampah yang sudah dipilah dan belum diolah atau

digunakan kembali. Lahan menjadi persoalan serius bagi Bank Sampah, karena 70 Bank Sampah yang ikut mendukung inovasi ini memiliki lahan yang relative sempit.

- c. **Penyediaan Perangkat Lunak:** penyediaan perangkat lunak diperlukan untuk inovasi seperti Bajak Sambal Terasi, berupa aplikasi Android. Aplikasi yang sudah terhubung dengan SISMIOP ini memungkinkan wajib pajak bisa memantau secara *real time* pajak mereka sudah dibayarkan dari saldo di Bank Sampah.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi, terutama untuk penguatan kapasitas diperlukan untuk SDM yang mengelola IPLT. Sebab, pengelolaan limbah tinja memerlukan *skill* dan adanya standar-standar yang harus dilakukan. Seperti misalnya, standar aman air hasil pengelolaan limbah ketika dibuang ke sungai atau aliran air lainnya. Jika standar-standar ini tidak dipatuhi, maka bisa membahayakan manusia, seperti misalnya adanya bakteri E. coli. Penguatan literasi, berupa pelatihan juga perlu diberikan kepada Bank Sampah untuk melakukan pemilahan dan penggunaan kembali sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah. Serta, penguatan kapasitas pengurus dalam mengelola program ini.

#### 4.6.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2028 – 2032)

Renaksi jangka panjang disusun untuk tiga inovasi: restorasi DAS Brantas untuk mendukung wisata berbasis sungai, penerapan Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT), Pemantau Kualitas Air dan Udara Real Time, Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sirkular Berbasis Sampah dan Limbah, dan penyediaan *charging station* untuk mobil listrik. Berikut Renaksi yang disusun di setiap komponen:

- a. **Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan:** untuk inovasi restorasi sungai, pemerintah kota memerlukan perjanjian kerjasama dengan BBWS Brantas, karena Kota Mojokerto dilewati empat DAS Brantas dan sembilan sub-DAS Brantas. Inovasi restorasi sungai ini, juga akan menjadi daya dukung bagi pengembangan Wisata Bahari Mojopahit. Begitu juga dengan LLTT, diperlukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan swasta penyedot limbah tinja. Karena, jika LLTT dilaksanakan, bisa jadi armada truk milik pemerintah kota tidak bisa lagi melayani penyedotan limbah tinja bagi warga kota. Oleh karena itu, peran swasta dibutuhkan.

- b. **Infrastruktur Pendukung:** di komponen ini, kegiatan yang diperlukan antara lain penyediaan alat pendukung untuk restorasi sungai, mulai dari pembersihan sungai, sehingga dibutuhkan alat-alat berat. Begitu juga dengan LLTT. Jika secara rutin akan ada limbah tinja yang masuk ke IPLT setiap hari, maka diperlukan mesin untuk mengolah limbah yang masuk. Jika tidak, akan terjadi *over capacity* di IPLT, yang bisa menyebabkan dampak serius. Pelaksanaan LLTT juga memerlukan *hardware* berupa HP pintar atau tablet yang *compatible* dengan aplikasi. Penyediaan sarana fisik juga dibutuhkan untuk penyediaan charging station untuk mobil listrik di Kota Mojokerto.
- c. **Perangkat Lunak:** penyediaan perangkat lunak diperlukan adalah aplikasi untuk LLTT. Perangkat lunak juga dibutuhkan untuk inovasi pemasangan alat pemantau kualitas udara dan air (telemetering) *real time*.
- d. **Penguatan Literasi:** penguatan literasi berupa sosialisasi dibutuhkan untuk semua inovasi yang diusulkan ini. Terutama, untuk inovasi LLTT. Saat ini, banyak masyarakat umum yang masih belum sadar perlunya melakukan penyedotan limbah tinja secara rutin dan terjadwal. Mereka akan melakukan penyedotan, jika WC sudah mampet. Penguatan literasi juga dibutuhkan di inovasi Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Sampah dan Limbah. Masyarakat, lewat Bank Sampah, harus diberi pelatihan dan peningkatan pengetahuan untuk melakukan ini.

Tabel 4. 11. Rencana Aksi Smart Environment Jangka Pendek & Jangka Menengah 2023 – 2027

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Perindungan Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi</li> <li>2. Dukungan alat untuk memantau kualitas udara</li> </ol>	2023	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan</li> </ol>	2023 - 2027
	Penambahan ruang terbuka hijau	Penambahan jumlah RTH yang mendukung KLA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis</li> <li>4. Pembuatan kerjasama dengan sektor swasta (CSR) dan komunitas</li> </ol>	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi perluasan RTH</li> <li>2. Perluasan RTH dengan penanaman pohon</li> <li>3. Penambahan fasilitas fisik di RTH, seperti tempat duduk, area bermain, dan sebagainya</li> </ol>	2023 - 2024	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam penambhan RTH (penanaman pohon)</li> <li>3. RTH sebagai pusat kegiatan</li> </ol>	2023 - 2024

			pecinta lingkungan						bagi masyarakat	
<b>Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik</b>	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Revitalisasi Pengelolaan Sampah, Limbah Pada, dan Limbah Cair	1. Pembuatan regulasi pendukung 2. Pembentukan tim	2023	1. Pembangunan fasilitas fisik (IPLT) 2. Maintenance kolam-kolam pengelolaan limbah tinja di IPLT	2023 2023 - 2027	-	-	1. Sosialisasi kepada sektopr swasta (perusahaan penyedot tinja) untuk keberadaan IPLT 2. Pelatihan kepada petugas (operator) di IPLT untuk pengelolaan kolam-kolam di IPLT	2023 - 2027
	Melakukan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah	Bajak Sambal Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi)	1. Penguatan pengurus di Bank Sampah (kelurahan/RW/RT) 2. Penguatan koordinasi antara DLH dan BPKPD (pembagian tugas dan fungsi)	2023 – 2024 2023	1. Penambahan jaringan khusus server 2. Penyediaan lahan lebih luas (di Bank Sampah)	1. 2023 2. 2023 - 2027	1. Pengembangan fitur di aplikasi Bajak Sambal Terasi 2. Melakukan koneksi dengan aplikasi JiRoLu dari DLH	2023	1. Sosialisasi kepada masyarakat lewat Bank Sampah di masing-masing kelurahan/RT dan media sosial milik pemerintah kota 2. Penguatan kapasitas pengurus Bank Sampah (kelurahan/RW/RT)	2023 - 2027

Tata Kelola Energi	Pemanfaatan (pengelolaan) kembali limbah cair dan padat untuk energi baru	Penambahan Jaringan Gas Metan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan sektor swasta (perusahaan mobil)</li> </ol>	2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pembangunan</li> <li>2. Pembangunan charging station</li> </ol>	2029 - 2030	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial	2029 - 2030
--------------------	---	-------------------------------	---	------	---	-------------	---	---	--	-------------

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 4. 12. Rencana Aksi Smart Environment Jangka Panjang 2028 – 2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Perindungan Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Restorasi DAS Brantas untuk Dukung Wisata Susur Sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan BBWS</li> <li>3. Pembuatan SOP atau petunjuk teknis</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi</li> <li>2. Dukungan alat untuk membersihkan dan restorasi sungai</li> </ol>	2028	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan</li> </ol>	2028
	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pemantau Kualitas Udara dan Air <i>Real Time</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan lokasi pemasangan Air Quality Monitoring Station (AQMS)</li> <li>2. Pemasangan AQMS</li> </ol>	2028 - 2029	Pembuatan aplikasi/website atau konek dengan aplikasi DLH yang sudah ada agar bisa melakukan pemantauan real time dan memudahkan akses oleh masyarakat	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial atau sosialisasi secara langsung kepada lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DLH atau walikota</li> <li>2. Pelatihan kepada operator yang akan melakukan pemantauan kualitas udara</li> </ol>	2028 - 2029

<b>Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik</b>	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Perwali atau regulasi pendukung lainnya</li> <li>2. Pembuatan kerjasama dengan sektor swasta (perusahaan penyedotan limbah tinja)</li> <li>3. Pembentukan tim pelaksana inovasi</li> <li>4. Pemetaan pelanggan di Kota Mojokerto</li> </ol>	2028 - 2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan jadwal penyedotan</li> <li>2. Penyediaan kendaraan penyedot limbah tinja</li> <li>3. Penyediaan tempat penampungan dan pengolahan limbah (IPLT)</li> <li>4. Hardware (HP pintar atau tablet) untuk pelayanan</li> <li>5. Telepon atau tempat call center</li> </ol>	2028 - 2032	Pembuatan aplikasi untuk LLTT	2028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>2. Penguatan kapasitas petugas di IPLT (call center, sopir, dan tenaga penyedot)</li> </ol>	2028 - 2032
	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) dalam konsep ekonomi sirkular	Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Limbah dan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK tim</li> <li>2. Pembuatan juknis inovasi</li> <li>3. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta</li> <li>4. Koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan atau Bank Sampah</li> </ol>	2028 - 2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lokasi untuk pengelolaan sampah</li> <li>2. Pemetaan daur ulang yang mungkin dilakukan dan pembuatan strategi pemasaran</li> </ol>	2028 - 2029	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat atau Bank Sampah</li> <li>2. Pelatihan kepada masyarakat atau Bank Sampah untuk pengelolaan limbah sampah agar bernilai ekonomis</li> <li>3. Pelatihan kepada masyarakat atau Bank Sampah untuk pemasaran produk yang dihasilkan</li> </ol>	2028 - 2032
<b>Tata Kelola Energi</b>	Penyediaan infrastruktur bagi energi alternatif	Charging Station Mobil Listrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwali</li> <li>2. Pembuatan perjanjian kerjasama</li> </ol>	2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pembangunan</li> <li>2. Pembangunan charging station</li> </ol>	2029 - 2030	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial	2029 - 2030

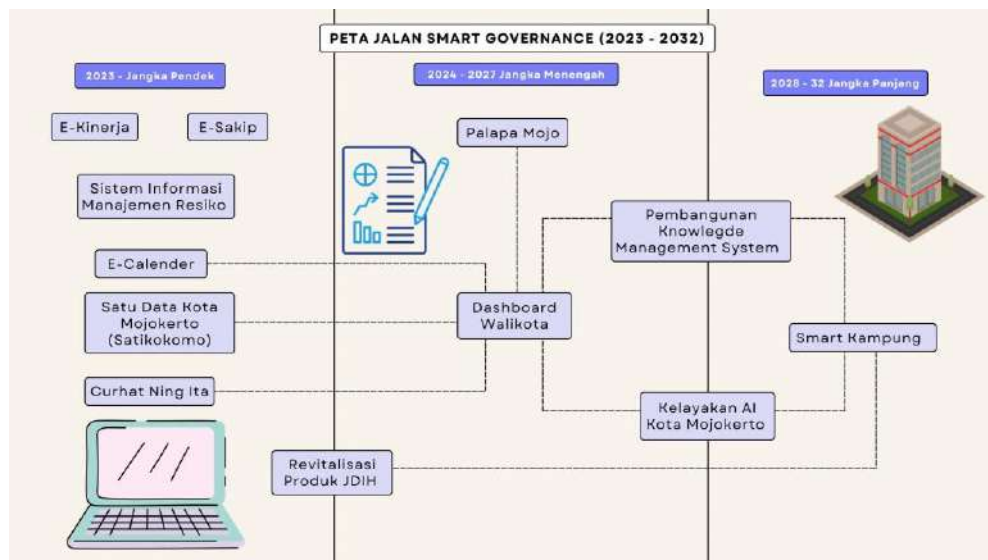
			dengan sektor swasta (perusahaan mobil)							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

**BAB V**  
**PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY***

## 6.1 SMART GOVERNANCE

Di dimensi *Smart Governance*, program-program yang akan dilaksanakan di jangka pendek dan menengah diantaranya adalah Palapa Mojo dan Curhat Ning Sistem Manajemen Risiko (Si Manko), Satu Data, Dashboard Walikota, Pengembangan Knowledge Management System (KMS), Pengembangan Kelayakan Artificial Intelligent (AI) Kota Mojokerto, dan Penyematan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk dokumen-dokumen produk hukum daerah, serta koneksi sinkronisasi dengan JDIH milik pemerintah pusat. Inovasi-inovasi yang menggunakan aplikasi atau TIK, pada umumnya tidak bisa dipisahkan dari peran Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom), yang berperan dalam pembuatan sistem atau aplikasi.



Gambar 5. 1. Peta Jalan Smart Governance Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut program-program yang akan diselenggarakan di Kota Mojokerto pada 2023 – 2027:

- a. **Curhat Ning Ita:** inovasi ini merupakan pelaksanaan dari program nasional LAPOR dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Lewat inovasi ini, warga di Kota Mojokerto dapat melakukan aduan melalui delapan kanal. Yaitu, SMS, pesan di WA, Instagram, Facebook, Twitter, website, dan mengadu secara langsung ke desk Dinas Kominfo yang terletak di Lantai 2 Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto di Jalan Gajahmada 100. Didukung oleh anggaran Rp. 135 juta pada 2023, Rp. 145 juta pada 2024, Rp. 150 juta pada 2025, Rp. 160 juta, dan Rp. 175 juta pada 2026 dan 2027, merupakan program di bawah komando Dinas Kominfo. Di inovasi ini, aduan tidak saja ditampung, tetapi juga akan dicarikan

solusi dengan diteruskan kepada OPD bersangkutan. Selain itu, Curhat Ning Ita juga menyediakan *Tim Cyber Patrol* yang bertugas untuk menyisir aduan yang beredar atau viral di media sosial selain di kanal Curhat Ning Ita.

- b. **Satu Data Kota Mojokerto:** inovasi ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto, sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan *leading sector* (wali data) Dinas Infokom dan Bappelitbangda sebagai coordinator Forum Data. Inovasi ini berupaya untuk menjadikan “satu” data sectoral yang selama ini banyak berbeda (berbagai versi). Seperti banyak daerah di Indonesia lainnya, terlepas dari inovasi ini belum memiliki pedoman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk Kota Mojokerto telah melaksanakannya.
- c. **E-SAKIP:** dibangun oleh Dinas Kominfo, e-SAKIP merupakan aplikasi yang dibangun untuk memantau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) pemerintah Kota Mojokerto. Dalam lima tahun terakhir ini, SAKIP Kota Mojokerto berada pada nilai BB, dan targetnya, dalam beberapa tahun ke depan, ingin menaikkan paling tidak menjadi A.
- d. **Penyematan TTE pada Dokumen Regulasi Daerah:** inovasi yang di bawah komando Bagian Hukum Kota Mojokerto dan didukung oleh Dinas Infokom merupakan upaya untuk melakukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Sebab, ketika Kota Mojokerto melakukan perbaikan website JDIH, website ini tidak lagi terkoneksi dengan pemerintah pusat (JDHN). Oleh karena itu, selain melakukan rekoneksi dengan JDHN, Bagian Hukum menambahkan tanda tangan elektronik (TTE) yang ramah terhadap pengguna di dokumen-dokumen produk hukum daerah yang dihasilkan.
- e. **Dashboard Walikota:** inovasi ini direncanakan untuk mempermudah walikota dalam pembuatan keputusan, karena di Dashboard Walikota ini, data-data capaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing OPD telah terpapar dengan jelas. Inovasi ini didukung oleh anggaran Rp. 162 juta pada 2023 dan 2024, dan naik menjadi Rp. 165 juta pada 2025. Pada 2026 naik menjadi Rp. 170 juta, dan Rp. 175 juta pada 2027.
- f. **Pembangunan Knowledge Management System (KMS):** inovasi yang diselenggarakan pada 2024 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan anggaran sebesar Rp. 100 juta untuk pembuatan aplikasi. Akan tetapi, untuk bisa beroperasi dengan optimal, KMS ini sendiri membutuhkan waktu beberapa tahun. KMS yang merupakan program dari Kemen PANRB, akan tetapi masih mengalami kesulitan untuk

diimplementasikan di Kota Mojokerto karena hambatan *mindset* SDM di pemerintah kota. Meskipun dianggarkan hanya di 2024, program akan berlanjut sampai dengan jangka panjang (2028 – 2032).

- g. **Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto:** inovasi yang diiniasi oleh Dinas Kominfo ini akan mulai dilaksanakan pada 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 200 juta. Program ini juga akan dilanjutkan pada jangka panjang (2028 – 2032).

Inovasi-inovasi yang dilakukan di jangka panjang (2028 – 2032), diantaranya meliputi *Smart Kampung*. Inovasi ini dilakukan dengan melibatkan 18 kelurahan yang ada di tiga kecamatan di Kota Mojokerto. Dengan berbekal tidak kurang dari 220 titik wifi gratis di Kota Mojokerto, sudah semestinya fasilitas ini dimanfaatkan dengan optimal, terutama untuk program yang berpusat di tingkat kelurahan. Di dalam inovasi *Smart Kampung* ini, selain revitalisasi Perpustakaan di kelurahan, beberapa pelayanan sudah bisa dilaksanakan di kelurahan, seperti layanan NIB dan layanan kependudukan. Di jangka pendek dan menengah ini, untuk pelayanan NIB sudah mulai dilaksanakan di kelurahan dengan Program Jempol Mempesona, yang nantinya juga akan ditambahkan layanan berupa klinik OSS dan *call center*. Selain itu, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di jangka panjang merupakan kelanjutan di jangka menengah, seperti KMS dan Pengembangan Kelayakan AI Kota Mojokerto.

Tabel 5. 1. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik	Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase layanan yang terintegrasi	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Mojokerto Smart City (Palapa Mojo) Pelayanan Publik Terpadu Kota Mojokerto	30%	162	60%	162	100%	162	-	-	-	-	APBN	Diskominfo
	Melakukan optimalisasi pelayanan publik yang tersedia untuk meningkatkan kepuasan masyarakat	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengaduan publik yang terselesaikan	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Cuhat Ning Ita	85%	135	90%	145	90%	150	90%	160	90%	175	APBN	Diskominfo
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Program penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	Nilai Kapabilitas APIP	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Si Manko (Sistem Informasi Manajemen Risiko)												Inspektorat
	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	1. Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi/kegiatan pendampingan dan asistensi 2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 3. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2. MRI dan Kapabilitas APIP 3. Nilai SAKIP	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	SimHP (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan)												Inspektorat
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan statistik sektoral di	Jumlah layanan yang sudah diintegrasikan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	E-Calender	1 aplikasi	27 juta										

		lingkup daerah kabupaten/kota 3. Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota 4. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan																
	Mendorong penggunaan Satikomo bagi OPD untuk mempublikasi data statistik sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pengembangan Satu Data Kota Mojokerto													Disko minfo
	Mengintegrasikan seluruh sistem dan layanan birokrasi dari perencanaan sampai evaluasi kinerja untuk mempermudah pengawasan	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan E-SAKIP	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dialokasikan anggaran, dibuat oleh Disko minfo	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Program Kepegawaian Daerah/Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis atas kesenjangan kinerja	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	e-Kinerja	1 aplikasi	48.49	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Bagian Organisasi
	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Program Kepegawaian Daerah/Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang melaksanakan budaya berbagi pengetahuan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pembangunan Knowledge Management System (KMS)	-	-	1 aplikasi	100 juta									Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Efisiensi Kebijakan Publik</b>	Melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap program pembentukan dan diseminasi produk hukum daerah secara online	1. Program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat 2. Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum yang terfasilitasi	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Revitalisasi JDIH (Penyematan TTE pada Produk Hukum)	Integrasi produk hukum Pemerintah Kota Mojokerto dengan JDIHN; Penyematan TTE pada Produk Hukum;	-	Peningkatan partisipasi stakeholder JDIH; penjangkaran aspirasi pembentukan produk hukum daerah	-	Produk hukum braille, produk hukum bahasa isyarat	-	Produk hukum terpihah dan kompilasi	-	Penyusunan produk hukum digital sepenuhnya	-	Tidak dialokasikan anggaran, dibuat oleh Disko minfo	Bagian Hukum, Disko minfo	

	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya database capaian kinerja Perangkat Daerah	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Dashboard Walikota	60%	162	65%	162	70%	165	75%	170	100%	175	APBN	Disko minfo
	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya database capaian kinerja Perangkat Daerah dan big data kota mojkerto	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan Kelayakan AI Kota	-	-	-	-	-	-	50%	200 juta	100%	200 juta	APBD	Disko minfo

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

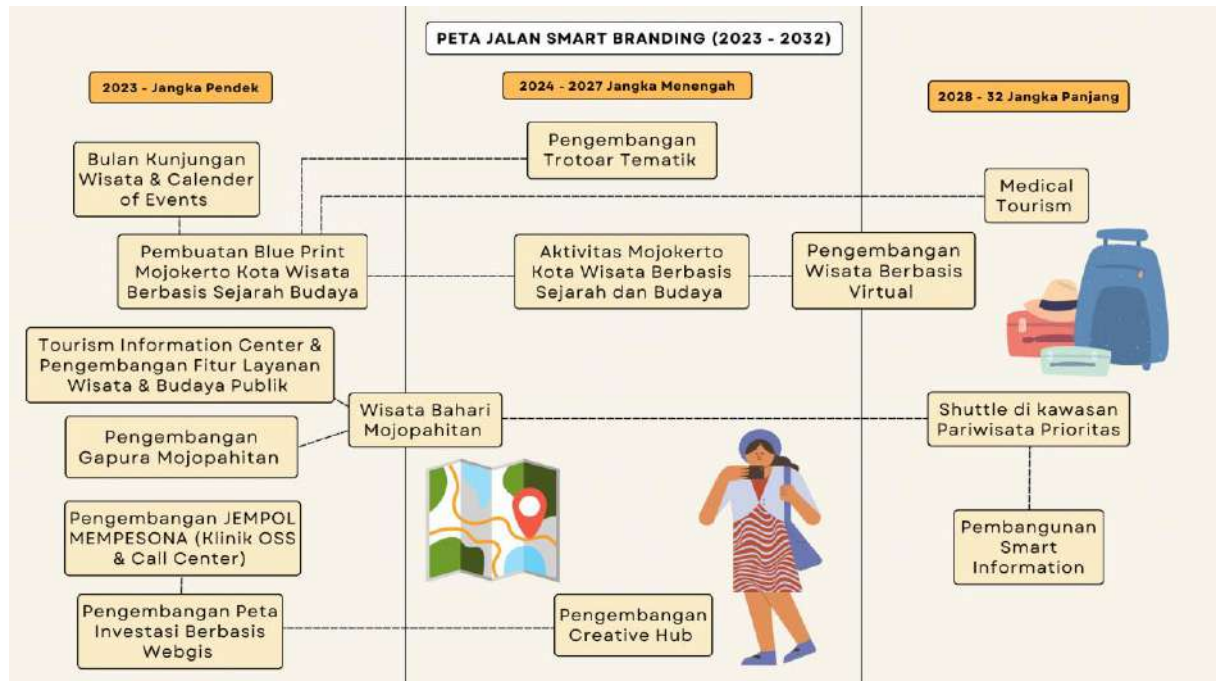
Tabel 5. 2. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Integrasi dan interoperabilitas data untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik	Pengelolaan e-gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentasi pengguna layanan publik	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Smart Kampung	1 Kelurahan	200 juta	3 Kelurahan	200 juta	6 Kelurahan	200 juta	3 Kelurahan	200 juta	10 Kelurahan	200 juta	AP BD	Diskominfo, DPMPPT SPNAKER, Dispenduk
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi/sistem yang berkaitan dengan birokrasi	Program Kepegawaian Daerah/Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang melaksanakan budaya berbagi pengetahuan	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pembangunan Knowledge Management System (KMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
Efisiensi Kebijakan Publik	Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya database capaian kinerja Perangkat Daerah dan big data kota Mojokerto	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan Kelayakan AI Kota	100%	200 juta	100%	200 juta	-	-	-	-	-	-	AP BN	Diskominfo

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 1.2 SMART BRANDING

Di *Smart Branding*, beberapa inovasi yang rencana akan dilaksanakan di Kota Mojokerto banyak dilatar belakangi oleh miskinnya daerah ini oleh potensi pariwisata alam. Beberapa inovasi yang rencana dilakukan antara lain: Wisata Bahari Mojopahit, pembuatan bulan kunjungan pariwisata, pembuatan profil investasi berdasarkan pada WebGIS, pembuatan trotoar tematik, dan pengembangan program Jempol Mempesona.



Gambar 5. 2. Peta Jalan Smart Branding Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut inovasi-inovasi yang rencana akan dilaksanakan pada kurun waktu 2023 – 2027 (tabel 5.3):

- Wisata Bahari Mojopahit:** rencana untuk dibangun di Kelurahan Rejoso, inovasi ini bertujuan untuk “membangkitkan” kembali *spirit of Mojopahit* untuk pengembangan destinasi wisata non-alam ini. Karena menggunakan Sungai Brantas sebagai pusat destinasi ini, pemerintah kota tidak saja melibatkan instansi/OPD di bawah pemerintah kota (Bappelitbangda, DLH, Dinas PUPERAKIM, Dinas Koperasi, UKM, dan Indag), tetapi juga dengan BBWS Brantas dan juga sektor swasta. Diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp. 36.476.496.000, 00, inovasi ini rencana akan dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Di lokasi ini akan dilengkapi dengan plaza bahari, tempat pertunjukan, perahu, dan juga UKM center.

- b. **Tourism Information Center (TIC):** merupakan penyediaan data dan informasi pariwisata berupa titik lokasi destinasi pariwisata di Kota Mojokerto beserta sarana pendukung yang kemungkinan dibutuhkan oleh wisatawan dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkatnya. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan sehingga bisa menjadi salah satu bagian dari infrastruktur Wisata Bahari Mojopahit. Di bawah *leading sector* Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, inovasi ini dilaksanakan pada 2023 dan 2024, dengan anggaran Rp. 37 juta di tahun pertama, dan Rp. 20 juta di tahun kedua untuk penambahan fitur di aplikasi.
- c. **Pembuatan Bulan Kunjungan Wisata:** saat ini Kota Mojokerto telah memiliki beberapa agenda kegiatan pariwisata, seperti Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pentas Seni Budaya Daerah di TMII, Apeksi Regional, Apeksi Nasional, dan Jatim Specta. Akan tetapi, sayangnya, event-event yang ada ini belum terintegrasi. Dalam pembuatan event dan bulan promosi kunjungan wisata ini, idealnya Kota Mojokerto juga melakukan koordinasi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, untuk membuat rangkaian kegiatan bersama. Di bawah *leading sector* Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1,9 milyar dalam satu tahun untuk menyelenggarakan sembilan *events*.
- d. **Pembuatan dan Aktivasi *Blue Print* Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya:** rangkaian kedua kegiatan ini dilaksanakan mulai 2023 untuk pembuatan *blue print*, dan aktivasi yang dilaksanakan pada 2024 – 2026. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100 tiap tahun dari 2024 sampai dengan 2026.
- e. **Pembuatan Profil Investasi berbasis WebGIS (Project Prospectus Wisata):** dikomando oleh Dinas DPMPSTNAKER, inovasi ini berupaya untuk memberikan gambaran potensi investasi di Kota Mojokerto dengan menggunakan GIS. Sehingga, investor memiliki gambaran lebih jelas dan berdasarkan *real time* untuk kondisi potensi inovasi di Kota Mojokerto. Profil Investasi Kota berupa penyusunan peta potensi investasi yang berisi tentang potensi dan peluang investasi dilihat dari beberapa sektor yang disajikan dengan memaksimalkan penggunaan peta. Sehingga, penyajian datanya menjadi lebih komunikatif dan menarik. **Project Prospectus Wisata** merupakan pengembangan dari peta potensi investasi khusus untuk pengembangan

pariwisata di Kota Mojokerto yang berisi berisi profil wisata, *master plan*, sampai dengan analisis keuangan secara lengkap untuk kelayakan investasi.

- f. **Pembangunan Trotoar Tematik:** menindaklanjuti upaya Kota Mojokerto untuk mengembangkan perwajahan kota yang menonjolkan nilai ke"Mojo pahitan" lewat pembuatan gapura Mojo pahitan, pembangunan trotoar tematik menjadi agenda selanjutnya. Inovasi ini sangat ideal dikembangkan di Kota Mojokerto mengingat luasan kota yang hanya sekitar 20 km<sup>2</sup>. Inovasi ini mulai dilaksanakan pada 2024, dengan *leading sector* Dinas PUPERAKIM. Pelaksanaan inovasi ini juga akan melibatkan komunitas kreatif di Kota Mojokerto.
- g. **Pengembangan Jempol Mempesona:** merupakan singkatan dari Jemput Bola Memberikan Pelayanan Sistem OSS (NIB) Tanpa Biaya), inovasi ini telah mampu memberikan layanan perizinan di tingkat kelurahan. Ke depan, inovasi ini dikembangkan tidak saja memberikan layanan perizinan, tetapi juga akan memberikan pendampingan OSS kepada para pengusaha di tingkat kelurahan dengan menyediakan satu orang personel, dan juga menyediakan call center yang siap sedia memberikan layanan konsultasi ataupun jika ada pengusaha mengalami hambatan perizinan. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 45 juta, dan dilaksanakan pada 2023.
- h. **Pembuatan Creative Hub Kota Mojokerto:** inovasi yang diselenggarakan dengan *leading sector* DPMPSTNAKER mulai dilaksanakan pada 2023 dengan anggaran Rp. 4 Milyar. *Creative Hub* ini tidak saja menyediakan *co-working space*, tetapi merupakan sarana berkumpulnya komunitas kreatif di Kota Mojokerto dan membuat kegiatan bersama serta menjadi *show case* karya mereka. Kegiatan ini tidak saja terbatas di jangka menengah, tetapi juga akan dilanjutkan di jangka panjang.

Di jangka panjang (2028 – 2032), seperti yang disajikan di tabel 5.4, inovasi yang akan dilaksanakan diantaranya pengembangan wisata berbasis *reality virtual*, pengembangan *creative hub* Kota Mojokerto, penyediaan *shuttle* di kawasan destinasi wisata prioritas, *medical tourism*, dan pembuatan *Smart Information Sign* atau petunjuk arah pintar. *Medical tourism* merupakan kegiatan yang dikembangkan oleh RSUD Dr. Wahidin, yang mengkolaborasikan antara layanan Kesehatan dan wisata. Misalnya, ketika *customers* (pasien) melakukan check-up Kesehatan atau perawatan, maka disediakan layanan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kota Mojokerto dan di wilayah sekitarnya.

Tabel 5. 3. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Ekosistem Pariwisata	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Tourism Information Centre (TIC) dan Pengembangan Fitur Layanan Rekreasi Publik dan Budaya Daring	1 dokume n	37. 00 0.0 00	Penamb ahan fitur di TIC	Rp. 20 jut a	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPARP AR
	1. Penambahan dan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru 2. Melakukan kerjasama dengan investor untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari Mojopahit	1. Jumlah destinasi wisata baru yang terbangun 2. Jumlah kunjungan wisata ke Kota Mojokerto	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Wisata Bahari Mojopahit	1 Kawasa n	36. 47 6.4 96. 00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	DAK	DISPOPARP AR DISKOPUK M PERINDAG, DLH, DPUPERA KI M, BBWS, BAPPETIB ANGDA
	Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholders di bidang pariwisata untuk pembuatan kalender event wisata terintegrasi	Mojotirto Festival, Pawai Pembangunan, Mojobatik Festival, Festival Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pentas Seni Budaya Daerah di TMII, Apeksi Regional, Apeksi Nasional, Jatim Specta	1. Jumlah event yang diselenggarakan 2. Jumlah kunjungan wisatawan	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Bulan Kunjungan dan Promosi Wisata	9 events	1.6 64. 53 9.7 00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPARP AR

	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah destinasi wisata baru yang terbangun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Penyusunan Blueprint Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya	1 dokumen blueprint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPAPAR
	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah destinasi wisata baru yang terbangun	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aktivitas City Branding Mojokerto Kota Wisata Berbasis Sejarah dan Budaya	-	-	100 juta	-	100 juta	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPOPAPAR
<b>Membangun Daya Saing Bisnis</b>	Pembuatan kebijakan untuk menarik investasi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah dokumen informasi potensi investasi	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pengembangan Profil Investasi Kota Mojokerto (Peta potensi berbasis WebGIS, Project Prospectus Wisata)	1 Dokumen	190.011.652										APBD	DPMPPTSPN AKER
	Meningkatkan kualitas pelayanan investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi dengan pengembangan Jempol Mempesona	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	1. Jempol mempesona (dikembangkan menjadi klinik pendampingan OSS) 2. Call Center Perizinan	500 kegiatan usaha	45.844.900										APBD	DPMPPTSPN AKER

	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah investor/ startup yang memanfaatkan fasilitas layanan investasi		Pengembangan Mojokerto Creative Hub	1 lokasi	-	1 lokasi	4 milyar	1 lokasi	4 milyar	1 lokasi		1 lokasi		APBD	DPMPTSPN AKER
Wajah Kota	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Pengembangan Trotoar Tematik	Jumlah landmarks kota yang terbangun	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan Trotoar Tematik	-	-	1 kawasan	-	1 kawasan	-	1 kawasan	-	-	-	-	DPUPERAKIM
	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota, yang memunculkan ciri khas Kota Mojokerto	Gapura Majapahitan	Jumlah Gapura Majapahitan yang terbangun	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Gapura Majapahitan												DPUPERAKIM

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

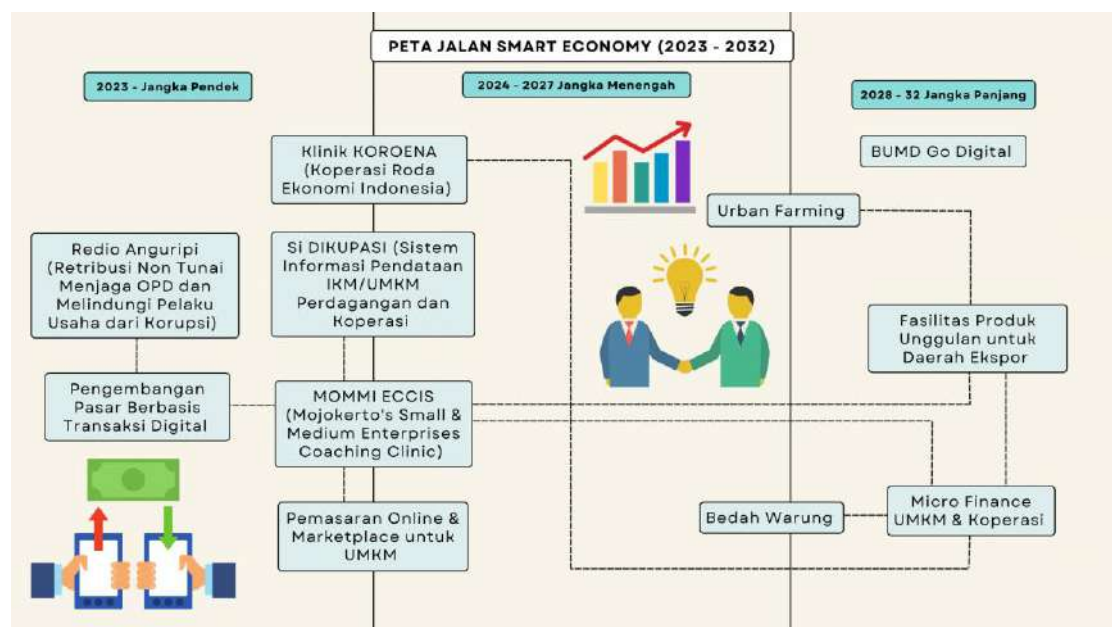
Tabel 5. 4. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
<b>Ekosistem Pariwisata</b>	Melakukan pengembangan daya tarik dan destinasi wisata baru	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan	Pengembangan Wisata berbasis Virtual Reality	1 Lokasi Wisata	250 juta	2 Lokasi Wisata	250 juta	3 Lokasi Wisata	250 juta	-	-	-	-	APBD	Dispora, Diskominfo
Membangun Daya Saing Bisnis	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah investor/ startup yang memanfaatkan fasilitas layanan investasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dan iklim investasi serta koordinasi bagi peningkatan investasi	Pembangunan Co-Working Space	1 Lokasi	4 Milyar	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DPMP TSP NAKER
<b>Wajah Kota</b>	Pembuatan <i>landmarks</i> kota baru untuk memperindah perwajahan kota berbasis TIK	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan	Pembangunan Smart Information Sign (Penunjuk arah pintar)	1 Lokasi	100 juta	2 Lokasi	200 juta	3 Lokasi	200 juta	-	-	-	-	APBD	DPUPRPE RAKIM, DISHUB, DISKOMINFO

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 2.2 SMART ECONOMY

Inovasi-inovasi yang rencana dilakukan di *Smart Economy* antara lain pengembangan urban farming (pertanian perkotaan), SI DIKUPASI (Sistem Informasi Pendataan IKM/UMKM Perdagangan dan Koperasi), pembayaran retribusi non-tunai Redjo Angurupi, Koperasi Roda Ekonomi Indonesia (KOROENA), dan MomMI ECCIS (Mojokerto's Small & Medium Enterprises Coaching Clinics).



Gambar 5. 3. Peta Jalan Smart Economy Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut inovasi-inovasi yang dikembangkan pada 2023 – 2027 di Kota Mojokerto (lengkap di tabel 5.5):

- a. **Urban Farming:** pertanian daerah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan sempit merupakan inovasi ideal untuk daerah urban seperti Kota Mojokerto yang memiliki lahan sempit. Tidak saja ini bisa menjadi alternatif untuk intensifikasi pertanian, tetapi juga bisa menjadi strategi untuk menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang. Targetnya, program ini tidak saja bisa mencukupi konsumsi rumah tangga, tetapi produknya bisa dijual di supermarket. Didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 115 juta pada 2023.
- b. **SI DIKUPASI:** merupakan inovasi di bawah Dinas Koperasi, UKM, dan Indag, merupakan inovasi berwujud aplikasi android yang di dalamnya telah ada

database UKM dan UMKM di Kota Mojokerto. Data yang masuk didalamnya termasuk nama usaha, aset, legalitas, kapasitas produk, dan sebagainya. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 150 juta.

- c. **Redjo Anguripi**: singkatan dari Retribusi Non Tunai Menjaga OPD dan Melindungi Pelaku Usaha dari Korupsi, Redjo Anguripi merupakan inovasi yang digagas oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Indag. Program yang ditujukan kepada para pedagang pasar, saat ini masih dilaksanakan di satu pasar (Tanjung Anyar), dan akan dilaksanakan di lima pasar lainnya. Dilaksanakan sederhana menggunakan tapping mesin, autodebit di rekening, atau QRIS, harapannya akan mencegah terjadinya korupsi (penggelapan) uang retribusi pedagang pasar ketika masih dikumpulkan dengan manual (dibayar *cash*).<sup>3</sup>
- d. **MomMI ECCIS**: merupakan gagasan asli yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan layanan bidang ekonomi dalam memberdayakan UMKM dan wirausaha baru dari inkubasi. Inovasi ini menampung semua permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM termasuk wirausaha baru yang lahir dari program Inkubasi di 2021. Guna mendukung pembinaan terhadap UMKM, MomMi ECCIS sudah didukung oleh aplikasi. Di 2021, dari 4.479 Usulan Wirausaha Baru dari program Inkubasi dengan 17 Jenis Usaha, 1.903 telah terfasilitasi dan terdampingi. Sedangkan di 2022 mentargetkan 2.041 Usulan Wirausaha Baru dari program Inkubasi dengan 4 Jenis Usaha untuk bisa terfasilitasi di MomMi ECCIS.
- e. **Klinik Koperasi Roda Ekonomi Indonesia (KOROENA)**: merupakan inovasi digawangi oleh Dinas Koperasi UMKM, Industri, dan Perdagangan. Inovasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah koperasi di Kota Mojokerto yang memiliki status sehat dengan memberikan konsultasi atau klinik pelatihan. Saat ini, dari 187 koperasi yang ada di Kota Mojokerto, hanya 19 koperasi dalam kategori 'sehat.' Inovasi ini akan diselenggarakan pada 2023 sampai dengan 2025, dengan sasaran sebanyak 90 koperasi pada 2023 (Rp. 236 juta), 130 koperasi di 2024 dengan dukungan anggaran Rp. 260 juta, dan 180 koperasi di 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 280 juta.

Di jangka panjang, beberapa inovasi yang dirancang antara lain (di tabel 5.6), beberapa inovasi yang diselenggarakan antara lain:

---

<sup>3</sup> <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/379887/launching-e-retribusi-rejo-anguripi-upaya-digitalisasi-pemkot-mojokerto-cegah-korupsi>

- a. **Pengembangan Microfinance UMKM:** merupakan rencana program di jangka panjang yang dilaksanakan pada 2028 – 2029. Program yang direncanakan tidak saja dibiayai dari APBD, tetapi juga dari bantuan zakat, infaq, dan shodaqoh (melalui BAZNAS) akan menyasar 500 pengusaha pada 2028, dan 1.000 pengusaha pada 2029. Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 500 juta di tahun pertama, dan Rp. 1 miliar di tahun kedua.
- b. **Fasilitasi Pengusaha UKM dan UMKM Tembus Pasar Ekspor:** Kota Mojokerto merupakan salah satu sentra industri kecil di bidang alas kaki (sepatu dan sandal). Para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto telah menjadi produsen untuk produk-produk alas kaki di Matahari, seperti Fladeo. Oleh karena itu, di 2028, pemerintah kota ingin melakukan fasilitasi industri-industri unggulan Kota Mojokerto untuk tidak saja menjadi produsen untuk produk-produk yang dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, perlu untuk difasilitasi untuk jaringan dengan eksportir dan asosiasi pengusaha.
- c. **Pengembangan Urban Farming:** *urban farming* tidak saja sebatas program di jangka menengah, tetapi juga di jangka panjang. Di periode ini, urban farming sudah dikembangkan dengan melibatkan sekolah-sekolah di Kota Mojokerto. Pengenalan pertanian urban kepada siswa-siswa sekolah ini juga bisa bertujuan menumbuhkan kecintaan anak-anak sekolah terhadap pertanian. Sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk menciptakan petani-petani muda di Kota Mojokerto.

Tabel 5. 5. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Industri Berdaya Saing	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Urban Farming	-	-	-	-	70%	115 juta	80%	115 juta	90%	115 juta	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sektor Swasta
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional/ Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	Pengembangan SI DIKUPASI (Sistem Informasi Pendataan IKM/UMKM Perdagangan dan Koperasi)	80%	200 juta	80%	225 juta	80%	250 juta	80%	275 juta	80%	300 juta	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah WUP & UMKM yang difasilitasi Coaching Clinic	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	MomMI ECCIS (Mojokerto's Small and Medium Enterprises Coaching Clinic)	120 pelaku usaha (WUP dan UMKM)	55 juta	180 pelaku usaha	75 juta	240 pelaku usaha	100 juta	300 pelaku usaha	150 juta	320 pelaku usaha	175 juta	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kesejahteraan Masyarakat	Penerapan kebijakan pro-poor	Program Bedah Warung	Jumlah wirausaha baru yang muncul	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	Bedah Warung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anggaran Kelurahan	Bagian Perekonomian, Kelurahan

	Penerapan kebijakan pro-poor	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan omzet koperasi	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis per 100,000 penduduk	KLINIK KOROENA (Koperasi Roda Ekonomi Nasional)	90 koperasi	236.981.465	130 koperasi	260 juta	180 koperasi	280 juta	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
<b>Transaksi Keuangan</b>	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	REDJO ANGURIPI (Retribusi Non Tunai Menjaga OPD dan Melindungi Pelaku Usaha dari Korupsi)	500 pedagang (Tematik, Krangan, Prapanca, Ketidur, Kliwon)	150 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan omzet usaha mikro	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Pemasaran Online (griyaumkm.com, e-marketplace dengan Tokopedia, Shopee, dsb)	2% dari total total UMK M)	150 juta	3%	100 juta	4%	100 juta	5%	100 juta	6%	100 juta	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Pengembangan Pasar berbasis Transaksi Digital/ Mljo Online - e-marketplace	1 pasar	150 juta	2 pasar	150 juta	-	-	-	-	-	-	APBD, CSR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

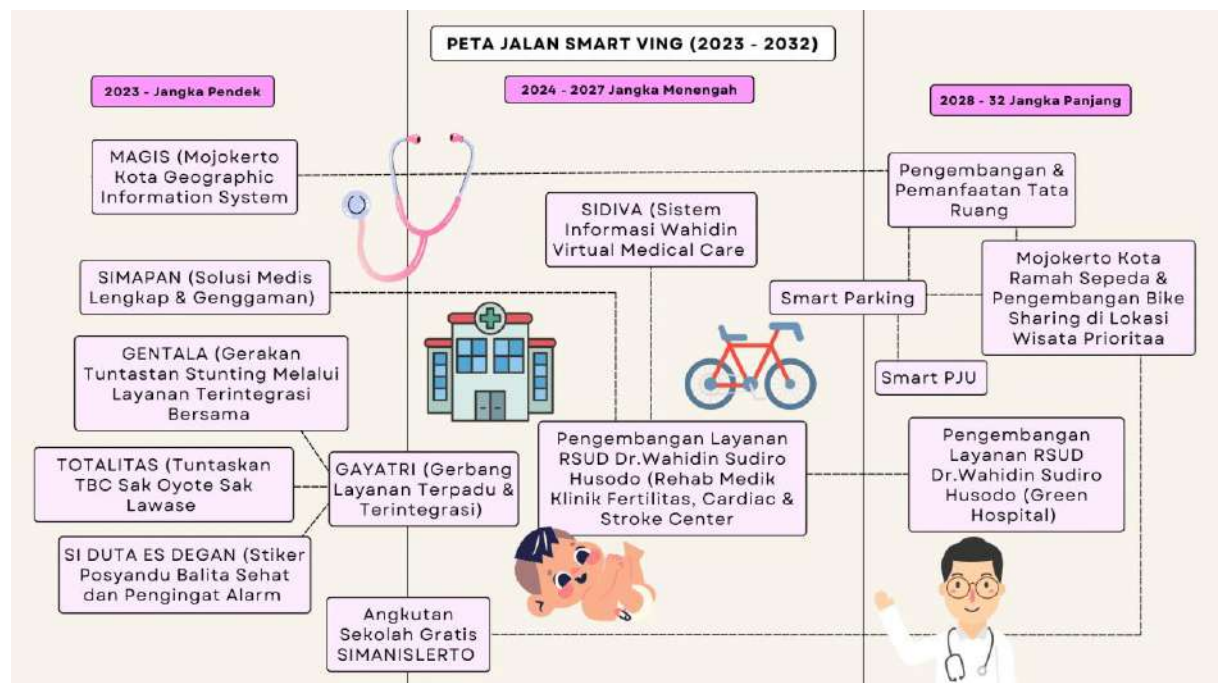
Tabel 5. 6. Peta Jalan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Industri Berdaya Saing	Dukungan kepada UKM/UMKM guna optimalisasi posisi strategis Kota Mojokerto	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah produk unggulan yang di ekspor	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	Fasilitasi ekspor produk unggulan	1000 pengusaha	50 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Kerjasama
	Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian perkotaan dapat mendukung ketangguhan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	20.1. Persentase anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Urban Farming	100%	100 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sektor Swasta
Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi UKM dan UMKM untuk sertifikasi usaha dan akses permodalan	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Masyarakat miskin yang di dibantu	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pengembangan Microfinance untuk UMKM dan Koperasi Kota Mojokerto	500 pengusaha	500 juta	1000 pengusaha	1 Milyar	-	-	-	-	-	-	APBD, Bantuan Zakat, Infaq, Sodaqoh	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Baznas
Transaksi Keuangan	Membangun sistem pembayaran elektronik	Pengelolaan BUMD	Jumlah BUMD yang menerapkan transaksi elektronik	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	BUMD GO DIGITAL	1 BUMD	300 juta	1 BUMD	300 juta	-	-	-	-	-	-	APBD, CSR	Bagian Perekonomian

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 2.3 SMART LIVING

Inovasi-inovasi yang dikembangkan di *Smart Living* antara lain MAGIS – Mojokerto Kota *Geographical Information System*, pengembangan GAYATRI, inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas seperti GENTALA untuk pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, POS TENSI OYE SIP untuk pengendalian hipertensi dan PTM lainnya, dan tiga inovasi dari RSUD Dr. Wahidin yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien, SIMAPAN, SIDIVA, dan Pengembangan Layanan di Rumah Sakit. Di bidang transportasi, Dinas Perhubungan merencanakan untuk pengembangan inovasi SIMANISKERTO – yang merupakan penyediaan transportasi gratis kepada anak sekolah.



Gambar 5. 4. Peta Jalan Smart Living Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Kota Mojokerto di dimensi *Smart Living* di 2023 – 2027:

- MAGIS – Mojokerto Kota Geographical Information System:** merupakan inovasi yang diiniasi oleh Bappelitbangda dan Dinas PUPERAKIM. Inovasi ini merupakan penyediaan informasi spasial yang berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan data *real time*, pengambilan kebijakan bisa dilakukan dengan lebih tepat karena sesuai dengan kewilayahan atau situasi saat itu (<http://magis.mojokertokota.go.id:4138/public/>). Inovasi ini juga

berguna untuk memberikan informasi terkait zonasi, yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Pada 2023, inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 60 juta.

- b. **Pengembangan GAYATRI - Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi**, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejak 2020. Di dalam *dashboard* GAYATRI ini terdapat dua menu utama: untuk masyarakat dan pemerintah daerah. GAYATRI merupakan upaya konkret pemerintah Kota Mojokerto memfasilitasi warga masyarakat untuk aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu contoh adalah masyarakat yang ingin berobat, hanya tinggal mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di GAYATRI ini. Karena, sebelum adanya GAYATRI ini, sering ada antrian panjang untuk berobat di Puskesmas. Selain itu, fitur seperti family folder, cek status kesehatan, pemeriksaan, dan kontrol penyakit, juga tersedia. Masyarakat juga bisa melakukan komunikasi dua arah penanganan Covid-19. Sedangkan untuk pemerintah daerah, inovasi ini berguna untuk membantu dalam pembuatan kebijakan karena situasi Kesehatan warga bisa dipantau secara *real time*. Misalnya, terkait dengan *stunting*. Pada 2023, pengembangan inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 37 juta, dan pada 2024, juga didukung oleh anggaran yang sama jumlahnya, Rp. 37 juta.
- c. **POS TENSI YES OKE SIP** - merupakan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Blooto, yang diselenggarakan untuk pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM). Ke depan, berpotensi menjadi *double burden* untuk biaya kesehatan di Indonesia, sudah saatnya PTM menjadi perhatian serius mulai dari tingkat Puskesmas.
- d. **SIMPAN – Solusi Medis Lengkap Dalam Genggaman**, merupakan inovasi yang diajukan oleh RSUD Dr. Wahidin. Inovasi yang sebelumnya hanya digunakan untuk pendaftaran calon pasien karena ada persoalan antrian panjang di pendaftaran. Saat ini akan dikembangkan kepada pelayanan lainnya, seperti pembuatan janji dengan dokter spesialis. Dengan adanya fitur ini, pasien tidak saja bisa memotong antrian pendaftaran, tetapi juga bisa memotong prosedur tidak perlu pergi ke poli umum, tetapi langsung ke poli spesialis. Inovasi ini juga didukung layanan pengantaran obat gratis bagi para pasien yang tinggal di dalam Kota Mojokerto. Di 2023, inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50 juta.
- e. **SIDIVA – Sistem Informasi Wahidin Medical Virtual Care**, merupakan inovasi lain yang dilakukan oleh RSUD Dr. Wahidin. Di 2022 ini, inovasi ini

masih dalam tahap pembangunan, dan rencana akan di-launching pada 2023. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50 juta.

- f. **SIMANISKERTO - Angkutan Sekolah Gratis** – penyediaan angkutan umum yang nyaman dan layak menjadi masalah di hampir daerah perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Mojokerto. Sebagai langkah awal penyediaan transportasi yang layak ini, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto menginisiasi inovasi SIMANISKERTO, yaitu dengan menyediakan angkutan sekolah gratis. Karena Dinas Perhubungan hanya memiliki tiga buah armada bus, dan tidak cukup untuk melayani seluruh wilayah daerahnya, Dinas Perhubungan kemudian juga mengandeng armada angkutan umum (mikrolet). Saat ini, kerjasama dilakukan dengan 11 armada mikrolet, dan angkutan gratis disediakan selama jam pergi (pagi) dan pulang sekolah (siang hari). Di 2023 dan 2024, inovasi ini akan mengembangkan rute dan juga aplikasi yang ada, dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2 miliar pada 2023 dan juga Rp. 2 miliar pada 2024.
- g. **Pengembangan Layanan RSUD Dr. Wahidin:** inovasi yang dikembangkan pada 2023 – 2025 ini terdiri dari beberapa tahapan. Pengembangan *electronic medical records* akan dilaksanakan pada 2023 dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1 Milyar; disusul dengan pengembangan Gedung Rehab Medik Terpadu pada 2024 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 11 Milyar. Dan, di 2025, dilakukan dua pengembangan berupa Klinik Fertilitas dan Stroke & Cardiac Clinic. Pengembangan kedua layanan ini dibiayai oleh anggaran sebesar Rp. 82 Milyar.
- h. **Smart Parking:** sistem parkir pintar ini dikembangkan oleh Dinas Perhubungan pada 2023 – 2027. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan di jangka panjang dengan menambahkan aplikasi *Smart Parking* untuk semakin memudahkan pengguna untuk mencari parkir di tempat yang mereka kehendaki.

Untuk jangka panjang, di dimensi *Smart Living* ini, beberapa program yang ingin dikembangkan oleh Kota Mojokerto meliputi pemanfaatan tata ruang, pengembangan aplikasi Smart Parking, *Smart PJU*, dan pengembangan Kota Mojokerto sebagai kota ramah sepeda (tabel 5.8).

- a. **Smart PJU (Penerangan Jalan Umum):** merupakan program yang direncanakan di jangka panjang (2028 – 2032). Di program ini, 50 unit PJU pintar akan terbangun dalam kurun waktu lima tahun. Setiap tahunnya, Dinas Perhubungan menganggarkan Rp. 700 juta. Dengan penggunaan *Smart PJU*

ini, harapannya bisa dilakukan penghematan biaya listrik karena kekuatan nyala lampu bisa diatur sesuai dengan situasi dan kebutuhan di jalan saat itu, dan penghematan biaya perawatan PJU.

- b. **Mojokerto Kota Ramah Sepeda:** sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia, Kota Mojokerto bisa menjadi satu *protipe* penerapan kota yang ramah sepeda di Indonesia. Inovasi ini tidak saja mampu menyediakan sarana transportasi yang ramah lingkungan, tetapi juga bisa menjadi salah satu atraksi bagi para wisatawan atau pengunjung di Kota Mojokerto. Pengembangan Mojokerto sebagai kota ramah sepeda ini dilakukan pada 2028 dan 2029, dengan alokasi anggaran di tiap-tiap tahun. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan swasta atau komunitas. Pengembangan kota yang ramah sepeda ini juga didukung oleh penyediaan *bike sharing* di lokasi-lokasi destinasi wisata prioritas.
- c. **Pengembangan Rumah Sakit RSUD Dr. Wahidin:** inovasi ini dilaksanakan pada 2028 – 2029, dengan melakukan pengembangan Gedung Pendidikan Terpadu di 2028 didukung oleh anggaran Rp. 40 Milyar, dan pengembangan green hospital pada 2029 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar.

Tabel 5. 7. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan informasi geospasial	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	MAGIS (Mojokerto Kota Geographic Information System)	7 Dashboard peta analisa	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Bappedalitbang dan Dinas PUPERAKIM
<b>Sarana Prasana Kesehatan</b>	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial 90%  AKI per 100.000 KH (target: < 94.6 per 100.000 KH) AKB per 1.000 KH (target: < 4,22 per 1.000 KH)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan  11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pengembangan GAYATRI (Gerbang Layanan Terpadu dan Terintegrasi)	1 paket	37.621.045.710,47	1 paket	37.621.045.710,47	-	-	-	-	-	-	DBHCHT, DID	Dinkes PPKB
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting balita 5,04%	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	GENTALA (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama) (Puskesmas Blooto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes PPKB

	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	AKI per 100.000 KH (target: < 94.6 per 100.000 KH)  AKB per 1.000 KH (target: < 4.22 per 1.000 KH)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SI DUTA ES DEGAN (Stiker Posyandu Balita Sehat Dan Pengingat Alarm Kentongan) (Puskesmas Blooto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes PPKB	
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk target 265 per 100.000 penduduk	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	TOTALITAS (Tuntaskan TBC sak Oyote Sak Lawase) (Puskesmas Blooto)												Dinkes PPKB	
	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai standar layanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) target 50 per 1.000 Penduduk	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 143ublic143ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 143ublic143ka	POS TENSI OKE OYE SIP (Program sadar tensi dengan prolanis, perkesmas, kartu & kantong tensi, konsultasi gizi dan farmasi kampanye gernas & skrining PTM) (Puskesmas												Dinkes PPKB	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 143ublic143ka terpadu daring yang dapat diakses oleh	SIMPAPAN (Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman)	1 paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dana BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota	BLUD RSUD Dr..Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

				<p>penyedia layanan 144ublic144ka</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p>													Mojokerto		
	<p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</p>	<p>Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu</p>	<p>11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 144ublic144ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 144ublic144ka</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p>	<p>SIDIVA (Sistem Informasi Wahidin Virtual Medical Care)</p>	-	-	1 paket	50.000.000									<p>Dana BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto</p>	<p>BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto</p>
	<p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</p>	<p>Peningkatan kualitas layanan (diukur dari IKM)</p>	<p>11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 144ublic144ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 144ublic144ka</p> <p>11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk</p>	<p>Pengembangan Layanan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo</p> <p>1. Transformasi Digital dengan elektronik Medical Record (2023)</p> <p>2. Gedung Rehap Medik Terpadu (2024)</p> <p>3. Klinik Fertilitas (2025)</p> <p>4. Cardiac dan Stroke Center (2025)</p> <p>5. Pengembangan Poli</p>	<p>1 Paket (Transformasi Digital dengan Elektronik Medical Record)</p>	<p>Rp. 1 Milyar</p>	1 paket Gedung Rehap Medik Terpadu	Rp. 11 M	<p>3 Paket (Klinik Fertilitas, Cardiac dan Stroke Center, Pengembangan Poli Eksekutif)</p>	Rp. 82 M	-	-	-	-	-	<p>Dana BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto</p>	<p>BLUD RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto</p>	

					Eksektif (2025)												
Sarana Transportasi	Mengembangkan layanan transportasi umum yang nyaman dan berkualitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk  19.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	Angkutan Sekolah Gratis (Pengembangan Rute dan Aplikasi SIMANISKE RTO)	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	-	-	-	-	DAU	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir	19.7. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan 145system pembayaran elektronik  19.8. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan 145system ketersediaan parkir langsung (real-time)	Smart Parking	1 dokumen	Rp. 300 juta	1 regulasi	Rp. 200 juta	1 titik	Rp 1 M	1 titik	Rp. 1 M	1 titik	Rp. 1 M	DAU	Dinas Perhubungan

Tabel 5. 8. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

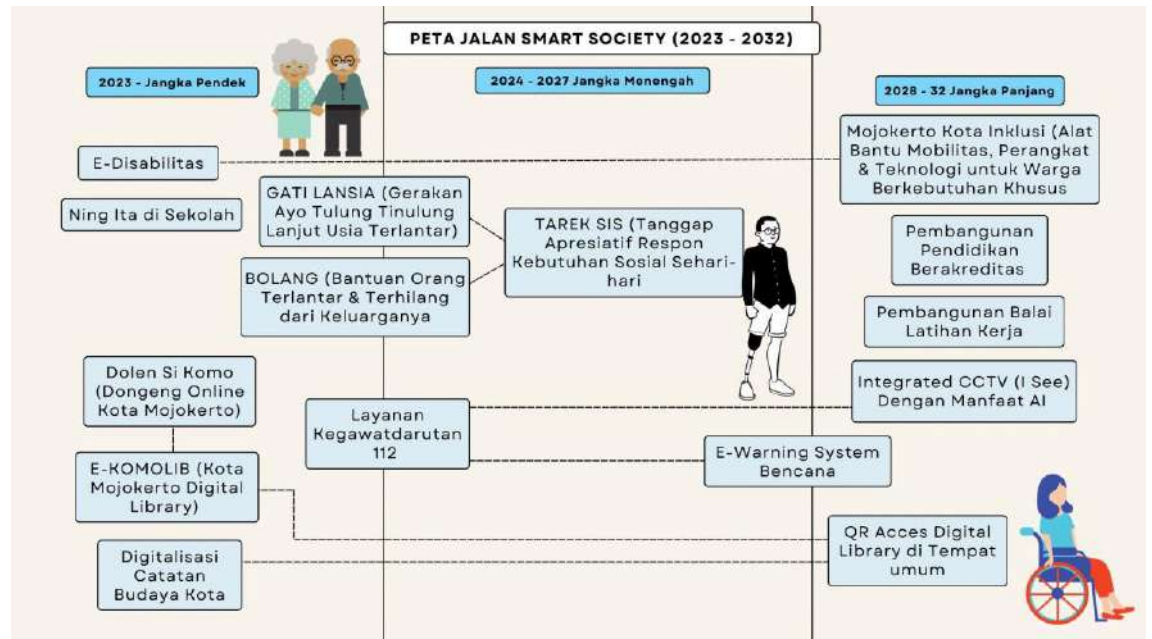
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
<b>Harmonisasi Tata Ruang</b>	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan RTRW, perizinan, pemberian insentif, dan disintensif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan informasi layanan tata ruang	8.1. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Pengembangan Layanan Pemanfaatan Tata Ruang	1 Aplikasi	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas PU PERAKIM
<b>Sarana Prasarana Kesehatan</b>	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan pemanfaatan Sistem Elektronik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file 146public 146ka terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan 146public 146ka  11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Pengembangan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Gedung Terpadu RS Terpadu di Green Hospital di 2029)	1 Paket (Gedung Terpadu Rumah Sakit Pendidikan)	Rp. 40 M	1 paket Green Hospital	Rp. 5 M	-	-	-	-	-	-	Dana BLU RSUD	RSUD Dr. Wahidin

Sarana Transportasi	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah Smart PJJU	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Smart PJJU	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	10 Unit	700.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase jalan di Kota Mojokerto yang ramah sepeda	19.10. Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (real-time) sebagai persentase dari total luas kota	Mojokerto Kota Ramah Sepeda dan Pengembangan Bike-Share System di Destinasi Wisata	2 titik	Rp. 250 juta	2 titik	Rp. 250 juta	-	-	-	-	--	-	APBD, CSR, Sektor Swasta	Dinas Perhubungan, Sektor Swasta, NGO
	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir	19.7. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan public pembayaran elektronik  19.8. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan public ketersediaan parkir langsung (real-time)	Smart Parking	1 titik	Rp. 1 M	1 titik	Rp. 1 M	-	-	-	-	-	-	DAU	Dinas Perhubungan

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 2.4 SMART SOCIETY

Di *Smart Society*, beberapa program yang dilakukan oleh Kota Mojokerto antara lain meliputi GATI LANSIA yang ditujukan untuk orang tua terlantar dan tanpa keluarga, Ning Ita di Sekolah, e-KOMOLIB, DOLEN SI KOMO, Layanan 112, dan *Early Warning System* (EWS) pada 2023 – 2027.



Gambar 5. 5. Peta Jalan Smart Society Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut di bawah gambaran inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan di Kota Mojokerto.

- d. **GATI LANSIA – Gerakan Ayo Tulung tinulung Lanjut Usia terlantar**, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Inovasi ini diperuntukkan bagi para lansia yang terlantar atau tanpa keluarga. Dari dana yang didukung dari APBD dan dari donatur, para lansia ini ditempatkan di Rumah Lansia milik Dinsos P3A bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki rumah, RT atau tetangga yang mengurus mereka, dengan Dinsos menyalurkan bantuan yang diterima dari donatur guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ke depannya, inovasi ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada donatur pribadi, sehingga perlu untuk merangkul lembaga seperti BAZNAS, Dompot Duafa, dan Kita Bisa untuk mendukung keberlanjutan

inovasi ini karena donatur pribadi berpotensi untuk putus di tengah jalan. Saat ini, 56 lansia menjadi penerima manfaat program ini, dan anggaran yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp. 200 juta di 2023; Rp. 300 juta pada 2024; Rp. 400 juta pada 2025; Rp. 450 juta pada 2026, dan menjadi Rp. 500 juta pada 2027.

- e. **E-KOMOLIB – Kota Mojokerto E-Library** – merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Inovasi ini lahir ketika pandemik Covid-19 dimana warga tidak lagi mengunjungi perpustakaan daerah, ruang baca di kelurahan, dan perpustakaan di RTH. Sebelum pandemik, perpustakaan Kota Mojokerto dikunjungi tidak kurang dari 100 orang per hari. Oleh karena itulah, saat ini buku-buku yang menjadi koleksi di perpustakaan daerah juga hadir dalam bentuk digital. Inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 130 juta pada 2023, untuk membiayai digitalisasi buku sebanyak 80.100 buku.
- f. **DOLEN SIKOMO** – Dongeng Online Kota Mojokerto, merupakan program yang diselenggarakan di bawah Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan menyelenggarakan dongeng yang dilakukan oleh siswa sekolah melalui live di account Instagram inovasi ini. Setiap bulan, tidak kurang dari 48 siswa mendongeng secara *live*.
- g. **Digitalisasi Catatan Budaya Kota**: dikomando oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, inovasi ini bertujuan untuk melakukan digitalisasi catatan-catatan sejarah dan budaya di Kota Mojokerto, mengingat kota ini merupakan bekas Kerajaan Mojopahit. Selain itu di Kota Mojokerto juga banyak terdapat catatan-catatan dari kitab-kitab yang banyak di pondok pesantren di sekitar Kota Mojokerto.
- a. **Ning Ita di Sekolah** – merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa siswa di sekolah dengan menyelenggarakan tambahan pelajaran agama selama 1 jam setelah jam pulang sekolah. Ini berlaku untuk seluruh sekolah di Kota Mojokerto, dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 80 juta di 2023.
- b. **Layanan darurat 112**, merupakan integrasi semua layanan panggilan darurat yang ada selama ini, baik kebencanaan ataupun non kebencanaan. Misalnya saja kecelakaan di di 110, layanan kebakaran di 113, PLN di 123, atau layanan darurat PSC 119, dan 115 untuk SAR. Nomor-nomor panggilan darurat ini kemudian dijadikan satu di 112. Karena inovasi ini mengintegrasikan layanan darurat yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai instansi yang terpisah, perlu dilakukan koordinasi ketika dilakukan inovasi ini. Anggaran yang dialokasikan untuk inovasi ini adalah Rp. 25 juta di 2023.

- c. **Early Warning System**, merupakan inovasi yang ditujukan untuk kedaruratan banjir. Sistem manajemen monitoring dan peringatan dini banjir pada bendung dan sepanjang bantaran sungai. Di Kota Mojokerto, EWS akan dipasang di Kali Sadar. Sistem ini dilengkapi dengan *Internet of Things* (Iot). EWS akan dapat memberikan data analisa yang cepat dan akurat, sebagai data acuan pengambilan kebijakan meminimalisasi banjir. Inovasi ini sangat penting bagi Kota Mojokerto yang dengan posisi tofografis seperti lepek dan dekat dengan DAS and Sub-DAS Brantas menjadi rentan terhadap banjir. Pelaksanaan inovasi ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 95 juta pada 2023.

Sedangkan di periode 2028 – 2032, inovasi-inovasi yang dilakukan di dimensi ini antara lain menjadikan Mojokerto sebagai kota ramah disabilitas, peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan universitas dan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK), serta menjadikan kota dalam kondisi aman terpantau dengan IC – yang mengintegrasikan layanan CCTV dengan IA, dengan *Smart PJU*, *Smart Traffic Light*, dan *early warning system* yang sudah real time. Berikut di bawah gambaran inovasi yang akan dilakukan di jangka panjang:

- a. **Mojokerto Ramah Disabilitas:** inovasi yang rencana dilakukan di jangka panjang ini tidak saja menyediakan fasilitas publik yang sudah ramah terhadap disabilitas, seperti trotoar yang ramah kursi roda dan dilengkapi *guiding block* bagi orang buta atau gedung-gedung yang sudah dilengkapi dengan bidang miring yang memudahkan kursi roda untuk lewat, tetapi juga pelayanan yang ramah disabilitas, program-program pemerintah kota yang memiliki keberpihakan kepada kaum disabilitas.
- b. **Peningkatan Kompetensi SDM Kota Mojokerto:** upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendirian universitas atau akademi yang terakreditasi pada 2032 dan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) pada 2030. Anggaran yang dialokasikan untuk pendirian universitas adalah Rp. 40 miliar, dan Rp. 15 miliar untuk pendirian BLK.
- c. **Pembuatan QR Access Digital Library di Tempat Umum di Kota Mojokerto:** inovasi ini merupakan kelanjutan dari KOMOLIB dan digitalisasi catatan sejarah dan budaya Kota Mojokerto. Buku-buku dan catatan yang sudah dalam bentuk digital ini agar bisa dengan mudah diakses warga, rencana akan dibuatkan Code QR dan diletakkan di fasilitas-fasilitas umum, seperti RTH.

Tabel 5. 9. Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
Interaksi Masyarakat yang Efisien	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang tertangani	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	GATI LANSIA (Gerakan Ayo Tulung tlnulung Lanjut Usia terlantar)	100%	200 juta	100%	300 juta	100%	400 juta	100%	450 juta	100%	500 juta	APBD (DAU)	Dinsos P3A
	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah Orang terlantar yang dipulangkan/ direunifikasi.	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	BOLANG (Bantuan Orang terlantar dan terhiLANG dari keluarganya	100%	30 juta	100%	50 juta	100%	80 juta	100%	100 juta	100%	110 juta	APBD (DAU)	Dinsos P3A
	Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah PMKS dan masyarakat umum yang mengalami permasalahan sosial/ membutuhkan layanan psikososial	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	TAREK SIS (Tanggap Apresiasi RESpon Kebutuhan Sosial Sehari-hari)	100%	-	100%	30 juta	100%	50 juta	100%	70 juta	100%	85 juta	APBD (DAU)	Dinsos P3A

	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah orang dengan disabilitas yang masuk dalam database	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	E-Disabilitas	100%	Rp. 10 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinsos P3A
<b>Ekosistem Belajar</b>	Penyelenggaraan pendidikan iman dan taqwa di sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah siswa yang menjalankan kegiatan iman dan taqwa	6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	Ning Ita di Sekolah	Seluruh sekolah di Kota Mojokerto	80.200.000.000,-									DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Program: Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk  17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Kota Mojokerto E-Library (KOMOLIB)	80.100 eksemplar	130.300									DAU	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Program Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Dongeng Online Kota Mojokerto (Dolen Komo)	576 siswa	-									APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan literasi dan minat baca warga kota	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Kab/Kota  Program Perizinan Penggunaan Arsip	1. Jumlah Naskah Kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik 2. Jumlah Naskah Sumber Arsip yang disusun dan diterbitkan	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Digitalisasi Catatan Budaya Kota	1 dokumen, 3 buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD

		Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup															
	Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pembinaan	Program: Perlindungan Perempuan  Kegiatan: Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan yang Memiliki Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah perempuan yang telah mandiri dan dibina	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SKOPER (Sekolah Berbasis Peningkatan Kerja)	500 perempuan rawan ekonomi	33 juta	500 perempuan rawan ekonomi	50 juta							DAU	Dinsos P3A
<b>Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat</b>	Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang efektif, efisien, dan responsif	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan yang dilayani dan ditindaklanjuti	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pengembangan Layanan 112 (Bencana Alam)		25 juta										Diskominfo, Satpol PP BPBD
	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	e-Warning System (Banjir)	1 aplikasi	95 juta										Diskominfo, Satpol PP BPBD

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 5. 10. Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (2028 – 2032)

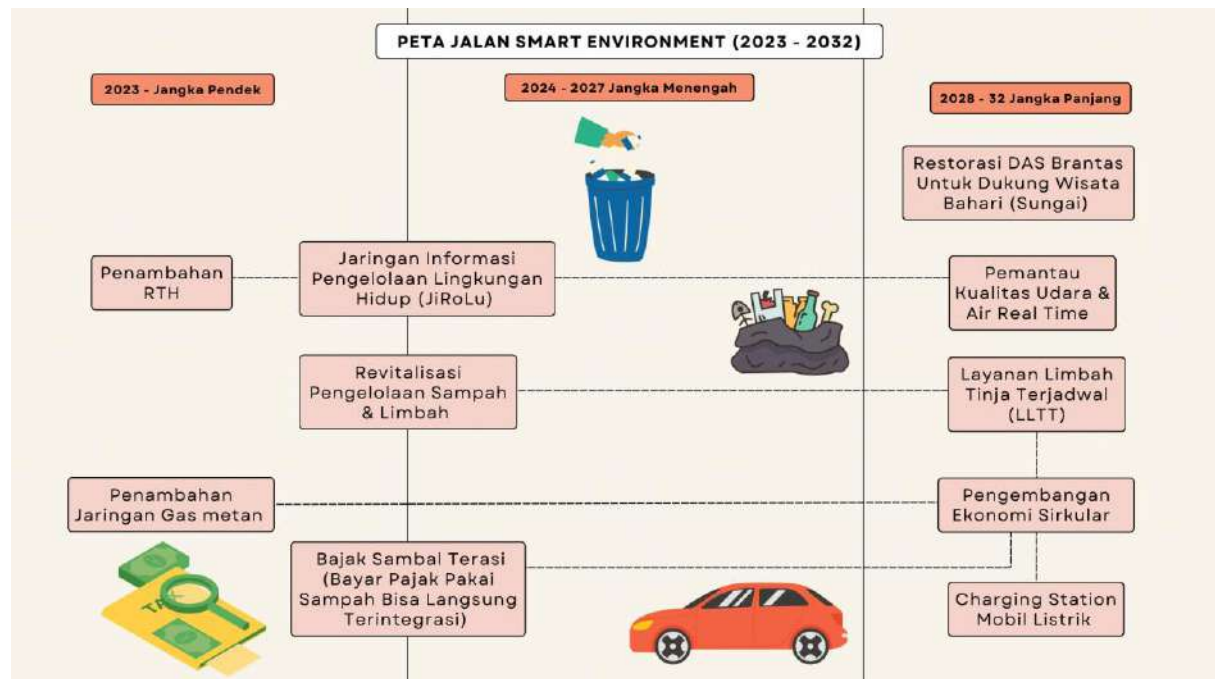
Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2028		2029		2030		2031		2032			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg .		
<b>Interaksi Masyarakat yang Efisien</b>	Penyediaan akses untuk orang dengan disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial/Sub kegiatan Layanan Aduan	Jumlah fasilitas di Kota Mojokerto yang telah ramah disabilitas	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	Kota Mojokerto Inklusif (Alat Bantu Mobilitas, Perangkat, dan Teknologi untuk Warga Berkebutuhan Khusus)	30% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	50% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	70% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	85% fasilitas umum dan pelayanan	Rp. 250 juta	100% fasilitas umum dan pelayanan	-	APBD, CSR	Dinsos P3A, Dinas PUPER AKIM, Dinkes PPKB
<b>Ekosistem Belajar</b>	Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan minat baca warga kota	Program Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku digital yang bisa diakses dengan QR	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	QR Akses Digital Library di Tempat Umum	3 lokasi	-	5 lokasi	-							APBD, CSR	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Sektor Swasta, Komunitas

	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Jumlah Universitas dengan Akreditasi B	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Pembangunan Akademi/ Universitas terakreditasi B	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	40 M	APBD	DISDIKB UD
	Meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif berbasis sertifikasi kompetensi	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Masyarakat Usia Produktif bersertifikasi kompetensi	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Pembangunan Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi					1 Gedung	15 M					APBD, CSR	DPMP SPNAKER, DISDIKB UD
<b>Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat</b>	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	IC/ I See (Integrated CCTV) Ai CCTV yang terintegrasi dengan smart PJU/ Smart Traffic Light, dan Warning System	5 Titik	400 Jt	10 Titik	400 Jt								Satpol PP, Dishub, Diskominfo, DLH
	Mengembangkan sistem kebencanaan efektif, efisien, dan terintegrasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	e-Warning System Secara Real Time	1 sistem aplikasi	100 juta									APBD	Diskominfo, Satpol PP, BPBD

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

## 5.6 SMART ENVIRONMENT

Di *Smart Environment*, beberapa inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota antara lain penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), revitalisasi pengelolaan limbah cair domestik, Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu), dan penambahan jaringan gas metan untuk inovasi di jangka pendek dan jangka menengah (2023 – 2027). Sedangkan di jangka panjang (2028 – 2032), Kota Mojokerto merencanakan untuk menyelenggarakan Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT), restorasi sungai, dan penyediaan *charging station* untuk mobil listrik.



Gambar 5. 6. Peta Jalan Smart Environment Kota Mojokerto (2023 – 2032)

Berikut di bawah gambaran inovasi program yang akan dilakukan di Kota Mojokerto pada 2023 – 2032:

- Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu):** merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 2023 – 2027. Berguna untuk memantau kualitas udara di Kota Mojokerto, inovasi ini dibiayai oleh APBD sebesar Rp. 135 juta pada 2023, Rp. 150 juta pada 2024, Rp. 160 juta pada 2025, dan Rp. 200 juta pada 2026.
- Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH):** dilaksanakan guna mendukung Kota Layak Anak (KLA), penambahan RTH ini dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup pada 2023 dan 2024, dan dibiayai oleh anggaran sebesar Rp. 10 miliar pada 2023, dan Rp. 12 miliar pada 2024.

- c. **Bajak Sambal Terasi:** merupakan singkatan dari Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi, program yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini menggunakan cara, masyarakat yang menyetorkan sampah lewat Bank Sampah di lingkungan mereka (kelurahan, RT, atau RW), uangnya bisa digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Saat ini, pelaksanaan inovasi ini masih manual, sehingga warga belum bisa memastikan uang dari penukaran sampah digunakan untuk membayar pajak. Akan tetapi, dengan pengembangan aplikasi, warga bisa memantau secara *real time*.
- d. **Revitalisasi Pengelolaan Limbah Cair:** di jangka pendek, revitalisasi pengelolaan limbah cair, dilakukan dengan penyediaan fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) karena hingga 2022, Kota Mojokerto belum memiliki sarana ini. Dengan dibiayai oleh DAK dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp. 6 miliar, kegiatan dilaksanakan pada 2023. Selain itu, revitalisasi dilakukan dengan pengelolaan sistem pembuangan limbah terpadu, dengan menasar rumah-rumah di Kota Mojokerto pada 2023 – 2027. Di jangka panjang, Kota Mojokerto juga merencanakan untuk menerapkan program Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT) bagi rumah-rumah di Kota Mojokerto.
- e. **Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Sampah dan Limbah:** inovasi ini bisa dianggap sebagai “kelanjutan” dari Bajak Sambal Terasi ataupun LLTT. Dalam artian, bahwa limbah dan sampah yang sudah dihasilkan oleh masyarakat bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, termasuk juga untuk menciptakan energi terbarukan yang baru. Misalnya, limbah tinja bisa diolah menjadi briket/arang yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energi baru.
- f. **Restorasi Sungai DAS Brantas Untuk Dukong Wisata Bahari Mojopahit:** pembersihan dan restorasi sungai-sungai di Kota Mojokerto, termasuk DAS Brantas perlu dilakukan. Selain itu kebersihan dan preservasi sungai, juga bisa berguna untuk mendukung upaya Kota Mojokerto dalam pengembangan Wisata Bahari Mojopahit.

Tabel 5. 11. Peta Jalan Jangka Pendek dan Jangka Menengah (2023 – 2027)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024		2025		2026		2027			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Proteksi Lingkungan	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara	23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per km2	Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (JiRoLu)	50,12 81,64	135 juta	50,25 81,68	150 juta	51 81,70	160 juta	51,50 81,72	200 juta	52 81,74		APBD	DLH
	Penambahan ruang terbuka hijau	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan	8.1 Jumlah bangunan yang dibangun lima tahun terakhir sesuai prinsip bangunan hijau	Penambahan jumlah RTH yang mendukung KLA	27,16	10.493.730.191		12 M						APBD	DLH	

Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik/ Daerah	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Revitalisasi Pengelolaan Sampah, Limbah Pada, dan Limbah Cair (Pembangunan IPLT)	1. Persentase sampah yang dikelola 2. Persentase limbah cair yang dikelola	22.1 Presentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Revitalisasi Pengelolaan Sampah, Limbah Pada, dan Limbah Cair	94,60%  50%	6.110.1 12.560	100%									DAK	DLH, Dinas PUPR PERAKIM
	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Jumlah rumah tangga yang tersambung sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat kota	22.1 Presentase air limbah olahan yang digunakan kembali		50 Rumah	2.860.0 00.000	45 Rumah	2.860.0 00.000	40 Rumah	2.860.0 00.000	35 Rumah	2.860.0 00.000	30 Rumah	2.860 .000. 000		DAK	Dinas PUPRPER AKIM
	Melakukan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sampah	Membayar Pajak dengan Sampah	Sistem atau aplikasi yang terbangun	16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga  16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Bajak Sambel Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi)	Aplikasi terkoneksi dengan Bank Sampah	5 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD

Tata Kelola Energi	Pemanfaatan (pengelolaan) kembali limbah cair dan padat untuk energi baru	Pemanfaatan limbah cair dan limbah padat untuk energi	Jumlah limbah cair dan padat yang berhasil dimanfaatkan kembali	7.2. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun  7.3. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun	Penambahan Jaringan Gas Metan												DLH
--------------------	---	---	---	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

Tabel 5. 12. Peta Jalan Jangka Panjang (2028 – 2032)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Nama Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leading Sector	
						2028		2029		2030		2031		2032				
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.			
Proteksi Lingkungan	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang direstorasi	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	Restorasi DAS Brantas untuk Dukung Wisata Sungai	1 DAS	Rp. 50 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD. CSR	DLH, BBWS, Dinas PUPERAK IM Masyaraka t
	Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah alat pemantau air dan kualitas udara <i>real time</i> yang terpasang	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	Pemantau Kualitas Udara dan Air <i>Real Time</i>	1 lokasi	Rp. 50 juta	1 lokasi	Rp. 50 juta	1 lokasi	Rp. 50 juta	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik/ Daerah	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang layak bagi masyarakat	Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Persentase masyarakat yang sudah terlayani LLTT	16.1. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering	Layanan Limbah Tinja Terjadwal (LLTT)	30%		50%		70%		85%		100%		APBD	DLH, IPLT, Dinas PUPERAK IM	

	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) dalam konsep ekonomi sirkular	Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Persentase sampah dan limbah yang dimanfaatkan kembali	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Pengembangan Ekonomi Sirkular Berbasis Limbah dan Sampah	5% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	10% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	12% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	15%	Rp. 100 juta	17% sampah dan limbah terolah	Rp. 100 juta	APBD, CSR	DLH, Bank Sampah, Sektor Swasta
<b>Tata Kelola Energi</b>	Penyediaan infrastruktur bagi energi alternatif	Program penggunaan energi alternatif	Jumlah fasilitas yang terpasang	7.10. Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar	Charging Station Mobil Listrik	1 lokasi	-	3 lokasi	-	5 lokasi						APBD, sektor swasta	DLH, Dishub

Sumber: FGD Bimbingan Teknis Tahap II dan Tahap III Kota Mojokerto

**BAB VI**  
**PENUTUP**

*Master Plan Smart City* Kota Mojokerto merupakan dokumen peta jalan dan rencana aksi untuk pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto selama 10 tahun, dari 2023 sampai dengan 2032. Pembuatan dokumen peta jalan dan rencana aksi di masing-masing dimensi *Smart City* dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan Dewan *Smart City* dan OPD terkait di Kota Mojokerto.

Hasil dari FGD tersebut, dapat disusun sasaran, strategi, peta jalan, dan rencana aksi untuk program di masing-masing dimensi (*Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, dan Smart Environment*) beserta OPD yang menjadi *leading sector* kegiatan atau program yang direncanakan beserta anggaran yang rencana akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak ketinggalan rencana aksi baik kebijakan, infrastruktur, aplikasi, ataupun literasi di masing-masing inovasi. Rencana aksi juga dilengkapi dengan tahun pelaksanaan, sehingga ini mempermudah *leading sector* dan pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi di *Smart City* tersebut.

Agar dokumen ini bisa menjadi panduan yang efektif dan efisien, perlu disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan dan para pembuat kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto, baik di tingkat Dewan *Smart City*, OPD, instansi lain di luar pemerintah Kota Mojokerto, akademisi, dan forum-forum di Kota Mojokerto. Selanjutnya *Master Plan* ini diharapkan bisa berfungsi sebagai:

- a. Acuan dan pedoman dasar untuk pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto selama 10 tahun mendatang;
- b. Acuan dan pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran *Smart City* di Kota Mojokerto dalam 10 tahun mendatang;
- c. Dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan *Smart City* di Kota Mojokerto.

Karena dokumen ini merupakan “dokumen hidup”, pemerintah Kota Mojokerto bisa dilakukan perubahan terhadap isi dokumen (sasaran, strategi, peta jalan, dan rencana aksi) sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan pembangunan di Kota Mojokerto. Termasuk, untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto di periode 2024 – 2029.

WALIKOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI